



**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
(LPPD) KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2020**

**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2021**



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

INSPEKTORAT

Jalan Mayor Kusmanto Nomor 23 Telp. 321040 Kode Pos 57415
KLATEN

PERNYATAAN HASIL REVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Kabupaten Klaten untuk Tahun Anggaran 2020 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ini.

Klaten, 10 Maret 2021

INSPEKTUR KABUPATEN KLATEN



Jajang Prihono
JAJANG PRIHONO, S.STP.

Pembina

NIP. 198102161999121001

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat, karunia serta ridho-Nya, **Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2020** yang merupakan amanat konstitusional telah dapat diselesaikan. Penyusunan LPPD Tahun 2020 ini merupakan amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) disusun untuk mengetahui sejauh mana kinerja pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dan dilengkapi dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai tolak ukur dalam capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan serta permasalahan dan solusinya. Dengan demikian laporan ini berisi gambaran kinerja pelaksanaan pemerintahan yang merupakan implementasi kebijakan dalam penyelenggaraan Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten selama tahun 2020.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten pada Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tertuang dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah belum memenuhi harapan kita semua, namun Pemerintah Kabupaten Klaten sudah berupaya secara optimal. Saran dan masukan dari berbagai pihak sebagai perbaikan kinerja sangat kami harapkan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten pada masa yang akan datang.

Akhirnya, kepada seluruh pihak yang telah membantu dan berpartisipasi aktif dalam penyelesaian laporan ini, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga segala upaya yang telah kami laksanakan dapat mewujudkan Kabupaten Klaten yang **Maju, Mandiri dan Berdaya Saing** dan senantiasa memperoleh petunjuk serta ridha dari Allah SWT. Amin.

Klaten, Maret 2021



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Lampiran	v
Daftar Gambar dan Tabel	vi
 BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1.LATAR BELAKANG.....	1
1.1.1. PENJELASAN UMUM.....	1
a. Undang-undang Pembentukan Daerah	1
b. Data Geografis Wilayah	2
1. Batas Administrasi	2
2. Luas wilayah	2
3. Topografi Kabupaten Klaten	3
4. Iklim di Kabupaten Klaten	4
5. Kondisi Hidrologi	4
6. Jenis Tanah	4
c. Jumlah Penduduk	5
d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	5
e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintah	6
f. Realisasi anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	9
1. Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020	9
2. Realisasi Belanja Daerah Tahun 2020	11
a) Belanja Tidak Langsung	11
b) Belanja Langsung	12
3. Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2020	12
1.1.2. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.....	13
a. Permasalahan Strategis Daerah	13
b. Visi dan Misi Kepala daerah	14
c. Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja berdasarkan RPJMD.....	15
d. Perjanjian Kinerja (PK) Kepala daerah Tahun 2020.....	25
e. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah.....	29
f. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan	32

1.1.3. PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.....	33
BAB II	
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN DAERAH.....	35
2.1. CAPAIAN KINERJA MAKRO.....	35
2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM).....	35
2.1.2 Angka Kemiskinan.....	36
2.1.3 Angka pengangguran.....	37
2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi.....	38
2.1.5 Pendapatan Per Kapita.....	39
2.1.6 Ketimpangan Pendapatan.....	40
2.2. CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN.....	41
2.3. AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH	41
a. Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	41
b. Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja.....	49
c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya.....	52
d. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah	52
e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau Peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.....	61
f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang telah dicapai.....	172
g. Analisa Program & Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja.....	196
BAB III	
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN.....	204
1. DASAR HUKUM.....	204
2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN.....	204
A. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan.....	204
B. Program dan Kegiatan.....	205
C. Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan.....	205
3. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN.....	206
3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang Diselenggarakan oleh Daerah Kabupaten/Kota.....	206

3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang Diselenggarakan oleh Daerah Kabupaten/Kota.....	209
3.3. Permasalahan dan Kendala.....	215
3.4. Saran dan Tindak Lanjut.....	215
BAB IV	
PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.....	216
A. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN.....	216
B. BIDANG URUSAN KESEHATAN.....	221
C. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM.....	228
D. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT.....	234
E. BIDANG URUSAN TRANTIBUM DAN LINMAS.....	242
F. BIDANG URUSAN SOSIAL.....	247
G. PROGRAM DAN KEGIATAN.....	251
BAB V	
PENUTUP.....	264

DAFTAR LAMPIRAN

- **LAMPIRAN INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME DAN OUTPUT
LPPD TAHUN 2020**
- **LAMPIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN URUSAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BESERTA OPD
PELAKSANA TAHUN 2020**

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Grafik Angka Kemiskinan di Kabupaten Klaten (dalam %) tahun 2016 -2020.....	37
Gambar 2.2 Perkembangan Antar Waktu Jumlah Penduduk Miskin di Kab.Klaten tahun 2016 – 2020	37
Gambar 2.3 Tingkat Penangguran Terbuka (TPT) % Kabupaten Klaten tahun 2017 – 2020	38
Gambar 2.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) % di Kab. Klaten tahun 2017-2020	38
Gambar 2.5 Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Klaten tahun 2016 - 2020	39
Gambar 2.6 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Klaten Tahun 2016-2020.....	62
Gambar 2.7 Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2016-2020.....	62
Gambar 2.8 Angka Kelulusan (AL) Tahun 2016-2020.....	65
Gambar 2.9 Angka Melek Huruf Penduduk Usia >15 Tahun ke atas di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020	66
Gambar 2.10 Rasio Guru Terhadap Murid untuk Jenjang SD/MI dan SMP/MTS Tahun 2016-2020.....	67
Gambar 2.11 Perkembangan Kasus Kematian Ibu Melahirkan di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.....	71
Gambar 2.12 Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.....	72
Gambar 2.13 Perkembangan Angka Kematian Balita di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.....	73
Gambar 2.14 Perkembangan Persentase Gizi Buruk di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.....	74

Gambar 2.15 Perkembangan Usia Harapan Hidup Masyarakat di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.	79
Gambar 2.16 Perkembangan Indikator BOR Bulanan (Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu).	80
Gambar 2.17 Perkembangan Indikator BOR Tahunan (%) (Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu).	80
Gambar 2.18 PMKS yang Memperoleh Bantuan Tahun 2016-2020.	82
Gambar 2.19 Laju Inflasi di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.	113
Gambar 2.20 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2018-2020.	150
Gambar 2.21 Capaian Konservasi Penghijauan Daerah Sumber Mata Air. Kabupaten Klaten Tahun 2018-2019 dan Target sampai tahun 2021.	151

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Luas Wilayah Per-Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2020.	2
Tabel 1.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten Per-Kecamatan Tahun 2018-2020.	5
Tabel 1.3 Jumlah Desa/Kelurahan menurut Kecamatan di Kabupaten Klaten tahun 2020.	6
Tabel 1.4 Jumlah ASN per perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten tahun 2020.	8
Tabel 1.5 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020.	10
Tabel 1.6 Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.	11
Tabel 1.7 Perincian Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2020.	11

Tabel 1.8	
Perincian Belanja Langsung Tahun Anggaran 2020.....	12
Tabel 1.9	
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020	12
Tabel 1.10	
Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator	
Sasaran RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021	16
Tabel 1.11	
Perjanjian Kinerja Kepala Daerah thun 2020	25
Tabel 1.12	
Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen RPJMD	
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021	29
Tabel 2.1	
Capaian Kinerja Makro Kabupaten Klaten	
Tahun 2019 dan 2020 berserta Perubahannya.....	35
Tabel 2.2	
Kondisi Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2019 – 2020	
di Kab. Klaten.....	36
Tabel 2.3	
Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Sebulan	
Menurut Jenis Pengeluaran 2018-2020	39
Tabel 2.4	
Distribusi Pengeluaran Penduduk Klaten Berdasarkan Kriteria	
Bank Dunia 2017-2020	40
Tabel 2.50	
Capaian Kinerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Klaten	
Tahun 2019 -2020	43
Tabel 2.6	
Skala Nilai Peringkat Kinerja Progresif	49
Tabel 2.7	
Skala Nilai Peringkat Kinerja Regresif	49
Tabel 2.8	
Capaian Kinerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Klaten	
terhadap Target Dalam RPJMD	54
Tabel 2.9	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja	
Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Usia Dini,	
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal	61
Tabel 2.10	
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)	
di Kabupaten Klaten Menurut Jenjang Pendidikan	
Tahun 2016-2020	63

Tabel 2.11	
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)	
di Kabupaten Klaten Menurut Jenjang Pendidikan	
Tahun 2016-2020	64
Tabel 2.12	
Perkembangan Persentase Angka Putus Sekolah Menurut	
Jenjang Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.....	64
Tabel 2.13	
Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D IV	
Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020	66
Tabel 2.14	
Kepala Sekolah yang Memenuhi Kualifikasi SI/D IV/S2	
dan Bersertifikat Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2016-2020.....	67
Tabel 2.15	
Perkembangan Angka Melanjutkan Sekolah dari SMP/MTs	
Ke SMA/MA/SMK Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020	68
Tabel 2.16	
Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik Tahun 2016-2020.....	68
Tabel 2.17	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja	
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan	
Menurunnya Angka Kematian, Angka Kesakitan dan Kecacatan	71
Tabel 2.18	
Jumlah Kasus Kematian Ibu Melahirkan Menurut Kecamatan	
dan Puskesmas Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020	71
Tabel 2.19	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja	
Menurunnya Angka Kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>)	75
Tabel 2.20	
Peserta KB dan KB Aktif di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020	76
Tabel 2.21	
Jumlah Pentahapan Keluarga Sejahtera Menurut Jenisnya	
di Kabupaten Klaten tahun 2016-2020	76
Tabel 2.22	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya	
Pemanfaatan Pelayanan Kerumahsakitatan oleh Masyarakat	
dan Menurunnya Angka Kematian di Rumah Sakit	79
Tabel 2.23	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya	
Upaya Pencegahan Permasalahan Sosial dan Aksesibilitas PMKS	
dalam Memperoleh Pelayanan dan Rehabilitasi yang Berperspektif HAM	82

Tabel 2.24	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	84
Tabel 2.25	
Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.....	85
Tabel 2.26	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan Benda Cagar Budaya	86
Tabel 2.27	
Jumlah Penyelenggaraan Seni dan Budaya di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.....	86
Tabel 2.28	
Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.....	87
Tabel 2.29	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan.....	88
Tabel 2.30	
Perkembangan Jumlah Pengunjung Perpustakaan di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.....	89
Tabel 2.31	
Perkembangan Jumlah Perpustakaan Desa di Kabupaten Klaten Tahun 2016 – 2020	89
Tabel 2.32	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah.....	90
Tabel 2.33	
Capaian Indeks Profesionalitas ASN	90
Tabel 2.34	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	93
Tabel 2.35	
Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2015–2019.....	93
Tabel 2.36	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	94

Tabel 2.37	
Jenis dan Jumlah Keputusan DPRD Tahun 2016-2020	95
Tabel 2.38	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	96
Tabel 2.39	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Tata Kelola Arsip SKPD.....	97
Tabel 2.40	
Pengelolaan Kearsipan di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.....	98
Tabel 2.41	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Profesional, Transparan dan Akuntabel	99
Tabel 2.42	
Perkembangan Persentase Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa Tahun 2016-2020	99
Tabel 2.43	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	101
Tabel 2.44	
Penjaminan Kualitas Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten	102
Tabel 2.45	
Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Klaten	103
Tabel 2.46	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah	106
Tabel 2.47	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Koordinasi Penataan Peraturan Perundang-Undangan serta Bantuan Hukum dan HAM.....	108
Tabel 2.48	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	109
Tabel 2.49	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Terwujudnya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Yang Kredibel.....	110

Tabel 2.50	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja	
Meningkatnya Fasilitasi Koordinasi	
Bidang Kehumasan dan Keprotokolan.....	111
Tabel 2.51	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja	
Meningkatnya Fasilitasi dan Pengawasan Kebijakan Daerah	
Bidang Perekonomian.....	112
Tabel 2.52	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja	
Meningkatnya Koordinasi Kesejahteraan Rakyat.....	114
Tabel 2.53	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya	
Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan	
Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian terhadap	
Pertumbuhan Ekonomi Daerah.....	115
Tabel 2.54	
Luas Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian	
Menurut Kecamatan dan Penggunaannya Tahun 2020	115
Tabel 2.55	
Perkembangan Luas Tanam dan Luas Panen Tanaman Pangan	
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020	116
Tabel 2.56	
Perkembangan Produksi dan Produktivitas	
Tanaman Pangan Tahun 2016-2020	117
Tabel 2.57	
Produksi Perkebunan Tahun 2016-2020	117
Tabel 2.58	
Populasi Ternak Tahun 2016-2020	118
Tabel 2.59	
Produksi Susu, Daging, dan Telur Tahun 2016-2020.....	118
Tabel 2.60	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya	
Peran LEM, LED dan Pengembangan Potensi TTG di Desa	
dalam Penanggulangan Kemiskinan	120
Tabel 2.61	
Lembaga Ekonomi Perdesaan	121
Tabel 2.62	
Pelatihan Teknologi Guna Tahun Tepat 2016-2020.....	121

Tabel 2.63	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisataaan	123
Tabel 2.64	
Jumlah Obyek Wisata, Pengunjung, Lama Tinggal dan Rata-rata Pengeluaran Wisatawan Nusantara (Wisnus) dan Wisatawan Mancanegara (Wisman) Tahun 2016-2020	124
Tabel 2.65	
Sumbangan Sektor Pariwisata Terhadap PAD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020	124
Tabel 2.66	
Nama dan Jenis Obyek Wisata serta Lokasinya di Kabupaten Klaten Tahun 2020	125
Tabel 2.67	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UMKM	128
Tabel 2.68	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Penerapan Inovasi Dalam Pembangunan Daerah.....	130
Tabel 2.69	
Inovasi Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten	130
Tabel 2.70	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Penanaman Modal	135
Tabel 2.71	
Jumlah Investasi PMA dan PMDN Tahun 2016-2020	135
Tabel 2.72	
Perkembangan Realisasi PMDN Tahun 2016-2020.....	136
Tabel 2.73	
Perkembangan Realisasi PMA Tahun 2016-2020	136
Tabel 2.74	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya dan Pengembangan Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Ketenagakerjaan	137
Tabel 2.75	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Perlindungan Sektor Ketenagakerjaan.....	140

Tabel 2.76	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Perindustrian.....	141
Tabel 2.77	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Publik dan Sarana Prasarana Dasar Masyarakat	143
Tabel 2.78	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Sasaran Meningkatnya Kualitas Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Penyelenggaraan Angkutan	144
Tabel 2.79	
Jumlah Sarana Angkutan (Umum dan Pribadi) Tahun 2016-2020	145
Tabel 2.80	
Data Terminal Angkutan Penumpang Umum Di Kabupaten Klaten Tahun 2020	145
Tabel 2.81	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan dan Pemukiman	147
Tabel 2.82	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Terkendalinya Pemanfaatan Kawasan Sesuai Dengan Konsep Tata Ruang.....	148
Tabel 2.83	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup	150
Tabel 2.84	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Pengurangan Kerentanan Risiko Bencana	153
Tabel 2.85	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Politik dan Demokrasi	155
Tabel 2.86	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya.....	156
Tabel 2.87	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	157

Tabel 2.88	
Rekapitulasi Data Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Tahun 2016-2020	158
Tabel 2.89	
Rekapitulasi Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Jenis Minuman Keras/ Beralkohol Tahun 2016-2020	159
Tabel 2.90	
Kondisi Jenis Permasalahan Ketentramaan Umum Tahun 2016-2020.....	160
Tabel 2.91	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kapasitas Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak	162
Tabel 2.92	
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020	163
Tabel 2.93	
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Klaten Periode 2016-2020	163
Tabel 2.94	
Keikutsertaan Perempuan di dalam Jabatan Eksekutif dan Legislatif di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.....	164
Tabel 2.95	
Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum di Kabupaten Klaten 2016-2020	164
Tabel 2.96	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Kualitas Layanan Perhubungan	165
Tabel 2.97	
Jumlah Sarana Angkutan (Umum dan Pribadi) Tahun 2016-2020	166
Tabel 2.98	
Data Terminal Angkutan Penumpang Umum di Kabupaten Klaten Tahun 2019	166
Tabel 2.99	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Pelayanan Perijinan Satu Pintu yang Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Sasaran dan Tepat Manfaat.....	167
Tabel 2.100	
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Berkualitas	168

Tabel 2.101	Jumlah Pelayanan Akte di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020	169
Tabel 2.102	Penduduk Kabupaten Klaten yang Belum Ber-Akte Lahir dan KTP Elektronik Tahun 2016-2020	169
Tabel 2.103	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Pengembangan Ketransmigrasian	170
Tabel 2.104	Realisasi Penempatan Transmigrasi Umum Menurut Daerah Penempatan Tahun 2016-2020	171
Tabel 2.105	Tingkat Efisiensi Sumber Daya	173
Tabel 2.106	Jumlah Sumber Daya Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten tahun 2020	192
Tabel 3.1	Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2020	207
Tabel 3.2	Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2020	210
Tabel 4.1	Target Pencapaian SPM Pendidikan	216
Tabel 4.2	Realisasi Pencapaian SPM Pendidikan	217
Tabel 4.3	Alokasi Anggaran dan Realisasi Penerapan SPM bidang Pendidikan Tahun 2020	218
Tabel 4.4	Jumlah ASN Dinas Pendidikan Menurut Pangkat / Golongan Tahun 2020	218
Tabel 4.5	Jumlah ASN & PTT Dinas Pendidikan Menurut Latar Belakang Pendidikan Tahun 2020	219
Tabel 4.6	Jumlah ASN Dinas Pendidikan Menurut Esselonering Tahun 2020	219
Tabel 4.7	Target Pencapaian SPM Bidang Kesehatan tahun 2020	221

Tabel 4.8	
Realisasi SPM Bidang Kesehatan tahun 2020	222
Tabel 4.9	
Alokasi Anggaran Penerapan SPM Kesehatan Tahun 2020	223
Tabel 4.10	
Jenis dan Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2020.....	223
Tabel 4.11	
Target Pencapaian SPM Pekerjaan Umum tahun 2020	228
Tabel 4.12	
Realisasi Pencapaian SPM Pekerjaan Umum	229
Tabel 4.13	
Alokasi Anggaran Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Berdasarkan Program & Kegiatan Tahun 2020.....	229
Tabel 4.14	
Jumlah Pegawai Disperwaskim berdasarkan status kepegawaian	230
Tabel 4.15	
Jumlah pegawai Disperwaskim berdasarkan pendidikan tahun 2020	230
Tabel 4.16	
Jumlah ASN Disperwaskim Menurut Jabatan tahun 2020	230
Tabel 4.17	
Jumlah ASN Disperwaskim Menurut Golongan/Ruang Tahun 2020.....	231
Tabel 4.18	
Jumlah ASN Disperwaskim Menurut Esselonering Tahun 2020.....	231
Tabel 4.19	
Permasalahan, Solusi dan Rencana Tindak Lanjut Penerpaan SPM bidang Pekerjaan Umum tahun 2020	232
Tabel 4.20	
Target Pencapaian SPM bidang Perumahan rakyat tahun 2020	235
Tabel 4.21	
Realisasi Pencapaian SPM bidang Perumahan rakyat tahun 2020	235
Tabel 4.22	
Anggaran Program Pendukung Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2020	236
Tabel 4.23	
Jumlah Pegawai Disperwaskim Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2020	237
Tabel 4.24	
Jumlah Pegawai Disperwaskim Berdasarkan Pendidikan tahun 2020	237

Tabel 4.25 Jumlah ASN Disperwaskim menurut Jabatan tahun 2020	238
Tabel 4.26 Jumlah ASN Disperwaskim Menurut Golongan/Ruang Tahun 2020.....	238
Tabel 4.27 Jumlah ASN Disperwaskim Menurut Esselonering Tahun 2020.....	239
Tabel 4.28 Permasalahan, Solusi dan Rencana Tindak Lanjut Penerpaan SPM Bidang Perumahan Rakyat tahun 2020.....	239
Tabel 4.29 Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020.....	242
Tabel 4.30 Realisasi Pencapaian SPM bidang Urusan Trantibunlinmas Tahun 2020.....	243
Tabel 4.31 Alokasi Anggaran Pencapaian SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020.....	244
Tabel 4.32 Jumlah Personil Pelaksana Penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebencanaan tahun 2020	245
Tabel 4.33 Jumlah Personil Pelaksana Penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub-Urusan Kebakaran dan Sub-Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum tahun 2020.....	246
Tabel 4.34 Permasalahan & Solusi Penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub-Urusan Kebakaran dan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2020.....	246
Tabel 4.35 Target Pencapaian SPM Urusan Sosial tahun 2020	248
Tabel 4.36 Target Pencapaian SPM Urusan Sosial tahun 2020	248

Tabel 4.37	
Alokasi Anggaran & Realisasi Program Pencapaian SPM	
Urusan Sosial Tahun 2020.....	250
Tabel 4.38	
Program dan Kegiatan Mendukung Pencapaian SPM	
Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2020	251
Tabel 4.39	
Program dan Kegiatan Mendukung Pencapaian SPM	
Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2020	259
Tabel 4.40	
Program dan Kegiatan Mendukung Pencapaian SPM	
Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2020	259
Tabel 4.41	
Program dan Kegiatan Mendukung Pencapaian SPM	
Bidang Urusan Trantibumlinmas Tahun 2020	261
Tabel 4.42	
Program dan Kegiatan Mendukung Pencapaian SPM	
Bidang Urusan Sosial Tahun 2020	263

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.1.1 PENJELASAN UMUM

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten sebagai wilayah daerah otonom dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah.

Sementara itu untuk menyesuaikan perkembangan keadaan dalam bidang pemerintahan, maka Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 diganti dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957, dimana jabatan Kepala Daerah dipangku oleh Fungsionalis, sehingga Bupati tidak lagi merangkap sebagai Kepala Daerah. Kemudian dalam pelaksanaannya diterbitkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 5 Desember 1957 Nomor : Pem.10/2/18, yang membentuk jabatan baru di lingkungan pamong praja, yaitu Pedjabat Bupati atau disingkat Pd. Bupati yang dipangku oleh Patih setempat. Patih inilah sebagai Kepala *Corps* Pamong Praja yang sehari-harinya disertai tugas-tugas Pemerintahan Pusat, sedangkan Bupati diberikan kedudukan sebagai Bupati dp (diperbantukan) Residen (Surakarta) yang bertempat tinggal di Daerah Swatantra Tingkat II (Kabupaten) Klaten, sejak tanggal 1 Agustus 1958. Disamping itu juga masih ada pejabat yang disebut Kepala Daerah, yang dalam prakteknya bertindak atas nama Dewan Pemerintah Daerah dari Daerah Swatantra yang bersangkutan yang menjalankan tugas-tugas otonomi dan *medebewind*, sehingga ada dualisme jabatan.

Pada Tahun 1959 terbitlah Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959, yang menetapkan bahwa Kepala Daerah diangkat oleh Menteri Dalam Negeri, dan dalam menjalankan tugasnya sehari-hari dibantu oleh sebuah badan yang bernama Badan Pemerintahan Harian. Disamping itu, Penetapan Presiden ini juga memuat tentang penyerahan tugas-tugas Pemerintahan Umum kepada Pemerintahan Daerah. Namun demikian peraturan tersebut baru direalisasikan pada Tahun 1963 dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1963 jo. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 1963. Sehingga dengan diterbitkannya peraturan tersebut berdampak dihapusnya dualisme dalam Pemerintahan Daerah, dimana telah disatukan kembali Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan bekas Pamong Praja ke dalam *corps* Pemerintahan Daerah. Bersamaan dengan itu, maka hapuslah pula Pemerintahan Kawedanan dengan Wedananya dan beralih sebagai fungsionaris pembantu/penghubung Bupati Kepala Daerah. Dengan demikian, maka Kantor Pemerintah Daerah dan Kantor Pamong Praja juga disatukan lagi pada satu tempat. Kemudian untuk

menyempurnakan struktur Pemerintahan Daerah, maka pada tahun 1965 diterbitkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965.

Melihat sejarah-sejarah yang terjadi di Kabupaten Klaten seperti di atas, maka tim penggali Hari Jadi Kabupaten Klaten memilih tanggal pendirian benteng Klaten sebagai hari dan tanggal kelahiran Kabupaten Klaten. Hal ini didasarkan pada peristiwa awal munculnya nama Klaten dalam sumber sejarah (dasar nomenklatur) dan asas kontinuitas peristiwa-peristiwa sejarah yang ada di Klaten. Di samping itu dukungan sumber sejarah tertulis tentang pendirian Benteng Klaten juga menjadi dasar dipilihnya tanggal 28 Juli 1804 sebagai hari lahirnya Kabupaten Klaten dan telah ditetapkan dengan Perda Nomor 12 tahun 2007, tanggal 18 Juni 2007 tentang Hari Jadi Kabupaten Klaten.

b. Data Geografis Wilayah

1. Batas Administrasi

Kabupaten Klaten terletak antara 7°32`19” Lintang Selatan sampai 7°48`33” Lintang Selatan dan antara 110°26`14” Bujur Timur sampai 110°47`51” Bujur Timur dengan batas-batas administrasi wilayah Kabupaten Klaten sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali,
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sukoharjo,
- 3) Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul (DIY), dan
- 4) Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman (DIY)

2. Luas Wilayah

Luas wilayah keseluruhan seluas 65.556 ha (655,56 km²) atau seluas 2,014% dari luas Provinsi Jawa Tengah, yang luasnya seluas 3.254.412 ha. Secara rinci luas wilayah Kabupaten Klaten per kecamatan dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut :

Tabel 1.1.
Luas Wilayah Per-Kecamatan
Di Kabupaten Klaten Tahun 2020

NO	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (km²)
1	Prambanan	24,43
2	Gantiwarno	25,64
3	Wedi	24,38
4	Bayat	39,43
5	Cawas	34,47
6	Trucuk	33,81
7	Kalikotes	12,98
8	Kebonarum	9,67
9	Jogonalan	26,70
10	Manisrenggo	26,96
11	Karangnongko	26,74
12	Ngawen	16,97
13	Ceper	24,45
14	Pedan	19,17
15	Karangdowo	29,23

16	Juwiring	29,79
17	Wonosari	31,14
18	Delanggu	18,78
19	Polanharjo	23,84
20	Karanganom	24,06
21	Tulung	32,00
22	Jatinom	35,53
23	Kemalang	51,66
24	Klaten Selatan	14,43
25	Klaten Tengah	8,92
26	Klaten Utara	10,38
	Jumlah	655,56

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Klaten tahun 2021

Dari tabel diatas Kecamatan Kemalang merupakan kecamatan yang terluas mencapai 7,88% dari luas wilayah Kabupaten Klaten, sedangkan Kecamatan Klaten Tengah merupakan kecamatan yang paling sempit yaitu hanya 1,36% dari luas wilayah Kabupaten Klaten.

3. Topografi Kabupaten Klaten

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Klaten diapit oleh Gunung Merapi dan Pegunungan Seribu, dengan ketinggian antara 76 – 1.60 m dpl (di atas permukaan laut). Secara geografis terbagi ke dalam 3 (tiga) wilayah, yaitu:

- 1) Wilayah lereng Gunung Merapi (wilayah bagian utara) yang meliputi Kecamatan Karangnongko, Kemalang, Jatinom dan Tulung.
- 2) Wilayah datar (wilayah bagian tengah) yang meliputi wilayah kecamatan-kecamatan Manisrenggo, Klaten Tengah, Kalikotes, Klaten Utara, Klaten Selatan, Ngawen, Kebonarum, Wedi, Jogonalan, Prambanan, Gantiwarno, Delanggu, Wonosari, Juwiring, Ceper, Pedan, Karangdowo, Trucuk, Cawas, Karangnom, Polanharjo.
- 3) Wilayah berbukit / gunung kapur (wilayah bagian selatan) yang hanya meliputi sebagian Kecamatan Bayat, Cawas dan Gantiwarno.

Dari sisi topografi wilayah Kabupaten Klaten, dirinci sebagai berikut:

- 1) Wilayah dengan ketinggian kurang dari 100 m di atas permukaan laut (dpl) meliputi sebagian dari kecamatan : Juwiring, Karangdowo dan Cawas
- 2) Wilayah dengan ketinggian antara 100 – 200 m dpl meliputi Kecamatan: Prambanan, Jogonalan, Gantiwarno, Wedi, Bayat, Cawas (di bagian barat), Trucuk, Kalikotes, Klaten Selatan, Klaten Tengah, Klaten Utara, Kebonarum (di bagian selatan), Ngawen (di bagian selatan dan timur), Ceper, Pedan, Karangnom (di bagian timur), Polanharjo (di bagian timur), Delanggu, Juwiring (di bagian barat) dan Wonosari (di bagian barat).
- 3) Wilayah dengan ketinggian antara 200 – 400 m dpl meliputi Kecamatan: Manisrenggo, Jogonalan (di bagian utara), Karangnongko, Kebonarum (di bagian utara), Ngawen (di bagian utara), Jatinom,

Karanganom (di bagian barat), Tulung (sebagian besar) dan Polanharjo (bagian barat).

- 4) Wilayah dengan ketinggian antara 400 – 1000 m dpl meliputi Kecamatan: Kemalang (sebagian besar), Manisrenggo (sebagian besar), Jatinom (sebagian kecil) dan Tulung (sebagian kecil).
- 5) Wilayah dengan ketinggian 1.000 – 2000 m dpl berada di Kecamatan Kemalang.

4. Iklim di Kabupaten Klaten

Kabupaten Klaten memiliki iklim tropis dengan musim hujan dan musim kemarau silih berganti sepanjang tahun, temperatur antara 28–30 derajat Celcius, dan kecepatan angin rata-rata berkisar 20–25 km/jam.

5. Kondisi Hidrologi

Kabupaten Klaten dilalui 80 sungai dengan berbagai klasifikasi (ordo), yaitu: (i) 1 sungai berklasifikasi induk yaitu Bengawan Solo, (ii) 1 sungai berklasifikasi Ordo I yaitu sungai Dengkeng, (iii) 24 sungai dengan klasifikasi ordo II, dan (iv) 54 sungai dengan Ordo III. Potensi air lainnya adalah sumber mata air. Terdapat 174 titik sumber mata air yang tersebar di 20 (dua puluh) Kecamatan. Dimana sumber air terbanyak terdapat di Kecamatan Tulung (24 lokasi) dan Manisrenggo (24 lokasi).

6. Jenis Tanah di Kabupaten Klaten

Jenis tanah di Kabupaten Klaten terdiri dari 5 (lima) macam, yaitu:

1. Litosol :

Bahan induk dari skis kristalin dan batu tulis terdapat di daerah Kecamatan Bayat.

2. Regosol Kelabu:

Bahan induk abu dan pasir vulkanik termedier terdapat di Kecamatan Cawas, Trucuk, Klaten Tengah, Kalikotes, Kebonarum, Klaten Selatan, Karangnongko, Ngawen, Klaten Utara, Ceper, Pedan, Karangdowo, Juwiring, Wonosari, Delanggu, Polanharjo, Karanganom, TulungdanJatinom.

3. Grumusol Kelabu Tua :

Bahan induk berupa abu dan pasir vulkan intermedier terdapat di daerah Kecamatan Bayat, Cawas sebelah selatan.

4. Kompleks Regosol Kelabu dan Kelabu Tua :

Bahan induk berupa batu apurnapal terdapat di daerah Kecamatan Klaten Tengah dan Kalikotes sebelah selatan.

5. Regosol Coklat Kekelabuan:

Bahan induk berupa abu dan pasir vulkan intermedier terdapat di daerah Kecamatan Kemalang, Manisrenggo, Prambanan, Jogonalan, Gantiwarno dan Wedi.

c. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Klaten pada Tahun 2020 berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten yang berdasarkan Data Konsolidasi Bersih (DKB) sebanyak 1.327.577 jiwa. dengan rincian jumlah penduduk laki-laki sebanyak 660.456 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 667.121 jiwa. Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Klaten bisa dilihat dalam Tabel 1.2.

Tabel 1.2.
Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten Per-Kecamatan Tahun 2018 – 2020

NO	KECAMATAN	TAHUN		
		2018	2019	2020
1	PRAMBANAN	52.662	52.824	52.957
2	GANTIWARNANO	40.609	40.696	41.443
3	WEDI	54.681	54.507	54.672
4	BAYAT	65.148	65.649	65.771
5	CAWAS	61.359	60.690	60.704
6	TRUCUK	80.740	81.715	82.226
7	KEBONARUM	20.910	20.935	21.140
8	JOGONALAN	61.117	61.237	61.927
9	MANISRENGGO	44.181	44.373	44.336
10	KARANGNONGKO	38.247	38.096	38.367
11	CEPER	66.963	67.619	68.188
12	PEDAN	48.831	48.990	49.000
13	KARANGDOWO	45.176	45.256	45.557
14	JUWIRING	60.686	61.155	61.325
15	WONOSARI	64.760	64.770	64.355
16	DELANGGU	43.248	43.661	43.505
17	POLANHARJO	42.783	42.969	43.179
18	KARANGANOM	47.585	47.602	47.406
19	TULUNG	55.283	55.419	55.805
20	JATINOM	61.905	62.312	62.183
21	KEMALANG	39.721	40.064	40.343
22	NGAWEN	46.697	47.368	47.304
23	KALIKOTES	37.943	38.116	38.217
24	KLATEN UTARA	48.416	49.265	49.256
25	KLATEN TENGAH	42.264	42.634	42.865
26	KLATEN SELATAN	44.965	45.687	45.546
TOTAL		1.316.880	1.323.609	1.327.577

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, Tahun 2021.

d. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan

Secara administratif Kabupaten Klaten dibagi menjadi 26 kecamatan, 391 desa dan 10 kelurahan. Adapun Jumlah Desa/Kelurahan menurut Kecamatan pada tahun 2020 dapat dilihat dalam Tabel 1.3

Tabel 1.3.
Jumlah Desa/Kelurahan menurut Kecamatan
di Kabupaten Klaten tahun 2020

NO	KECAMATAN	DESA	KELURAHAN
1	Prambanan	16	-
2	Gantiwarno	16	-
3	Wedi	19	-
4	Bayat	18	-
5	Cawas	20	-
6	Trucuk	18	-
7	Kalikotes	7	-
8	Kebonarum	7	-
9	Jogonalan	18	-
10	Manisrenggo	16	-
11	Karangnongko	14	-
12	Ngawen	13	-
13	Ceper	18	-
14	Pedan	14	-
15	Karangdowo	19	-
16	Juwiring	19	-
17	Wonosari	18	-
18	Delanggu	16	-
19	Polanharjo	18	-
20	Karanganom	19	-
21	Tulung	18	-
22	Jatinom	17	1
23	Kemalang	13	-
24	Klaten Selatan	11	1
25	Klaten Tengah	3	6
26	Klaten Utara	6	2
	Jumlah	391	10

Sumber : Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Klaten, Tahun 2021

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan Pegawai Pemerintahan

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten mengamanatkan terbentuknya 23 (dua puluh tiga) perangkat daerah yang meliputi :

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat Daerah;
4. Dinas Pendidikan
5. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;
6. Dinas Kesehatan;
7. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah;
12. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;

13. Dinas Komunikasi Informatika;
14. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
15. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
16. Dinas Perhubungan;
17. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
18. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan;
19. Dinas Arsip dan Perpustakaan;
20. Satuan Polisi Pamong Praja;
21. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
22. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Sedangkan untuk 2 (dua) perangkat daerah lainnya diatur dengan Perda tersendiri yaitu Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten dan Perda Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Klaten.

Selain Perangkat Daerah sebagaimana diatas juga dibentuk Kecamatan sebagai Perangkat Daerah sejumlah 26 (dua puluh enam) Kecamatan, yang terdiri dari :

1. Kecamatan Prambanan;
2. Kecamatan Gantiwarno;
3. Kecamatan Wedi;
4. Kecamatan Bayat;
5. Kecamatan Cawas;
6. Kecamatan Trucuk;
7. Kecamatan Kebonarum;
8. Kecamatan Jogonalan;
9. Kecamatan Manisrenggo;
10. Kecamatan Karangnongko;
11. Kecamatan Ceper;
12. Kecamatan Pedan;
13. Kecamatan Karangdowo;
14. Kecamatan Juwiring;
15. Kecamatan Wonosari;
16. Kecamatan Delanggu;
17. Kecamatan Polanharjo;
18. Kecamatan Karanganom;
19. Kecamatan Tulung;
20. Kecamatan Jatinom;
21. Kecamatan Kemalang;
22. Kecamatan Ngawen;
23. Kecamatan Kalikotes;

24. Kecamatan Klaten Utara;
25. Kecamatan Klaten Tengah;
26. Kecamatan Klaten Selatan.

Dalam wilayah kecamatan dibentuk 10 (sepuluh) Kelurahan sebagai perangkat kecamatan yang meliputi :

1. Kelurahan Jatinom, Kecamatan Jatinom.
2. Kelurahan Gergunung, Kecamatan Klaten Utara;
3. Kelurahan Barenglor, Kecamatan Klaten Utara;
4. Kelurahan Bareng, Kecamatan Klaten Tengah;
5. Kelurahan Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah;
6. Kelurahan Kabupaten, Kecamatan Klaten Tengah;
7. Kelurahan Klaten, Kecamatan Klaten Tengah;
8. Kelurahan Mojayan, Kecamatan Klaten Tengah;
9. Kelurahan Buntalan, Kecamatan Klaten Tengah;
10. Kelurahan Gayamprit, Kecamatan Klaten Selatan;

Secara keseluruhan jumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten berdasarkan data Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Klaten per 31 Desember 2020 adalah sejumlah 8.990 orang. Secara rinci jumlah ASN di masing-masing perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.4.
Jumlah ASN per Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten
Tahun 2020

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH	JENIS KELAMIN	
			L	P
1	Sekretariat Daerah	149	89	60
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	39	32	7
3	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	96	59	37
4	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	38	28	10
5	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	34	20	14
6	Inspektorat	50	29	21
7	Satuan Polisi Pamong Praja	52	47	5
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	29	21	8
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	21	11	10
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	291	267	24
11	Dinas Komunikasi Informatika	25	18	7
12	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	30	18	12
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	20	14	6
14	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	43	21	22
15	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	43	25	18

NO	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH	JENIS KELAMIN	
			L	P
16	Dinas Arsip dan Perpustakaan	24	10	14
17	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	226	136	90
18	Dinas Perhubungan	52	39	13
19	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	40	31	9
20	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	149	115	34
21	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	33	19	14
22	Dinas Kesehatan	1.483	308	1.175
23	Dinas Pendidikan	5.463	1.851	3.612
24	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	31	14	17
25	Kecamatan Wedi	22	13	9
26	Kecamatan Kebonarum	15	7	8
27	Kecamatan Ngawen	14	5	9
28	Kecamatan Kalikotes	17	9	8
29	Kecamatan Jogonalan	15	8	7
30	Kecamatan Gantiwarno	15	8	7
31	Kecamatan Prambanan	20	10	10
32	Kecamatan Manisrenggo	21	15	6
33	Kecamatan Kemalang	21	17	4
34	Kecamatan Karangnongko	22	16	6
35	Kecamatan Jatinom	18	10	8
36	Kecamatan Tulung	23	17	6
37	Kecamatan Karanganyam	17	9	8
38	Kecamatan Polanharjo	17	14	3
39	Kecamatan Delanggu	16	9	7
40	Kecamatan Wonosari	22	16	6
41	Kecamatan Ceper	18	12	6
42	Kecamatan Juwiring	18	11	7
43	Kecamatan Pedan	17	13	4
44	Kecamatan Karangdowo	19	13	6
45	Kecamatan Cawas	21	11	10
46	Kecamatan Bayat	16	11	5
47	Kecamatan Trucuk	15	10	5
48	Kecamatan Klaten Tengah	45	25	20
49	Kecamatan Klaten Selatan	18	7	11
50	Kecamatan Klaten Utara	31	15	16
51	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	16	11	5
TOTAL		8.990	3.544	5.446

Sumber : BKPPD Kabupaten Klaten per 31 Desember 2020

f. Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

1) Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020

Pada Tahun Anggaran 2020 Pemerintah Kabupaten Klaten menargetkan Pendapatan Daerah sebesar Rp.2.509.533.202.687,- dan di akhir tahun

anggaran tercapai sebesar Rp. 2.465.572.071.354,- Sehingga dari pendapatan tercapai sebesar 98,25% dari target yang telah ditentukan dengan perincian target dan realisasi pendapatan daerah terlihat dari tabel berikut :

Tabel 1.5.
Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2020

NO	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	(%)
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH	304.546.856.100	246.558.797.299	329.963.261.898	133,83
1	Pendapatan Pajak Daerah	132.050.000.000	85.584.000.000	116.132.536.269	135,69
2	Hasil Retribusi Daerah	14.123.603.600	10.707.170.000	14.760.621.483	137,86
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18.285.884.000	14.145.547.096	17.577.664.499	124,26
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	140.087.368.500	136.122.080.203	181.492.439.647	133,33
II	DANA PERIMBANGAN	1.707.736.367.000	1.533.062.670.188	1.516.494.102.076	98,92
1	Dana Transfer Umum Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	39.379.096.000	41.137.404.000	41.978.389.803	102,04
2	Dana Transfer Umum Dana Alokasi Umum	1.297.168.894.000	1.175.695.180.000	1.167.212.792.000	99,28
3	Dana Transfer Khusus	371.188.377.000	316.230.086.188	307.302.920.273	97,18
III	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	709.524.263.000	729.911.735.200	619.114.707.380	84,82
1	Pendapatan Hibah	102.717.000.000	116.145.580.000	115.170.740.000	99,16
2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	169.982.257.000	158.455.399.200	163.789.663.880	103,37
3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	51.752.868.000	57.067.155.000	57.067.155.000	100
4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	17.397.000.000	14.804.313.000	85,1
5	Dana Desa	385.072.138.000	380.846.601.000	268.282.835.500	70,44
	PENDAPATAN	2.721.807.486.100	2.509.533.202.687	2.465.572.071.354	98,25

Sumber : BPKD Kabupaten Klaten (data per tanggal 23 Februari 2021)

2) Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten pada Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp. 2.917.442.203.797,28 dan terealisasi sebesar Rp. 2.432.600.729,577,- dengan persentase realisasi anggaran sebesar 83,38% yang perinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.6
Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	(%)
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.989.682.907.100,00	2.093.641.067.774,00	1.737.312.107.695,00	82,98
BELANJA LANGSUNG	916.644.391.000,00	823.801.136.023,28	695.288.621.882	84,40
TOTAL BELANJA	2.906.327.298.100	2.917.442.203.797,28	2.432.600.729.577	83,38

Sumber : BPKD Kabupaten Klaten (data per tanggal 23 Februari 2021)

Jika dilihat dari komposisinya, belanja tidak langsung memberikan kontribusi sebesar 71,76% dari realisasi total belanja Kabupaten Klaten di tahun 2020 dan sisanya sebesar 29,24% disumbangkan oleh belanja langsung. Dari tabel diatas diketahui bahwa terdapat 2 jenis belanja yaitu :

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung meliputi Belanja Pegawai, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemerintah Desa, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga. Anggaran Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten pada tahun 2020 sebesar Rp2.093.641.067.774,- dan dapat direalisasikan sebesar Rp.1.737.312.107.695,- atau 82,98%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 1.7
Perincian Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2020

URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	(%)
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.989.682.907.100	2.093.641.067.774	1.737.312.107.695	82,98
1 Belanja Pegawai	1.225.991.040.200	1.035.679.423.323	931.415.680.664	89,93
2 Belanja Subsidi	2.000.000.000	2.000.000.000	1.988.515.348	99,43
3 Belanja Hibah	96.824.937.000	99.744.075.000	97.547.602.309	97,8
4 Belanja Bantuan Sosial	6.118.500.000	6.118.500.000	3.511.725.000	57,4
5 Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten & Pemerintah Desa	14.617.360.400	15.780.271.281	13.255.263.593	84

6	Belanja Bantuan Keuangan	641.131.069.500	713.551.893.700	599.002.566.700	83,95
7	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000	220.766.904.470	90.590.754.081	41,03

Sumber : BPKD Kabupaten Klaten (data per tanggal 23 Februari 2021)

b. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Belanja Langsung pada tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp.823.801.136.023,28 dan dengan realisasi sebesar Rp.682.301.005.295,00 atau 82,82%.

Tabel 1.8
Perincian Belanja Langsung
Tahun Anggaran 2020

URAIAN		SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp)	(%)
BELANJA LANGSUNG		916.644.391.000,00	823.801.136.023,28	695.288.621.882,00	84,40
1	Belanja Pegawai	104.295.604.303,56	123.971.422.711,56	114.604.642.135,00	92,44
2	Belanja Barang dan Jasa	514.300.530.379,44	503.703.597.334,72	423.557.260.173,00	84,09
3	Belanja Modal	298.048.256.317	196.126.115.977	157.126.719.574,00	80,12

Sumber : BPKD Kabupaten Klaten (data per tanggal 23 Februari 2021)

3) Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020

Untuk total pendapatan, total belanja, total pembiayaan dan SILPA Tahun Anggaran 2020 serta SILPA tahun sebelumnya di Kabupaten Klaten secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.9
Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2020

URAIAN		SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp)
I	PENDAPATAN	2.721.807.486.100	2.509.533.202.687	2.465.572.071.354
II	BELANJA	2.906.327.298.100	2.917.442.203.797,28	2.432.600.729.577
	SURPLUS / (DEFISIT)	- 184.519.812.000	- 407.909.001.110,28	32.971.341.777
III	PEMBIAYAAN DAERAH			
A	Penerimaan Pembiayaan Daerah	185.519.812.000	408.909.001.110,28	408.687.702.548,28
	1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	159.519.812.000	382.909.001.110,28	382.687.702.548,28
	2. Pencairan dana cadangan.	26.000.000.000	26.000.000.000	26.000.000.000
B	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
	1. Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
	2. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
	PEMBIAYAAN NETTO	184.519.812.000	407.909.001.110,28	407.687.702.548,28

URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN (Rp.)	SETELAH PERUBAHAN (Rp.)	REALISASI (Rp)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	-	0	440.659.044.325,28

Sumber : BPKD Kabupaten Klaten (data per tanggal 23 Februari 2021)

1.1.2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Berdasarkan Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten, Seiring dengan penambahan penduduk dan dinamika perkembangan jaman yang cepat maka secara umum Kabupaten Klaten menghadapi permasalahan daerah sebagai berikut :

1. Kemiskinan dan pengangguran tidak hanya menjadi tugas pemerintah daerah semata dan penanganannya direncanakan harus dengan baik, sistematis, terukur dan berlanjut;
2. Peningkatan jumlah penduduk dengan dinamika di dalamnya mempengaruhi struktur dan pola ruang wilayah kabupaten sehingga pengendalian ruang tidak semudah yang direncanakan dalam tata ruang;
3. Perubahan peruntukan pemanfaatan lahan dari lahan pertanian menjadi non pertanian untuk keberlangsungan budidaya manusia khususnya perumahan dan permukiman tidak dapat dihindari padahal luas lahan tetap;
4. Luasan lahan pertanian abadi tidak memenuhi target yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga salah satu dampaknya kontribusi sektor Pertanian dalam struktur PDRB sudah tidak lagi menjadi penyumbang yang terbesar padahal Kabupaten Klaten dikenal dengan kesuburan tanah dan perannya sebagai salah satu penyangga pangan bagi Provinsi Jawa Tengah;
5. Kegiatan penambangan Bahan Galian Golongan C (pasir , kerikil dan batu) di sepanjang aliran Sungai Woro apalagi yang tidak berijin dan lokasinya di luar zona yang ditentukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 yang masuk wilayah kawasan Kecamatan Kemalang, Manisrenggo dan Karangnongko menjadi tumpuan penghidupan ribuan masyarakat sejak puluhan tahun lalu semakin kompleks dinamikanya dan hasil penambangan tersebut berdampak rusaknya infrastruktur jalan jembatan yang dilalui padahal secara umum seharusnya Wilayah Kecamatan Kemalang menjadi kawasan tangkapan/serapan air bagi wilayah Kabupaten Klaten;
6. Kontribusi/proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Struktur APBD masih sangat bergantung kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

7. Mengingat letak wilayah Kabupaten Klaten relatif di tengah Pulau Jawa maka potensi kerawanan terjadinya bencana alam gempa bumi tektonik dan letusan Gunung Merapi cukup besar selain bencana tanah longsor, angin topan, banjir dan kekeringan yang terjadi hampir selalu terjadi setiap tahun sehingga Wilayah Kabupaten Klaten dapat dikatakan sebagai “laboratorium bencana alam”;
8. Terjadinya kesenjangan (disparitas) perkembangan wilayah di mana wilayah/jalur tengah sepanjang jalan nasional Surakarta-Yogyakarta memiliki perkembangan sangat pesat Perda Perubahan atas Perda No. 5 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 IV-2 sedangkan wilayah utara dan selatan relatif kurang berkembang/stagnan. Hal ini untuk wilayah utara (Wilayah Kecamatan Kemalang, Manisrenggo, Karangnongko dan Tulung) boleh jadi salah satunya disebabkan letaknya berdekatan dengan Gunung Merapi dan untuk wilayah selatan (Kecamatan Cawas, Bayat, Gantiwarno dan Prambanan) boleh jadi disebabkan potensi kegempaan yang berada pada tingkat menengah sehingga tanahnya labil yang berpengaruh terhadap kekuatan struktur bangunan;
9. Pertumbuhan investasi/penanaman modal di Wilayah Kabupaten Klaten tidak sebesar yang masuk ke kabupaten tetangga kawasan “SUBOSUKAWONOSRATEN“ (Kabupaten Boyolali, Sukoharjo dan Karanganyar, Wonogiri dan Sragen).

b. Visi Dan Misi Kepala Daerah

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang dirumuskan dalam RPJM Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 adalah: **“MEWUJUDKAN KABUPATEN KLATEN YANG MAJU, MANDIRI DAN BERDAYA SAING”**. Adapun beberapa penjelasan terhadap visi tersebut adalah sebagai berikut :

- 1. Klaten**, diartikan sebagai suatu daerah otonom, yang mempunyai batas-batas wilayah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 2. Maju**, yang dimaksud maju adalah kondisi bahwa masyarakat Kabupaten Klaten dapat tercukupi kebutuhan hidupnya secara adil dan merata, baik kebutuhan lahiriah yang meliputi: sandang, pangan, papan, dan kesehatan, maupun kebutuhan batiniah yang meliputi rasa aman, tentram, dan damai.
- 3. Mandiri**, yang dimaksud mandiri adalah bahwa masyarakat Kabupaten Klaten mampu bertumpu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri, tanpa harus meninggalkan kerjasama dengan para pihak untuk melaksanakan pembangunan.

4. Berdaya saing, yang dimaksud berdaya saing adalah bahwa masyarakat Kabupaten Klaten yang ingin dituju adalah masyarakat yang tidak tergantung pada pihak lain dan memiliki keunggulan komparatif.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, maka ditempuh 8 (delapan) misi pembangunan daerah, yaitu :

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
3. Meningkatkan dan mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal;
4. Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar sosial masyarakat;
5. Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumber daya alam yang selaras dengan tata ruang wilayah;
6. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian;
7. Meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender dan perlindungan anak;
8. Meningkatkan kapasitas pelayanan publik.

c. Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Target Kinerja berdasarkan RPJMD

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sementara sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran memuat penjabaran visi dan misi yang lebih terukur dalam jangka waktu perencanaan, serta memuat besaran-besaran kuantitatif yang menterjemahkan rumusan tujuan. Sehingga adanya rumusan sasaran diharapkan dapat membantu dan memandu dalam mempermudah perumusan indikator kinerja.

Guna mewujudkan visi dan misi pembangunan tersebut, maka pembangunan jangka menengah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 memiliki Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran dan Target Kinerja yang tersaji dalam Tabel 1.10 dibawah ini.

Tabel 1.10
TUJUAN, INDIKATOR TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR SASARAN RPJMD KABUPATEN KLATEN TAHUN 2016-2021

Misi / Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I. Mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat dan berbudaya											
1. Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat	Angka harapan lama sekolah	tahun	12,84	12,85	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	12,97	
	Angka rata-rata lama sekolah	tahun	8,16	8,22	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23	8,23	
	a. Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal	1	Prosentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	43,00	45,00	46,00	48,00	50,00	52,00	55,00
		2	Prosentase sekolah menengah pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00
2. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Usia Harapan Hidup	Tahun	71,81	76,59	76,62	76,62	76,62	76,62	76,62	76,62	
a. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat dan menurunnya angka kematian , angka kesakitan dan kecacatan	1	Kasus kematian Ibu	kasus	15	18	18	17	16	15	14	
	2	Angka Kematian Bayi	per 1000 KH	12,94	11,69	10,15	10,13	10,11	10,09	10,07	
	3	Angka kematian Balita	per 1000 KH	2,99	1,09	1,69	1,67	1,65	1,63	1,61	
	4	Prevalensi gizi buruk (BB/U)	%	0,75	0,89	0,73	0,73	0,72	0,71	0,7	
b. Menurunnya angka kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>)	Angka Kelahira (<i>Total Fertility Rate</i>) / TFR		2,2	2,3	2,18	2,16	2,14	2,12	2,1	2,1	
c. Meningkatnya pemanfaatan pelayanan Kerumahsakitin oleh masyarakat dan menurunnya angka kematian di Rumah Sakit	Usia Harapan Hidup	Tahun	71,81	76,59	76,62	76,62	76,62	76,62	76,62	76,62	
3. Menurunkan tingkat kemiskinan	Prosentase penduduk miskin	%	14,89	14,46	14,15	14,12	14,10	14,05	14,00	14,00	

Misi / Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021			
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
a.	Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM	1	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	77	79	81	83	85	87	89	89
		2	persentase penguatan kapasitas PSKS	%	90	92	94	96	97	99	100	100
		3	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	13,9	13,7	13,5	13,3	13,1	13	12,9	12,9
4.	Menurunkan Laju Pertumbuhan Penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)		1,1	1,07	1,05	1,03	1,01	0,98	0,96	0,96
a.	Menurunnya angka kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>)		Angka Kelahira (<i>Total Fertility Rate</i>) / TFR		2,2	2,3	2,18	2,16	2,14	2,12	2,1	2,1
5.	Meningkatkan Peran Serta, Kesadaran dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Hidup Sehat, Berprestasi dan Berbudaya		Rasio aset budaya tersertifikasi	%	7/92	8/92	9/92	10/92	11/92	12/92	13/92	13/92
			Tingkat prestasi pemuda dan olahraga	%	36	38	41	44	46	47	48	48
a.	Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga	1	Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda	%	5	10	10	10	10	10	10	60
		2	Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga	%	5	5	5	5	5	5	5	30
b.	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan Benda Cagar Budaya	1	Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya	%	5	6	6	6	6	6	6	36
		2	Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	7	10	10	10	10	10	10	60
6.	Meningkatkan minat baca masyarakat		Index Kepuasan Masyarakat	Index	65	65	65	65	70	70	70	70
a.	Meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan		Prosentase kenaikan kunjungan masyarakat	%	4	4	5	5	5	5	5	5
II. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih												
1.	Meningkatkan profesionalisme aparatur		Indeks Profesionalitas ASN		0	79,02	81,29	82,06	84,07	87,36	87,36	87,36

Misi / Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
pemerintah daerah	Indeks kapasitas fiskal daerah	Indeks	0,08	0,18	1,28	1,03	1,03	1,03	1,03	1,03	
	Prosentase SDM yang memiliki kualifikasi perencanaan	%	50,98	50,98	54,90	58,82	62,75	66,67	70,59	70,59	
	a. Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah	Indeks Profesionalitas ASN	0	79,02	81,29	82,06	84,07	87,36	87,36	87,36	
	b. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	WTP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
	c. Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja sekretariat DPRD	Persentase raperda yang disahkan tepat waktu	%	70	70	70	85	85	90	90	85
d. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Tingkat Konsistensi dan ketepatan waktu Perencanaan	%	90	100	100	100	100	100	100	100	
2.	Meningkatnya pengelolaan dan penataan arsip daerah	Index Kepuasan Masyarakat	index	65	65	65	65	70	70	70	70
a.	Meningkatnya tata kelola arsip SKPD	Prosentase kenaikan SKPD mengelola arsip secara baku	%	5	5	5	5	5	5	5	25
3.	Meningkatnya tata kelola kelembagaan desa dan pembinaan administrasi pemerintahan desa	Prosentase pemerintah desa yang dibina dalam peningkatan kapasitas dan tata kelola pemerintahan	%	20%	27%	33%	40%	47%	53%	60%	60%
a.	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel	Prosentase penyelenggaraan pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel	%	15%	15%	31%	46%	72%	87%	100%	100%
4.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel	Opini BPK									
a.	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	1 Level Maturitas SPIP	level	1	2	2	2	3	3	3	3
		2 Level Kapabilitas APIP	level	2	2	2	3	3	3	3	3

Misi / Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021			
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		3	Nilai Akuntabilitas Kinerja pemerintah	Nilai	47,89 (C)	53.01 (CC)	59 (CC)	64 (B)	66(B)	68(B)	70 (BB)	70 (BB)
b.	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan otonomi daerah		Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Skor	2,6	2,7	2,8	2,9	3	3,05	3,1	3,1
c.	Meningkatnya koordinasi penataan peraturan perundang undangan serta bantuan hukum dan HAM	1	Persentase tercapainya penyusunan produk hukum dan penanganan perkara	%	80	80	100	85	90	90	90	90
		2	Indeks kabupaten peduli HAM	Indeks	0	60	70	75	80	80	80	80
d.	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan		Persentase kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan (fisik dan keuangan) dengan target (rencana)	%	80	85	88	90	90	90	90	90
e.	Terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel		Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai regulasi	%	0		100	100	100	100	100	100
f.	Meningkatnya fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan	1	Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan kepala daerah	%	1200	90	92	94	96	98	100	100
		2	Persentase dokumentasi kegiatan kepala daerah	%	100	90	92	94	96	98	100	100
		3	Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan kepala daerah	%	125	100	92	94	96	98	100	100
g.	Meningkatnya fasilitasi dan pengawalan kebijakan daerah bidang perekonomian		Tingkat Inflasi YoY	%	2,57	4 (± 1)	4 (± 1)	3,5 (± 1)	3,5 (± 1)	3,5 (± 1)	3,5 (± 1)	3,5 (± 1)
h.	Meningkatnya koordinasi kesejahteraan rakyat		Persentase keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesra	%	90	90	90	90	95	95	95	95

Misi / Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
III. Meningkatkan & mengembangkan ekonomi daerah yang lebih produktif, kreatif, inovatif & berdaya saing berlandaskan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi lokal											
1. Meningkatkan Perekonomian Daerah yang Berdaya saing untuk kesejahteraan Masyarakat	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,39	5,39	5,4	5,41	5,42	5,43	5,43	5,43	
a. Meningkatnya ketersediaan Pangan Beragam, bergizi seimbang dan meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	12,5	12,07	12,15	12,25	12,3	12,4	12,6	12,6	
2. Meningkatkan pemberdayaan dan perekonomian yang produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing serta mengoptimalkan jaringan penanggulangan kemiskinan di desa	Prosentase LEM, LED yang aktif dan produktif (LEM, LED baik yang baru atau yang sdh berjalan dan yang telah di fasilitasi atau di bantu sehingga dapat berproduksi	%	13%	19%	23%	26%	33%	41%	45%	45%	
a. Meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dalam penanggulangan kemiskinan	Prosentase desa yang memiliki LEM, LED dan posyantek	%	12%	19%	27%	35%	42%	50%	58%	58%	
3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Kesejahteraan Masyarakat	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,51	0,51	0,51	0,52	0,52	0,53	0,53	0,53	
	Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	%	5,39	5,39	5,4	5,41	5,42	5,43	5,43	5,43	
	Pendapatan Per kapita (000)	rupiah	20.410	20.410	21.410	22.460	23.560	24.720	24.720	24.720	
	a. Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisata	Persentase Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata	%	5	10	20	25	25	25	25	130
	b. Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM	1 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	18,74	18,74	18,86	18,94	19,12	19,37	19,38	19,38
2 Persentase UMKM yang memiliki daya saing		%	5	5	7	9	11	13	15	15	

Misi / Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD			
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021				
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	Target				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
c.	Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah		Prosentase inovasi yang diterapkan	%	31,82	45,45	63,64	72,73	81,82	86,36	100,00	100,00	
d.	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor penanaman modal	1	Rasio daya serap tenaga kerja										
		2	PMDN		189	238	397	417	438	460	483	2.433	
		3	PMA		46	294	294	294	294	294	294	294	1.764
		4	Persentase pertumbuhan realisasi investasi (PMDN/PMA)										
		a	PMDN	%	1,75	1,75	1,81	1,98	2,20	2,50	2,50	2,50	12,74
		b	PMA	%	2,25	2,25	2,40	2,45	2,50	2,55	2,55	2,55	14,70
4.	Menurunkan tingkat pengangguran terbuka		Tingkat pengangguran terbuka	%	2,51	3,94	4,35	4,30	4,25	4,20	4,15	4,15	
a.	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor ketenagakerjaan	1	Rasio penduduk yang bekerja	%	0,97	0,99	1,01	1,03	1,05	1,07	1,08	1,08	
		2	Angka partisipasi angkatan kerja	%	67,79	84,76	69,51	69	69	69	69	69	
b.	Meningkatnya perlindungan sektor ketenagakerjaan		Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	%	86,81	87,00	87,30	87,60	87,90	88,20	88,20	88,20	
5.	Meningkatnya daya saing produk industri daerah		Pertumbuhan Industri	%	0,59	0,59	0,59	0,60	0,61	0,62	0,63	0,63	
a.	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas, dan daya saing sektor Perindustrian	1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	27,55	33,73	34,76	34,86	34,98	35,2	35,2	35,2	
		2	Persentase IKM yang memiliki daya saing	%	2,50	3,50	4,50	5,50	6,50	7,50	7,50	7,50	
IV. Meningkatkan kapasitas infrastruktur publik dan penyediaan kebutuhan sarana prasarana dasar sosial masyarakat													

Misi / Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1. Meningkatkan pemenuhan infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat											
a. Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat	indeks layanan infrastruktur	%	27,81	30,45	33,30	35,05	37,19	38,96	40,81	40,81	
b. Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perhubungan	%	36,04	38,92	40,76	45,87	47,41	57,52	57,52	57,52	
c. Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Indeks kualitas perumahan dan kawasan permukiman	indek	57,71	61,61	65,50	70,01	73,75	74,05	74,40	94,40	
V. Meningkatkan kapasitas pengelolaan dan kelestarian sumber daya alam yang selaras dengan tata ruang wilayah											
1. Meningkatkan kelestarian sumber daya alam	Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	indek	36,46	41,35	46,24	51,13	56,03	58,47	60,92	60,92	
a. Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan konsep tata ruang	Ketaatan terhadap RTRW	%	78,86	78,90	78,94	78,98	79,20	79,60	80,00	80,00	
b. Terjaganya kualitas lingkungan hidup	Indeks kualitas air	indek	16,00	20,89	25,79	30,68	35,57	38,02	40,46	40,46	
	Indeks kualitas udara	indek	60,00	64,89	69,79	74,68	79,57	82,02	84,46	84,46	
	Indeks tutupan vegetasi (lahan)	indek	34,14	39,03	43,93	48,82	53,71	56,16	58,60	58,60	
2. Mewujudkan pengurangan resiko bencana	Indeks resiko bencana	Indeks		123	122	121	120	119	119	119	
a. Terwujudnya pengurangan kerentanan resiko bencana	Kelas Indeks kapasitas bencana	Kelas		sedang	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang	sedang	
VI. Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berakhlak dan berkepribadian											

Misi / Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD	
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021		
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Meningkatkan kualitas tatanan kehidupan masyarakat yang mempunyai jati diri dan berwawasan kebangsaan	Indeks demokrasi	%	69,75	70	72	75	77	80	80	75,7
a.	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi	Indeks demokrasi	%	69,75	70	72	75	77	80	80	75,7
2.	Meningkatkan pengembangan sosial budaya dan lembaga kemasyarakatan	Prosentase desa/ kel yang terfasilitasi di bidang sosial budaya dan LK	%	5%	5%	13%	23%	40%	70%	100%	100%
a.	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya	Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)	%	16%	16%	33%	49%	66%	83%	100%	100%
3.	Menciptakan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Indeks ketertiban masyarakat	Indeks	90	90	93	95	97	99	100	100
a.	Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat	Indeks ketertiban masyarakat	Indeks	90	90	93	95	97	99	100	100
VII. Meningkatkan kapasitas pengarusutamaan gender dan perlindungan anak											
1.	Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan dan kualitas pemenuhan hak anak serta perlindungan khusus anak	Indeks pembangunan gender (IPG)	indeks	96,42	96,47	96,52	96,57	96,62	96,67	96,72	96,72
a.	Meningkatnya kapasitas perempuan, perlindungan perempuan dan anak	1. Indeks pemberdayaan gender (IDG)	indeks	59,95	60,02	60,09	60,16	60,23	60,3	60,37	60,37
		2. Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	tingkat	Madya	Madya	madya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya	Nindya

Misi / Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja (Tujuan/ Impact)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun-0)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
				Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VIII. Meningkatkan kapasitas pelayanan publik										
1. Meningkatkan kualitas layanan masyarakat										
a. Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan	Indeks kepuasan layanan perhubungan	Indeks	75,990	77,338	78,762	79,016	80,047	81,078	81,078	81,078
b. Meningkatnya pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat	Nilai survey kepuasan masyarakat	%	84,50	84,07	79,52	79,52	80,00	80,00	80,00	80,00
c. Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Indeks	sdh	sdh	sdh	sdh	sdh	sdh	sdh	sdh
2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program transmigrasi	Persentase partisipasi masyarakat mengikuti program transmigrasi	%	75,00	75,20	75,40	75,60	75,80	76,00	76,20	76,20
a. Pengembangan ketransmigrasian	Persentase besaran peningkatan minat transmigrasi	%	-64,62	39,13	40,00	40,50	41,00	41,50	42,00	42,00

d. Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Daerah Tahun 2020

Penetapan Perjanjian Kinerja (PK) ditetapkan berdasarkan sasaran strategis, serta didukung Program Prioritas agar lebih sistematis dan terukur ditentukanlah target kinerja pencapaian sasaran dalam jangka menengah Daerah. Hal ini dimaknai, bahwa target pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis.

Berangkat dari pengertian ini, maka Perjanjian Kinerja dimaknai sebagai lembaran/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program prioritas yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja diharapkan tercipta sinergisitas antara pemberi mandat dan penerima amanah untuk sama-sama mewujudkan target kinerja yang telah disepakati.

Perjanjian Kinerja Kepala Daerah Tahun 2020 ditetapkan mengacu pada RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 pada tahun berkenaan, serta RKPD 2020. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Daerah Tahun 2020 sebagaimana Tabel 1.11.

Tabel 1.11.
Perjanjian Kinerja Kepala Daerah Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal	1.1	Prosentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	52
		1.2	Prosentase sekolah menengah pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	90
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan menurunnya angka kematian, angka kesakitan dan kecacatan	2.1	Kasus kematian Ibu	Kasus	15
		2.2	Angka Kematian Bayi	per 1000 KH	10,09
		2.3	Angka kematian Balita	per 1000 KH	1,63
		2.4	Prevalensi gizi buruk (BB/U)	%	0,71
3	Menurunnya angka kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>)	3.1	Angka Kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>)/TFR	Indeks	2,12
4	Meningkatnya pemanfaatan pelayanan Kerumahsakitkan oleh masyarakat dan menurunnya angka kematian di Rumah Sakit.	4.1	Usia Harapan Hidup	Tahun	76,62
5	Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM	5.1	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	87
		5.2	Persentase penguatan kapasitas PSKS	%	99
		5.3	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	13

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
6	Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga.	6.1	Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda	%	10
		6.2	Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga	%	5
7	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya.	7.1	Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya	%	6
		7.2	Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	10
8	Meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan	8.1	Prosentase kenaikan kunjungan masyarakat	%	5
9	Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah	9.1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	87,36
10	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	10.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	WDP
11	Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja sekretariat DPRD	11.1	Persentase Raperda yang disahkan tepat waktu	%	90
12	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	12.1	Tingkat Konsistensi dan ketepatan waktu Perencanaan	%	100
13	Meningkatnya tata kelola arsip SKPD	13.1	Prosentase kenaikan SKPD mengelola arsip secara baku	%	5
14	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel	14.1	Prosentase penyelenggaraan pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel	%	53
15	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	15.1	Level Maturitas SPIP	Tingkat	3
		15.2	Level Kapabilitas APIP	Tingkat	3
		15.3	Nilai Akuntabilitas Kinerja pemerintah	Angka	68(B)
16	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan otonomi daerah	16.1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Angka	3,05
17	Meningkatnya koordinasi penataan peraturan perundang undangan serta bantuan hukum dan HAM	17.1	Persentase tercapainya penyusunan produk hukum dan penanganan perkara	%	90
		17.2	Indeks kabupaten peduli HAM	%	80
18	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan	18.1	Persentase kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan (fisik dan keuangan) dengan target (rencana)	%	90
19	Terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel	19.1	Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai regulasi	%	100
20	Meningkatnya fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan	20.1	Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan kepala daerah	%	98

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
	keprotokolan	20.2	Persentase dokumentasi kegiatan kepala daerah	%	98
		20.3	Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan kepala daerah	%	98
21	Meningkatnya fasilitasi dan pengawalan kebijakan daerah bidang perekonomian	21.1	Tingkat Inflasi YoY	%	3,5 (± 1)
22	Meningkatnya koordinasi kesejahteraan rakyat	22.1	Persentase keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesra	%	95
23	Meningkatnya ketersediaan Pangan Beragam, bergizi seimbang dan meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	23.1	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	12,4
24	Meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dalam penanggulangan kemiskinan	24.1	Prosentase desa yang memiliki LEM, LED dan posyantek	%	50
25	Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisata	25.1	Persentase Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata	%	25
26	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM	26.1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	19,37
		26.2	Persentase UMKM yang memiliki daya saing	%	13
27	Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah	27.1	Prosentase inovasi yang diterapkan	%	86,36
28	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor penanaman modal	28.1	Rasio daya serap tenaga kerja (PMDN/PMA):		
			PMDN	%	460
		PMA	%	294	
		28.2	Persentase pertumbuhan realisasi investasi (PMDN/PMA):		
PMDN	%		2,5		
PMA	%	2,55			
29	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor Ketenagakerjaan	29.1	Rasio penduduk yang bekerja	%	1,07
		29.2	Angka partisipasi angkatan kerja	%	69
30	Meningkatnya perlindungan sektor ketenagakerjaan	30.1	Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	%	88,2
31	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas, dan daya saing sektor Perindustrian	31.1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	35,2
		31.2	Persentase IKM yang memiliki daya saing	%	7,5

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
32	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat	32.1	Indeks layanan infrastruktur	Indeks	38,96
33	Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan	33.1	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perhubungan	Tingkat	57,52
34	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	34.1	Indeks kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Indeks	74,05
35	Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan konsep tata ruang	35.1	Ketaatan terhadap RTRW	%	79,6
36	Terjaganya kualitas lingkungan hidup	36.1	Indeks kualitas air	Indeks	38,02
		36.2	Indeks kualitas udara	Indeks	82,02
		36.3	Indeks tutupan vegetasi (lahan)	Indeks	56,16
37	Terwujudnya pengurangan kerentanan resiko bencana	37.1	Kelas Indeks kapasitas bencana	Indeks	Sedang
38	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi	38.1	Indeks demokrasi	Indeks	88
39	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya	39.1	Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)	Klpk	83
40	Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	40.1	Indeks ketertiban masyarakat	Indeks	99
41	Meningkatnya kapasitas perempuan, perlindungan perempuan dan anak	41.1	Indeks pemberdayaan gender (IDG)	Indeks	60,3
		41.2	Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	Kelas	Nidya
42	Meningkatnya kualitas layanan perhubungan	42.1	Indeks kepuasan layanan perhubungan	Indeks	81,09
43	Meningkatnya pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat	43.1	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	Indeks	80
44	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas	44.1	Indeks kepuasan layanan masyarakat	Indeks	92,7
45	Pengembangan ketransmigrasian	45.1	Persentase besaran peningkatan minat transmigrasi	%	41,5

e. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Program Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.12
Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen RPJMD
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021

NO	NAMA PROGRAM	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNGJAWAB
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	PELAKSANA URUSAN PENDIDIKAN
2	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	
3	Pendidikan Non Formal	
4	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
5	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	
6	Manajemen Pelayanan Pendidikan	
7	Upaya Kesehatan Masyarakat	PELAKSANA URUSAN KESEHATAN
8	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	
9	Obat dan Perbekalan Kesehatan	
10	Pengawasan Obat dan Makanan	
11	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	
12	Perbaikan Gizi Masyarakat	
13	Pengembangan Lingkungan Sehat	
14	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	
15	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	
16	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya	
17	Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/Rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/Rumah sakit mata	
18	Program Pelayanan Kesehatan	
19	Pemberdayaan fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	PELAKSANA URUSAN SOSIAL
20	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	
21	Pembinaan para penyandang cacat dan trauma	
22	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	
23	Keluarga berencana	PELAKSANA URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
24	Kesehatan Reproduksi Remaja	
25	Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/ KR yang Mandiri	
26	Peningkatan Peran Serta kepemudaan	PELAKSANA URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
27	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	
28	Pengelolaan Kekayaan Budaya	PELAKSANA URUSAN KEBUDAYAAN
29	Pengembangan Nilai Budaya	
30	Pengelolaan Keragaman Budaya	

31	Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	PELAKSANA URUSAN PERPUSTAKAAN
32	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	PELAKSANA URUSAN KEPEGAWAIAN
33	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	
34	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	PELAKSANA URUSAN KEUANGAN
		PELAKSANA URUSAN PERDAGANGAN
35	Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	PELAKSANA URUSAN PENUNJANG KESEKRETARIATAN DEWAN
36	Perencanaan pembangunan daerah	PELAKSANA URUSAN PERENCANAAN
37	Perencanaan pembangunan ekonomi	
38	Perencanaan sosial dan budaya	
39	Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	
40	Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
41	Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	PELAKSANA URUSAN BIDANG KEARSIPAN
42	Peningkatan kualitas pelayanan informasi	
43	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa / Kelurahan	PELAKSANA URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
44	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa	
45	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	PELAKSANA URUSAN PENGAWASAN
46	Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	
47	Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	SEKRETARIAT DAERAH
48	Peningkatan Kerjasama antar pemerintah daerah	
49	Pengembangan Wilayah Perbatasan	
50	Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	
51	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	
52	Pengembangan data/informasi/statistik daerah	
53	Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan	PELAKSANA URUSAN STATISTIK
54	Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	KECAMATAN
55	Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	
56	Penataan peraturan perundang undangan	
57	Penyuluhan pelayanan bantuan hukum dan HAM	SEKRETARIAT DAERAH
58	Peningkatan koordinasi pelaksanaan pembangunan	

59	Peningkatan Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	SEKRETARIAT DAERAH
60	Kerjasama Informasi dengan Mass Media	SEKRETARIAT DAERAH
61	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	SEKRETARIAT DAERAH
62	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	SEKRETARIAT DAERAH
63	Peningkatan Ketahanan Pangan	PELAKSANA URUSAN PANGAN
64	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	PELAKSANA URUSAN PERTANIAN
65	Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	
66	Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	
67	Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	PELAKSANA URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
68	Pengembangan Kemitraan	
69	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	PELAKSANA URUSAN PARIWISATA
70	Pengembangan Destinasi Pariwisata	
71	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	
72	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	PELAKSANA URUSAN KOPERASI DAN UNIT USAHA MENENGAH
73	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	
74	Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	
75	Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	PELAKSANA URUSAN PERDAGANGAN
76	Pembinaan pedagang kakilima dan asongan	
77	Penelitian dan pengembangan	
78	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	PELAKSANA URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
79	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	PELAKSANA URUSAN PENANAMAN MODAL
80	Peningkatan Kesempatan Kerja	PELAKSANA URUSAN KETENAGA KERJAAN
81	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	
82	Pengembangan industri kecil dan menengah	PELAKSANA URUSAN KETENAGA KERJAAN
83	Peningkatan kemampuan teknologi industri	PELAKSANA URUSAN PERINDUSTRIAN
84	Pembangunan Jalan Dan Jembatan	
85	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	PELAKSANA URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
86	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	
87	Pembinaan dan Pengembangan bidang ketenagalistrikan	PELAKSANA URUSAN PERHUBUNGAN
88	Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	PELAKSANA URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
89	Perbaikan Perumahan akibat bencana alam/sosial	PELAKSANA URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

90	Pengembangan Kinerja Pengelolaan air minum dan air limbah	PELAKSANA URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
91	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	
92	Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang	
93	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	PELAKSANA URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
94	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	PELAKSANA URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
95	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	
96	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	
97	Penanganan Darurat Bencana	PELAKSANA PENANGGULANGAN DAN PENANGANAN KEBENCANAAN
98	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	
99	Peningkatan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	
100	Peningkatan dan Pembinaan Kehidupan Sosial Politik	PELAKSANA URUSAN PELAKSANA URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
101	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	
102	Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga	
103	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	PELAKSANA URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
104	Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	
105	Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	
106	Penanganan Darurat Bencana	PELAKSANA URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
107	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	
108	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	
109	Peningkatan pelayanan angkutan	PELAKSANA BIDANG PANGARASUTAMAAN GENDER DAN PERLINDUNGAN ANAK
110	Peningkatan Pengembangan Pelayanan Perizinan	PELAKSANA URUSAN PERHUBUNGAN
111	Penataan administrasi kependudukan	PELAKSANA URUSAN PENANAMAN MODAL
112	Pengembangan wilayah transmigrasi	PELAKSANA URUSAN ADMINISTARSI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
113	Transmigrasi lokal	PELAKSANA URUSAN TRANSMIGRASI

f. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Kegiatan Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten dalam Dokumen Rancangan Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Klaten Tahun 2020 adalah sebagai *terlampir di Buku Lampiran LPPD Tahun 2020*

1.1.2 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Klaten mendasarkan pada :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- d. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
- e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Daerah Kabupaten/Kota;
- k. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

SPM yang telah ditetapkan Pemerintah Pusat menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Kabupaten Klaten untuk menyusun perencanaan dan penganggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah Kabupaten Klaten menyusun rencana penerapan dan pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan PP Nomor 2 Tahun 2018 dan juga Peraturan Menteri Teknis. Rencana pencapaian SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra OPD). Target tahunan pencapaian SPM dituangkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Rencana Kerja dan

Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD) sesuai klasifikasi belanja daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Penerapan SPM di Kabupaten Klaten sudah dilaksanakan sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM. Sampai saat ini penerapan SPM belum bisa berjalan dengan optimal karena terkendala dengan beberapa hal diantaranya belum terintegrasinya SPM dengan dokumen perencanaan daerah maupun penganggaran & realisasi di masing-masing OPD pengampu SPM belum menggambarkan tingkat penerapan dan capaiannya.

Dalam melaksanakan penerapan SPM, masing-masing OPD pengampu SPM setiap tahun secara rutin melaporkan capaian indikator SPM sesuai dengan urusan wajib pelayanan dasarnya masing-masing.

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

2.1 CAPAIAN KINERJA MAKRO

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam Pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro Kabupaten Klaten Tahun 2020 menggunakan indikator kinerja makro sebagaimana Tabel 2.1. berikut:

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Makro Kabupaten Klaten Tahun 2019 dan 2020 berserta Perubahannya

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Th. 2019	Capaian Kinerja Th. 2020	Perubahan (%)
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,29	75,56	0,35
2	Angka Kemiskinan	12,28	12,89	0,61
3	Angka Pengangguran	3,55	5,46	3,11
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,57	-1,18	(6,75)
5	Pendapatan Per Kapita*	933.193	955.531	2,39
<i>*menggunakan pendekatan pengeluaran per kapita per bulan</i>				
6	Ketimpangan Pendapatan (kriteria Bank Dunia)	19,15	20,13	0,98

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Pembangunan manusia di Kabupaten Klaten pada Tahun 2020 mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klaten. Pada tahun 2020, IPM Klaten mencapai 75.56, meningkat 0,27 poin dibandingkan Tahun 2019 yang besarnya 75.29.

Selama periode 2019 - 2020, beberapa komponen pembentuk IPM mengalami peningkatan. Bayi yang baru lahir memiliki harapan untuk hidup hingga 76,78 tahun, meningkat 0,10 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun 2019. Anak-anak usia 7 tahun memiliki peluang bersekolah selama 13,25 tahun, atau meningkat 0,01 tahun. Penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh

pendidikan selama 8,58 tahun, atau meningkat 0,27 tahun. Sedangkan Pengeluaran per kapita masyarakat mengalami penurunan dari Rp12.074.000,- pada tahun 2019, turun Rp 153.000,- menjadi Rp11.921.000,- di Tahun 2020. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Klaten pada tahun 2019-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Kondisi Indeks Pembangunan Manusia tahun 2019-2020
di Kabupaten Klaten

UHH		HLS		RLS		Pengeluaran		IPM		Peningkatan
(Tahun)		(Tahun)		(Tahun)		(Rp. 000)				
2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019 - 2020
76,68	76.78	13,24	13.25	8,31	8.58	12.074	11.921	75.29	75.56	0,27
Keterangan :										
UHH: Umur Harapan Hidup saat lahir										
HLS : Harapan Lama Sekolah										
RLS : Rata-rata Lama Sekolah										

Sumber : BPS Kabupaten Klaten & BPS Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2021.

2.1.2 Angka Kemiskinan

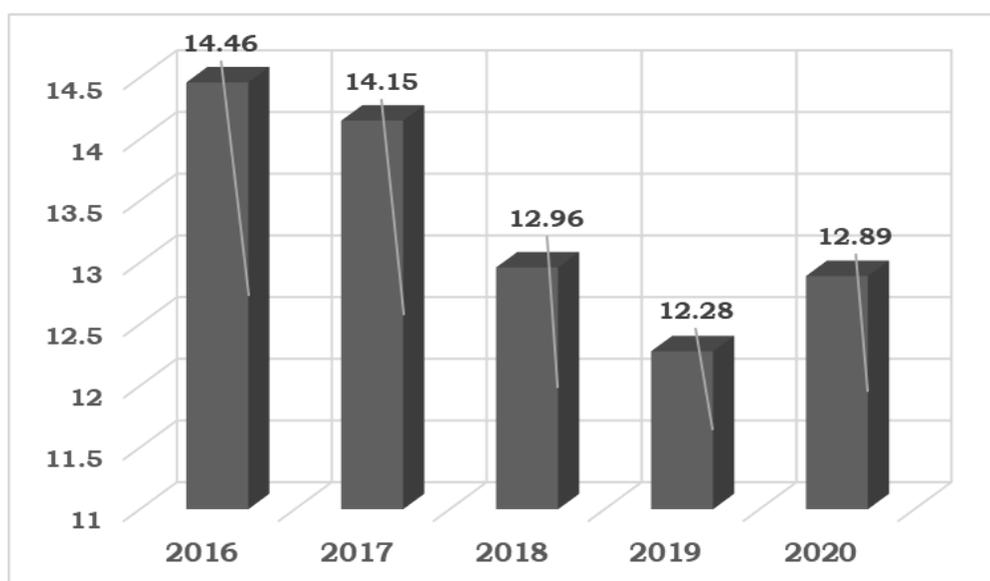
Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran sehingga penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Angka kemiskinan adalah persentase penduduk miskin pada daerah yang bersangkutan

Angka Kemiskinan di Kabupaten Klaten periode 2016-2020 terus mengalami penurunan, tetapi tahun 2020 sedikit mengalami kenaikan (Gambar 2.1). Pada periode 2016-2020 jumlah penduduk miskin cenderung menurun dari 168.010 orang di tahun 2016 menjadi 164.990 orang di tahun 2017 (Gambar 2.2). Persentase penduduk miskin juga mengalami penurunan dari 14,46 persen di tahun 2016 menjadi 14,15 persen di tahun 2017. Pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 164.990 orang atau turun 0,31 persen dari tahun 2016. Pada tahun 2018 jumlah penduduk miskin turun lagi menjadi 151.730 orang, persentase penduduk miskin juga turun menjadi 12,96 persen. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 adalah 144.140 orang atau sebesar 12,28 persen dari total penduduk Klaten. Jumlah penduduk miskin dan persentase penduduk miskin pada tahun 2019 merupakan nilai yang terendah selama 5 tahun terakhir. Tetapi untuk tahun 2020 terjadi kenaikan sebesar 0,61 persen yang diakibatkan dampak pandemi Virus Covid-19 .

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Klaten di tahun 2020 naik 7.690 jiwa dibandingkan tahun 2019. Penambahan penduduk miskin Kabupaten Klaten yang sebesar 5,34 persen adalah lebih kecil jika

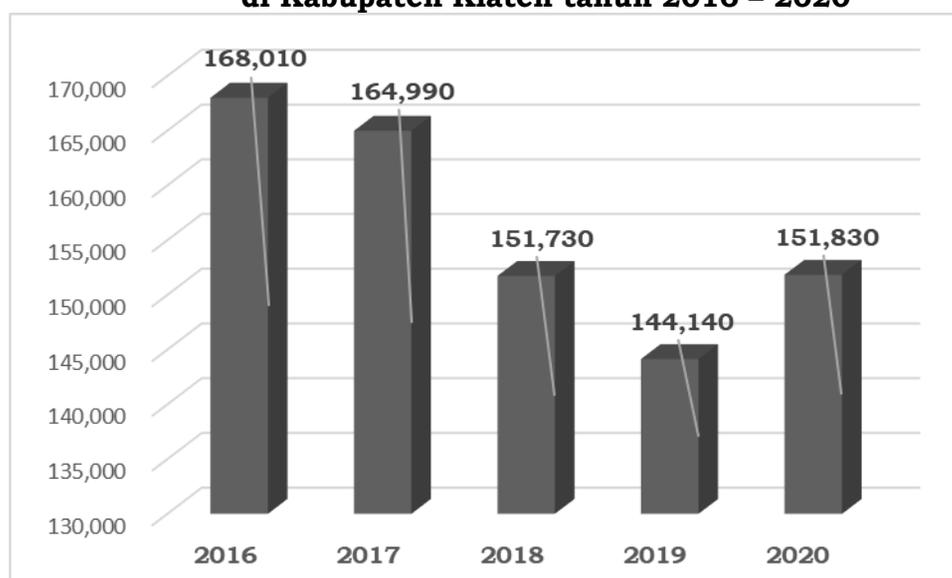
dibandingkan penambahan penduduk miskin Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 6,35 persen.

Gambar 2.1
Grafik Angka Kemiskinan di Kabupaten Klaten (dalam %) Tahun 2016 – 2020



Sumber: BPS Kabupaten Klaten, Tahun 2021

Gambar 2.2
Perkembangan Antar Waktu Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Klaten tahun 2016 – 2020

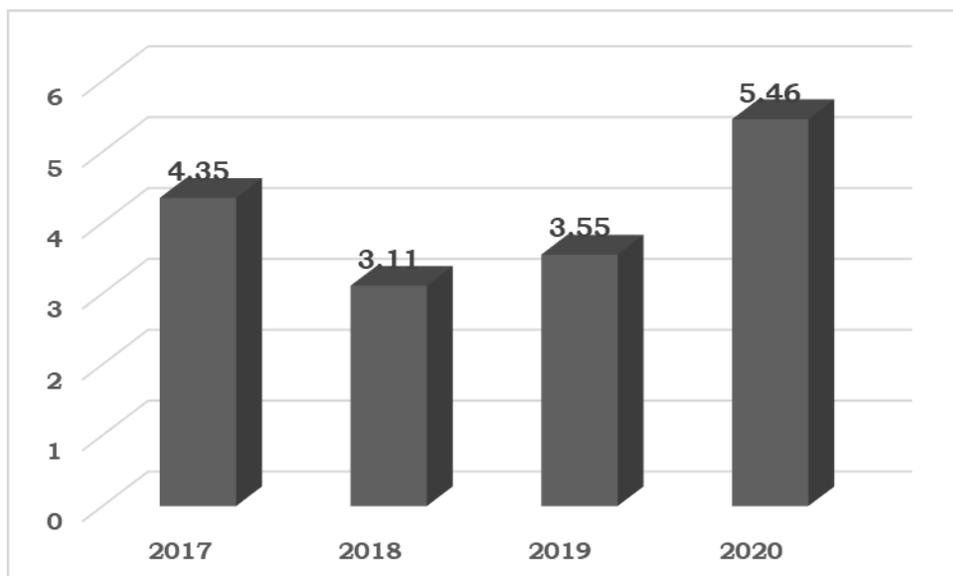


Sumber : BPS Kab. Klaten Tahun 2021

2.1.3 Angka Pengangguran

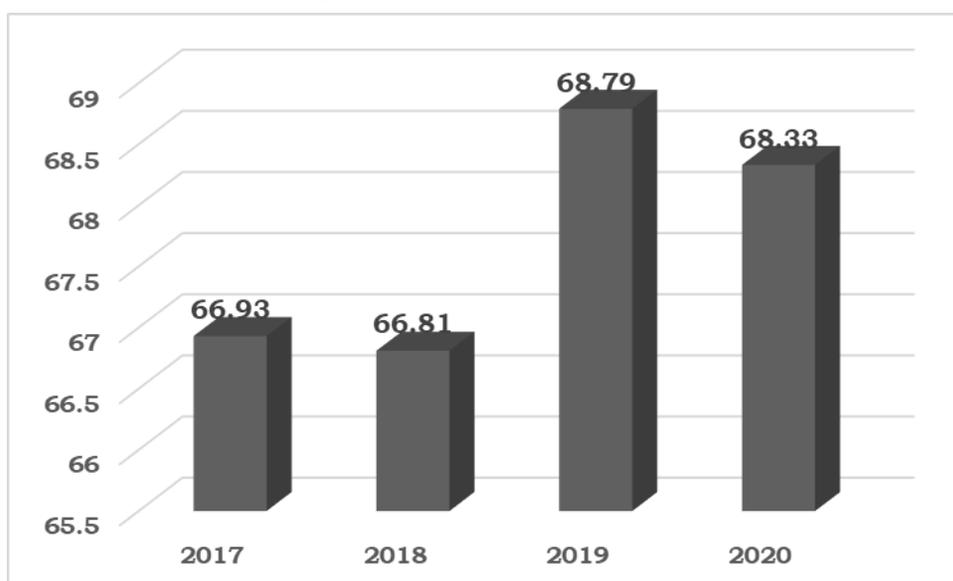
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah, Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Klaten pada tahun 2020 sebesar 5,46% dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2020 sebesar 68,33%. Data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Klaten pada Tahun 2017 – 2020 dapat dilihat di Gambar 2.3. sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tahun 2017-2020 dapat dilihat dalam Gambar 2.4.

Gambar 2.3
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) %
di Kabupaten Klaten tahun 2017 - 2020



Sumber : BPS Kab. Klaten Tahun 2021

Gambar 2.4
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
di Kabupaten Klaten Tahun 2017 - 2020



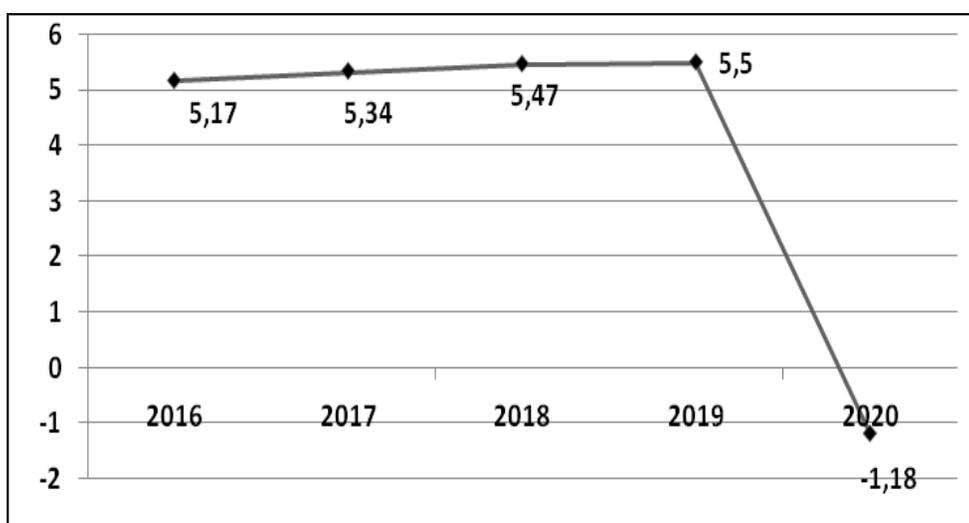
Sumber : BPS Kab. Klaten Tahun 2021

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan perekonomian Kabupaten Klaten selama Tahun 2016-2019 menunjukkan kinerja positif. Pada Tahun 2016 sebesar 5,17%, Tahun 2017 sebesar 5,34%, Tahun 2018 sebesar 5,47%, dan pada tahun 2019 tumbuh sebesar 5,5%. Namun pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi sebesar -1,18 %. Hal ini disebabkan adanya dampak wabah pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Klaten yang sebesar -1,18% masih lebih baik jika dibandingkan Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang mengalami kontraksi sebesar -2,65% dan Pertumbuhan ekonomi

nasional yang mengalami kontraksi sebesar -2,07%. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat dalam Gambar 2.5.

Gambar 2.5.
Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Klaten (%)
Tahun 2016 – 2020



Sumber : BPS Kabupaten Klaten per 26 Februari 2021

2.1.5 Pendapatan Per Kapita

Perhitungan pendapatan per kapita tidak dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga data pendapatan per kapita menggunakan pendekatan Pengeluaran rata-rata Per Kapita sebulan. Adapun rata-rata pengeluaran per kapita sebulan menurut jenis pengeluaran pada tahun 2018 – 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 2.3.
Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Sebulan menurut Jenis Pengeluaran 2018 - 2020

Jenis Pengeluaran	Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Sebulan (Rupiah)		
	2018	2019	2020
Makanan	434.445	439.963	476.383
Bukan Makanan	461.822	493.230	479.148
Jumlah Pengeluaran	896.267	933.193	955.531

Sumber : BPS Kabupaten Klaten Tahun 2021

Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Tabel 2.3 menyajikan data pengeluaran rata-rata per kapita sebulan untuk makanan dan bukan makanan 2018 sampai dengan 2020. Dari tabel tersebut terlihat bahwa selama periode 2019-2020 rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk meningkat dari Rp. 933.193,- pada tahun 2019 menjadi Rp.955.531,- pada tahun 2020. Bila dilihat dari

komposisinya pengeluaran untuk makanan mengalami kenaikan dari Rp.439.963,- pada tahun 2019 menjadi Rp. 476.383 pada tahun 2020. Sebaliknya, pengeluaran bukan makanan menurun dari Rp. 493.230,- pada tahun 2019 menjadi Rp. 479.148,- pada Tahun 2020.

2.1.6 Ketimpangan Pendapatan

Salah satu metode penghitungan yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan atau pengeluaran penduduk adalah Kriteria Bank Dunia. Ukuran ini membagi penduduk menjadi tiga kelompok pendapatan/pengeluaran yakni kelompok 40 persen berpendapatan terendah, 40 persen berpendapatan menengah dan 20 persen berpendapatan tertinggi.

Berdasarkan Kriteria Bank Dunia, tingkat ketimpangan diukur dengan besarnya pengeluaran yang dilakukan oleh 40 persen penduduk yang berpendapatan terendah dengan batasan sebagai berikut :

- a. Tingkat ketimpangan **rendah** jika 40 % penduduk berpendapatan terendah menerima lebih dari 17 persen jumlah pendapatan;
- b. Tingkat ketimpangan **moderat** jika 40 % penduduk berpendapatan terendah menerima antara 12 hingga 17 persen jumlah pendapatan.
- c. Tingkat ketimpangan **tinggi** jika 40 % penduduk berpendapatan terendah menerima kurang 12 persen jumlah pendapatan.

Data Distribusi Pengeluaran Penduduk Kabupaten Klaten berdasarkan kriteria Bank Dunia dari Tahun 2017 s/d 2020 bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah tersaji dalam Tabel berikut :

Tabel 2.4.
Distribusi Pengeluaran Penduduk Klaten
Berdasarkan Kriteria Bank Dunia 2017 – 2020

Kelompok Penduduk	Tahun			
	2017	2018	2019	2020
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pendapatan 40% kebawah	19,34	18,87	19,15	20,13

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, Maret 2021

Dari data diatas tampak bahwa Pemerintah Kabupaten Klaten berhasil menekan ketimpangan pendapatan yang terjadi di tengah masyarakat, bahkan pada saat Kabupaten Klaten didera Pandemi Virus Covid-19 di Tahun 2020. Terlihat sejak Tahun 2017 s/d 2020, tingkat pendapatan penduduk Kabupaten Klaten selalu berada dalam kriteria Tingkat Ketimpangan Rendah. Sesuai data Tabel 2.4. diatas dengan kriteria Bank Dunia, 40% penduduk

Kabupaten Klaten yang berpendapatan terendah menerima lebih dari 17% jumlah total pendapatan seluruh penduduk.

2.2 CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintah Daerah. Laporan capaian kinerja urusan Pemerintahan Daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi Indikator Kinerja Kunci Keluaran, Indikator kinerja Kunci Hasil dan Indikator Kunci untuk Fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dapat dilihat dalam Buku Lampiran Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020.

2.3 AKUNTABILITAS KINERJA PEMERINTAH DAERAH

Pembangunan berbasis kinerja menuntut adanya pencapaian target sasaran strategis jangka menengah Daerah yang telah ditetapkan. Sehingga pembangunan berbasis kinerja, sesungguhnya upaya untuk mencapai efisiensi pelaksanaan program/kegiatan dan sumber daya anggaran yang diukur dari keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan pembangunan berbasis kinerja akan sejalan dengan upaya untuk mewujudkan prinsip *good governance* dengan mengedepankan akuntabilitas sejauh mana perangkat daerah telah memenuhi tugas pokok dan fungsinya dalam pelayanan publik.

Oleh karena itu pentingnya pengendalian dan pertanggungjawaban pelaksanaan program/kegiatan untuk memastikan bahwa kinerja yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan pembangunan, dan mencapai target yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah menginformasikan capaian keberhasilan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Visi dan Misi Pemerintahan Daerah secara terukur, sebagaimana yang diperjanjikan dalam perjanjian kinerja kepala daerah.

a. Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

Penetapan Perjanjian Kinerja (PK) ditetapkan berdasarkan sasaran strategis, serta didukung Program Prioritas agar lebih sistematis dan terukur ditentukanlah target kinerja pencapaian sasaran dalam jangka menengah Daerah. Hal ini dimaknai, bahwa target pencapaian tahunan merupakan bagian dari target yang lebih strategis.

Berangkat dari pengertian ini, maka Perjanjian Kinerja dimaknai sebagai lembaran/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk

melaksanakan program prioritas yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja diharapkan tercipta sinergitas antara pemberi mandat dan penerima amanah untuk sama-sama mewujudkan target kinerja yang telah disepakati.

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 ditetapkan mengacu pada RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 pada tahun berkenaan, serta RKPD 2020. Adapun Perjanjian Kinerja Kabupaten Klaten Tahun 2020 beserta Target Kinerjanya sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.5.

Tabel 2.5.
Capaian Kinerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2019 dan 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Tahun 2019				Tahun 2020			
				Satuan	Target	Realisasi	%	Satuan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal	1.1	Prosentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	50	98,28	196,56	%	52	98,37	189,2
		1.2	Prosentase sekolah menengah pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	85	85,09	100,11	%	90	90,57	100,63
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan menurunnya angka kematian , angka kesakitan dan kecacatan	2.1	Kasus kematian Ibu	Kasus	16	12	75,00	Kasus	15	17	113,33
		2.2	Angka Kematian Bayi	per 1000 KH	10,11	10,01	99,01	per 1000 KH	10,09	9,34	92,57
		2.3	Angka kematian Balita	per 1000 KH	1,65	1,59	96,36	per 1000 KH	1,63	1,52	93,25
		2.4	Prevalensi gizi buruk (BB/U)	%	0,72	0,71	98,61	%	0,71	0,90	126,76
3	Menurunnya angka kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>) (3.1	Angka Kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>)/TFR	Indeks	2,14	2,1	98,13	Indeks	2,12	2,1	99,06
4	Meningkatnya pemanfaatan pelayanan Kerumahsakitkan oleh masyarakat dan menurunnya angka kematian di Rumah Sakit.	4.1	Usia Harapan Hidup	Tahun	76,22	76,67	100,59	Tahun	76,62	76,78	100,21
5	Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM	5.1	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	85	62,26	72,75	%	87	98,4	113,10
		5.2	Persentase penguatan kapasitas PSKS	%	97	96	98,9	%	99	96	96,97
		5.3	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	13,1	13,09	99,92	%	13	12,35	95,00
6	Meningkatnya Hasil Pengembangan dan	6.1	Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda	%	10	13	130	%	10	55,71	5571

	Pembinaan Pemuda dan Olahraga.	6.2	Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga	%	5	22	440,00	%	5	8,26	165,2
7	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya.	7.1	Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya	%	6	3,13	52,17	%	6	-75	-1250
		7.2	Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	10	14,3	143,00	%	10	100	1000
8	Meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan	8.1	Prosentase kenaikan kunjungan masyarakat	%	5	22,19	443,8	%	5	-15,13	-302,55
9	Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah	9.1	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	84,07	77,55	92,24	Indeks	87,36	78,06	89,35
10	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	10.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	WDP	WTP	150	Opini	WDP	WTP	133,33
11	Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja sekretariat DPRD	11.1	Persentase Raperda yang disahkan tepat waktu	%	85	91,31	108,60	%	90	83,33	92,59
12	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	12.1	Tingkat Konsistensi dan ketepatan waktu Perencanaan	%	100	100	100	%	100	100	100
13	Meningkatnya tata kelola arsip SKPD	13.1	Prosentase kenaikan SKPD mengelola arsip secara baku	%	5	12,56	251,2	%	5	8,72	174,4
14	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel	14.1	Prosentase penyelenggaraan pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel	%	72	68	94,44	%	87	88	101
15	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	15.1	Level Maturitas SPIP	Tingkat	3	3	100	Tingkat	3	3	100
		15.2	Level Kapabilitas APIP	Tingkat	3	3	100	Tingkat	3	3	100
		15.3	Nilai Akuntabilitas Kinerja pemerintah	Angka	66 (B)	61,32 (B)	92,91	Angka	68(B)	61,32 (B)	90,18
16	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan	16.1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan	Angka	3	3,22	107,33	Angka	3,05	3,21	105,25

	Pemerintahan Umum dan otonomi daerah		Pemerintahan Daerah (EKPPD)								
17	Meningkatnya koordinasi penataan peraturan perundang undangan serta bantuan hukum dan HAM	17.1	Persentase tercapainya penyusunan produk hukum dan penanganan perkara	%	90	83	92,22	%	90	90	100
		17.2	Indeks kabupaten peduli HAM	%	80	90	112,50	%	80	95,7	119,63
18	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan	18.1	Persentase kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan (fisik dan keuangan) dengan target (rencana)	%	90	81	90,00	%	90	97	107,78
19	Terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel	19.1	Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai regulasi	%	100	100	100	%	100	100	100
20	Meningkatnya fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan	20.1	Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan kepala daerah	%	96	98	102,08	%	98	99,42	101,45
		20.2	Persentase dokumentasi kegiatan kepala daerah	%	96	98	102,08	%	98	98,61	100,62
		20.3	Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan kepala daerah	%	96	98	102,08	%	98	98,89	100,91
21	Meningkatnya fasilitasi dan pengawalan kebijakan daerah bidang perekonomian	21.1	Tingkat Inflasi YoY	%	3,5 (± 1)	2,64	75,43	%	3,5 (± 1)	1,38	39,43
22	Meningkatnya koordinasi kesejahteraan rakyat	22.1	Persentase keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesra	%	95	95	100	%	95	95	100
23	Meningkatnya ketersediaan Pangan Beragam, bergizi seimbang dan meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	23.1	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	12,3	10,98	89,69	%	12,4	10,57	85,24
24	Meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dalam	24.1	Prosentase desa yang memiliki LEM, LED dan Posyantek	%	42	39	92,86	%	50	42	84,00

	penanggulangan kemiskinan											
25	Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisata	25.1	Persentase Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata	%	25	31,96	127,84	%	25	-55,88	-223,53	
26	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM	26.1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	19,12	19,98	104,49	%	19,37	19,98	103,15	
		26.2	Persentase UMKM yang memiliki daya saing	%	11	11,45	104,09	%	13	11,8	90,77	
27	Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah	27.1	Prosentase inovasi yang diterapkan	%	81,82	105	128,33	%	86,36	85	98,8	
28	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor penanaman modal	28.1	Rasio daya serap tenaga kerja (PMDN/PMA):									
			PMDN	%	438	19	4,34	%	460	3	0,65	
			PMA	%	294	139	47,28	%	294	12	4,08	
		28.2	Persentase pertumbuhan realisasi investasi (PMDN/PMA):									
			PMDN	%	2,2	733	33318,18	%	2,5	-79	-3160,00	
			PMA	%	2,5	272	10880,00	%	2,55	-59	-2313,73	
29	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor Ketenagakerjaan	29.1	Rasio penduduk yang bekerja	%	1,05	1,00	95,24	%	1,07	0,96	89,72	
		29.2	Angka partisipasi angkatan kerja	%	69	81	117,39	%	69	98,79	143,17	
30	Meningkatnya perlindungan sektor ketenagakerjaan	30.1	Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	%	87,9	71,48	81,32	%	88,2	43,12	48,89	
31	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas, dan daya saing sektor Perindustrian	31.1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	34,98	37,00	105,77	%	35,2	37,00	105,11	
		31.2	Persentase IKM yang memiliki daya saing	%	6,5	7,6	116,92	%	7,5	3,54	47,2	
32	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat	32.1	Indeks layanan infrastruktur	Indeks	37,19	60,87	163,67	Indeks	38,96	60,87	156,24	

33	Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan	33.1	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perhubungan	Tingkat	47,41	45,87	96,75	Tingkat	57,52	69,83	121,40
34	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	34.1	Indeks Kualitas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Indeks	73,75	53,76	72,89	Indeks	74,05	74,05	100
35	Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan konsep tata ruang	35.1	Ketaatan terhadap RTRW	%	79,2	78,98	100,28	%	79,6	79,6	100
36	Terjaganya kualitas lingkungan hidup	36.1	Indeks Kualitas Air	Indeks	35,57	28,46	80,01	Indeks	38,02	36,16	95,11
		36.2	Indeks Kualitas Udara	Indeks	79,57	82,29	103,42	Indeks	82,02	76,82	93,68
		36.3	Indeks Tutupan Vegetasi (lahan)	Indeks	53,71	83,3	155,09	Indeks	56,16	42,54	75,75
37	Terwujudnya pengurangan kerentanan resiko bencana	37.1	Kelas Indeks Kapasitas Bencana	Indeks	Sedang (119)	Sedang (123,20)	103,53	Indeks	Sedang (119)	Sedang (123,20)	103,53
38	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi	38.1	Indeks Demokrasi	Indeks	77	72,17	93,73	Indeks	80	77,22	96,53
39	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya	39.1	Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)	Klpk	66	58	87,88	Klpk	83	61	73,49
40	Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	40.1	Indeks Ketertiban Masyarakat	Indeks	97	96	98,97	Indeks	99	98	98,99
41	Meningkatnya kapasitas perempuan, perlindungan perempuan dan anak	41.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	60,23	60,25	100,03	Indeks	60,3	72,35	119,98
		41.2	Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	Kelas	Nindya (750)	Madya (650)	86,67	Kelas	Nidya (750)	Madya (650)	86,67
42	Meningkanya kualitas layanan perhubungan	42.1	Indeks Kepuasan Layanan Perhubungan	Indeks	80,05	79,02	98,71	Indeks	81,09	79,95	98,59

43	Meningkatnya pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat	43.1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks	80	78,37	97,96	Indeks	80	81,60	102,00
44	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas	44.1	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi	Indeks	Sdh (92,70)	Sdh (91,77)	99,00	Indeks	92,7	81,6	88,03
45	Pengembangan ketransmigrasian	45.1	Persentase Besaran Peningkatan Minat Transmigrasi	%	41	5,2	12,68	%	41,5	5,2	12,53

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Klaten Tahun 2020 (data setelah rewiu Inspektorat Kabupaten Klaten)

b. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Mengacu Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 136) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021, capaian indikator kinerja organisasi yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Klaten dibandingkan dengan target perjanjian kinerja pada tahun 2020 sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.5.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten dilakukan penentuan skala nilai peringkat kinerja sebagai bahan penilaian dari masing-masing sasaran strategis. Adapun skala nilai peringkat kinerja sebagaimana dimaksud, dapat dilihat dalam Tabel 2.6 dan juga Tabel 2.7.

Tabel 2.6.
Skala Nilai Peringkat Kinerja Progresif

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$\geq 90,01\%$	Sangat Tinggi
2	$75,01\% \leq 90,00\%$	Tinggi
3	$65,01\% \leq 75,00\%$	Sedang
4	$50,01\% \leq 65,00\%$	Rendah
5	$\leq 50,00\%$	Sangat Rendah

Sumber : LKjIP Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2020

Tabel 2.7.
Skala Nilai Peringkat Kinerja Regresif

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$\leq 99,99$	Tercapai
2	≥ 100	Tidak Tercapai

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kabupaten Klaten

Berdasarkan **hasil pengukuran kinerja** terhadap 45 (empat puluh lima) sasaran strategis dengan Indikator Kinerja Sasaran 67 (*enam puluh tujuh*) yang terdiri dari: 60 (*enam puluh*) indikator yang sifatnya progresif, dan 7 (*tujuh*) indikator yang sifatnya regresif. Dari masing-masing indikator diperoleh hasil:

1. Indikator Progresif, dengan hasil:

- a) Sebanyak 42 (*empat puluh dua*) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 62,69% dengan Kriteria **Sangat Tinggi**;
- b) Sebanyak 7 (tujuh) atau sebanyak 10,45% dengan Kriteria **Tinggi**;
- c) Sebanyak 1 (satu) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 1,49% dengan kriteria **Sedang**; dan
- d) Sebanyak 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Sasaran atau sebanyak 14,93% dengan Kriteria **Sangat Rendah**.

Adapun perincian atas hasil pengukuran kinerja, sebagai berikut:

- a) Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria **Sangat Tinggi** (atau interval nilai realisasi kinerja $\geq 90,1$) sebanyak 42 (*empat puluh dua*) indikator kinerja sasaran atau sebanyak 62,69%, diantaranya:
 1. Prosentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan;
 2. Prosentase sekolah menengah pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan ;
 3. Usia Harapan Hidup;
 4. Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 5. Persentase penguatan kapasitas PSKS;
 6. Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan;
 7. Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda;
 8. Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga;
 9. Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah;
 10. Persentase Raperda yang disahkan tepat waktu;
 11. Tingkat Konsistensi dan ketepatan waktu Perencanaan;
 12. Prosentase kenaikan SKPD mengelola arsip secara baku;
 13. Prosentase penyelenggaraan pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel;
 14. Level Maturitas SPIP;
 15. Level Kapabilitas APIP;
 16. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
 17. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD);
 18. Persentase tercapainya penyusunan produk hukum dan penanganan perkara;
 19. Indeks Kabupaten Peduli HAM;
 20. Persentase kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan (fisik dan keuangan) dengan target (rencana);
 21. Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai regulasi;

22. Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan kepala daerah;
 23. Persentase dokumentasi kegiatan kepala daerah;
 24. Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan kepala daerah;
 25. Persentase keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesra;
 26. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB;
 27. Persentase UMKM yang memiliki daya saing;
 28. Prosentase inovasi yang diterapkan;
 29. Angka Partisipasi Angkatan Kerja;
 30. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB;
 31. Indeks Layanan Infrastruktur;
 32. Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perhubungan;
 33. Indeks Kualitas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 34. Ketaatan terhadap RTRW;
 35. Indeks Kualitas Air;
 36. Indeks Kualitas Udara;
 37. Kelas Indeks Kapasitas Bencana;
 38. Indeks Demokrasi;
 39. Indeks Ketertiban Masyarakat;
 40. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
 41. Indeks Kepuasan Layanan Perhubungan; dan
 42. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat.
- b) Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan ***Kriteria Tinggi***, atau interval nilai realisasi kinerja $75,1 \leq 90$ sebanyak 7 (tujuh) indikator atau 10,45%, diantaranya:
1. Indeks Profesionalitas ASN;
 2. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB;
 3. Prosentase desa yang memiliki LEM, LED dan Posyantek;
 4. Rasio penduduk yang bekerja;
 5. Indeks Tutupan Vegetasi (lahan);
 6. Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA); dan
 7. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat.
- c) Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan ***Kriteria Sedang***, atau interval nilai realisasi kinerja $65,01 \leq 75$ sebanyak 1 (*satu*) indikator atau 1,49%, yaitu: Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan).
- d) Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria ***Sangat Rendah***, atau interval nilai realisasi kinerja ≤ 50 sebanyak 10 (*sepuluh*) indikator atau 14,93%, diantara:
1. Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya;

2. Prosentase kenaikan kunjungan masyarakat;
3. Persentase Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata;
4. Persentase IKM yang memiliki daya saing;
5. Rasio daya serap tenaga kerja PMDN;
6. Rasio daya serap tenaga kerja PMA;
7. Persentase pertumbuhan realisasi investasi PMDN;
8. Persentase pertumbuhan realisasi investasi PMA;
9. Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan; dan
10. Persentase Besaran Peningkatan Minat Transmigrasi.

2. Indikator Regresif, dengan hasil:

- a) Indikator regresif dengan Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja dengan Kriteria ***Tercapai (Berhasil Menekan)***, atau interval nilai realisasi kinerja skala $\leq 99,9$ sebanyak 5 (*lima*) indikator, atau 7,46%, diantaranya:
 1. Angka Kematian Bayi;
 2. Angka Kematian Balita;
 3. Tingkat Inflasi YoY;
 4. Angka Kelahiran (*Total Fertility Rate*)/TFR; dan
 5. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- b) Sedangkan yang ***Tidak Tercapai***, atau interval nilai realisasi kinerja skala ≥ 100 sebanyak 2 (*dua*) indikator atau 2,99%, diantaranya:
 1. Kasus kematian Ibu; dan
 2. Prevalensi gizi buruk (BB/U).

c. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

Pengukuran capaian dilakukan dengan mengukur capaian kinerja Tahun 2020 dibanding Tahun 2019. Tabel Capaian Kinerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2019 dan Tahun 2020 sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.5.

d. Pengukuran Capaian Kinerja Dibandingkan dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

Pengukuran dilakukan dengan membandingkan antara Capaian Kinerja sampai dengan Tahun 2020 terhadap target kinerja pada tahun terakhir RPJMD (2021). Dalam mengukur capaian kinerja tahun berkenaan dengan target dalam RPJMD juga dengan membandingkan dengan capaian saat awal RPJMD maupun capaian kinerja 2 (*dua*) tahun sebelumnya (Tahun 2018 dan 2019).

Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2020 dibandingkan dengan target dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten dapat disajikan dalam Tabel 2.8.

Tabel 2.8.
Capaian Kinerja Organisasi Pemerintah Kabupaten Klaten terhadap Target Dalam RPJMD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Capaian Kondisi Awal RPJM	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Th. 2020 thd Target Akhir RPJMD (%)
					2018	2019	Target	Realisasi	%		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal	1.1	Prosentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	43	61,05	98,28	52	98,37	189,2	55	178,85
		1.2	Prosentase sekolah menengah pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	65	82,00	85,09	90	90,57	100,63	95	95,40
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan menurunnya angka kematian , angka kesakitan dan kecacatan	2.1	Kasus kematian Ibu	15	13	12	15	17	113,33	14	121,43
		2.2	Angka Kematian Bayi	12,94	10,7	10,01	10,09	9,34	92,57	10,07	92,75
		2.3	Angka kematian Balita	2,99	1,9	1,59	1,63	1,52	93,25	1,61	94,41
		2.4	Prevalensi gizi buruk (BB/U)	0,75	0,56	0,71	0,71	0,90	126,76	0,70	128,57
3	Menurunnya angka kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>)	3.1	Angka Kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>)/TFR	2,2	1,91	2,1	2,12	2,1	99,06	2,1	100
4	Meningkatnya pemanfaatan pelayanan Kerumahsakitkan oleh masyarakat dan menurunnya angka kematian di Rumah Sakit.	4.1	Usia Harapan Hidup	76,59	76,77	76,67	76,62	76,78	100,21	76,62	100,21
5	Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM	5.1	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	35,52	70,66	62,26	87	98,4	113,10	89	110,56
		5.2	Persentase penguatan kapasitas PSKS	90	96	96	99	96	96,97	100	96,00
		5.3	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	13,9	14,32	13,09	13	12,35	95,00	12,9	95,74

6	Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga.	6.1	Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda	5	12	12	10	55,71	5571	60	92,85
		6.2	Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga	5	5	5	5	8,26	165,2	30	27,53
7	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya.	7.1	Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya	5	3,2	12	6	-75	-1250	6	-1250
		7.2	Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	7	14,3	5	10	100	1000	10	1000
8	Meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan	8.1	Prosentase kenaikan kunjungan masyarakat	4	65,79	22,19	5	-15,13	-302,55	5	-302,55
9	Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah	9.1	Indeks Profesionalitas ASN	-	74	77,55	87,36	78,06	89,35	87,36	89,35
10	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	10.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	WDP (3)	WTP (4)	WTP (4)	WDP	WTP	133,33	WTP (4)	100
11	Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja sekretariat DPRD	11.1	Persentase Raperda yang disahkan tepat waktu	70	93,10	91,31)	90	83,33	92,59	90	98,14
12	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	12.1	Tingkat Konsistensi dan ketepatan waktu Perencanaan daerah	Na	71	100	100	100	100	90	111,11
13	Meningkatnya tata kelola arsip SKPD	13.1	Prosentase kenaikan SKPD mengelola arsip secara baku	5	11,72	12,56	5	8,72	174,4	5	174,4
14	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel	14.1	Prosentase penyelenggaraan pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel	15	48	68	87	88	101	100	88

15	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	15.1	Level Maturitas SPIP	1	2	3	3	3	100	3	100
		15.2	Level Kapabilitas APIP	2	2	3	3	3	100	3	100
		15.3	Nilai Akuntabilitas Kinerja pemerintah	47,89(C)	60,33 (B)	61,32 (B)	68(B)	61,32 (B)	90,18	70 (B)	87,6
16	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan otonomi daerah	16.1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	2,6	3,09	3,22	3,05	3,21	105,25	3,1	103,55
17	Meningkatnya koordinasi penataan peraturan perundang undangan serta bantuan hukum dan HAM	17.1	Persentase tercapainya penyusunan produk hukum dan penanganan perkara	80	90	83	90	90	100	90	100
		17.2	Indeks kabupaten peduli HAM	0	234	90	80	95,7	119,63	80	119,63
18	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan	18.1	Persentase kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan (fisik dan keuangan) dengan target (rencana)	80	87,78	81	90	97	107,78	90	107,78
19	Terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel	19.1	Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai regulasi	0	100	100	100	100	100	100	100
20	Meningkatnya fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan	20.1	Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan kepala daerah	90	88,14	98	98	99,42	101,45	90	110,47
		20.2	Persentase dokumentasi kegiatan kepala daerah	90	98,08	98	98	98,61	100,62	90	109,07
		20.3	Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan kepala daerah	100	95	98	98	98,89	100,91	100	99,86
21	Meningkatnya fasilitasi dan pengawalan kebijakan daerah bidang perekonomian	21.1	Tingkat Inflasi YoY	4(± 1)	2,39	2,64	3,5 (± 1)	1,38	39,43	3,5 (± 1)	39,43

22	Meningkatnya koordinasi kesejahteraan rakyat	22.1	Persentase keterlibatan stakeholder dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesra	90	90	95	95	95	100	95	100
23	Meningkatnya ketersediaan Pangan Beragam, bergizi seimbang dan meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	23.1	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	12,5	10,98	10,98	12,4	10,57	85,24	12,6	83,89
24	Meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dalam penanggulangan kemiskinan	24.1	Prosentase desa yang memiliki LEM, LED dan Posyantek	12	35	39	50	42	84,00	58	72,41
25	Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisata	25.1	Persentase Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata	5	47,50	31,96	25	-55,88	-223,53	100	-223,53
26	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM	26.1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	18,74	17,88	19,98	19,37	19,98	103,15	19,38	103,10
		26.2	Persentase UMKM yang memiliki daya saing	5	8,99	11,45	13	11,8	90,77	15	78,67
27	Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah	27.1	Prosentase inovasi yang diterapkan	31,82	60	105	86,36	85	98,8	100	85

28	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor penanaman modal	28.1	Rasio daya serap tenaga kerja (PMDN/PMA):									
			PMDN	189	131	19	460	3	0,65	483	0,62	
			PMA	46	264	139	294	12	4,08	294	4,08	
		28.2	Persentase pertumbuhan realisasi investasi (PMDN/PMA):									
				PMDN	1,75	1078	733	2,5	-79	-3160,00	2,50	-3160,00
				PMA	2,25	52	272	2,55	-59	-2313,73	2,55	-2313,73
29	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor Ketenagakerjaan	29.1	Rasio penduduk yang bekerja	0,97	0,87	1	1,07	0,96	89,72	1,08	88,89	
		29.2	Angka partisipasi angkatan kerja	6,779	73,58	81	69	98,79	143,17	69	143,17	
30	Meningkatnya perlindungan sektor ketenagakerjaan	30.1	Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	86,81	82,59	71,48	88,2	43,12	48,89	25,5	169,10	
31	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas, dan daya saing sektor Perindustrian	31.1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	27,55	35,94	37,00	35,2	37,00	105,11	35,2	95,14	
		31.2	Persentase IKM yang memiliki daya saing	2,5	1,80	7,6	7,5	3,54	47,2	7,5	47,2	
32	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat	32.1	Indeks layanan infrastruktur	26,27	58,61	60,87	38,96	60,87	156,24	38,16	160	
33	Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan	33.1	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perhubungan	36,04	43,58	45,87	57,52	69,83	121,40	57,52	121,40	
34	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	34.1	Indeks Kualitas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	57,71	34,08	53,76	74,05	74,05	100	74	100,68	

35	Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan konsep tata ruang	35.1	Ketaatan terhadap RTRW	78,86	78,98	78,98	79,6	79,6	100	80,00	99,50
36	Terjaganya kualitas lingkungan hidup	36.1	Indeks Kualitas Air	16,00	18,28	28,46	38,02	36,16	95,11	40,46	89,37
		36.2	Indeks Kualitas Udara	60,00	83,3	82,29	82,02	76,82	93,68	84,46	90,95
		36.3	Indeks Tutupan Vegetasi (lahan)	34,14	42,54	83,3	56,16	42,54	75,75	58,60	72,59
37	Terwujudnya pengurangan kerentanan resiko bencana	37.1	Kelas Indeks Kapasitas Bencana	0	Sedang	Sedang (123,20)	Sedang (119)	Sedang (123,20)	103,53	Sedang	Sedang
38	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi	38.1	Indeks Demokrasi	69,75	72,17	72,17	80	77,22	96,53	75,70	102
39	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya	39.1	Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)	16	49	58	83	61	73,49	100	61
40	Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	40.1	Indeks Ketertiban Masyarakat	90	92,2	96	99	98	98,99	100	98,99
41	Meningkatnya kapasitas perempuan, perlindungan perempuan dan anak	41.1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	59,95	60,25	60,25	60,3	72,35	119,98	60,37	119,84
		41.2	Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	Madya	Madya (650)	Madya (650)	Nidya (750)	Madya (650)	86,67	Nindya (750)	86,67
42	Meningkanya kualitas layanan perhubungan	42.1	Indeks Kepuasan Layanan Perhubungan	75,99	78,95	79,02	81,09	79,95	98,59	81,08	98,61
43	Meningkatnya pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat	43.1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	84,50	80,52	78,37	80	81,60	102,00	80,00	102

44	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas	44.1	Indeks kepuasan layanan masyarakat thd layanan administrasi	Sdh	82,74	91,77	92,7	81,6	88,03	sdh	Sdh
45	Pengembangan ketrasmigrasian	45.1	Persentase Besaran Peningkatan Minat Transmigrasi	-64,62	-80	5,2	41,5	5,2	12,53	42	12,38

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Klaten Tahun 2020 (data setelah reviu Inspektorat Kabupaten Klaten)

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Sasaran Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal.

Memedomani ketentuan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pendidikan menjadi pelayanan dasar yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten. Untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah, serta untuk mewujudkan sasaran pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi masyarakat didukung dengan Pelaksanaan Pendidikan Sepanjang Hayat di Kabupaten Klaten Tahun 2020 didasarkan pada pencapaian pendekatan 6 (enam) pilar strategis, yakni: 1). Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), 2). Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, 3). Pendidikan Kecakapan Hidup (*Life-skill*), 4). Pendidikan Keaksaraan, 5). Pengarusutamaan Gender, dan 6). Peningkatan Kualitas Pendidikan. Sehingga capaian kinerja Pendidikan Sepanjang Hayat tahun 2020 merupakan gambaran keberhasilan capaian kinerja urusan pendidikan dalam mendukung pencapaian visi-misi pembangunan jangka menengah Daerah.

Adapun capaian sasaran: Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal sebagaimana Tabel 2.9

Tabel 2.9
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian Kondisi Awal RPJM	Capaian Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Persentase Sekolah Dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	43	61,05	98,28	52	98,37	189,2	55	178,85
2	Persentase Sekolah Menengah Pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	65	82,00	85,09	90	90,57	100,63	95	95,40

Sumber: Dinas Pendidikan, 2021.

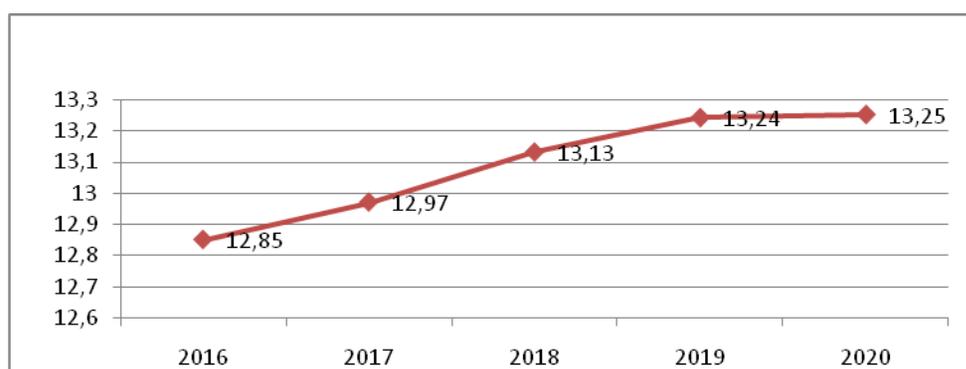
Capaian sasaran kinerja: Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal, pada tahun 2020 dengan indikator persentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (dengan catatan jumlah sekolah dasar sebanyak 738 sekolah, dan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan sebanyak 726 sekolah), dan indikator persentase Sekolah Menengah Pertama

yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan (dengan catatan jumlah Sekolah Menengah Pertama sebanyak 116 sekolah, dan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan sebanyak 105 sekolah).

Capaian sasaran kinerja: **Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal** sebagaimana tersebut di atas ditunjang beberapa indikator kinerja urusan pendidikan, diantaranya:

1) Angka Harapan Lama Sekolah

Angka harapan lama sekolah di Kabupaten Klaten mengalami peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu 2016-2020, yaitu dari sebesar 12,85 pada tahun 2016 menjadi sebesar 13,25 pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pendidikan semakin baik pada setiap jenjang pendidikan. Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 disajikan pada Gambar 2.6

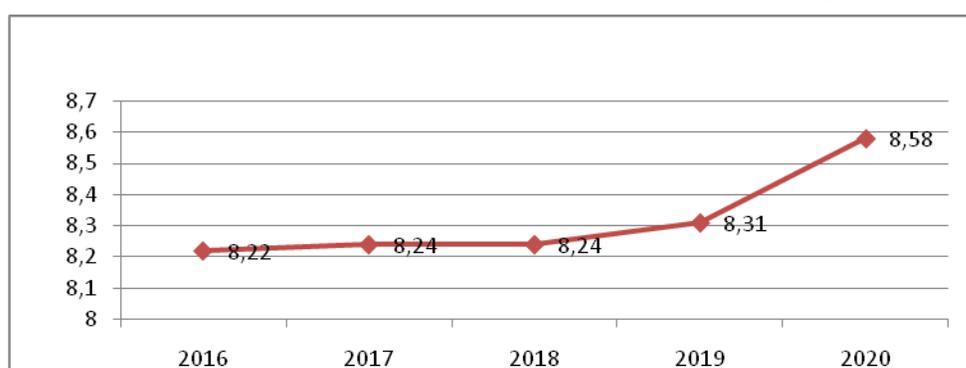


Sumber : BPS Kabupaten Klaten, 2021. Up Date Terakhir 18 Desember 2020.

Gambar 2.6 Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah Klaten Tahun 2016-2020

2) Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Klaten mengalami peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu 2016-2020, yaitu dari sebesar 8,22 pada tahun 2016 menjadi sebesar 8,58 pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa keinginan penduduk untuk memasuki jenjang pendidikan lebih tinggi semakin baik. Perkembangan Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Klaten tahun 2016-2020 disajikan pada gambar 2.7



Sumber: Sumber : BPS Kabupaten Klaten, 2021. Up Date Terakhir 18 Desember 2020.

Gambar 2.7 Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2016-2020.

Perkembangan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu Tahun 2016-2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan khususnya di dua tahun terakhir terjadi kenaikan sebesar 0,27% dari sebesar 8,31 pada tahun 2019 menjadi sebesar 8,58 pada tahun 2020, hal ini disebabkan intervensi kebijakan Pemerintah Daerah yang berfokus pada intervensi anak usia sekolah untuk mengikuti program wajib pendidikan dasar dengan pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

3) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah selama tahun 2016-2020 mengalami perkembangan. Jenjang pendidikan SD/MI/SDLB/Paket A tahun 2015 sudah mencapai 94,53%, seiring dengan perbaikan layanan pendidikan, dan pada tahun 2020 naik menjadi 96,02%. Adapun untuk jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B tumbuh dari 87,58% pada tahun 2015, dan pada Tahun 2020 menjadi 100,48%. Hal ini disebabkan karena keinginan anak usia sekolah pada jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B banyak yang bersekolah dari luar daerah serta ditunjang angka melanjutkan dan proporsi jumlah penduduk anak usia SMP/MTs/SMPLB/Paket B juga meningkat. Perkembangan APK di Kabupaten Klaten selama Tahun 2016-2020 untuk semua jenjang pendidikan disajikan pada Tabel 2.10

Tabel 2.10
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK)
di Kabupaten Klaten Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2016-2020

No	Tahun	SD/MI/SDLB/ Paket A	SMP/MTs/SMP LB/Paket B	SMA/SMK/MA/S MALB/Paket C
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2016	105,23	97,57	81,00
2	2017	97,45	90,93	-
3	2018	102,75	95,21	-
4	2019	98,66	98,46	-
5	2020	96,02	100,48	-

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2021.

Catatan: *) Mulai tahun 2017 Urusan Pendidikan Menengah menjadi kewenangan Provinsi.

4) Angka Partisipasi Murni (APM)

APM untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah selama tahun 2016-2020 mengalami perkembangan yang bersifat fluktuatif. Jenjang pendidikan SD/MI/SDLB/Paket A tahun 2019 sudah mencapai 88,37%, naik menjadi 88,54% pada tahun 2020. Jenjang SMP/MTs/SMPLB/Paket B pada tahun 2018 mencapai 64,07% menjadi 71,14% pada tahun 2020 hal ini dipicu adanya anak usia sekolah pada jenjang tertentu ingin sekolah di luar daerah, yang relatif lebih baik dalam layanan penyelenggaraan pendidikannya. Perkembangan APM di

Kabupaten Klaten untuk semua jenjang pendidikan dasar disajikan pada Tabel 2.11

Tabel 2.11
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)
di Kabupaten Klaten Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2016-2020

No	Tahun	SD /MI /SDLB/Paket A	SMP/MTs/SMPLB/
(1)	(2)	(3)	(4)
1	2016	91,26	72,77
2	2017	86,84	68,22
3	2018	90,84	64,07
4	2019	88,37	73,14
5	2020	88,54	71,14

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2021.

Berdasarkan Tabel 2.11 sebagaimana tersebut di atas, yang mendesak untuk dilakukan adalah perkembangan APM untuk semua jenjang pendidikan sangat dipengaruhi kondisi masyarakat dan layanan pendidikan pada saat-saat tertentu, mengingat Klaten diapit dua kota besar, Yogyakarta dan Solo.

5) Angka Putus Sekolah

Perkembangan angka putus sekolah (APS) selama tahun 2016-2020 untuk semua jenjang pendidikan bersifat fluktuatif. Perkembangan angka putus sekolah di Kabupaten Klaten tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.12

Tabel 2.12
Perkembangan Persentase Angka Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan
di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Uraian	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Angka Putus Sekolah Tk. Pendidikan SD/MI	%	0,03	0,04	0,03	0,02	0,01
Angka Putus Sekolah Tk. Pendidikan SMP/MTS	%	0,08	0,23	0,18	0,13	0,08
Angka Putus Sekolah Tk. Pendidikan SMA/MA)	%	0,69	0,63	0,58	0,53	0,48

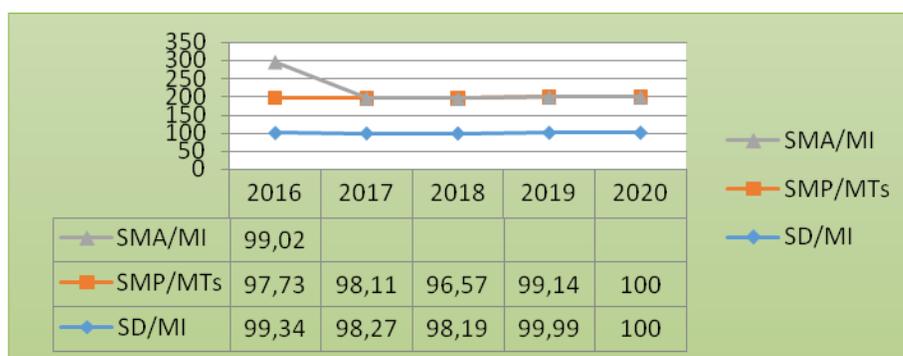
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2021.

Berdasarkan Tabel 2.12 sebagaimana tersebut di atas, dapat dilihat bahwa angka putus sekolah dua tahun terakhir mengalami penurunan baik untuk angka putus sekolah tingkat SD/MI dari tahun 2017 sebesar 0,04% menjadi 0,01% di tahun 2020. Sedangkan untuk angka putus sekolah SMP/MTS bersifat fluktuatif, dari 0,08% pada tahun 2016 menjadi 0,23% pada tahun 2017, dan secara berangsur-angsur mulai tahun 2018 turun, terakhir pada tahun 2020 menjadi 0,08%. Begitu juga dengan Angka Putus Sekolah Tk. Pendidikan SMA/MA menunjukkan trend

penurunan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebutuhan dasar bidang pendidikan dasar sudah terpenuhi dengan adanya program Pemerintah antara lain Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).

6) Angka Kelulusan (AL)

Angka kelulusan (AL) menunjukkan bobot prestasi kelulusan untuk setiap jenjang penyelenggaraan pendidikan. Adapun kondisi Angka Kelulusan (AL) untuk setiap jenjang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Klaten pada Tahun 2016-2020 bersifat fluktuatif. Perkembangan angka kelulusan tahun 2016-2020 disajikan pada gambar 2.8



Sumber: Dinas Pendidikan, 2021.

Gambar 2.8 Angka Kelulusan (AL) Tahun 2016-2020

Catatan: *) Mulai tahun 2017 urusan pendidikan menengah menjadi kewenangan Provinsi.

Berdasarkan Gambar 2.8 sebagaimana tersebut di atas dapat dilihat bahwa angka kelulusan jenjang SD/Mi mengalami kenaikan di dua tahun terakhir yaitu 99,99% di tahun 2019 naik menjadi 100% di tahun 2020. Sedangkan untuk jenjang SMP/MTS dari 97,73 % di tahun 2016 naik menjadi 100% pada tahun 2020.

7) Angka Melek Huruf

Indikator keberhasilan pembangunan urusan pendidikan ditunjukkan dengan kemampuan mengatasi angka buta huruf penduduk usia 15 tahun ke atas. Beberapa langkah nyata yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten diantaranya dengan melakukan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan.

Angka melek huruf pada penduduk usia lebih dari 15 tahun ke atas dirumuskan dengan pengertian persentase penduduk usia 15 Tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. Adapun perkembangan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Klaten tahun 2016-2020 disajikan pada Gambar 2.9



Sumber: Dinas Pendidikan, 2021.

Gambar 2.9 Angka Melek Huruf Penduduk Usia >15 Tahun ke atas di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Berdasarkan Gambar 2.9 sebagaimana tersebut di atas, angka melek huruf di Kabupaten Klaten pada tiga tahun terakhir mengalami kenaikan, dari 99,57 % di tahun 2018 menjadi 99,59 % di tahun 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa hampir seluruh penduduk Kabupaten Klaten sudah terbebas dari buta huruf.

8) Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Kurikulum Pendidikan Tahun 2013 mensyaratkan kualifikasi teknis yang semakin tinggi sehingga perlu dibarengi peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Sementara itu perkembangan Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D IV di Kabupaten Klaten tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.13

Tabel 2.13
Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D IV Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Uraian	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jenjang Pendidikan SD/ MI	%	81,99	84,16	87,67	90,32	85,63
Jenjang Pendidikan SMP/ MTs	%	91,51	60,33	91,98	94,17	94,50
Jenjang Pendidikan SMA/ MA/ SMK*)	%	97,06	Na	Na	Na	Na

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2021.

Catatan: *) Mulai tahun 2017 urusan pendidikan menengah menjadi kewenangan Provinsi.

Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV selama lima tahun terakhir (Tahun 2016-2020) guru yang memenuhi kualifikasi S1/D.IV semakin meningkat, hal ini tidak terlepas dari adanya dana tunjangan profesi guru yang sudah memiliki sertifikat profesi, dan bantuan keuangan dari Pemerintah provinsi untuk meningkatkan kapasitasnya.

Adapun data guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah di SD/MI/, SMP/MTS berkualifikasi S1/D.IV dan bersertifikat Kepala Sekolah tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.14

Tabel 2.14
Kepala Sekolah yang Memenuhi Kualifikasi SI/D IV/S2 dan Bersertifikat Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2016-2020

Uraian	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jenjang Pendidikan SD/ MI	%	98,76	98,27	99,00	99,19	99,60
Jenjang Pendidikan SMP/ MTs	%	96,78	93,55	96,92	97,10	98,52
Jenjang Pendidikan SMA/ MA/ SMK*)	%	97,53	Na	Na	Na	Na

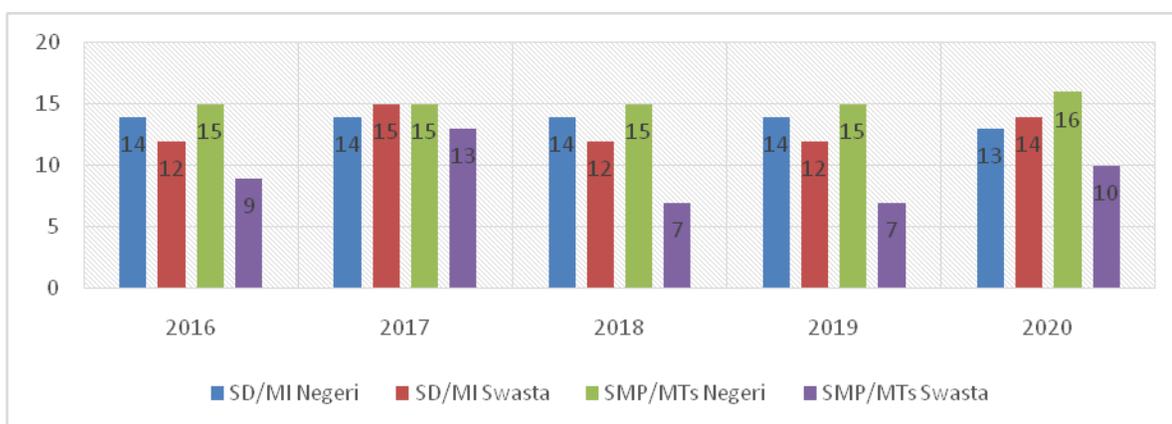
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2021.

Catatan: *) Mulai tahun 2017 urusan pendidikan menengah menjadi kewenangan Provinsi..

Berdasarkan Tabel 2.14 sebagaimana tersebut di atas, terdapat peningkatan jumlah Kepala Sekolah yang Memenuhi Kualifikasi D4/SI dan bersertifikat di jenjang pendidikan SD/MI dari 98,08% pada tahun 2015 menjadi 99,19% di tahun 2019, dan untuk jenjang pendidikan SMP/MTS dari 96,58% pada tahun 2015 menjadi 97,10% pada tahun 2019. Jabatan Kepala Sekolah di Jenjang Pendidikan SD/MI/SMP/MTS telah memenuhi kualifikasi S1/D4 sesuai standar sistem Pendidikan Nasional. Kepala Sekolah masing-masing telah tercapai 100%. Hal ini menandakan bahwa tingkat mutu guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah yang dipersyaratkan telah sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.

9) Rasio Guru Terhadap Murid

Rasio guru terhadap murid berdasarkan jenjang pendidikan pada tahun 2016-2020 disajikan pada Gambar 2.10.



Sumber: Dinas Pendidikan, 2021.

Gambar 2.10. Rasio Guru Terhadap Murid untuk Jenjang SD/MI dan SMP/MTS Tahun 2016-2020.

Berdasarkan Gambar 2.10 sebagaimana di atas Rasio Guru Terhadap Murid untuk Jenjang Pendidikan SD/MI Negeri (*Rasionya 1:14*) dan SMP/MTs Negeri (*Rasionya 1:15*) pada tahun 2016 angkanya relatif stabil hingga tahun 2019, kemudian pada tahun 2020 rasio guru terhadap murid untuk Jenjang Pendidikan SD/MI Negeri menjadi 1:13 dan untuk jenjang SMP/MTs Negeri

menjadi 1:16. Sedangkan untuk jenjang Pendidikan SD/MI swasta dan SMP/MTs swasta dari tahun 2016-2020 bersifat fluktuatif, hal ini sangat tergantung kondisi sekolah dan akibat kebijakan zonasi sekolah sangat berpengaruh terhadap situasi pilihan siswa dan sikap orang tua/wali murid untuk memilih dan menentukan sekolah yang diminati.

10) Manajemen Pelayanan Pendidikan

Manajemen Pelayanan Pendidikan diukur dengan indikator Angka melanjutkan sekolah dari Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA di Kabupaten Klaten di tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.15.

Tabel 2.15.
Perkembangan Angka Melanjutkan Sekolah dari SMP/MTs Ke SMA/MA/SMK Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Angka Melanjutkan dari SD/ MI ke SMP/ MTs	98,87	99,26	99,30	96,70	99,90
Angka Melanjutkan dari SMP/ MTs ke SMA/ MA/ SMK	92,43	88,28	95,48	97,73	92,60

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Klaten, 2021.

Berdasarkan Tabel 2.15. sebagaimana tersebut di atas, peserta didik di jenjang pendidikan SD/MI yang melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP/MTs pada tahun 2016-2020 perkembangannya bersifat fluktuatif, begitu pula untuk jenjang SMP/MTs. Hal ini mengkondisikan, bahwa angka melanjutkan sangat bersifat situasional.

11) Sarana dan Prasarana Sekolah

Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pendidikan sangat berpengaruh terhadap proses kegiatan belajar mengajar dan tentunya akan juga sangat berpengaruh terhadap capaian kualitas pendidikan di Kabupaten Klaten. Perkembangan kondisi sarana dan prasarana sekolah dalam kondisi baik selama tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.16.

Tabel 2.16.
Persentase Ruang Kelas Dalam Kondisi Baik Tahun 2016-2020

Uraian	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sekolah pendidikan SD/MI dalam kondisi baik	%	71,09	81,00	79,00	67,18	68,87
Sekolah pendidikan SMP/MTS	%	85,11	96,30	80,00	87,37	74,35

Sumber : Dinas Pendidikan, 2021.

Berdasarkan Tabel 2.16. sebagaimana tersebut di atas kondisi ruang kelas gedung sekolah masih terdapat ruang kelas dalam kondisi tidak layak meskipun persentasenya kecil, sehingga rehabilitasi ruang kelas menjadi hal mutlak yang harus dilaksanakan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait pemenuhan Pendidikan Sepanjang Hayat bagi masyarakat di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2020, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis: Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal terdiri dari 6 (enam) program, diantaranya:

1. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2. Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun;
3. Pendidikan Non Formal;
4. Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
5. Manajemen Pelayanan Pendidikan.

Permasalahan:

Urusan Pendidikan dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

- a. Belum terpenuhinya aksesibilitas sarana dan prasarana layanan pendidikan sekolah dasar dalam kondisi layak;
- b. Belum optimalnya tenaga pendidik dan kependidikan yang sesuai dengan basis kompetensi sesuai jenjang pendidikan;
- c. Terjadinya kekosongan kepala sekolah jenjang pendidikan SD Negeri, dan belum tuntasnya *regrouping* Sekolah Dasar; dan
- d. SD Negeri tidak mempunyai tenaga administrasi untuk mengelola administrasi Laporan Dana BOS dan Aset, sehingga guru terbebani dengan tugas administrasi pelaporan BOS dan Aset.

Solusi:

Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki layanan pendidikan dasar, diantaranya:

- a. Pemenuhan sarana dan prasarana layanan pendidikan, meliputi: rehab sedang/berat ruang kelas, maupun gedung sekolah, pengadaan sapsras laboratorium, ruang praktikum dan komputer;
- b. Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan dengan pelaksanaan Diklat peningkatan kapasitas guru;
- c. Pengisian Kepala Sekolah dengan Diklat penguatan bagi calon Kepala Sekolah; dan
- d. Pengusulan pengangkatan tenaga harian Lepas (THL) Pengadministrasian Umum di SD Negeri.

2. Sasaran Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Menurunnya Angka Kematian, Angka Kesakitan dan Kecacatan;
--

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa azas penyelenggaraan kesehatan berdasarkan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif, norma-norma keagamaan. Serta memperhatikan ketentuan Pasal 3, dinyatakan bahwa tujuan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan kesadaran kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomi.

Mengingat kesehatan sebagai hak dasar manusia yang harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang menyeluruh secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat. Bahwa untuk memenuhi hak, dan kebutuhan kesehatan setiap individu dan masyarakat dalam pelayanan kesehatan, serta memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada masyarakat, Pemerintah wajib menyiapkan dan/atau mengadakan kebutuhan upaya kesehatan masyarakat, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, dan pembiayaan kesehatan yang harus diwujudkan.

Berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar diantaranya Urusan Kesehatan dengan parameter aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan yang diarahkan untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan indikator meningkatnya Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang ditandai dengan peningkatan kesehatan, pendidikan, dan pendapatan masyarakat, serta berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014 urusan kewenangan daerah Kabupaten/Kota berkaitan dengan urusan kesehatan mencakup diantaranya: 1. Upaya kesehatan, 2. Sumber Daya Manusia Kesehatan, 3. Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan Minuman, dan 4. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

Adapun capaian sasaran terwujudnya Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan menurunnya angka kematian, angka kesakitan dan kecacatan sebagaimana Tabel 2.17.

Tabel 2.17.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Menurunnya Angka Kematian, Angka
Kesakitan dan Kecacatan

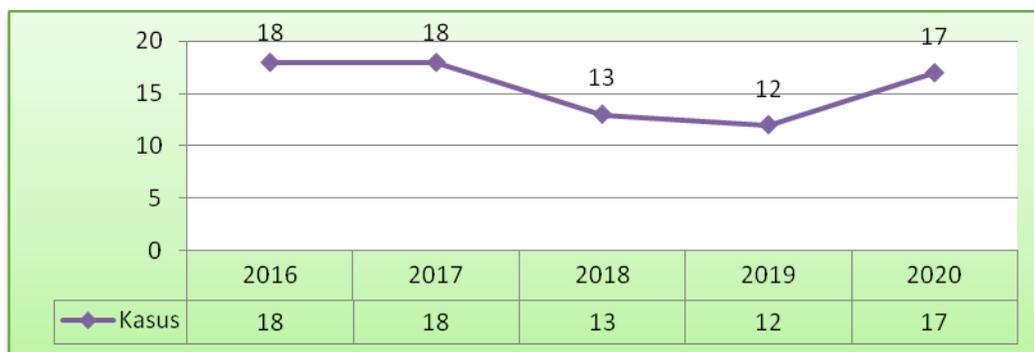
No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Kasus kematian Ibu	15	13	12	15	17	113,33	14	121,43
2	Angka Kematian Bayi	12,94	10,7	10,01	10,09	9,34	92,57	10,07	92,75
3	Angka Kematian Balita	2,99	1,9	1,59	1,63	1,52	93,25	1,61	94,41
4	Prevalensi Gizi Buruk (BB/U)	0,75	0,56	0,71	0,71	0,90	126,76	0,70	128,57

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021.

Capaian sasaran kinerja: Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan Menurunnya Angka Kematian, Angka Kesakitan dan Kecacatan, sebagaimana tersebut di atas ditunjang beberapa indikator kinerja urusan kesehatan, diantaranya:

1. Kasus Kematian Ibu Melahirkan

Perkembangan kasus kematian ibu melahirkan di Kabupaten Klaten selama Tahun 2016-2020 dapat disajikan pada Gambar 2.11.



Sumber: Dinas Kesehatan, 2021.

Gambar 2.11 Perkembangan Kasus Kematian Ibu Melahirkan di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Berdasarkan Gambar 2.11. sebagaimana tersebut di atas, kasus Kematian Ibu di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu Tahun 2016-2020 cenderung bersifat fluktuatif. Penyebab kematian ibu, di samping akibat hipertensi dan pendarahan, juga disebabkan oleh faktor-faktor non medis. Kondisi ini menggambarkan derajat kesehatan masyarakat perlu di tingkatkan terutama di wilayah-wilayah kecamatan dengan kasus kematian ibu yang tinggi. Adapun kasus kematian ibu melahirkan selama tahun 2016-2020 menurut kecamatan dan Puskesmas disajikan pada Tabel 2.18.

Tabel 2.18.
Jumlah Kasus Kematian Ibu Melahirkan Menurut Kecamatan dan Puskesmas
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Puskesmas	Kematian Ibu Melahirkan				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Prambanan	Prambanan	0	0	2	0	0
		Kebondalem Lor	0	0	0	1	0
2	Gantiwarno	Gantiwarno	0	1	0	0	1
3	Wedi	Wedi	3	0	1	0	0

No	Kecamatan	Puskesmas	Kematian Ibu Melahirkan				
			2016	2017	2018	2019	2020
4	Bayat	Bayat	0	1	1	0	0
5	Cawas	Cawas I	0	2	1	0	0
		Cawas II	0	1	1	0	0
6	Trucuk	Trucuk I	1	1	0	0	0
		Trucuk II	0	1	0	1	1
7	Kalikotes	Kalikotes	1	0	0	0	1
8	Kebonarum	Kebonarum	0	0	0	0	0
9	Jogonalan	Jogonalan I	1	1	0	2	1
		Jogonalan II	0	0	0	0	0
10	Manisrenggo	Manisrenggo	1	0	1	0	0
11	Karangnongko	Karangnongko	0	1	0	0	1
12	Ngawen	Ngawen	0	0	0	1	0
13	Ceper	Ceper	0	2	0	1	1
		Jambukulon	1	0	0	0	0
14	Pedan	Pedan	0	0	1	1	1
15	Karangdowo	Karangdowo	1	1	1	0	2
16	Juwiring	Juwiring	3	0	0	0	0
17	Wonosari	Wonosari I	0	1	1	0	1
		Wonosari II	1	0	0	2	0
18	Delanggu	Delanggu	1	1	0	0	3
19	Polanharjo	Polanharjo	0	0	1	1	0
20	Karanganom	Karanganom	0	2	1	0	0
21	Tulung	Tulung	0	0	0	0	0
		Majegan	1	0	0	0	0
22	Jatinom	Jatinom	0	0	1	1	0
		Kayumas	1	0	0	0	1
23	Kemalang	Kemalang	0	2	0	0	1
24	Klaten Selatan	Klaten Selatan	0	0	0	0	2
25	Klaten Tengah	Klaten Tengah	1	0	0	0	0
26	Klaten Utara	Klaten Utara	1	0	0	1	0
Jumlah			18	18	13	12	17

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021.

Berdasarkan Tabel 2.18 sebagaimana tersebut di atas dapat dilihat bahwa setiap tahun masih ada ibu mati karena melahirkan, hal ini disebabkan salah satunya karena hipertensi, faktor medis lainnya, dan non medis yang menyebabkan kasus kematian ibu melahirkan cukup tinggi.

2. Angka Kematian Bayi (AKB)

Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Klaten selama Tahun 2016-2020 disajikan pada gambar 2.12.



Sumber: Dinas Kesehatan, 2021.

Gambar 2. 12. Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Berdasarkan Gambar 2.12. sebagaimana tersebut di atas angka kematian bayi dalam kurun waktu tahun 2016-2020 mengalami penurunan. Penyebab Kematian bayi terbanyak adalah BBLR, Asfiksia dan kelainan kongenital. Derajat kesehatan masyarakat perlu ditingkatkan terutama di wilayah kecamatan dan Puskesmas dengan kasus kematian bayi yang tinggi.

3. Angka Kematian Balita

Perkembangan Angka Kematian Balita (AKABA) di Kabupaten Klaten selama Tahun 2016-2020 disajikan pada Gambar 2.13.



Sumber: Dinas Kesehatan, 2021.

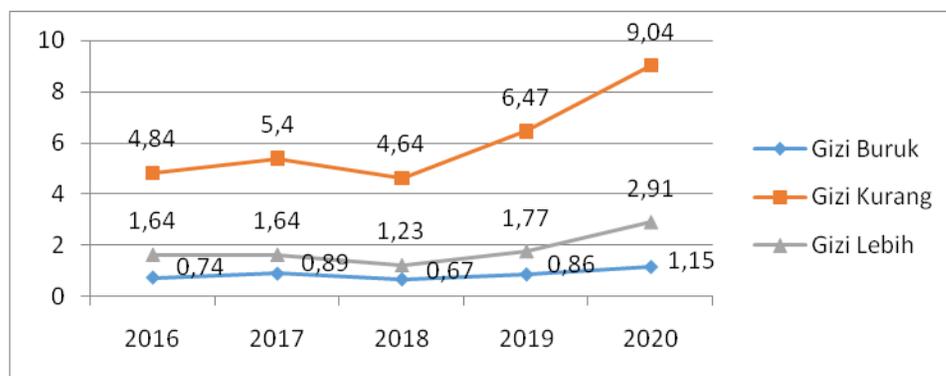
Gambar 2.13. Perkembangan Angka Kematian Balita di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Berdasarkan Gambar 2.13. sebagaimana tersebut di atas Angka Kematian Balita (AKABA) tahun 2016 sebanyak 1,8 per 1.000 KH (atau 32 kasus), tahun 2017 sebanyak 1,7 per 1.000 KH (atau 27 kasus), tahun 2018 sebanyak 1,9 per 1.000 KH (atau 30 kasus), tahun 2019 menjadi sebanyak 1,59 per 1.000 KH (atau 25 kasus), dan tahun 2020 menjadi sebanyak 1,52 per 1.000 KH (atau 24 kasus). Penyebab Kematian balita terbanyak diare, maka derajat kesehatan masyarakat perlu ditingkatkan terutama di wilayah kecamatan dan Puskesmas dengan kasus kematian balita yang tinggi.

4. Prevalensi Gizi Buruk

Balita dengan status gizi buruk masih menjadi masalah karena berbagai penyebab. Penyebab balita mengalami gizi buruk karena: asupan makan yang kurang, pola jajanan makanan yang tidak memenuhi zat gizi, pola asuh orang tua yang tidak telaten memenuhi kebutuhan zat gizi anak asuhannya.

Kasus *underweight* (gizi buruk dan gizi kurang) dengan indikator berat badan menurut umur di Kabupaten Klaten selama Tahun 2016-2020 dari hasil pengukuran serentak dapat disajikan pada Gambar 2.14.



Sumber: Dinas Kesehatan, 2021.

Gambar 2.14. Perkembangan Persentase Gizi Buruk di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Berdasarkan Gambar 2.14. sebagaimana tersebut di atas dapat dilihat perkembangan selama tahun 2016-2020 kasus gizi buruk murni tanpa penyakit penyerta bersifat fluktuatif, dan Kecamatan yang perlu mendapat perhatian (survalen) diantaranya: Delanggu, Jogonalan, Trucuk, Wonosari, Kalikotes, Prambanan, Jatinom, Gantiwarno.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2020, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis: **Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat** terdiri dari 13 (tiga belas) program, diantaranya:

1. Upaya Kesehatan Masyarakat;
2. Obat dan Perbekalan Kesehatan;
3. Pengawasan Obat dan Makanan;
4. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
5. Perbaikan Gizi Masyarakat;
6. Pengembangan Lingkungan Sehat;
7. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
8. Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
9. Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin;
10. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Prasarana Sarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya;
11. Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Prasarana dan Sarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata;
12. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia; dan
13. Pelayanan Kesehatan.

Permasalahan:

Urusan Kesehatan dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

- a. Masih diketemukannya kasus kematian ibu dan bayi;
- b. Masih ditemui adanya: Angka kesakitan demam berdarah, penemuan infeksi HIV dan AIDS yang setiap tahun cenderung meningkat, adanya ancaman pandemik flu burung, penyakit yang bersumber dari binatang diantaranya:

- demam berdarah dengue, malaria, filiarisis, serta penanganan pandemi *Covid-19*;
- c. Beberapa jenis penyakit menular/infeksi tertentu belum dapat diatasi, di sisi lain angka kesakitan dan kematian beberapa penyakit tidak menular dan degeneratif seperti Diabetes Militus (DM), kardiovaskuler dan keganasan (kanker) masih terjadi. Serta beberapa penyakit yang perlu kewaspadaan dini, diantaranya: penyakit menular tuberculosis paru, kusta penderita PB, diare, infeksi saluran pernafasan atas, HIV, kejadian luar biasa KIPI;
 - d. Kondisi gizi : Berat Badan (BB) naik, BB di bawah garis merah dan gizi buruk;
 - e. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang penyehatan lingkungan;
 - f. Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat masih rendah, diantaranya: kebiasaan cuci tangan dengan sabun, sebelum makan dan sesudah buang air besar, serta kebiasaan merokok di masyarakat masih tinggi; dan
 - g. Pelaksanaan Pembiayaan Jaminan Pelayanan Kesehatan belum optimal.

Solusi:

Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki layanan kesehatan, diantaranya:

- a. Peningkatan kualitas pendampingan bagi ibu hamil di setiap Puskesmas dan layanan kesehatan masyarakat; dan
- b. Pemetaan kasus dan faktor risiko serta skrining penyakit ibu sebelum kehamilan. Peningkatan *Antenatal Care* (ANC) terpadu, didukung kelas ibu hamil untuk menjaga kontinuitas konseling, edukasi dan informasi bagi ibu hamil.

3. Sasaran *Menurunnya Angka Kelahiran (Total Fertility Rate);*

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam menekan angka kelahiran diupayakan dengan pelayanan keluarga berencana. Adapun capaian sasaran: ***Menurunnya Angka Kelahiran (Total Fertility Rate)*** sebagaimana Tabel 2.19.

Tabel 2.19.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Menurunnya Angka Kelahiran (*Total Fertility Rate*)

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Angka Kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>) /TFR	2,2	1,91	2,1	2,12	2,1	99,06	2,1	100

Sumber: Dinsos P3A dan KB, 2021.

Jumlah kelahiran hidup pada tahun 2019 sebanyak 15.681 KH, dan pada tahun 2020 menjadi sebanyak 37.376 KH (atau turun/naik 58,05% dibanding

tahun 2019). Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam menurunkan angka kelahiran dengan melaksanakan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan indikator:

1. Jumlah Peserta KB dan KB Aktif

Jumlah peserta KB baru dalam kurun waktu Tahun 2016-2020 perkembangannya bersifat fluktuatif. Peserta KB baru pada tahun 2019 sebanyak 12.503 peserta KB baru, dan pada tahun 2020 menjadi 12.348 peserta KB baru (atau turun 1,26%). Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya kesadaran pasangan usia subur dalam menyiapkan keluarga dan kondisi sosial masyarakat. Gambaran peserta KB dan KB Aktif di Kabupaten Klaten tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.20.

Tabel 2.20.
Peserta KB dan KB Aktif di
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Tahun	Pasangan Usia Subur	Peserta KB Baru	Peserta KB Aktif
2016	201.950	26.461	158.943
2017	211.577	23.783	169.626
2018	196.717	15.565	137.109
2019	197.949	12.503	141.315
2020	195.133	12.348	138.344

Sumber : Dinas Sosial, P3A dan KB Kab. Klaten, 2021.

Berdasarkan Tabel 2.20. sebagaimana tersebut di atas, perkembangan persentase KB Baru terhadap terhadap pasangan usia subur pada tahun 2019 sebesar 6,32%, dan rasio peserta KB baru terhadap Peserta KB Aktif sebesar 8,85%, sedangkan rasio peserta KB Aktif terhadap pasangan usia subur sebesar 71,39%. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah pasangan subur menjadi 195.133 PUS, jumlah peserta KB Baru sebanyak 12.348 orang, dan jumlah peserta KB aktif menjadi sebanyak 138.344 orang.

2. Jumlah Keluarga Sejahtera

Perkembangan jumlah keluarga sejahtera tahun 2016-2020 mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun tahun 2020 jumlah keluarga Pra Sejahtera sebanyak 52.722 jiwa, jumlah Keluarga Sejahtera I (KS I) sebanyak 237.775 jiwa, dan jumlah Keluarga Sejahtera (KS) sebanyak 82.267 jiwa. Data tersebut mengindikasikan bahwa upaya Pemerintah Kabupaten Klaten dalam melaksanakan program pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat mencapai hasil yang optimal. Jumlah Pra Sejahtera, KS I, dan keluarga sejahtera tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.21.

Tabel 2.21.
Jumlah Pentahapan Keluarga Sejahtera Menurut Jenisnya
di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Kecamatan	Pra Sejahtera	KS-I	KS	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Prambanan	1.425	9.233	3.103	13.761

Kecamatan	Pra Sejahtera	KS-I	KS	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
02 Gantiwarno	2.110	8.356	2.275	12.741
03 Wedi	1.666	11.062	3.680	16.408
04 Bayat	5.643	8.412	3.184	17.239
05 Cawas	2.689	12.152	4.028	18.869
06 Trucuk	4.728	13.413	4.339	22.480
07 Kalikotes	894	6.806	2.402	10.102
08 Kebonarum	369	3.946	1.203	5.518
09 Jogonalan	1.812	10.835	3.520	16.167
10 Manisrenggo	1.751	7.922	3.490	13.163
11 Karangnongko	2.002	7.311	2.116	11.429
12 Ngawen	1.168	9.239	4.163	14.570
13 Ceper	1.222	14.078	5.268	20.568
14 Pedan	1.394	9.534	3.433	14.361
15 Karangdowo	3.135	9.060	2.603	14.798
16 Juwiring	1.740	10.019	3.783	15.542
17 Wonosari	2.956	10.206	3.682	16.844
18 Delanggu	475	7.938	2.811	11.224
19 Polanharjo	1.142	8.421	2.774	12.337
20 Karanganom	1.343	9.444	3.305	14.092
21 Tulung	2.588	9.628	2.987	15.203
22 Jatinom	4.128	8.631	3.170	15.929
23 Kemalang	3.239	6.341	2.468	12.048
24 Klaten Selatan	1.142	8.445	2.889	12.476
25 Klaten Tengah	945	8.325	2.426	11.696
26 Klaten Utara	1.016	8.998	3.165	13.179
2020	52.722	237.755	82.267	372.744
2019	52.682	237.828	81.747	372.261
2018	52.688	238.374	81.688	372.750
2017	80.935	192.994	114.736	388.665
2016	67.400	239.583	83.239	390.222

Sumber : Dinas Sosial, P3AKB Kab. Klaten, 2021.

Berdasarkan Tabel 2.21. sebagaimana tersebut di atas, pada tahun 2019 jumlah keluarga Pra Sejahtera sebanyak 52.682 jiwa, jumlah Keluarga Sejahtera I (KS I) sebanyak 237.828 jiwa, dan jumlah Keluarga Sejahtera (KS) sebanyak 81.747 jiwa. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah keluarga Pra Sejahtera sebanyak 52.722 jiwa, jumlah Keluarga Sejahtera I (KS I) sebanyak 237.775 jiwa, dan jumlah Keluarga Sejahtera (KS) sebanyak 82.267 jiwa.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat untuk menurunkan angka kelahiran. Pada tahun 2020, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis: **Menurunnya Angka Kelahiran (Total Fertility Rate)**, diantaranya:

1. Keluarga Berencana;

2. Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja;
3. Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri;
4. Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat;
5. Pelayanan Kontrasepsi;
6. Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak;
7. Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR;
8. Pengendalian dan Pengawasan Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; dan
9. Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga.

Permasalahan:

Urusan keluarga berencana untuk menekan angka melahirkan dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

1. Tingginya angka *drop out* KB; dan
2. Banyak Pasangan Usia Subur.

Solusi:

Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki layanan keluarga berencana, diantaranya:

- a. Peningkatan kualitas pendampingan bagi masyarakat, terutama pasangan usia subur; dan
- b. Pemetaan kasus dan faktor risiko serta skrining sosial untuk menjaga kontinuitas konseling, edukasi dan penanganan keluarga berencana.

4. Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Pelayanan Kerumahsakitannya oleh Masyarakat dan Menurunnya Angka Kematian di Rumah Sakit;

Kesehatan sebagai hak dasar manusia yang harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang menyeluruh secara terarah, terpadu dan berkesinambungan, adil dan merata, serta aman, berkualitas, dan terjangkau oleh masyarakat. Bahwa untuk memenuhi hak, dan kebutuhan kesehatan setiap individu dan masyarakat dalam pelayanan kesehatan, serta memberikan perlindungan serta kepastian hukum kepada masyarakat, Pemerintah wajib menyiapkan dan/atau mengadakan kebutuhan upaya kesehatan masyarakat, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, dan pembiayaan kesehatan yang harus diwujudkan.

Oleh karena itu Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pemanfaatan pelayanan Kerumahsakitannya oleh masyarakat dan menurunnya angka kematian di Rumah Sakit didorong dengan mengutamakan dan mengoptimalkan pelayanan

Rumah Sakit Daerah (RSD) didukung dengan kinerja Puskesmas untuk menekan angka kematian.

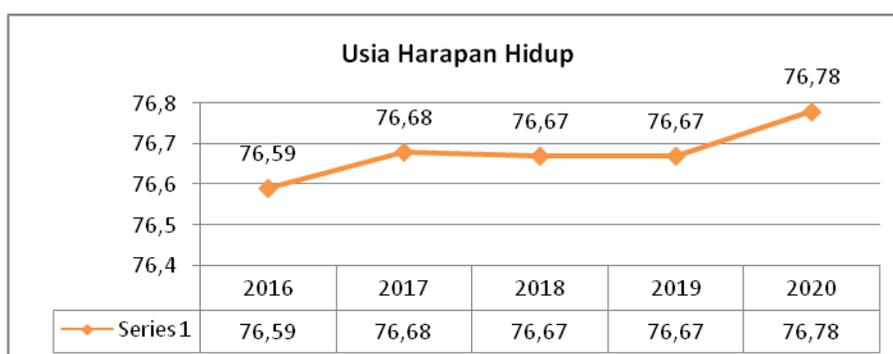
Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Pemanfaatan Pelayanan Kerumahsakitian oleh Masyarakat dan Menurunnya Angka Kematian di Rumah Sakit** sebagaimana Tabel 2.22.

Tabel 2.22.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Pemanfaatan Pelayanan Kerumahsakitian oleh Masyarakat dan Menurunnya
Angka Kematian di Rumah Sakit

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Usia Harapan Hidup	76,59	76,77	76,67	76,62	76,78	100,21	76,62	100,21

Sumber: BPS, 2021 (diolah).

Usia Harapan Hidup (UHH) dalam arti usia hidup panjang dan sehat, di samping sebagai cerminan terhadap ukuran peningkatan kesejahteraan penduduk, juga menjadi indikator meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Selama kurun waktu 2016-2020 UHH cenderung mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan antara lain oleh semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap budaya hidup bersih dan sehat, termasuk upaya pemberian asupan yang semakin berkualitas terhadap anak usia dini. Perkembangan UHH di Kabupaten Klaten tahun 2016-2020 disajikan pada Gambar 2.15.

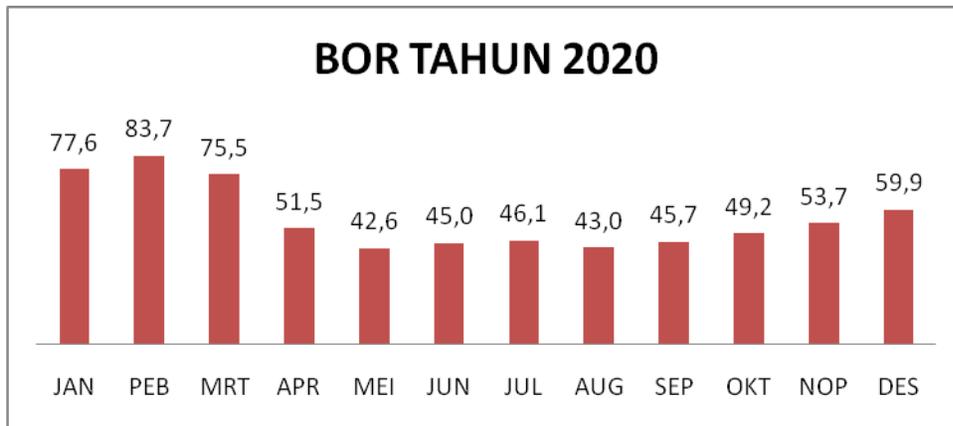


Sumber : BPS, 2021. Update Terakhir 18 Desember 2020.

Gambar 2.15 Perkembangan Usia Harapan Hidup Masyarakat di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

1) Cakupan Pelayanan RSUD Bagas Waras

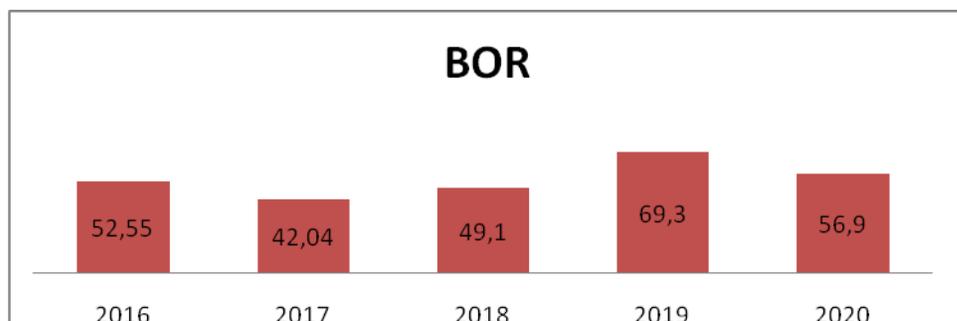
Kinerja pelayanan RSD Bagas Waras diukur dari indikator BOR (Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu). BOR Tahun 2020 adalah 56,9 % dengan jumlah per bulan disajikan pada Gambar 2.16.



Sumber : RSD Bagas Waras Kab. Klaten, 2021

Gambar 2.16. Perkembangan Indikator BOR Bulanan (Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu)

Disamping perkembangan Indikator BOR sebagaimana tersebut di atas, jumlah kunjungan pasien pada tahun tercatat sebanyak 110.810 jiwa dengan perincian: 1). Rata-rata kunjungan rawat inap sebanyak 8305 orang/Tahun (atau rata-rata 23 orang/hari), 2). Rata-rata kunjungan rawat jalan sebanyak 90.627 orang/Tahun (atau rata-rata 248 orang/hari), dan 3). Rata-rata kunjungan IGD sebanyak 11.878 orang/Tahun (atau rata-rata 33 orang/hari). Adapun kinerja pelayanan RSD Bagas Waras dapat dilihat pada Gambar 2.17.



Sumber : RSUD Bagaswaras, 2021

Gambar 2.17. Perkembangan Indikator BOR Tahunan (%) (Persentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu).

Berdasar pada Gambar 2.16. dan Gambar 2.17. indikator BOR di atas terlihat bahwa pada Tahun 2020 terjadi Penurunan Persentase Pemakaian Tempat Tidur dibanding Tahun 2019 sebesar 12,4.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2020, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis: **Meningkatnya Pemanfaatan Pelayanan Kerumahsakitannya Oleh Masyarakat dan Menurunnya Angka Kematian di Rumah Sakit** dengan program utama Pelayanan Kesehatan, dengan didukung beberapa program, diantaranya:

1. Peningkatan Pelayanan Kesehatan; dan
2. Manajemen, Informasi dan Regulasi Kesehatan.

Permasalahan:

Urusan Kesehatan dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

1. Angka kesakitan demam berdarah masih ditemui, penemuan infeksi HIV dan AIDS tiap tahun cenderung meningkat, serta adanya ancaman penyakit yang bersumber dari binatang diantaranya:
 - a. Demam berdarah dengue .
 - b. Malaria
 - Filariatis
2. Untuk jenis penyakit menular/infeksi tertentu belum dapat diatasi, di sisi lain angka kesakitan dan kematian beberapa penyakit tidak menular dan degeneratif seperti *Diabetes Militus* (DM), kardiovaskuler dan keganasan (kanker). Serta beberapa penyakit yang perlu kewaspadaan dini, diantaranya:
 - a. Penyakit menular Tuberculosis paru
 - b. Kusta penderita PB
 - c. Diare
 - d. Infeksi Saluran Pernapasan atas
 - e. HIV
 - f. Kejadian luar biasa KIPI
 - g. Pencegahan Stunting
 - h. Pelaksanaan Pembiayaan Jaminan Pelayanan Kesehatan belum optimal.

Solusi:

Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki layanan kesehatan, diantaranya:

- a. Peningkatan kualitas pendampingan bagi ibu hamil di setiap Puskesmas dan layanan kesehatan masyarakat;
- b. Pemetaan kasus dan faktor resiko serta skrining penyakit ibu sebelum kehamilan. Peningkatan *Antenatal Care* (ANC) terpadu, didukung kelas ibu hamil untuk menjaga kontinuitas konseling, edukasi dan informasi bagi ibu hamil

5. Sasaran Meningkatnya Upaya Pencegahan Permasalahan Sosial dan Aksesibilitas PMKS dalam Memperoleh Pelayanan dan Rehabilitasi yang Berperspektif HAM;

Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien bisanya dicerminkan ke dalam 3 (tiga) pilar yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Sehingga kelihatan, sejauh mana faktor kontribusi masyarakat turut andil menyelesaikan masalah agar ruang demokrasi tumbuh dan berkembang. Ukuran Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien diukur pada upaya pencegahan permasalahan dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM, sehingga sasaran strategis yang hendak dicapai dapat diukur.

Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Upaya Pencegahan Permasalahan Sosial dan Aksesibilitas PMKS** dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM sebagaimana Tabel 2.23.

Tabel 2.23.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Upaya Pencegahan Permasalahan Sosial dan Aksesibilitas PMKS dalam Memperoleh
Pelayanan dan Rehabilitasi yang Berperspektif HAM

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	35,52	70,66	62,26	87	98,4	113,10	89	110,56
2	Persentase penguatan kapasitas PSKS	90	96	96	99	96	96,97	100	96,00
3	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	13,9	14,32	13,09	13	12,35	95,00	12,9	95,74

Sumber: Dinas Sosial, P3A dan KB, 2021.

1. Persentase Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) merupakan salah satu fokus pembangunan daerah di Kabupaten Klaten hingga saat ini. Program-kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka peningkatan perlindungan sosial belum sepenuhnya dapat mengatasi permasalahan PMKS secara keseluruhan, namun telah menunjukkan perkembangan ke arah yang positif. Hal ini ditunjukkan kinerja layanan penanganan PMKS yang memperoleh bantuan, dan persentase PMKS skala Kabupaten yang menerima bantuan program pemberdayaan masyarakat melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE) atau kelompok ekonomi Sejenis Lainnya. Perkembangan PMKS yang memperoleh bantuan dapat tahun 2016–2020 disajikan pada Gambar 2.18.



Sumber: Dinas Sosial P3A dan KB, 2021.

Gambar 2.18. PMKS yang Memperoleh Bantuan Tahun 2016–2020

Berdasarkan Gambar 2.18 sebagaimana tersebut di atas dari tahun 2016-2018 mengalami kenaikan yang drastis kemudian menurun menjadi 62,26% di tahun 2019, namun mengalami kenaikan lagi pada tahun 2020 menjadi 90,32%. Penanganan PMKS selama ini diupayakan dukungan dan kepedulian dari berbagai pihak untuk mengurangi angka PMKS, khususnya peran Pemerintah Daerah, keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun melalui kelompok-kelompok masyarakat dapat membuahkan hasil yang maksimal, terutama bagi keluarga rawan sosial yang jumlahnya relatif sudah semakin berkurang, namun demikian tetap harus mendapatkan perhatian yang memadai dari semua pihak.

2. Persentase Penguatan Kapasitas PSKS

Sumber daya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam turut serta penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) selama ini telah memberikan kontribusi positif. Tercatat sebanyak 11 (sebelas) PSKS yang telah turut andil dalam penanganan 25 (dua puluh lima) Jenis PMKS di Klaten. 11 (sebelas) PSKS tersebut, diantaranya: 1) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), 2) Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), 3) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), 4) Karangtaruna, 5) IPSM, 6) PLKSAI, 7) Lembaga Konsultasi Kelembagaan Kesejahteraan Sosial (LKKKS), 8) PPDK, 9) Tim Advokasi Disabilitas, 10) Taruna Siaga Bencana (Tagana), dan 11) Komda Lansia.

Dari sebanyak 11 (sebelas) PSKS yang telah diberdayakan sebanyak 96% telah mampu secara mandiri mengembangkan kapasitasnya dalam membantu penanganan PMKS.

3. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Dari 26 (dua puluh enam) jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang teridentifikasi selama tahun 2020 menjadi sebanyak 172.857 PMKS, yang terdiri dari: fakir miskin sebanyak 144.140 orang, lanjut usia terlantar sebanyak 10.433 orang, dan perempuan rawan sosial ekonomi sebanyak 4.561 orang.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait peningkatan kualitas derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2020, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis: **Meningkatnya Upaya Pencegahan Permasalahan Sosial dan Aksesibilitas PMKS dalam Memperoleh Pelayanan dan Rehabilitasi yang Berperspektif HAM**, diantaranya:

1. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;
2. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
3. Pemberdayaan Fakir Miskin, Komonitas Adat Terpencil (KAT) dan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial; dan
4. Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, Penyakit Lainnya).

Permasalahan:

Urusan Sosial dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

- a. Masih banyaknya masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang belum terselesaikan;
- b. Meningkatnya kasus pengguna Narkoba, Penyakit Menular Seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS;
- c. Banyaknya Eks. Penyandang Penyakit Sosial (Gepeng) yang dibuang/dilepas dari daerah lain; dan
- d. Minimnya sarana dan prasarana Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial.

Solusi:

Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki layanan sosial, diantaranya:

- Peningkatan kualitas pendampingan bagi petugas sosial dan layanan sosial masyarakat;
- Pemetaan kasus dan faktor risiko serta skrining sosial untuk menjaga kontinuitas konseling, edukasi dan penanganan Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Eks. Penyandang Penyakit Sosial;
- Penguatan Posyandu Remaja untuk mencegah penggunaan Narkoba, Penyakit Menular Seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS; dan
- Peningkatan sarana dan prasarana Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial.

6. Sasaran Meningkatkan Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga;

Lembaga atau organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Klaten meliputi: (a) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI); (b) Organisasi Kemasyarakatan Pemuda; (c) Lembaga Sosial Pemuda, Lembaga kepemudaan yang umumnya berbentuk Yayasan; (d) Organisasi Pemuda Partai Politik; (e) Organisasi Kemahasiswaan; (f) Praja Muda Karana (Pramuka); (g) Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) tingkat SLTA; (h) Karang Taruna; (i) Organisasi Pemuda Kedaerahan; (j) Lembaga Pemuda Profesi; (k) Perkumpulan Pemuda di bidang Seni; (l) Klub Ilmuwan Muda; dan (m) Lembaga Pemuda Pencinta Alam (n) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Lembaga-lembaga tersebut sebagian besar secara organisasi 84 berjalan namun kualitas dan kapasitasnya masih rendah, sehingga masih perlu adanya pembinaan secara simultan oleh pihak-pihak yang terkait.

Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga** sebagaimana Tabel 2.24

Tabel 2.24
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda	5	12	12	10	55,71	557,1	60	92,85
2	Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga	5	5	5	5	8,26	165,2	30	27,53

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, 2021.

Berdasarkan Tabel 2.24 sebagaimana tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2019 jumlah prestasi pemuda sebanyak 31 penghargaan, dan pada tahun 2020 bertambah menjadi sebanyak 70 penghargaan. Sedangkan jumlah prestasi olahraga pada tahun 2019 sebanyak 111 penghargaan, dan pada tahun 2020 mendapat 121 penghargaan.

Perkembangan jumlah organisasi kepemudaan dan jumlah organisasi olahraga selama lima tahun terakhir (tahun 2016-2020) jumlahnya relatif stabil, hanya saja kegiatan keolahragaan yang khusus diperuntukkan bagi penyandang disabilitas belum banyak. Jumlah klub/cabang olahraga mengalami penurunan, hal ini menunjukkan pembinaan terhadap klub/cabang olahraga belum optimal. Sedangkan jumlah gedung olah raga sudah cukup merata disetiap kecamatan, namun yang memenuhi standar sarana dan prasarana gedung olahraga baru ada (2) dua yaitu GOR Gelar Sena dan Stadion Trikoyo.

Perkembangannya kepemudaan dan olahraga dapat dilihat pada Tabel 2.25

Tabel 2.25
Perkembangan Kepemudaan dan Olahraga
di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Jml klub/cabang olahraga	Cabang	31	31	31	31	31
2.	Jml gedung Olahraga Tk. Kecamatan	Gedung	26	26	26	26	26
3.	Jml Organisasi Pemuda	Organisasi	29	29	29	29	25
4.	Jml Organisasi Olahraga	Organisasi	35	35	35	35	35

Sumber : Disparbudpora Kabupaten Klaten, 2021.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait peningkatan kualitas pemuda dan olahraga. Pada tahun 2020, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis: **Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga**, diantaranya:

1. Peningkatan Peran Serta Kepemudaan;
2. Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda;
3. Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba;
4. Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga; dan
5. Pembinaan Pemuda dan Olahraga.

Permasalahan:

Peningkatan kualitas pemuda dan prestasi olahraga dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

- a. Program kepemudaan pemerintah kurang menyentuh kebutuhan usia produktif;
- b. Jiwa kewirausahaan pemuda masih rendah; dan
- c. Rendahnya prestasi olahraga, karena minimnya pembinaan dan penghargaan bagi atlet berprestasi.

Solusi:

Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki peningkatan kualitas pemuda dan prestasi olahraga, diantaranya:

- a. Peningkatan kualitas pendampingan bagi pemuda, sesuai dengan dinamika yang berkembang; dan
- b. Pemberian penghargaan yang sepadan bagi atlet dan pemuda yang berprestasi.

7. Sasaran *Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan Benda Cagar Budaya.*

Upaya Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya dengan melakukan berbagai event dan baluran budaya daerah. Langkah ini diharapkan akan memperkuat daya saing daerah melalui seni dan budaya. Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan Benda Cagar Budaya** sebagaimana Tabel 2.26.

Tabel 2.26.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan Benda Cagar Budaya

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya	5	3,2	12	6	-75	-1250	6	-1250
2	Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	7	14,3	5	10	100	1000	10	1000

Sumber : Disparbudpora Kabupaten Klaten, 2021.

1. Penyelenggaraan Seni dan Budaya

Perkembangan jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya serta sarana penyelenggaraan seni dan budaya selama tahun 2016-2020 dapat disajikan pada Tabel 2.27.

Tabel 2.27.

Jumlah Penyelenggaraan Seni dan Budaya
di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan Budaya	kegiatan	52	52	52	28	7
2	Jumlah sarana Penyelenggaraan seni dan Budaya	Tempat	12	12	12	12	12

Sumber : Disparbudpora Kab. Klaten, 2021.

Promosi, pengembangan dan pembinaan seni budaya daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dengan pengiriman Tim kesenian Kabupaten ke TMII, ke Provinsi Jawa Tengah dan beberapa kabupaten lain. Begitu juga dengan pemberian bantuan keuangan kepada sanggar-sanggar kesenian yang ada di Kabupaten Klaten semakin intensif.

Upaya untuk perlindungan dan pelestarian seni budaya daerah akan didaftarkan melalui HAKI (Hak Atas Kepemilikan Intelektual), diantaranya: a)

Lurik ATBM; b) Tari Lurik Payung; dan c) Tari Lurik Asri. Begitu juga dengan pelestarian dan penggunaan bahasa Jawa dialek Yogyakarta-Surakarta yang diimplementasikan dalam bentuk lomba dongeng Bahasa Jawa, Lomba Dalang Muda, dan mewajibkan penggunaan bahasa Jawa halus setiap hari Kamis di semua OPD Kabupaten Klaten belum efektif dilaksanakan.

2. Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan.

Selama tahun 2016-2020 perkembangan jumlah cagar budaya yang dilestarikan di Kabupaten Klaten tidak ada perubahan. Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan di Kabupaten Klaten pada Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.28.

Tabel 2.28.
Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan
di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah Candi Purbakala	Jumlah	8	8	8	8	8
2	Jumlah Makam	Jumlah	4	4	4	4	4
3	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	buah	0	0	0	0	34

Sumber : *Disparbudpora Kabupaten Klaten, 2021.*

Berdasarkan Tabel 2.28. sebagaimana tersebut di atas, jumlah cagar budaya yang dilestarikan selama tahun 2016-2020 mengalami perkembangan, sebab penambahan maupun pengurangan cagar budaya memerlukan verifikasi dari Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Budaya dan Pariwisata serta UNESCO.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait *Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya.* Pada tahun 2020, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya, diantaranya:

1. Pengelolaan Kekayaan Budaya;
2. Pengembangan Nilai Budaya;
3. Pengelolaan Keragaman Budaya: dan
4. Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya.

Permasalahan:

Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya dengan permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

- a. Kekayaan, nilai dan keberagaman budaya yang berkembang apabila tidak dirawat dan dipelihara dengan baik akan mengakibatkan *culture lag* (kemandegan budaya), dan menjadi ancaman desintegrasi bangsa;

- b. Terbatasnya pengetahuan tentang sejarah, seni budaya dan tradisi sehingga penerapan nilai luhur budaya Jawa semakin berkurang;
- c. Belum terwadahnya para pelaku/pekerja seni dalam berekspresi mementaskan hasil karyanya;
- d. Belum ditetapkannya icon seni budaya asli Kabupaten Klaten;
- e. Lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran cagar budaya; dan
- f. Banyak benda yang diduga sebagai cagar budaya yang belum teridentifikasi untuk dilestarikan.

Solusi:

Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya, diantaranya:

- a. Peningkatan kualitas pendampingan bagi pamong budaya, sesuai dengan dinamika yang berkembang;
- b. Pemetaan kasus dan faktor resiko serta skrining sosial untuk menjaga kontinuitas konseling, edukasi untuk pengembangan dan pengelolaan budaya; dan
- c. Pemberian penghargaan yang sepadan bagi pelaku seni dan budaya yang berprestasi.

8. Sasaran *Meningkatnya Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan;*

Upaya Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan kunjungan masyarakat ke perpustakaan dengan melakukan berbagai event daerah. Langkah ini diharapkan akan meningkatkan budaya baca masyarakat. Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan** disajikan pada Tabel 2.29.

Tabel 2.29.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Persentase Kenaikan kunjungan masyarakat	4	65,79	22,19	5	-15,13	-302,6	5	-302,55

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip, 2021.

Pada Tahun 2020 jumlah perpustakaan desa sebanyak 43 unit dan perpustakaan kelurahan sebanyak 2 unit. Layanan perpustakaan keliling sebanyak 5 unit yang melayani 26 kecamatan di Kabupaten Klaten, secara bergilir sesuai jadwal yang ditetapkan. Terdapat juga layanan perpustakaan keliling dengan 5 unit sepeda motor untuk *merolling* buku pada daerah yang tidak terjangkau bus keliling. Upaya ini dilakukan untuk mendukung pencapaian peningkatan minat

baca masyarakat. Adapun perkembangan pengelolaan perpustakaan di Kabupaten Klaten tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.30.

Tabel 2.30.
Perkembangan Jumlah Pengunjung Perpustakaan
di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah koleksi perpustakaan	Judul	43.979	44.687	45.362	49.786	49.786
2	Jumlah pengunjung perpustakaan	Orang	40.003	41.225	68.346	83.511	70.878

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kab. Klaten, 2021.

Berdasarkan Tabel 2.30. sebagaimana tersebut di atas, jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2019 sebanyak 83.511 orang, dan pada tahun 2020 menjadi sebanyak 70.878 orang (atau turun -15,13%). Hal ini disebabkan karena Pandemi Covid-19, dimana perpustakaan keliling dan kegiatan *car free day* tidak bisa operasional kegiatan, padahal dari sini biasanya masyarakat memanfaatkan jasa pelayanan perpustakaan. Perkembangan jumlah perpustakaan desa selama tahun 2016–2020 disajikan pada Tabel 2.31.

Tabel 2.31.
Perkembangan Jumlah Perpustakaan Desa
di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

NO	Tahun	Jumlah Perpustakaan
(1)	(2)	(3)
1	2016	44
2	2017	45
3	2018	45
4	2019	45
5	2020	45

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kab. Klaten, 2021.

Berdasarkan Tabel 2.31. sebagaimana tersebut di atas, perkembangan lima tahun terakhir (tahun 2016-2020) bahwa terdapat peningkatan jumlah perpustakaan yang didirikan di desa-desa setiap tahunnya. Namun demikian jumlah perpustakaan desa sampai dengan tahun terakhir hanya sejumlah 45 desa dari 391 desa (atau baru 11,50% dari jumlah desa).

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait upaya peningkatan jumlah pengunjung perpustakaan. Pada tahun 2020, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis: **Meningkatnya Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan** dengan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

Permasalahan:

Permasalahan yang dihadapi untuk meningkatkan kunjungan masyarakat ke Perpustakaan, diantaranya:

- a. Terbatasnya buku literatur yang diminati/dibutuhkan pengunjung; dan
- b. Kurang representatifnya ruang baca, sarana dan prasarana perpustakaan.

Solusi:

Solusi yang bisa dilakukan untuk memperbaiki peningkatan pengunjung perpustakaan, diantaranya:

- Peningkatan kualitas pengelola perpustakaan, sesuai dengan dinamika yang berkembang;
- Menghimpun buku-buku masyarakat yang memiliki nilai untuk dikelola sebagai museum buku; dan
- Menciptakan lingkungan perpustakaan yang representatif.

9. Sasaran *Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah;*

Ukuran tata kelola pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien diukur dari tingkat profesionalisme aparatur Pemerintah daerah, sejauh mana data dan informasi dipakai sebagai *Road Map* reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Tata kelola pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien tercermin ke dalam 3 (tiga) pilar yaitu: akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Sehingga akan terlihat sejauh mana faktor kontribusi masyarakat turut andil menyelesaikan masalah agar ruang demokrasi tumbuh dan berkembang.

Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah** sebagaimana Tabel 2.32.

Tabel 2.32.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Indeks Profesionalitas ASN	-	74	77,55	87,36	78,06	89,35	87,36	89,35

Sumber: Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah, 2021.

*) Catatan: Kondisi awal belum terisi karena pengisian Indeks Profesionalitas ASN dimulai tahun 2017.

Tuntutan profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan perwujudan akuntabilitas kinerja Pemerintah sebagai kewajiban Pemerintah yang harus diwujudkan untuk mempertanggung-jawaban mandat yang telah diberikan dalam mengelola urusan penyelenggaraan Pemerintah. Capaian Indeks Profesionalitas ASN tahun 2020 merupakan cerminan sejauh mana integritas ASN dalam menjalankan mandat. Capaian Indeks Profesionalitas ASN dapat disajikan pada Tabel 2.33.

Tabel 2.33.
Capaian Indeks Profesionalitas ASN

IPP	Unsur				Jumlah Nilai IPP
	Kualifikasi	Kompetensi	Kinerja	Disiplin	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai	12,1	36,05	25	4,91	78,06

Sumber: BKPPD Kabupaten Klaten, 2021.

Capaian kinerja sebagaimana Tabel 2.33. di atas merupakan hasil dari penilaian berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN) diperoleh hasil, bahwa pada tahun 2020 nilai IPP mencapai 78,06 dengan (kategori tinggi). Indeks Profesionalitas ASN ini ditunjang dari unsur:

a. Kualifikasi

Dimensi Kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS (Pegawai Negeri Sipil) dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah, dan diperhitungkan sebesar 25% dari keseluruhan Pengukuran. Pada tahun 2019 jumlah ASN sebanyak 9877 orang, dengan perincian yang berpendidikan: a) Jenjang SD/MI sebanyak 63 orang (atau 0,64%), b) Jenjang SMP/MTS sebanyak 226 orang (atau 2,29%), c) Jenjang SMA/MA/SMK sebanyak 1.531 orang (atau 15,50%), d) Jenjang D3 sebanyak 1.610 orang (atau 16,30%), e) Jenjang S1 sebanyak 5.884 orang (atau 59,57%), dan f) Jenjang S2 sebanyak 563 orang (atau 5,70%). Sedangkan pada tahun 2020 jumlah ASN sebanyak 8.990 orang dengan perincian yang berpendidikan: a) Jenjang SD/MI sebanyak 53 orang (atau 0,59%), b) Jenjang SMP/MTS sebanyak 202 orang (atau 2,25%), c) Jenjang SMA/MA/SMK sebanyak 1.339 orang (atau 14,89%), d) Jenjang D3 sebanyak 1.403 orang (atau 15,61%), e) Jenjang S1 sebanyak 5.443 orang (atau 60,55%), dan f) Jenjang S2 sebanyak 550 orang (atau 6,12%).

b. Kompetensi Dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan, dan diperhitungkan sebesar 36% (empat puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran. Indikator yang digunakan yaitu riwayat pengembangan kompetensi yang terdiri atas: a. Diklat Kepemimpinan; b. Diklat Fungsional; c. Diklat Teknis; dan d. Seminar/Workshop/Magang/Kursus/sejenisnya. Kondisi jumlah pegawai Kabupaten Klaten yang berjumlah 9.877 ASN pada tahun 2019 yang mengikuti: Diklat Teknis sesuai Tupoksi sebanyak 353 orang, Diklat Teknis Fungsional sebanyak 63 orang dan Bimbingan Teknis sebanyak 56 orang. Atau dengan kata lain, jumlah ASN yang Diklat dan BinteK hanya berkisar 4,78%. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah ASN sebanyak 8.990 orang, yang mengikuti: Diklat Teknis sesuai Tupoksi sebanyak 20 orang, Diklat Teknis Fungsional sebanyak 550 orang (atau dengan kata lain, jumlah ASN yang Diklat dan BinteK hanya berkisar 56,4%). Hal ini menandakan masih diperlukan peningkatan sumber daya aparatur agar kinerja ASN meningkat.

c. Kinerja

Dimensi Kinerja, menurut Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 8 Tahun 2019 digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai

penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS, dan diperhitungkan sebesar 25% (tiga puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran.

d. Disiplin

Hukuman disiplin yang sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (5) Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 8 Tahun 2019 yaitu yang telah mempunyai keputusan final dan dihitung dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2019 jumlah ASN yang melanggar disiplin sebanyak 10 (sepuluh) ASN, sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 10 kasus pelanggaran disiplin.

Program yang dilaksanakan pada tahun 2020 untuk sasaran strategis: *Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah* terdiri dari 2 (dua) program, diantaranya:

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; dan
2. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.

Permasalahan:

- a. Belum semua Pejabat Struktural mengikuti Diklat Struktural sesuai jenjangnya untuk tahun 2020 tidak ada pengiriman Diklatpim (Diklat Struktural) karena adanya pandemic *Covid-19*;
- b. Belum terisinya seluruh kotak jabatan (13%);
- c. Masih dalam kategori sedang nilai IP ASN (78,06);
- d. Belum optimalnya update data Kepegawaian (20%); dan
- e. Belum optimalnya pengembangan aparatur (4%).

Solusi:

- a. Meningkatkan koordinasi di semua lini untuk meningkatkan kapasitas ASN; dan
- b. Membangun basis data terpadu, untuk mempercepat terwujudnya ASN yang berintegritas dan kompetitif.

10. Sasaran <i>Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah</i>
--

Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Klaten diukur Opini BPK terhadap LKPD. Opini BPK terhadap LKPD merupakan penilaian atas kinerja keuangan daerah yang dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk menilai sejauh mana akuntabilitas dan kinerja keuangan Pemerintah daerah telah dilaksanakan dengan baik. Dasar penilaian BPK berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Badan Pemeriksa keuangan, berdasarkan ketentuan ini pemeriksaan dilakukan secara periodik setiap tahun, dan pemeriksaan ini mencakup neraca, laporan realisasi anggaran, laporan kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan yang dihasilkan atas pemeriksaan ini secara bertingkat, terdiri atas: Tidak Wajar (TD), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar dengan Pengecualian (WDP), dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Adapun capaian

sasaran: **Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah** sebagaimana Tabel 2.34.

Tabel 2.34.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Opini BPK terhadap LKPD	WDP (3)	WTP (4)	WTP (4)	WDP (3)	WTP (4)	133,33	WTP (4)	100

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, 2021.

Catatan: Tidak Wajar (TD) Skor 1, Tidak Memberikan Pendapat (TMP) Skor 2, Wajar dengan Pengecualian (WDP) Skor 3, dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Skor 4.

Realisasi atas target kinerja keuangan menunjukkan hasil kinerja sangat tinggi, atau menghasilkan opini penilaian *WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)*, kinerja ini merupakan komitmen bersama di semua jajaran Pemerintah Kabupaten Klaten untuk mewujudkan aspek akuntabilitas pelaksanaan program/kegiatan, transparansi penggunaan anggaran, dan tertib administrasi sebagai bagian dari fakta integritas yang telah dibangun dan diciptakan penyelenggara negara. Adapun Opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2013–2018 disajikan pada Tabel 2.35.

Tabel 2.35.
Opini BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten
Tahun 2015–2019

Tahun	Opini BPK	Keterangan
(1)	(2)	(3)
2015	WTP	<i>Paragraf penjelas berupa:</i> berlarutnya pekerjaan pembangunan menara Masjid Agung, belum memadainya data rincian aset peralatan dan aset tetap lainnya pada sekolah-sekolah, kelebihan pembayaran perjalanan dinas, serta program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian pegawai ASN.
2016	WDP	<i>Paragraf penjelas berupa:</i> belum memadainya data rincian aset peralatan dan aset tetap lainnya pada sekolah-sekolah, kelebihan pembayaran perjalanan dinas, serta program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian pegawai ASN.
2017	WDP	<i>Paragraf penjelas berupa:</i> belum memadainya data rincian aset peralatan dan aset tetap lainnya Perangkat Daerah dan pengelolaan dana BOS.
2018	WTP	<i>Paragraf penjelas berupa:</i> pengendalian rekening pengelolaan KAS dan mekanisme pembayaran langsung masih lemah. Pengelolaan piutang PBB perdesaan dan perkotaan tidak tertib.
2019	WTP	<i>Paragraf penjelas berupa:</i> 1. Pengelolaan Rekening Pemkab dan pengelolaan kas pada Bendahara belum memadai diantaranya adanya Rekening aktif pada PT Bank Jateng, PT BPR Bank Klaten dan Bank Umum atas nama Pemkab Klaten yang tidak terdaftar dalam SK Bupati, dan Bendahara Pengeluaran yang tidak tertib. 2. Pengendalian dan penatausahaan aset tetap Pemkab belum optimal, diantaranya luas tanah bawah jalan yang belum akurat, sebanyak 684 ruas jalan lingkungan belum ditetapkan dalam SK Bupati, pembayaran pajak kendaraan bermotor belum dipenuhi, administrasi pinjam pakai dan sewa aset

Tahun	Opini BPK	Keterangan
(1)	(2)	(3)
		tetap belum tertib, serta terdapat barang hilang hasil sensus yang belum diverifikasi.

Sumber : Badan Pengelola Keuangan Daerah, 2021.

*) Catatan: Opini BPK tahun 2020 In Proses.

Hasil penilaian sebagaimana tersebut pada Tabel 2.35 di atas, berdasarkan atas Proses pemeriksaan ini meliputi eksaminasi atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah pengungkapan laporan keuangan, serta penilaian atas prinsip akuntabilitas yang digunakan dan estimasi yang signifikan, serta penyajian laporan keuangan secara menyeluruh yang dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2020, dengan penguatan Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Permasalahan:

- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang meliputi eksaminasi atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah pengungkapan laporan keuangan masih ditemukan beberapa temuan penggunaan keuangan Daerah yang efektif dan efisien; dan
- b. Penyajian laporan keuangan yang dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten belum lengkap atas prinsip akuntabilitas yang digunakan dan estimasi yang signifikan.

Solusi:

- a. Meningkatkan koordinasi di semua lini untuk meningkatkan kapasitas ASN yang mengelola barang dan jasa daerah; dan
- b. Membangun basis data terpadu, untuk mempercepat terwujudnya ASN yang berintegritas dan kompetitif untuk melaksanakan program dan kegiatan berbasis kinerja.

11. Sasaran *Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD;*

Salah satu tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD adalah mendukung tugas pokok DPRD, dan membuat laporan administrasi dan keuangan. Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD** tahun 2020 sebagaimana Tabel 2.36.

Tabel 2.36.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Persentase Raperda yang disahkan tepat waktu	70	93,10	91,31)	90	88,33	92,59	90	98,14

Sumber: Sekretariat DPRD, 2021.

Berdasarkan Tabel 2.36. sebagaimana tersebut di atas, pada tahun 2019 jumlah Raperda yang disahkan tepat waktu sebanyak 12 Raperda, dari 13 Raperda yang direncanakan, sedangkan pada tahun 2020 jumlah Raperda yang disahkan tepat waktu sebanyak 5 Raperda, dari 6 Raperda yang direncanakan.

Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Klaten dalam mendukung pencapaian jangka menengah Daerah diukur dari jumlah Keputusan DPRD selama tahun 2016-2020 sebagaimana Tabel 2.37.

Tabel 2.37.
Jenis dan Jumlah Keputusan DPRD Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Perda	8	18	28	15	6
2	Keputusan DPRD	50	38	49	39	21
3	Keputusan Pimpinan DPRD	17	18	9	4	2
4	Keputusan Badan Anggaran	8	6	6	7	7
5	Keputusan Badan Musyawarah	16	12	13	13	13
Jumlah		99	92	105	78	50

Sumber: Sekretariat DPRD, 2021.

Berdasarkan Tabel 2.37. Sebagaimana di atas, hasil pengukuran kinerja terhadap indikator jenis dan jumlah keputusan DPRD Kabupaten Klaten tahun 2016-2020, mulai tahun 2018 cenderung mengalami penurunan jumlah produk keputusan yang dihasilkan, misalnya: Jumlah Perda yang ditetapkan pada tahun 2018 sebanyak 28 Perda, dan tahun 2020 hanya 7 Perda, 2. Keputusan DPRD pada tahun 2018 sebanyak 49 produk, dan tahun 2020 sebanyak 21 Keputusan DPRD, 3. Keputusan Pimpinan DPRD pada tahun 2018 sebanyak 9 produk, dan tahun 2020 sebanyak 2 Keputusan Pimpinan DPRD, 4. Keputusan Badan Anggaran dan Keputusan Badan Musyawarah relatif stabil.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait: Meningkatnya Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD pada tahun 2020, dengan Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan DPRD.

Permasalahan:

- a. Belum semua ASN mengikuti Diklat struktural dan fungsional untuk meningkatkan kualitas dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD; dan
- b. Tingginya mobilitas DPRD yang tidak diimbangi kecepatan pengadministrasian kegiatan terkadang belum bisa diukur sebagai capaian kerjanya.

Solusi:

- a. Meningkatkan koordinasi di semua lini untuk meningkatkan kapasitas ASN di lingkungan Sekretariat DPRD untuk mendukung tugas dan fungsi DPRD; dan
- b. Membangun basis data terpadu, untuk mempercepat terwujudnya ASN yang berintegritas dan kompetitif untuk melaksanakan program dan kegiatan berbasis kinerja.

12. Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah;

Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien dicerminkan ke dalam 3 (tiga) pilar yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Sehingga kelihatan, sejauh mana faktor kontribusi masyarakat turut andil menyelesaikan masalah agar ruang demokrasi tumbuh dan berkembang. Ukuran Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien diukur pada saat rencana disusun, sejauh mana data dan informasi dipakai sebagai *road map* untuk menyusun sasaran strategis yang hendak dicapai, juga sejauh mana konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran dapat terlaksana dengan tepat waktu dan manfaat.

Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah** sebagaimana Tabel 2.38.

Tabel 2.38.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Tingkat Konsistensi dan ketepatan waktu Perencanaan	Na	71	100	100	100	100	90	111,11

Sumber: Bappeda, 2021.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait: **Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah** pada tahun 2020, yang didukung perlunya **perencanaan pembangunan Daerah** yang wajib berbasis data dan informasi pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga sesuai dengan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dijelaskan bahwa RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) memuat kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun dari sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat harus didukung **data dan informasi pelaksanaan pembangunan**.

Pada tahun 2020 untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis **Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah** didukung dengan program, diantaranya:

1. Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
3. Perencanaan Sosial dan Budaya;
4. Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam; dan
5. Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.

Permasalahan:

- a. Belum meratanya penyebaran ASN yang berkualitas untuk mendukung tugas dan fungsi perencana;
- b. Tidak tersedianya data dan informasi pelaksanaan pembangunan yang mudah diakses sebagai bahan penyusunan rencana, dan evaluasi kinerja;
- c. Penggunaan sistem data dan informasi belum terintegrasi; dan
- d. Masih adanya kendala pengumpulan data dan pengukuran data kinerja secara akurat dan cepat.

Solusi :

- a. Meningkatkan koordinasi di semua lini untuk meningkatkan kapasitas ASN perencana;
- b. Membangun basis data terpadu, untuk mempercepat terwujudnya pembangunan daerah yang berintegritas dan kompetitif untuk melaksanakan program dan kegiatan berbasis kinerja; dan
- c. Perencanaan pembangunan daerah harus didukung **base line data dan informasi pembangunan** yang akurat, dan tepat manfaat. Dukungan semua pihak untuk mewujudkan perencanaan yang tepat waktu dan manfaat, serta untuk menjaga konsistensi antar dokumen rencana sangat dibutuhkan sekaligus sebagai upaya kita mendukung: **Terwujudnya Masyarakat Klaten yang Maju, Mandiri dan Berdaya Saing.**

13. Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Arsip SKPD;

Upaya Pemerintah Kabupaten Klaten dalam meningkatkan tata kelola Arsip SKPD dengan melakukan berbagai perbaikan sarana dan prasarana kearsipan, dan peningkatan pengelolaan arsip secara terpadu. Langkah ini diharapkan akan meningkatkan tata kelola Arsip. Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Tata Kelola Arsip SKPD** disajikan pada Tabel 2.39.

Tabel 2.39.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Tata Kelola Arsip SKPD

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Persentase kenaikan SKPD mengelola arsip secara baku	5	11,72	12,56	5	8,72	174,4	5	174,4

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan, 2021.

Pengelolaan kearsipan sebagai bagian dari aset Pemerintah Daerah dilihat dari jumlah arsip yang tercatat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada Tahun 2019 sebanyak 74.700 arsip, dan pada tahun 2020 sudah mencapai 120.417 arsip. Gambaran pengelolaan kearsipan di Kabupaten Klaten pada Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.40.

Tabel 2.40.

Pengelolaan Kearsipan di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Arsip	buah	74.700	78.434	87.625	98.635	120.417

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kab. Klaten, 2021.

Berdasarkan Tabel 2.40. sebagaimana tersebut di atas, Pelayanan arsip untuk OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten diharapkan dapat berkembang kearah arsip digital, sehingga akan lebih memudahkan dalam pencarian arsip. Dengan semakin meningkatnya jumlah koleksi arsip dan semakin mutakhirnya pengelolaan kearsipan akan menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung perpustakaan, sehingga bisa meningkatkan jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan Daerah.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait: **Meningkatnya Tata Kelola Arsip SKPD** dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk turut serta memanfaatkan ***data dan informasi pelaksanaan pembangunan*** yang terdokumentasikan/tersipkan. Pada tahun 2020 program untuk tercapainya sasaran **Meningkatnya Tata Kelola Arsip SKPD**, diantaranya:

1. Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah;
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi; dan
3. Perbaikan Sistem Adminstrasi Kearsipan

Permasalahan:

- a. Belum meratanya penyebaran ASN yang berkualitas untuk mendukung pengembangan dan pengelolaan arsip Daerah; dan
- b. Terbatasnya ruang untuk penyimpanan arsip, dan sebagian besar arsip belum terdigitalisasi.

Solusi :

- a. Meningkatkan koordinasi di semua lini untuk meningkatkan kapasitas ASN pengelola arsip; dan
- b. Membangun basis data terpadu, untuk mempercepat terwujudnya pembangunan daerah yang berintegritas dan kompetitif untuk melaksanakan program dan kegiatan berbasis kinerja.

14. Sasaran Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Profesional, Transparan dan Akuntabel;

Pemerintahan Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan terdepan memerlukan peningkatan standar pelayanan dalam hal: pemberdayaan masyarakat, menjaga adat-istiadat, serta melayani kebutuhan administrasi penduduk. Upaya Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang

profesional, transparan dan akuntabel dengan melakukan berbagai peningkatan partisipasi, dan penyempurnaan regulasi tentang desa. Langkah ini diharapkan akan meningkatkan tata kelola Pemerintahan Desa yang profesional, transparan dan akuntabel. Adapun capaian sasaran: **Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Profesional, Transparan dan Akuntabel** disajikan pada Tabel 2.41.

Tabel 2.41.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Profesional, Transparan dan Akuntabel

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Persentase penyelenggaraan Pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel	15	48	68	87	88	101	100	88

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2021.

Guna pengembangan dan peningkatan penyelenggaraan Pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel langkah yang ditempuh adalah dengan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, penetapan APBDes yang tepat waktu dan peningkatan pembinaan PKK. Adapun perkembangan persentase peningkatan kapasitas pemerintahan desa tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.42.

Tabel 2.42.
Perkembangan Persentase Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa
Tahun 2016-2020

Tahun	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Desa yang menyusun APBDes tepat waktu sesuai peraturan	Jumlah desa binaan PKK dalam satu Periode RPJMD
(1)	(2)	(3)	(4)
2016	13	15	26
2017	35	31	39
2018	88,43	58,36	96,8
2019	75	59	66
2020	0	88	78

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2021.

*) catatan: pada tahun 2020 kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa ditiadakan karena adanya refocusing untuk penanganan Covid-19.

Berdasarkan Tabel 2.42. sebagaimana tersebut di atas, kinerja penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa tahun 2016-2020 menunjukkan peningkatan kinerja, dilihat dari cakupan jumlah desa sebanyak 391 desa dengan jumlah Perangkat Desa sebanyak 3.096 orang, dan jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebanyak 2.703 orang.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait: *Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Profesional, Transparan dan Akuntabel* dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk turut serta terlibat pelaksanaan pembangunan di desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pelestarian kegiatan. Pada tahun 2020, program prioritas untuk

mendukung tercapainya sasaran *Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Profesional, Transparan dan Akuntabel*, di antaranya:

1. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan;
2. Tata Kelola Pemerintah Desa; dan
3. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.

Permasalahan:

- a. Masih lemahnya pengelolaan tata laksana administrasi dan pertanggungjawaban keuangan desa;
- b. Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan desa;
- c. Belum optimalnya pengelolaan aset desa;
- d. Masih rendahnya kualitas perangkat desa; dan
- e. Potensi PKK belum diberdayakan secara optimal untuk pengembangan kawasan perdesaan.

Solusi:

- a. Peningkatan kapasitas pemerintahan desa dalam mengelola keuangan desa secara transparan dan akuntabel;
- b. Peningkatan kualitas sumber daya aparatur desa, untuk memanfaatkan peluang pengembangan teknologi informasi; dan
- c. Peningkatan peran PKK dalam pengembangan potensi kawasan perdesaan.

<p>15. Sasaran: <i>Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;</i></p>
--

Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien biasanya dicerminkan ke dalam 3 (tiga) pilar yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Sehingga kelihatan, sejauh mana faktor kontribusi masyarakat turut andil menyelesaikan masalah agar ruang demokrasi tumbuh dan berkembang. Ukuran tata kelola pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien diukur pada saat rencana disusun, sejauh mana data dan informasi dipakai sebagai *Road Map* untuk menyusun sasaran strategis yang hendak dicapai, juga sejauh mana konsistensi antar dokumen perencanaan saling menguatkan, sehingga *output*, *outcome* dan *benefite* akan kelihatan progres capaiannya.

Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah** sebagaimana Tabel 2.43.

Tabel 2.43.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Level Maturitas SPIP	1	2	3	3	3	100	3	100
2	Level Kapabilitas APIP	2	2	3	3	3	100	3	100
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	47,89(C)	60,33 (B)	61,32 (B)	68(B)	61,32 (B)	90,18	70 (B)	87,6

Sumber: Inspektorat dan Setda Bagian Organisasi, 2021.

1. Level Maturitas Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) dan Level Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Kapabilitas APIP ditingkatkan untuk memastikan dan mengurangi terjadinya penyimpangan/penyelewengan atas tujuan yang akan dicapai melalui Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP). Level Maturitas SPIP Kabupaten Klaten berada di level 3 berdasarkan hasil Penjaminan Kualitas atas pelaksanaan penilaian maturitas level SPIP di Kabupaten Klaten tanggal 26 November 2019 oleh Tim Penjamin Kualitas dari Badan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat. Kemudian berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Peningkatan Kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor LHR-586/D3.04/2/2019 Tanggal 21 Juni 2018, Inspektorat Kabupaten Klaten disimpulkan bahwa Kapabilitas Inspektorat Kabupaten Klaten berada pada level 3.

2. Level Maturitas SPIP

Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah. Maturitas SPIP terdiri dari 5 tingkatan yaitu:

1. Level 0 (belum ada), Belum memiliki kebijakan dan prosedur;
2. Level 1 (Rintisan), Ada praktik pengendalian intern – ada kebijakan dan prosedur tertulis, namun masih bersifat *ad-hoc* dan tidak terorganisasi dengan baik. Tanpa komunikasi dan pemantauan;
3. Level 2 (Berkembang), Ada praktik pengendalian intern tapi tidak terdokumentasi dengan baik. Pelaksanaan tergantung pada individu dan belum melibatkan semua unit organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi.
4. Level 3 (Terdefinisi), Ada praktik pengendalian intern yang terdokumentasi dengan baik. Evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai.

5. Level 4 (Terkelola & Terukur), Ada praktik pengendalian internal yang efektif. Evaluasi formal dan terdokumentasi.
6. Level 5 (Optimum), Menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan. Pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer

Kabupaten Klaten menetapkan target pada tahun 2020 mencapai tingkat maturitas SPIP level 3 (tiga). Target tersebut telah tercapai dengan baik pada tahun 2019 karena berdasarkan penilaian telah terdapat pengendalian intern walaupun belum terdokumentasi dengan baik. Penilaian Maturitas SPIP dilakukan dua tahap yaitu penilaian mandiri oleh Inspektorat dan kemudian dilakukan *Quality Assurance* (kendali mutu) oleh tim dari Badan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY. Penilaian mandiri telah dilakukan pada akhir tahun 2017 dan kemudian dilakukan kendali mutu oleh BPKP DIY pada awal tahun 2018 dengan nilai akhir 2,29. Penilaian mandiri dilakukan kembali pada akhir tahun 2018 dengan nilai 3,35 kemudian direviu oleh BPKP DIY dengan nilai 3,15. Akhirnya berdasarkan hasil *Quality Assurance* dari BPKP Pusat tertanggal 26 November 2019, Kabupaten Klaten dinyatakan telah mencapai Level 3 Maturitas SPIP.

3. Level Kapabilitas APIP

Kapabilitas APIP ditargetkan pada tahun 2018 mencapai level 3 (tiga), namun demikian realisasinya baru mencapai level 2. Sama dengan Penilaian Maturitas SPIP, Penilaian tingkat kapabilitas APIP dilakukan dua tahap yaitu penilaian mandiri oleh Inspektorat dan kemudian dilakukan *Quality Assurance* (kendali mutu) oleh tim dari Badan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY. Penilaian Mandiri atas kapabilitas APIP di Kabupaten Klaten telah dilakukan sebanyak dua kali. Penilaian mandiri pertama dilakukan pada bulan April 2018 dan penilaian mandiri kedua dilakukan pada Bulan November 2018. Atas penilaian mandiri pertama telah dievaluasi oleh BPKP DIY dengan hasil penilaian Inspektorat Kabupaten Klaten mencapai level 2 (dua). Penilaian Mandiri tingkat Kapabilitas APIP yang diselesaikan tanggal 13 November 2018 telah menunjukkan bahwa Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Klaten telah mencapai level 3 (tiga), namun demikian hasil evaluasi (*quality Assurance*) dari BPKP Pusat baru mencapai Level 2+, dengan penjelasan sebagaimana Tabel 2.44.

Tabel 2.44.
Penjaminan Kualitas Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP
Inspektorat Kabupaten

No	Elemen	Level
(1)	(2)	(3)
1	Peran dan Layanan	3
2	Manajemen Sumber Daya Manusia	2
3	Praktik Profesional	2
4	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3
5	Budaya dan Hubungan	3

No	Elemen	Level
(1)	(2)	(3)
6	Struktur Tata Kelola	3

Sumber: Inspektorat Kabupaten Klaten, 2021.

Peningkatan Level Kapabilitas APIP ini dilakukan dengan menggunakan model yang dikembangkan oleh *Institute of Internal Auditor (IIA) Research Foundation* yaitu *Internal Audit Capability Model (IA-CM)*. Model Kapabilitas Pengawasan Intern atau *Internal Audit Capability Model (IA-CM)* adalah suatu kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik. IA-CM dimaksudkan sebagai model universal dengan perbandingan sekitar prinsip, praktik, dan proses yang dapat diterapkan secara global untuk meningkatkan efektivitas pengawasan intern. Terdapat 6 (enam) elemen yang dinilai dari model tersebut yaitu Peran dan Layanan; Pengelolaan Sumber Daya Manusia; Praktik Profesional; Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja; Budaya dan Hubungan Organisasi; serta Struktur Tata Kelola.

Berdasarkan Tabel 2.44. sebagaimana tersebut di atas, penyebab belum tercapainya Level 3, diantaranya:

- a. Inspektorat belum mempunyai SDM yang berkualifikasi sebagai Perencana Pengawasan Berbasis Risiko (PPBR) disebabkan Inspektorat belum menginternalisasi peningkatan kapasitas SDM melalui kegiatan pembimbingan, pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kerangka kompetensi (KPA tersedianya Staf APIP yang berkualifikasi profesional pada elemen 2);
- b. Inspektorat belum menilai keakuratan hasil penilaian risiko (*risk register*) OPD dan menggunakannya sebagai dasar untuk penyusunan PPBR.

Selanjutnya berdasarkan nilai Penjaminan Kualitas Atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP yang masih pada level 2, Inspektorat Kabupaten Klaten melakukan penilaian mandiri ke BPKP DIY untuk mendapatkan QA, dan diajukan ke BPKP Pusat untuk direviu. Selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Reviu (LHR) dari Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Direktorat Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah (BPKP) Nomor LHR-586/D3.04/2/2019, tertanggal 26 Desember 2019 dinyatakan Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Klaten telah berada pada level 3, sebagaimana Tabel 2.45.

Tabel 2.45.
Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Klaten

No	Elemen	Hasil SA	Hasil QA	Hasil Reviu
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peran dan Layanan	3	3	3
2	Manajemen Sumber Daya Manusia	3	3	3
3	Praktik Profesional	3	3	3
4	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	3	3
5	Budaya dan Hubungan	3	3	3
6	Struktur Tata Kelola	3	3	3

Sumber: Inspektorat Kabupaten Klaten, 2021.

4. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

Tuntutan akuntabilitas kinerja Pemerintah merupakan kewajiban Pemerintah yang harus bisa diwujudkan untuk mempertanggung-jawaban mandat yang telah diberikan dalam mengelola urusan penyelenggaraan Pemerintah. Sebagaimana dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016–2021 mengupayakan pentingnya **Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih** yang dijabarkan ke dalam arah kebijakan pembangunan daerah dengan meningkatkan efektivitas organisasi pemerintah daerah yang peka terhadap permasalahan dan perubahan lingkungan internal maupun eksternal, dan mewujudkan tata pemerintahan yang efektif dan efisien.

Capaian kinerja telah menunjukkan hasil yang meningkat. Target yang ditetapkan pada tahun 2019 dengan nilai 66, namun terealisasi 61,32 (dengan Kategori B). Perolehan skor 61,32 dengan kriteria sedang.

Berdasarkan penilaian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terdapat beberapa ikhtisar penting terkait penilaian kinerja instansi Pemerintah di Kabupaten Klaten, diantaranya:

1. Pemerintah Kabupaten Klaten memperoleh nilai 61,32 atau dengan predikat B.

Secara rinci hasil penilaian tersebut, sebagai berikut:

- Perencanaan kinerja nilai 20,79
- Pengukuran kinerja nilai 15,16
- Pelaporan kinerja nilai 10,21
- Evaluasi kinerja nilai 5,03
- Capaian kinerja nilai 10,14

2. Nilai ini merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Instansi Pemerintah Kabupaten Klaten.

3. Pemerintah Kabupaten Klaten telah membangun akuntabilitas kinerja di semua jenjang Pemerintahan dengan menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah yang mencakup: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja.

4. Secara umum atas kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten adalah baik, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk perbaikan ke depan, agar kinerja pada instansi Pemerintah terus mengalami peningkatan.

Langkah-langkah strategis yang akan dilaksanakan guna meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja, adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan kualitas perencanaan, dengan langkah-langkah;

- a) Mereviu dokumen perencanaan untuk melihat ketepatan dan sinkronisasi antara tujuan, sasaran, indikator kinerja untuk mencapai target pembangunan jangka menengah dan panjang daerah.
- b) Memperbaiki dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja sesuai dengan hasil reviu sebagai acuan penyusunan anggaran dengan menyusun agenda aksi daerah.

- b. Memperbaiki kualitas pengukuran kinerja melalui langkah-langkah;
 - a) Menerapkan sistem pengukuran kinerja secara konsisten, dan sebagai bahan penilaian kinerja lembaga/pejabat, sekaligus sebagai pengendalian rencana.
 - b) Memastikan penerapan dan penetapan Perjanjian Kinerja secara berjenjang mulai eselon II, III sampai pada tingkatan eselon IV.
- c. Meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja terhadap OPD, serta kualitas evaluasi program; dan
- d. Melakukan pengendalian dan evaluasi secara berjenjang terhadap capaian kinerja baik di tingkat kabupaten maupun OPD sebagai dasar penerapan pemberian *reward and punishment* dalam rangka semakin mendorong terciptanya manajemen berbasis kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2020, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah terdiri dari 3 (tiga) program, diantaranya:

1. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
2. Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;
3. Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan;
4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
- dan
5. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Tata Laksana Perangkat Daerah.

Permasalahan:

- a. Tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal dari Audit yang belum sepenuhnya sesuai dengan rekomendasi atas LHP yang telah diterbitkan dalam menindaklanjuti hasil temuan;
- b. Proses perencanaan, penganggaran, sampai laporan kinerja belum menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi yang terintegrasi;
- c. Terbatasnya jumlah sumber daya aparatur pengawas/auditor; dan
- d. Masih adanya ketidaktertiban pengelolaan barang daerah oleh OPD pengelola.

Solusi:

- a. Penguatan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal dengan pembuatan regulasi, sosialisasi, koordinasi intensif, serta penguatan komitmen auditor dalam melaksanakan penyelesaian tindak lanjut pengawasan;
- b. Mensinergikan/mengintegrasikan perencanaan, penganggaran, sampai laporan kinerja dengan menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi yang terintegrasi, dan menghubungkan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai;
- c. Mengajukan formasi auditor dan mengirimkan diklat fungsional/substantif ke lembaga diklat yang berkompeten; dan
- d. Penguatan komitmen seluruh kepala OPD dalam penerapan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan aturan yang berlaku untuk mempertahankan

opini WTP atas opini BPK Atas Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Klaten.

16. Sasaran Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;

Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien biasanya dicerminkan ke dalam 3 (tiga) pilar yaitu akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Sehingga kelihatan, sejauh mana faktor kontribusi masyarakat turut andil menyelesaikan masalah agar ruang demokrasi tumbuh dan berkembang. Ukuran Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien diukur pada saat rencana disusun, sejauh mana data dan informasi dipakai sebagai *road map* untuk menyusun sasaran strategis yang hendak dicapai, juga sejauh mana konsistensi antar dokumen perencanaan saling menguatkan, sehingga *output*, *outcome* dan *benefit* akan kelihatan progres capaiannya.

Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah** sebagaimana Tabel 2.46.

Tabel 2.46.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	2,6	3,09	3,22	3,05	3,21	105,25	3,1	103,55

Sumber: Setda Bagian Pemerintahan, 2021.

Catatan: Kondisi capaian 2020 baru penilaian dari Provinsi, dari Depdagri belum keluar.

Dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016–2021 telah ditetapkan adanya kebijakan daerah untuk : **Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih** yang dijabarkan ke dalam arah kebijakan pembangunan daerah dengan Meningkatkan efektivitas organisasi Pemerintah Daerah yang peka terhadap permasalahan dan perubahan lingkungan internal maupun eksternal, dan mewujudkan tata Pemerintahan yang efektif dan efisien.

Capaian EKPPD (Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah) Kabupaten Klaten tahun 2020 dengan **skor 3,21** tergolong **sangat tinggi**, dan perolehan skor ini apabila dirangking untuk tingkat Provinsi Jawa Tengah menduduki posisi 23 (dua puluh tiga) dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Ke depan untuk memperbaiki peringkat EKPPD diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Peningkatan koordinasi secara lebih intensif dengan sesama OPD (Organisasi Perangkat Daerah).
- b. Melakukan pendampingan/*desk* dengan OPD dalam mengisi format EKPPD.

- c. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Tim Daerah (BPKP dan Inspektorat).

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait: **Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Efektif dan Efisien**, dan program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan otonomi daerah terdiri dari 6 (enam) program, diantaranya:

1. Peningkatan Kinerja Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
2. Peningkatan Kerjasama Daerah;
3. Pengembangan Wilayah Perbatasan;
4. Peningkatan Koordinasi Pembinaan Fasilitas Administrasi Tata Kelola Kecamatan;
5. Pengembangan Komunikasi Informatika Mass Media;
6. Peningkatan Koordinasi Pembinaan Fasilitas Pemberdayaan Desa/Kelurahan di kecamatan;
7. Peningkatan Koordinasi Pembinaan Fasilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan;
8. Peningkatan Koordinasi Pembinaan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan; dan
9. Kerjasama Informasi dengan Mass Media.

Permasalahan:

- a. Masih adanya kendala pengumpulan data dan pengukuran data kinerja secara akurat dan cepat; dan
- b. Masih terbatasnya kemampuan SDM perencana dan pelaporan di jajaran OPD untuk mempercepat terwujudnya Pemerintahan yang kredibel.

Solusi :

- a. Meningkatkan koordinasi di semua lini untuk meningkatkan kapasitas OPD;
- b. Membangun basis data terpadu, untuk mempercepat pengukuran kinerja dan mengambil tindakan/intervensi tepat waktu apabila diperlukan.

17. Sasaran Meningkatnya Koordinasi Penataan Peraturan Perundang Undangan serta Bantuan Hukum dan HAM;

Meningkatnya koordinasi penataan peraturan perundang-undangan serta bantuan hukum dan HAM sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Klaten diukur dengan indikator persentase tercapainya penyusunan produk hukum dan penanganan perkara, dan Indeks Kabupaten Peduli HAM.

Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Koordinasi Penataan Peraturan Perundang-Undangan serta Bantuan Hukum dan HAM** sebagaimana Tabel 2.47.

Tabel 2.47.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Koordinasi Penataan Peraturan Perundang-Undangan serta Bantuan Hukum
dan HAM

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Persentase tercapainya penyusunan produk hukum dan penanganan perkara	80	90	83	90	90	100	90	100
2	Indeks Kabupaten Peduli HAM	0	234	90	80	95,7	119,63	80	119,63

Sumber: Setda Bagian Hukum, 2021.

1. Persentase Tercapainya Penyusunan Produk Hukum dan Penanganan Perkara

Pada tahun 2019 direncanakan sebanyak 63 Produk Hukum Daerah, dengan perincian: sebanyak 13 Peraturan Daerah, dan 50 Peraturan Bupati, terealisasi sebanyak (12 Perda + 96 Perbup). Jumlah perkara yang ditangani sebanyak 6 perkara, dan terselesaikan sebanyak 6 perkara. Pada tahun 2020 direncanakan sebanyak 6 Produk Hukum Daerah, dengan perincian: sebanyak 6 Peraturan Daerah, dan 73 Peraturan Bupati, terealisasi sebanyak (5 Perda + 73 Perbup). Jumlah perkara yang ditangani sebanyak 10 perkara, dan terselesaikan sebanyak 10 perkara.

2. Indeks Kabupaten Peduli HAM

Penghargaan atas martabat manusia adalah hak setiap warga negara yang wajib diberikan negara. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Klaten dalam menjamin hak setiap warga negara diukur dari Indeks Kabupaten Peduli HAM.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran: **Persentase Tercapainya Penyusunan Produk Hukum dan Penanganan Perkara** di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2020, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis sasaran **Persentase Tercapainya Penyusunan Produk Hukum dan Penanganan Perkara** dengan program Penataan Peraturan Perundang-Undangan.

Permasalahan:

- a. Banyaknya produk hukum nasional yang belum ditindaklanjuti dengan peraturan daerah, begitu pula sebaliknya banyak peraturan daerah yang perlu ditinjau ulang.
- b. Supremasi hukum belum sepenuhnya dapat diimplementasikan sebagai penyelesaian persoalan sosial kemasyarakatan yang muncul.
- c. Pembangunan berbasis isu, sepenuhnya belum dianalisis secara tata naskah akademis baik menyangkut aspek: *yuridis, sosial dan filosofinya*.

Solusi:

1. Pemerintah wajib hadir memberi perlindungan HAM terhadap warga negara yang mengalami ancaman.

2. Pemerintah wajib memenuhi hak-hak politik, memberi peluang berkembangnya aspek kebebasan sipil, memperkuat aspek kelembagaan demokrasi agar Kabupaten Peduli HAM dapat diwujudkan.
3. Memperkuat Sekretariat Komisi HAM Kabupaten.

18. Sasaran Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan;

Untuk mewujudkan sasaran Meningkatkan koordinasi pelaksanaan pembangunan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Klaten diukur dengan indikator persentase kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan (fisik dan keuangan) dengan target (rencana). Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan** sebagaimana Tabel 2.48.

Tabel 2.48.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Persentase kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan (fisik dan keuangan) dengan target (rencana)	80	87,78	81	90	97	107,78	90	107,78

Sumber: Setda Bagian Pembangunan, 2021.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam meningkatkan kinerja pembangunan dilakukan dengan melakukan Rapat Koordinasi “Senenan” dan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan secara rutin, hal ini sebagai bentuk agenda aksi untuk pengendalian kegiatan yang diharapkan menjaga konsistensi capaian pelaksanaan pembangunan dengan target rencana. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 169 program dengan 2.918 kegiatan. Realisasi fisik tercapai 81% dari target rencana. Dukungan dana untuk melaksanakan pembangunan dianggarkan sebanyak Rp.1.012.713.701.277,52 dan terserap sebesar Rp.857.012.047.026,68 (atau 84,63%). Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 428 program dengan 2.157 kegiatan. Realisasi fisik tercapai 97% dari target rencana dengan rencana anggaran sebanyak Rp.806.643.941.344,- dan terserap sebesar Rp.667.040.959.363,- (atau 82,66%).

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Meningkatkan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan. Pada tahun 2020, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis: **Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan**, dengan program Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan.

Permasalahan:

1. Ada beberapa kegiatan fisik yang tidak bisa diselesaikan tepat waktu, karena terbatasnya masa kontrak pekerjaan tidak mencukupi waktunya untuk menyelesaikan pekerjaan.

Solusi:

1. Mengefektifkan Pengendalian kegiatan agar semua pekerjaan fisik dapat diselesaikan tepat waktu dan tepat manfaat.

19. Sasaran *Terwujudnya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa yang Kredibel*

Untuk mewujudkan sasaran *Terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel* sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Klaten diukur dengan indikator Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai regulasi. Adapun capaian sasaran: ***Terwujudnya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa yang Kredibel*** sebagaimana Tabel 2.49.

Tabel 2.49.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Terwujudnya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa yang Kredibel

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai regulasi)	0	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: *Setda Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, 2021.*

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam meningkatkan kinerja pembangunan: *Terwujudnya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa yang Kredibel* dilakukan secara transparan, dan terbuka untuk publik. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 198 usulan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, dari sebanyak 198 usulan yang lolos seleksi secara elektronik sebanyak 198, gagal lelang sebanyak 2, 1 jasa pengadaan barang dan jasa dikembalikan ke OPD, dan 5 penunjukan langsung oleh OPD terkait. Sedangkan pada tahun 2020 tercatat sebanyak 134 usulan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, dari sebanyak 134 usulan yang lolos seleksi secara elektronik sebanyak 110, gagal lelang sebanyak 13 usulan, 11 jasa pengadaan barang dan jasa dikembalikan ke OPD.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran: ***Terwujudnya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa yang Kredibel*** dilakukan secara transparan, dengan dukungan program Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa).

Permasalahan:

Karena semua sistem sudah dijalankan secara *online*, tertutup kemungkinan adanya praktek penyimpangan.

Solusi:

Mengefektifkan pengendalian kegiatan agar semua pekerjaan fisik dapat diselesaikan tepat waktu.

20. Sasaran Meningkatnya Fasilitas Koordinasi Bidang Kehumasan dan Keprotokolan;

Untuk mewujudkan sasaran Meningkatkan fasilitas koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Klaten diukur dengan indikator kinerja, diantaranya: Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan kepala daerah, Persentase dokumentasi kegiatan kepala Daerah, dan Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan kepala daerah. Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Fasilitas Koordinasi Bidang Kehumasan dan Keprotokolan** sebagaimana Tabel 2.50.

Tabel 2.50.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Fasilitas Koordinasi Bidang Kehumasan dan Keprotokolan

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah	90	88,14	98	98	99,42	101,45	90	110,47
2	Persentase dokumentasi kegiatan kepala Daerah	90	98,08	98	98	98,16	100,16	90	109,07
3	Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan Kepala Daerah	100	95	98	98	99,86	101,90	100	99,86

Sumber: Setda Bagian Humas, 2021.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam **Meningkatkan Fasilitas Koordinasi Bidang Kehumasan dan Keprotokolan**, pada tahun 2020, diantaranya:

1. Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah

Jumlah publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah yang direncanakan pada tahun 2019 sebanyak 1720, dan terealisasi sebanyak 1687 (atau 98%), sedangkan pada tahun 2020 jumlah publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah yang direncanakan sebanyak 1720, dan terealisasi sebanyak 1710 (atau 99,42%).

2. Persentase Dokumentasi Kegiatan Kepala Daerah

Pada tahun 2019 jumlah dokumentasi kegiatan Kepala Daerah yang direncanakan sebanyak 2400 dan terealisasi sebanyak 2352 (98%), sedangkan pada tahun 2020 jumlah dokumentasi kegiatan Kepala Daerah yang direncanakan sebanyak 360 dan terealisasi sebanyak 355 (atau 98,61%).

3. Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan Kepala Daerah

Pada tahun 2019 jumlah pelayanan keprotokolan kegiatan Kepala Daerah yang direncanakan sebanyak 240 dan terealisasi sebanyak 235 (atau 98%), sedangkan pada tahun 2020 jumlah pelayanan keprotokolan kegiatan Kepala Daerah yang direncanakan sebanyak 450 dan terealisasi sebanyak 445 (atau 98,89%).

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran: **Meningkatnya Fasilitasi Koordinasi Bidang Kehumasan dan Keprotokolan**, pada tahun 2020 untuk mendukung pencapaian sasaran strategis didukung dengan program, diantaranya:

1. Kerjasama dengan Mass Media;
2. Pengembangan data/informasi/statistik Daerah;
3. Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi;
4. Penanganan Pengaduan Masyarakat; dan
5. Peningkatan Persandian Daerah.

Permasalahan:

Liputan kegiatan Kepala Daerah, belum menjadi dokumen cerita historis Pemerintahan baru sebatas berita/informasi.

Solusi:

Menyusun sekapur sirih setiap event Kepala Daerah yang memiliki nilai historis menjadi cerita sukses perjalanan Pemerintah.

21. Sasaran Meningkatnya Fasilitasi dan Pengawasan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian;

Untuk mewujudkan sasaran Meningkatkan Fasilitasi dan Pengawasan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Klaten diukur dengan indikator kinerja Tingkat Inflasi YoY. Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Fasilitasi dan Pengawasan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian** sebagaimana Tabel 2.51.

Tabel 2.51.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Fasilitasi dan Pengawasan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Tingkat Inflasi YoY	4(± 1)	2,39	2,64	3,5 (± 1)	1,38	39,43	3,5 (± 1)	39,43

Sumber: Setda Bagian Perekonomian, 2021.

Perkembangan inflasi di Kabupaten Klaten selama tahun 2016-2020 sangat fluktuatif. Inflasi di Kabupaten Klaten pada tahun 2019 sebesar 2,64%, atau lebih tinggi dibanding tahun 2020 sebesar 1,38%. Penurunan nilai inflasi disebabkan adanya pelaksanaan program pembangunan yang sinergis dan harga komoditas yang stabil. Perkembangan laju inflasi di Kabupaten Klaten selama Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Gambar 2.19.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Klaten, 2021. (Diolah).

Gambar 2.19. Laju Inflasi di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Berdasarkan Gambar 2.19. di atas, laju inflasi selama tahun 2016-2020 mengalami perkembangan yang bersifat fluktuatif, namun berdasarkan penggolongannya, inflasi di Kabupaten Klaten apabila dilihat termasuk ringan, karena masih di bawah 10% per tahunnya, dan juga di bawah inflasi nasional maupun provinsi. Sedangkan untuk Tahun 2020 inflasi di Kabupaten Klaten sebesar 1,44% disebabkan oleh terkendalinya harga beberapa komoditas pangan utama dan berfungsinya Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Klaten.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran: **Meningkatnya Fasilitasi dan Pengawasan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian** dalam menjaga stabilitas harga dengan menjaga inflasi daerah, agenda aksi ini dilakukan melalui program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.

Permasalahan:

Fluktuatifnya harga kebutuhan pokok, seringkali bergerak lebih cepat dari upaya Pemerintah untuk melakukan perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan. Karena kegiatannya Pemerintahan bersifat "linier" tidak "given" atau menunggu waktu.

Solusi:

1. Perlunya stok kebutuhan bahan pokok yang aman dan tersedia; dan
2. Menggerakkan kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Klaten untuk bergerak cepat mengatasi gejala harga yang dimungkinkan terjadi.

22. Sasaran Meningkatnya Koordinasi Kesejahteraan Rakyat;

Untuk mewujudkan sasaran Meningkatkan Koordinasi Kesejahteraan Rakyat sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Klaten diukur dengan indikator kinerja Persentase keterlibatan *stakeholder* dalam pelaksanaan

pembangunan bidang kesra. Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Koordinasi Kesejahteraan Rakyat** sebagaimana Tabel 2.52.

Tabel 2.52.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Koordinasi Kesejahteraan Rakyat

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Persentase keterlibatan <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan pembangunan bidang Kesra	90	90	95	95	95	100	95	100

Sumber: Setda Bagian Kesra, 2021.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam Meningkatkan Koordinasi Kesejahteraan Rakyat, pada tahun 2020 jumlah keterlibatan *stakeholder* dalam pelaksanaan pembangunan Bidang Kesra yang direncanakan sebanyak 300 pemangku kepentingan, dan terealisasi sebanyak 285 (atau 95%). Kegiatan yang dilakukan diantaranya: penyaluran bantuan bagi PMKS, penguatan Pokja Lansia, dan fasilitasi bantuan sosial lainnya.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran: **Meningkatnya Koordinasi Kesejahteraan Rakyat** untuk mendukung kegiatan Perangkat Daerah dilakukan dengan program, diantaranya:

1. Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
2. Peningkatan Keagamaan; dan
3. Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Penyakit Menular Seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS.

Permasalahan:

Kompleksitas permasalahan sosial belum disusun rencana Aksi Daerah untuk mengatasi isu daerah yang berkembang terkait dengan bidang Kesra.

Solusi:

Perlu disusun Renaksi Daerah Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dengan Perangkat Daerah terkait.

23. Sasaran Meningkatkan Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Meningkatkan Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah;

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang pemenuhannya menjadi hak azasi setiap warga negara, hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996. Ketentuan peraturan perundangan ini telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, ditegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan hal yang sangat penting dalam rangka pembangunan nasional dan membentuk manusia Indonesia yang berkualitas, mandiri dan sejahtera melalui perwujudan persediaan pangan yang

cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam dan terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Pada kenyataannya peta penduduk rawan pangan yang dilansir BPS masih menunjukkan situasi yang sangat memprihatinkan. Rendahnya aksesibilitas pangan, dengan indikator kemampuan rumah tangga untuk selalu memenuhi kebutuhan pangan anggotanya akan mendorong penurunan konsumsi makanan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman di tingkat rumah tangga. Pada akhirnya akan mengancam dan berdampak pada kekurangan gizi masyarakat, terutama pada kelompok rentan yaitu ibu, bayi dan anak.

Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah** sebagaimana Tabel 2.53.

Tabel 2.53.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Meningkatnya Kontribusi Sektor
Pertanian terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Kontribusi sektor Pertanian terhadap PDRB	12,5	10,98	10,98	12,4	10,57	85,24	12,6	83,89

Sumber: Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2021.

Luas wilayah Kabupaten Klaten sebesar 655,56 Km². Pada Tahun 2018 berdasarkan pemakaian di lahan pertanian untuk penggunaan lahan sawah 32.959,2 Ha dan untuk lahan bukan sawah sebesar 6.579,5 Ha. Sedangkan untuk lahan bukan pertanian seluas 26.017 Ha. Menurut sistem penggunaan air di Kabupaten Klaten, menunjukkan bahwa sawah dengan sistem pengairan teknis seluas 19.012 Ha, sistem pengairan setengah teknis seluas 10.314 Ha; sistem pengairan sederhana seluas 2.202 Ha, serta sistem tadah hujan seluas 1.631 Ha.

Penggunaan lahan di Kabupaten Klaten setiap tahunnya selalu berubah dan cenderung mengikuti pertambahan jumlah penduduk, dan perluasan kegiatan perekonomian. Perubahan tata guna lahan berhubungan dengan lahan sawah dan lahan kering. Adapun Luas Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian Menurut Kecamatan dan Penggunaannya Tahun 2020 disajikan pada Tabel 2.54.

Tabel 2.54.

Luas Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian Menurut Kecamatan dan Penggunaannya Tahun 2020

No	Kecamatan	Dari Sawah & Tegalan (Ha)	Peruntukan Bangunan Tanah (Ha)				Jumlah (Ha)
			Perumahan	Industri	Perusahaan	Jasa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Prambanan	6,2401	4,8938	1,1598	0	0,1865	6,2401
2	Gantiwarno	0,3049	0,3049	0	0	0	0,3049
3	Wedi	1,2655	1,0455	0	0	0,2200	1,2655
4	Bayat	1,5360	1,5360	0	0	0	1,5360

No	Kecamatan	Dari Sawah & Tegalan (Ha)	Peruntukan Bangunan Tanah (Ha)				Jumlah (Ha)
			Perumahan	Industri	Perusahaan	Jasa	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5	Cawas	1,4323	1,0367	0	0	0,3956	1,4323
6	Trucuk	1,0909	0,8744	0,1965	0	0,0200	1,0909
7	Kalikotes	0,8770	0,8770	0	0	0	0,8770
8	Kebonarum	1,0576	1,0254	0,0322	0	0	1,0576
9	Jogonalan	3,0291	2,3517	0,6774	0	0	3,0291
10	Manisrenggo	0,5710	0,5710	0	0	0	0,5710
11	Karangnongko	0,2913	0,2913	0	0	0	0,2913
12	Ngawen	1,6694	1,6694	0	0	0	1,6694
13	Ceper	8,1483	3,0174	4,9491	0	0,1818	8,1483
14	Pedan	1,8115	1,7869	0,0246	0	0	1,8115
15	Karangdowo	1,2128	1,2008	0	0	0,0120	1,2128
16	Juwiring	2,2360	1,6907	0,5453	0	0	2,2360
17	Wonosari	5,3325	4,0268	1,3057	0	0	5,3325
18	Delanggu	4,9686	4,8386	0,1300	0	0	4,9686
19	Polanharjo	1,3451	1,1936	0,0909	0,0606	0	1,3451
20	Karanganom	4,7212	4,0590	0,6622	0	0	4,7212
21	Tulung	1,3996	1,0666	0,3330	0	0	1,3996
22	Jatinom	1,7253	1,6935	0	0,0318	0	1,7253
23	Kemalang	25,4459	0,0220	0	25,4239	0	25,4459
24	Klaten Selatan	8,4121	8,4121	0	0	0	8,4121
25	Klaten Tengah	3,4641	3,2521	0	0	0,2120	3,4641
26	Klaten Utara	3,5921	3,3666	0,2255	0	0	3,5921
	2020	93,1802	56,1038	10,3322	25,5163	1,2279	93,1802

Sumber : DPKPP Kab. Klaten, 2021.

Sedangkan LP2PB (Lahan Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan) seluas 32.451 Ha sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), khususnya peruntukan sawah lestari Daerah. Dengan adanya LP2PB tersebut, alih fungsi lahan pertanian dapat dikendalikan dengan rata-rata perubahan lahan pertanian 56 Ha di luar LP2PB.

Untuk mengatasi perubahan lahan, dan mengganti produksi pertanian yang hilang akibat perubahan lahan pertanian dikembangkan pola pertanian terpadu, yang merupakan integrasi antara bidang tanaman pangan, bidang peternakan, dan bidang perikanan yang diharapkan kedepan bisa menjadi Kawasan Agropolitan. Perkembangan luas tanam dan luas panen tanaman pangan Tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.55.

Tabel 2.55.
Perkembangan Luas Tanam dan Luas Panen Tanaman Pangan
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

No	Jenis Komoditas	2016		2017		2018		2019		2020	
		Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)								
1	Padi	76.029	73.627	74.964	73.962	76.029	73.627	74.964	73.962	73.266	70.916
2	Jagung	9.682	9.549	11.713	11.085	9.682	9.549	11.713	11.085	12.430	11.087
3	Kedelai	1.935	1.523	2.562	2.234	1.935	1.523	2.562	2.234	561	544
4	Kacang Tanah	1.224	1.067	955	909	1.224	1.067	955	909	855	876
5	Kacang Hijau	350	299	240	228	350	299	240	228	1978	1843
6	Ubi Kayu	822	685	435	395	822	685	435	395	1193	997
7	Ubi Jalar	24	20	26	21	24	20	26	21	27	25

Sumber: DPKPP Kab. Klaten, 2021.

Sedangkan Perkembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan Tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.56.

Tabel 2.56.

Perkembangan Produksi dan Produktivitas
Tanaman Pangan Tahun 2016-2020

No	Jenis Komoditas	2016		2017		2018		2019		2020	
		Produksi (Ton)	Provitas (Kwt/ha)								
1	Padi	426.028	57,87	380.268	51,41	426.028	57,87	380.268	51,41	449.093	63,33
2	Jagung	72.583	74,97	90.343	81,50	72.583	74,97	90.343	81,50	99.088	89,38
3	Kedelai	2.759	18,12	4.440	19,87	2.759	18,12	4.440	19,87	1.040	19,12
4	Kacang Tanah	1.784	14,58	1.527	16,79	1.784	14,58	1.527	16,79	1.158	13,21
5	Kacang Hijau	260	8,72	285	12,50	260	8,72	285	12,50	1.985	10,77
6	Ubi Kayu	32.224	392,11	9.778	224,99	32.224	392,11	9.778	224,99	27.296	273,81
7	Ubi Jalar	356	143,55	251	119,28	356	143,55	251	119,28	333	134,77

Sumber: DPKPP Kab. Klaten, 2021.

Berdasarkan Tabel 2.55 dan Tabel 2.56 sebagaimana di atas, terlihat bahwa rata-rata luas panen dibawah luas tanam. Hal ini disebabkan karena adanya puso dan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), terutama Wereng Batang Coklat (WBC), Tikus, Penggerek Batang dan Sundep. Sehingga hal ini juga berpengaruh terhadap produksi dan produktivitas tanaman pangan terutama padi.

Produksi dan produktivitas padi pada Tahun 2020 meningkat dibandingkan dengan Tahun 2019. Hal ini disebabkan oleh implementasi intensifikasi pertanian yang cukup baik dan penerapan teknologi di bidang pertanian. Sedangkan Produksi Perkebunan Tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.57.

Tabel 2.57.

Produksi Perkebunan Tahun 2016-2020

No.	Jenis Komoditas	Produksi (Ton)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Tembakau Rajangan	2,193.575	1,233.527	1.147,27	1.750,30	1,558,79
2	Tembakau Asepan	1,038.530	1,070.724	1.037,05	2.595,30	2.308,72
3	Tembakau Vorstenland	303.930	239.455	135.535	55.144	-
4	Kelapa Dalam	4,097.630	4,697.582	3.976,64	4.048.189	4.322,36
5	Kelapa Hibrida	45.510	45.600	49.073	29.340	29,94
6	Kelapa Deres	99.470	98.740	87.149	87,15	78,84
7	Kopi Arabica	105.250	81.320	43,32	43.320	162,20
8	Kopi Robusta	9.830	9.990	9,82	9,82	12,94
9	Cengkeh	44.220	45.630	36,5	36,5	49,75
10	Lada	13.150	12.110	9,78	11,4	17,70
11	Tebu	6,289.000	3,258.940	3.258,9	3.316.970	3.202,97

Sumber: DPKPP Kab. Klaten, 2021.

Berdasarkan Tabel 2.57. sebagaimana tersebut di atas, komoditas andalan dan unggulan adalah Tembakau Rajangan produksi tertinggi dicapai pada Tahun 2016 sebesar 2.193,575 Ton dan Tembakau Asepan produksi tertinggi dicapai pada Tahun 2019 sebesar 2.595,30 ton. Sedangkan populasi ternak pada tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.58.

Tabel 2.58.
Populasi Ternak Tahun 2016-2020

No	Jenis Ternak	Populasi Ternak (ekor)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Sapi Potong	88,343	88,850	100,259	102.431	104.312
2	Sapi Perah	5,795	6,098	6,284	6.433	6.807
3	Kambing	88,343	88,957	9,596	101.402	105.782
4	Domba	38,489	38,570	45,204	46.963	47.562
5	Ayam Bukan Ras	2,801,581	3,256,177	2,245,443	2.532.676	2.109.668
6	Ayam Pedaging	2,898,344	3,385,400	2,475,187	3.896.788	2.489.800
6	Ayam Petelur	867,822	930,234	746,422	832.764	900.342
7	Itik	395,436	575,100	425,473	430.329	397.012
8	Burung Puyuh	451,193	452,332	519,566	535.244	363.563

Sumber: DPKPP Kab. Klaten, 2021.

Berdasarkan Tabel 2.58. sebagaimana tersebut di atas, hal yang menjadi catatan khusus adalah penurunan jenis Ayam Bukan Ras dan Ayam Pedaging. Pada tahun 2019 jumlah Ayam Bukan Ras sebanyak 2.532.676 ekor, dan pada tahun 2020 turun menjadi sebanyak 2.109.668 ekor (atau turun 16,70%), begitu juga dengan Ayam Pedaging, pada tahun 2019 sebanyak 3.896.788 ekor, dan pada tahun 2020 turun menjadi sebanyak 2.489.800 ekor (atau turun 36,11%). Kondisi ini dipengaruhi oleh perubahan iklim yang berakibat tingginya tingkat kematian ayam. Sedangkan produksi peternakan Tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.59.

Tabel 2.59.
Produksi Susu, Daging, dan Telur Tahun 2016-2020

No	Jenis	Produksi (Lt/Kg/Butir)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Susu (Liter)	4,878,662	5,903,181	4,266,718	4.978.442	4.456.373
2	Daging (Kg)	2,749,351	2,963,800	584,220	2.010.393	1.897.720
3	Telur (Butir)	375,376,131	570,571,719	130.992.000	154.784.416	154.567.112

Sumber: DPKPP Kab. Klaten, 2021.

Berdasarkan Tabel 2.59. sebagaimana tersebut di atas perkembangan produksi susu, daging dan telur pada tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan dari Tahun 2016-2017 yang selalu meningkat setiap tahunnya, hal ini dipengaruhi oleh tingginya harga pakan ternak dan menurunnya populasi hewan ternak. Sedangkan pada tahun 2020 produksi susu turun sebanyak 522.069 liter dibanding tahun 2019 (atau turun 10,49%), produksi daging turun sebanyak 112.673 kilogram dibanding tahun 2019 (atau turun 5,60%), dan produksi telur turun sebanyak 217.304 butir dibanding tahun 2019 (atau turun 0,14%). Kondisi ini dipengaruhi oleh perubahan iklim yang berakibat tingginya tingkat kematian ayam.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran **Meningkatnya Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Meningkatkan Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah** pada tahun 2020 dilaksanakan dengan program, diantaranya:

1. Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan);
2. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Masyarakat;
3. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan;

4. Pengembangan Perikanan Tangkap;
5. Pengembangan Budidaya Perikanan;
6. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak;
7. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan;
8. Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;
9. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan;
10. Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
11. Peningkatan Kesejahteraan Petani; dan
12. Pemberdayaan Penyuluh Pertanian /Perkebunan Lapangan.

Permasalahan:

- a. Belum optimalnya penerapan penelitian dan pengembangan di bidang pertanian yang berakibat belum terwujudnya upaya penanganan terpadu di bidang pertanian sebagai pilar penyangga ketahanan pangan;
- b. Belum optimalnya penerapan teknologi, rekayasa genetik, varietas–varietas baru yang memiliki keunggulan absolut dan komparatif, dan belum optimalnya intensifikasi dan diversifikasi hasil – hasil pangan;
- c. Tingginya tingkat penggunaan bahan kimia yang berakibat menurunnya tingkat kesuburan tanah dan kekebalan hama penyakit tanaman sehingga perlu gerakan bersama untuk kembali ke alam (*back to nature*);
- d. Belum optimalnya kepastian hukum dalam rangka memberikan proteksi dan advokasi terhadap petani, demikian pula legalisasi kepemilikan hak kekayaan intelektual (*intellectual property right*) terhadap produk – produk pangan unggulan Kabupaten Klaten;
- e. Belum berkembangnya diversifikasi pangan;
- f. Belum optimalnya pemanfaatan lahan dan pekarangan rumah menuju kawasan rumah pangan lestari.
- g. Belum tercapainya kemandirian dan kedaulatan pangan;
- h. Belum optimalnya sinergitas antara program-program Pemerintah dengan kebutuhan riil dalam mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan, dan belum optimalnya kemampuan dan keterampilan para penyuluh dalam mengoptimalkan kesadaran dan keterampilan petani;
- i. Belum terciptanya sinergitas antar Satuan Kerja (Satker) dalam melakukan koordinasi terpadu dalam upaya mengoptimalkan urusan ketahanan pangan;
- j. Belum beragam tingkat konsumsi pangan; dan
- k. Menurunnya produktivitas perikanan.

Solusi :

- a. Peningkatan penerapan penelitian dan pengembangan di bidang pertanian untuk mewujudkan penanganan terpadu di bidang pertanian sebagai pilar penyangga ketahanan pangan;
- b. Peningkatan penerapan teknologi, rekayasa genetik, varietas–varietas baru yang memiliki keunggulan absolut dan komparatif, dan peningkatan intensifikasi dan diversifikasi hasil – hasil pangan;

- c. Menekan penggunaan bahan kimia yang berakibat menurunnya tingkat kesuburan tanah dan kekebalan hama penyakit tanaman sehingga perlu gerakan bersama untuk kembali ke alam (*back to nature*);
- d. Penguatan kepastian hukum dalam rangka memberikan proteksi dan advokasi terhadap petani, demikian pula legalisasi kepemilikan hak kekayaan intelektual (*intellectual property right*) terhadap produk – produk pangan unggulan Kabupaten Klaten; dan
- e. Penciptaan sinergitas antara program – program Pemerintah dengan kebutuhan riil dalam mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan, dan belum optimalnya kemampuan dan keterampilan para penyuluh dalam mengoptimalkan kesadaran dan keterampilan petani.

24 Sasaran *Meningkatnya Peran LEM, LED dan Pengembangan Potensi TTG di Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan;*

Pemerintahan Desa sebagai penyelenggara Pemerintahan terdepan memerlukan peningkatan standar pelayanan dalam hal: pemberdayaan masyarakat, menjaga adat-istiadat, serta melayani kebutuhan administrasi penduduk. Upaya Pemerintah Kabupaten dalam meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dalam Penanggulangan Kemiskinan dengan melakukan peningkatan partisipasi, dan penyempurnaan regulasi tentang desa. Langkah ini diharapkan akan meningkatkan tata kelola Pemerintahan Desa yang Profesional, Transparan dan Akuntabel. Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Peran LEM, LED dan Pengembangan Potensi TTG di Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan** disajikan pada Tabel 2.60.

Tabel 2.60.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Peran LEM, LED dan Pengembangan Potensi TTG di Desa dalam
Penanggulangan Kemiskinan

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Persentase desa yang memiliki LEM, LED dan Posyantek	12	35	39	50	42	84,00	58	72,41

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2021.

Program pemberdayaan masyarakat untuk mendorong kemandirian desa dan menanggulangi kemiskinan dilaksanakan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Pasar Desa. Jumlah BUMDes dalam kurun waktu tahun 2013-2014 relatif masih rendah karena belum adanya dukungan dana desa dan komitmen Pemerintah Desa, peningkatan mulai terlihat pada tahun 2015 ketika dana desa mulai diberikan kepada Pemerintah Desa serta ditunjang dengan adanya komitmen dari Pemerintah Desa yang tinggi. Dari 226 BUMDes yang ada di Kabupaten Klaten saat ini, diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) kategori berdasarkan Peraturan

Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan BUMDesa Provinsi Jawa Tengah yaitu: 1. BUMDes Dasar sejumlah 85; 2. BUMDes Tumbuh sejumlah 112; 3. BUMDes Berkembang sejumlah 24; dan 4. BUMDes Maju sejumlah 5.

Guna pengembangan dan optimalisasi pengelolaan BUMDes maka, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melakukan pendampingan kepada pengelola BUMDes dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Perkembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.61.

Tabel 2.61.
Lembaga Ekonomi Perdesaan

Tahun	Jumlah BUMDes	Jumlah Pasar Desa	Pasar Desa Dikelola Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
2016	70	41	3
2017	156	41	3
2018	246	41	3
2019	300	41	3
2020	357	41	41

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2021.

Berdasarkan Tabel 2.61. sebagaimana tersebut di atas, Lembaga ekonomi perdesaan lainnya (Pasar Desa) juga dituntut dapat memberikan kontribusi positif di dalam meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Peran pasar desa belum maksimal karena otoritas manajemen pengelolaan pasar desa belum diberikan sepenuhnya kepada Desa dan masih dikelola oleh Pemerintah Daerah. Hal ini perlu adanya komunikasi dari pihak terkait dalam rangka menyelesaikan permasalahan tersebut, lebih lanjut diharapkan adanya keberpihakan terhadap APBDes dalam rangka pengembangan Pasar Desa.

Pelatihan teknologi tepat guna di perdesaan dari kurun waktu tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.62.

Tabel 3.62.
Pelatihan Teknologi Tepat Guna Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jenis Pelatihan TTG yang telah diberikan	1. Pelatihan Pembuatana Aneka Kripik bahan Singkong Pemanfaatan TTG di Desa Bono peserta dari Desa Bono, Pucangmiliran dan Wunut Kec. Tulung	1. Pelatihan Hidroponik Pemanfaatan TTG di Desa Bawukan peserta dari Desa Bawukan dan Desa Panggang Kecamatan Kemalang 2. Pelatihan Ternak Lele dengan metode Bioflock Pemanfaatan TTG di Desa Gunung	1. Pelatihan pembuatan Briket orang dengan bahan sampah organik di desa Solodiran, Kec Manisrenggo 2. Pelatihan pembuatan Briket orang dengan bahan sampah	1. Pelatihan pembuatan briket arang dengan bahan sampah organik di desa Jurangjero, Kec. Karanganom 2. Pelatihan pembuatan briket arang dengan bahan sampah organik di desa Karang,	Karena refokusing tidak ada kegiatan Pelatihan Teknologi Tepat Guna.

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
			Gajah peserta dari Desa Kebondan dan Desa Gununggajah, Bayat 3. Pelatihan Hidroponik Pemanfaatan TTG di Desa Sidowayah peserta dari Desa Sidowayah dan Desa Kebonharjo Kecamatan Polanharjo	organik di desa Kranggan, Kec Manisrenggo 3. Pelatihan pembuatan Briket orang dengan sampah organik di desa Taskomban g, Kec Manisrenggo 4. Pelatihan pembuatan Briket orang dengan bahan sampah organik di desa Nangsri, Kec Manisrenggo	Kec. Karanganom 3. Pelatihan pembuatan briket arang dengan bahan sampah organik di desa Karanganom, Kec. Karanganom 4. Pelatihan pembuatan briket arang dengan bahan sampah organik di desa Jungkare, Kec. Karanganom 5. Pelatihan pertanian hidroponik di desa Kahuman, Kec. Ngawen	
2.	Data Perkembangan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dipedesaan	1. Posyantek Kec. Kemalang 2. Posyantek Kec. Tulung	1. Posyantek Kec. Karanganom (Keputusan Bupati Klaten No. 414.4/213 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola POSYANTEK Kec. Karanganom Kab. Klaten) 2. Posyantek Kec. Polanharjo (Keputusan Bupati Klaten No. 414.4/214 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola POSYANTEK Kec. Polanharjo Kab. Klaten)	1. Posyantek antar desa TA 2018 di Kec. Cawas, Kec. Wedi	1. Posyantek antar desa Kec. Manisrenggo 2. Posyantek antar desa Kec. Trucuk	

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2021.

Berdasarkan Tabel 2.62. sebagaimana tersebut di atas, mekanisme penerapan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) di Kabupaten Klaten diawali dengan sosialisasi kepada seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Klaten (26

Kecamatan), kemudian proses pembentukan Teknologi Tepat Guna (TTG) dipilih pada kecamatan yang memiliki potensi untuk dikembangkan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait Meningkatkan Peran LEM, LED dan Pengembangan Potensi TTG di Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan dengan program, diantaranya:

1. Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan; dan
2. Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.

Permasalahan:

1. Masih rendah desa yang memanfaatkan peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG; dan
2. Terbatasnya kualitas sumber daya aparatur desa, untuk memanfaatkan peluang pengembangan teknologi informasi.

Solusi :

1. Percepatan penggunaan Dana Desa yang berorientasi untuk pengembangan LEM, LED dan pengembangan potensi TTG; dan
2. Peningkatan kapasitas SD aparatur desa untuk memanfaatkan era digital bagi pengembangan desa.

25. Sasaran Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisata;

Sektor pariwisata merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya sebagai penggerak utama perekonomian di daerah, untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Klaten dengan mendorong sektor pariwisata untuk mengembangkan produktifitas, dan nilai tambah untuk meningkatkan daya saing daerah.

Adapun capaian Sasaran: **Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisata** sebagaimana Tabel 2.63.

Tabel 2.63.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisata

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Persentase Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata	5	47,50	31,96	25	-55,88	-223,52	100	-223,53

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, 2021.

Berdasarkan Tabel 2.63. sebagaimana tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD pada tahun 2019 sebanyak

Rp.2.384.397.000,- dan pada tahun 2020 menjadi sebanyak Rp.1.051.962.520,- (turun sebanyak 55,88%).

Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata, selama ini upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dengan mendorong partisipasi masyarakat di bidang pariwisata dan memperbaiki regulasi kebijakan pengembangan kepariwisataan Daerah. Salah satu upaya peningkatan yang dilakukan dengan perbaikan obyek wisata dan menarik sebanyak mungkin pengunjung.

Perkembangan jumlah obyek wisata dan pengunjung di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu Tahun 2016-2020 menunjukkan peningkatan, selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.64.

Tabel 2.64.
Jumlah Obyek Wisata, Pengunjung, Lama Tinggal dan Rata-rata Pengeluaran Wisatawan Nusantara (Wisnus) dan Wisatawan Mancanegara (Wisman) Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Obyek Wisata (obyek)	Pengunjung (orang)		Lama Tinggal (hari)		Rata-rata Pengeluaran (Rp.000)	
		Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman
2016	82	377.409	372	1	1	750	1.500
2017	82	2.224.294	190.686	1	1	1.000	2.000
2018	82	2.483.945	222.373	1	1	1.000	2.000
2019	82	3.884.024	183.559	1	1	1.000	2.000
2020	82	1.399.167	22.199	1	1	900	1.500

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, 2021.

Berdasarkan Tabel 2.64. sebagaimana tersebut di atas, dapat dilihat bahwa jumlah pengunjung obyek wisata pada tahun 2016-2020 mengalami kenaikan dan didominasi oleh wisatawan nusantara, sedangkan wisatawan mancanegara relatif lebih sedikit karena wisatawan mancanegara lebih banyak berkunjung ke Candi Prambanan. Hal ini disebabkan adanya penataan di beberapa obyek wisata dan naiknya jumlah pengunjung pada beberapa perayaan seperti Maleman, Syawalan dan Yaqowiyu.

Sedangkan di sisi lain lama tinggal wisatawan Nusantara rata-rata hanya satu hari dan untuk wisatawan mancanegara rata-rata hanya 0,75 hari. Hal ini disebabkan kebanyakan para wisatawan, baik Nusantara maupun mancanegara hanya sekedar berkunjung di tempat obyek wisata saja dan lebih menyukai menginap di Yogyakarta ataupun Surakarta. Demikian juga dengan rata-rata pengeluaran relatif belum begitu besar, untuk wisatawan Nusantara hanya berkisar antara Rp. 350.000,- sampai Rp.1.000.000,- dan wisatawan mancanegara berkisar Rp.500.000,- sampai Rp.2.000.000,- Sumbangan Sektor Pariwisata Terhadap PAD tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.65.

Tabel 2.65.
Sumbangan Sektor Pariwisata Terhadap PAD
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

No	Jenis Obyek Wisata Perayaan	Realisasi (Rp. dlm 000)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Perayaan Padusan	52.500	57.500	58.000	64.005	0
2	Perayaan Maleman	28.000	28.000	28.000	30.800	0
3	Perayaan Syawalan	51.700	52.500	53.000	58.500	0

No	Jenis Obyek Wisata Perayaan	Realisasi (Rp. dlm 000)				
		2016	2017	2018	2019	2020
4	Perayaan Yaqowiyu	0	0	0	0	0
5	Deles Indah	14.000	15.600	9.600	4.200	0
6	OMAC	609.976	739.919	943.170	1.689.580	265.788
7	Jombor Permai	65.495	68.050	71.450	67.175	423.235
8	Makam Pandanaran	143.300	144.500	141.200	161.175	100.400
9	Makam Ronggowarsito	1.890	2.000	2.050	2.435	0
10	Pemandian Jolotundo	24.200	50.170	81.680	120.065	45.765
11	Candi Plaosan	53.883	80.454	218.718	153.027	
12	Makam Ki Ageng Gribig	3.000	3.030	3.041	4.030	
13	Lain-lain	23.850	13.450	12.460	28.880	6.535
14	Lain-lain diluar pendapatan	-	-	-	45.608	210.240
	Jumlah	1.071.794	1.255.173	1.622.369	2.430.005	1.051.962

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, 2021.

Berdasarkan Tabel 2.65. sebagaimana tersebut di atas, terlihat bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD pada tahun 2019 sebanyak Rp.2.430.005.000,- dan pada tahun 2020 menjadi sebanyak Rp.1.051.962.520,- (turun sebanyak 55,88%), kondisi ini dipengaruhi karena Pandemi Covid-19.

Pengembangan pariwisata Kabupaten Klaten dapat dilihat antara lain dari produk wisata. Produk pariwisata di Kabupaten Klaten mencakup:

A. Jenis Kekayaan Wisata Alam

Kabupaten Klaten mempunyai banyak wisata alam maupun wisata buatan. Nama dan jenis obyek wisata serta lokasinya di Kabupaten Klaten disajikan pada Tabel 2.66.

Tabel 2.66.
Nama dan Jenis Obyek Wisata serta Lokasinya
di Kabupaten Klaten Tahun 2020

No.	Nama Obyek Wisata	Jenis Obyek Wisata	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)
01.	Perayaan Padusan	Event Tradisional	Kec. Tulung Kab.Klaten
02.	Perayaan Maleman	Event Tradisional	Kec. Klaten Utara
03.	Perayaan Syawalan	Event Tradisional	Kec. Bayat dan Kec. Kalikotes
04.	Perayaan Yaqowiyu	Event Tradisional	Kec. Jatinom
05.	Deles Indah	Wisata Alam	Kec. Kemalang
06.	Sumber Air Ingas (OMAC)	Wisata Alam	Kec. Tulung Kab.Klaten
07.	Makam Sunan Pandanaran	Wisata Sejarah dan Religi	Kec. Bayat
08.	Jombor Permai	Wisata Alam	Kec. Bayat
09.	Makam R.Ng Ronggowarsito	Wisata Sejarah dan Religi	Kec. Trucuk
10.	Makam Ki Ageng Perwito	Wisata Sejarah dan Religi	Kec. Wonosari
11.	Pemandian Jolotundo	Wisata Alam	Kec. Karanganom
12.	Candi Plaosan, Sojiwan, Sewu dan Candi Bubrah	Wisata Sejarah dan Religi	Kec. Prambanan
13.	Makam Ki Agen Gribig	Wisata Sejarah dan Religi	Kec. Jatinom
14.	Sendang Sinongko	Wisata Alam	Kec. Ceper
15.	Umbul Ponggok, Nganten, Siblarak dan Umbul Nilo	Wisata Air dan Snarkling	Kec. Polanharjo
16.	Umbul Pelem	Wisata Air	Kec. Tulung
17.	Umbul Susuhan	Wisata Air	Kec. Ngawen

No.	Nama Obyek Wisata	Jenis Obyek Wisata	Lokasi
(1)	(2)	(3)	(4)
18.	Umbul Brintik, Brondong, Geneng dan Umbul Pluneng	Wisata Air	Kec. Kebonarum
19.	Desa Wisata Bugisan	Wisata Budaya dan Sejarah	Kec. Prambanan
20.	Desa Wisata Nganjat	Wisata Air dan Perikanan Nila	Kec. Polanharjo
21.	Desa Wisata Janti	Pemancingan	Kec. Polanharjo
22.	Desa Wisata Sidowayah	Wisata Air, Outbond, Kampung Dolanan dan Oase	Kec. Polanharjo
23.	Desa Wisata Soropaten	Wisata Budaya	Kec. Karangnom
24.	Desa Wisata Beku	Wisata Air dan Outbond	Kec. Karangnom
25.	Desa Wisata Kebondalem Kidul	Wisata Budaya, Sejarah dan Industri	Kec. Prambanan
26.	Desa Wisata Soran-Duwet	Wisata Budaya dan Outbond	Kec. Ngawen
27.	Desa Wisata Jarum	Wisata Budaya dan Kerajinan Batik	Kec. Bayat
28.	Desa Wisata Krakitan	Wisata Religi dan Alam	Kec. Bayat
30.	Desa Wisata Paseban	Wisata Religi, Budaya dan Industri	Kec. Bayat
31.	Desa Wisata Gunung Gajah	Wisata Alam	Kec. Bayat
32.	Desa Wisata Jotangan	Wisata Alam	Kec. Bayat
33.	Desa Wisata Demak Ijo	Wisata Budaya dan Kerajinan	Kec. Karangnongko
34.	Desa Wisata Karangnongko	Wisata Budaya dan Sejarah	Kec. Karangnongko
35.	Desa Wisata Balerante	Wisata Alam dan Air	Kec. Kemalang
36.	Desa Wisata Sidorejo	Wisata Alam dan Agro	Kec. Kemalang
37.	Desa Wisata Tegalmulyo	Wisata Alam, Outbond dan Embung	Kec. Kemalang
38.	Desa Wisata Nglinggi	Wisata Pemancingan dan Kuliner	Kec. Klaten Selatan
39.	Desa Wisata Mlese dan Tlising	Industri Lurik	Kec. Cawas
40.	Desa Wisata Melikan	Wisata Budaya dan Kerajinan Keramik	Kec. Wedi
41.	UmbulTirtomulyani&TirtoMulyono	Alam	Kec. Kebonarum
42.	WatuPrahur Bukit Cinta	Alam	Kec. Bayat
43.	WatuSepur	Alam	Kec. Bayat
44.	Bukit Petrum	Alam	Kec. Bayat
45.	Puncak Arjuna	Alam	Kec. Bayat
46.	Kedungan Waterpark	Buatan	Kec. Pedan
47.	Tirtonirmolo	Buatan	Kec. Prambanan
48.	Museum Gula Jawa Tengah	Buatan	Kec. Jogonalan
49.	Candi Merak	Budaya	Kec. Karangnongko
50.	Candi Sojiwan	Budaya	Kec. Prambanan
51.	Kolam Renang Tirta Pelangi	Buatan	Kec. Bayat
52.	Kolam Renang Tirta Indah	Buatan	Kec. Klaten Selatan
53.	Kolam Renang Tirta Harapan	Buatan	Kec. Klaten Utara
54.	Desa Wisata Glagah	Edukasi	Kec. Jatinom
55.	Wisata Hidroponik	Edukasi	Kec. Kemalang
56.	Kalitalang	Alam	Kec. Kalitalang
57.	Banyu Beku	Alam	Kec. Polanharjo
58.	Water Gong	Alam	Kec. Polanharjo
59.	Ponggok Ciblon	Buatan	Kec. Polanharjo
60.	Susur Kali Pusur	Alam	Kec. Tulung
61.	Tugu Waseso Soropaten	Budaya	Kec. Polanharjo
62.	Taman Celosia Tlogo Nursery	Buatan	Kec. Prambanan
63.	Umbul Gedaren	Alam	Kec. Jatinom
64.	Umbul Manten	Alam	Kec. Tulung
65.	Umbul Brondong	Alam	Kec. Kebonarum
66.	Omah Wayang	Budaya	Kec. Klaten Selatan

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Klaten, 2021.

Berdasarkan Tabel 2.66. sebagaimana tersebut di atas, jumlah Obyek Wisata (OW) di Kabupaten Klaten sebanyak 66 (enam puluh enam) WO, dan tersebar di beberapa kecamatan, serta jenis wisatanyapun sangat beragam. Sehingga potensi ini perlu dijaga dan dikembangkan untuk meningkatkan daya saing daerah.

B. Jenis Kekayaan Wisata Budaya

Jenis kekayaan wisata budaya di Kabupaten Klaten antara lain: Candi Plaosan, Candi Lumbung, Candi Bubrah, Candi Asu (Sona), Candi Sojiwan, Candi Merak, Candi Karangnongko, Candi Sewu, Masjid Jimbung, Masjid Golo, Masjid Jawi, Makam Syech Domba, Makam Syeh Kewel, Makam Ki Ageng Gribig, Makam R Ng. Ronggowarsito, Situs Kaliworo, dan Situs Wonoboyo, Makam Sunan Pandanaran, dan Makam Kyai Mlati.

C. Tempat Bersejarah

Tempat bersejarah yang ada di Kabupaten Klaten diantaranya: Monumen Juang 45 Klaten, Monumen PARATA MBKD Pos X-I, Museum Gula Jawa Tengah di Jogonalan, Monumen Patung Kemerdekaan Soekarno, Goa Jepang dan Pesanggrahan Pakubuwono di Deles.

Pada tahun 2020 untuk mewujudkan Sasaran strategis *Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisata*, didukung dengan program:

1. Pengembangan Kemitraan;
2. Pengembangan Pemasaran Pariwisata; dan
3. Pengembangan Destinasi Pariwisata.

Permasalahan :

- a. Belum optimalnya pengembangan pemasaran pariwisata;
- b. Belum optimalnya pengembangan destinasi pariwisata;
- c. Belum optimalnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia kepariwisataan; dan
- d. Masih terbatasnya penataan kawasan pariwisata yang dapat memiliki daya tarik.

Solusi :

Peningkatan pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata serta peningkatan sumber daya manusia yang terkait dengan kepariwisataan serta penataan kawasan pariwisata yang dapat memiliki daya tarik.

26. Sasaran *Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM;*

Sektor perdagangan, koperasi dan UKM merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya sebagai penggerak utama perekonomian di daerah, untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan. Upaya yang dilakukan untuk: **Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan**

UMKM diupayakan dengan berbagai kebijakan Daerah yang mendukung urusan perdagangan, koperasi dan UMKM.

Adapun capaian Sasaran: **Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UMKM** sebagaimana Tabel 2.67.

Tabel 2.67.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing pada Urusan Perdagangan,
Koperasi dan UMKM

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	18,74	17,88	19,98	19,37	19,98	103,15	19,38	103,10
2	Persentase UMKM yang memiliki daya saing	5	8,99	11,45	13	11,8	90,77	15	78,67

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM, 2021.

1. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Pada tahun 2019 tercatat kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tumbuh sebesar 19,98%. Tumbuhnya sektor perdagangan ini ditunjang adanya pengembangan dan pemberdayaan UKM melalui pola klaster dan penetapan Produk Unggulan Daerah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta dapat menjadi daya ungkit bagi pertumbuhan sektor dan sub sektor lainnya.

Disamping itu, tumbuhnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB pada tahun 2019 nilai investasi PMDN sebanyak Rp.189.278.100.000,- dan PMA sebanyak 1.952.800 US\$, serta nilai ekspor dari 448.740.170,03 US\$ sedangkan pada tahun 2020 tercatat nilai investasi PMDN sebanyak Rp.698.896.464.253,- dan PMA sebanyak 66.100.000.000 US\$, serta nilai ekspor menjadi 90.224.785,50 US\$.

2. Persentase UMKM yang Memiliki Daya Saing

Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 55.070 UMKM, namun dari sebanyak 55.070 UMKM tersebut yang memiliki keunggulan daya saing produk kompetitif baru sebanyak 6.306 UMKM (atau 11,45%) yang tersebar di 11 (sebelas) klaster UMKM. Sedangkan pada tahun 2020 tercatat sebanyak 55.100 UMKM, namun dari sebanyak 55.100 UMKM tersebut yang memiliki keunggulan daya saing produk kompetitif baru sebanyak 6.500 UMKM (atau 11,8%).

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Meningkatkan Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2020, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis sasaran *Meningkatnya Nilai Tambah,*

Produktifitas dan Daya Saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM diantaranya dengan program:

1. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;
2. Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;
3. Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan;
4. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;
5. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM; dan
6. Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.

Permasalahan :

- a. Terbatasnya akses dan perluasan pasar produk ekspor serta kurang berkembangnya kerjasama perdagangan internasional;
- b. Lemahnya daya saing dan belum optimalnya pengembangan mutu, desain dan merk dagang beberapa produk ekspor;
- c. Terbatasnya kemampuan SDM pelaku usaha di sektor perdagangan khususnya Usaha Dagang Kecil Menengah;
- d. Masih lemahnya legalisasi hak kekayaan intelektual terhadap produk – produk perdagangan unggulan Kabupaten Klaten;
- e. Belum optimalnya penataan dan pemberdayaan PKL; dan
- f. Masih kurangnya ketersediaan sarana prasarana pasar yang representatif.

Serta:

- a. Kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk memberikan informasi, data dan laporan perkembangan usahanya;
- b. Kurangnya inovasi dan diversifikasi produk; dan
- c. Terbatasnya produk berorientasi ekspor.

Solusi :

- a. Peningkatan akses dan perluasan pasar produk ekspor dengan membuka kerjasama perdagangan internasional;
- b. Penguatan daya saing dengan pengembangan mutu, desain dan merk dagang beberapa produk ekspor;
- c. Optimalisasi pelaksanaan perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar;
- d. Peningkatan kemampuan kualitas SDM pelaku usaha di sektor perdagangan khususnya Usaha Dagang Kecil Menengah;
- e. Mengupayakan legalisasi hak kekayaan intelektual terhadap produk – produk perdagangan unggulan Kabupaten Klaten; dan
- f. Penataan dan pemberdayaan PKL

27. Sasaran Meningkatnya Penerapan Inovasi Dalam Pembangunan Daerah;

Penerapan inovasi dalam pembangunan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya sebagai penggerak utama perekonomian di daerah, untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan masyarakat.

Adapun capaian Sasaran: **Meningkatnya Penerapan Inovasi Dalam Pembangunan Daerah** sebagaimana Tabel 2.68.

Tabel 2.68.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Penerapan Inovasi Dalam Pembangunan Daerah

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
	Persentase inovasi yang diterapkan	31,82	60	105	86,36	85	98,43	100	85

Sumber: Bappeda, 2021.

Inovasi Pembangunan Daerah merupakan upaya untuk mengakselerasi pencapaian-pencapaian pembangunan daerah dan pengembangan Daerah. Inovasi ini didorong munculnya pola pikir yang inovatif menjadi pijakan bagi kerangka penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Pada tahun 2019 tercatat sebanyak 19 jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan, dan pada tahun 2020 jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan sebanyak 34 kebijakan. Gambaran inovasi-inovasi yang telah dilakukan dan terus dikembangkan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten disajikan pada Tabel 2.69.

Tabel 2.69.
Inovasi Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten

No	Nama Inovasi	Deskripsi Singkat Inovasi	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)
1	TITIP BANDAKU	Penyelamatan Arsip Daerah rawan bencana yang berbentuk data digital dan digital baik perorangan maupun lembaga	Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten
2	SIMBAT (<i>Sistem Informasi Manajemen Obat</i>)	Sistem Informasi Management Obat Puskesmas digunakan untuk mempermudah penatausahaan persediaan obat di Puskesmas	Dinas Kesehatan
3	SIMPUS GIZKIA	Aplikasi di 34 puskesmas untuk pencatatan dan pelaporan data-data pelayanan kesehatan terhadap ibu dan anak	Dinas Kesehatan
4	SIMPUS	Aplikasi di 34 puskesmas untuk manajemen pelayanan kesehatan dari pendaftaran sampai penerimaan obat	Puskesmas
5	Matur Dokter	Merupakan Inovasi untuk kemudahan akses masyarakat dalam kesehatan, mendapat layanan respon cepat terutama masalah gawat darurat kesehatan	Dinas Kesehatan

No (1)	Nama Inovasi (2)	Deskripsi Singkat Inovasi (3)	OPD (4)
		<p>melalui aplikasi di android secara gratis. Matur Dokter merupakan kegiatan pengembangan dari PSC 119, Program Ini telah di <i>launching</i> pada Desember 2019.</p> <p>Jenis-jenis layanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gawat Darurat Kesehatan 24 jam 2. Konsultasi kesehatan 3. Info Sehat 4. Tips Kesehatan 5. Berita Sehat 6. Forum Sehat 7. Informasi Kamar Tidur Kosong di RS 8. Pelayanan Ambulance <p>Pelaksana Kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Matur Dokter Dinas Kesehatan Kab. Klaten 2. Tim Matur Dokter 34 Puskesmas Kabupaten Klaten <p>Sarana dan Prasarana</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 15 Ambulance Matur Dokter (2 di Dinkes, 13 di Puskesmas) ◆ 3 Motor Matur Dokter ◆ Aplikasi Matur Dokter dan Aplikasi khusus driver ambulance ◆ Perangkat HT di Dinas Kesehatan dan 34 Puskesmas <ol style="list-style-type: none"> 1. Aplikasi Matur Dokter: Diunduh dari Play Store Handphone Android 2. whatsapp : 0822 60000 910 3. 3. Telepon : 0822 60000 910 (0272 3391 330) <p>Email : maturdokter@gmail.com Instagram: <i>maturdokterkabklaten</i> facebook : <i>maturdokterkabklaten</i> Twitter : <i>maturdokterkabklaten</i></p>	
6	Apik (<i>Ayo Piknik ke Klaten</i>)	Sebuah aplikasi yang berbasis Internet yang menyajikan Obyek wisata, Kebudayaan dan Olahraga yang berada di Kabupaten Klaten yang menyajikan juga Informasi pendukung yang berkaitan dengan Obyek wisata tersebut	Disparbudpora
7	Aplikasi e-Awas Om (<i>Eling Waspada Omo Penyakit</i>) diganti Matur Tani	Aplikasi yang berbasis android untuk memudahkan masyarakat/petani di Kab. Klaten dalam memperoleh informasi mengenai OPT dan cara pengendalian berdasar prinsip PHT (pengendalian hama terpadu)	DPKPP
8	Alat Pemanen Air Hujan	Alat yang berfungsi menampung air hujan yang bisa dimanfaatkan sebagai cadangan air pada saat musim kemarau	DLHK
9	BIOGAS	Alat pengolah sampah organik menjadi biogas yang bisa	DLHK

No	Nama Inovasi	Deskripsi Singkat Inovasi	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)
		dimanfaatkan sebagai energi gas	
10	BIOPORI	Lubang lubang di sekitar lingkungan kantor yang berfungsi menyerap air hujan agar kembali ke tanah sekitar sekaligus berfungsi sebagai tempat pembuatan kompos skala kecil	DLHK
11	<i>sistaru.klatenkab.go.id</i>	Sistem pelayanan informasi tata ruang yang berbasis online yang bisa diakses oleh masyarakat dan pelaku usaha yang ingin mendapatkan informasi tentang tata ruang sesuai Perda Kabupaten Klaten Nomor 11 tahun 2011 tentang RTRW Kabuapten Klaten Tahun 2011-2031	DPUPR
12	Buku Matur Jujur	pembentukan budaya baru dengan cara berbeda, yang dilakukan melalui pendidikan karakter di semua pusat pendidikan (keluarga, sekolah, dan masyarakat), dengan sekolah sebagai lokomotif. Sebagai penghubung tri pusat pendidikan, dibutuhkan sarana yang mudah, murah, fleksibel, dengan anak difasilitasi media berani menulis/mengungkapkan dengan "matur jujur" terhadap apa yang dilihat, dilakukan/dikerja	Dinas Pendidikan
13	KARSA TANDING (<i>Kerjasama Implementasi Rumah Sakit Tanpa Dinding</i>)	Model Pelaksanaan Promosi kesehatan melalui kerja sama stakeholder, mempercepat layanan informasi dan promosi, terjalannya komunikasi dan kerjasama antara rumah sakit dan mitra fasilitas kesehatan, dan menunjukkan kehadiran pemerintah dalam pembangunan kesehatan	RSD Bagas Waras Klaten
14	SI KREEASI (<i>Sistem Keuangan Rumah Sakit Yang Efisien, Efektif, Akuntabel Dan Terintegrasi</i>)	Menyajikan data pendapatan Rumah Sakit Bagas Waras Kab. Klaten dengan cepat sehingga dapat diketahui secara cepat kondisi keuangan yang aman	RSD Bagas Waras Klaten
15	ANJUNGAN MANDIRI ANTRIAN POLIKLINIK	Antrian pasien menuju ke poliklinik dengan tujuan agar pasien tertib dalam mengantri sehingga pasien datang awal mendapat pelayanan	RSD Bagas Waras Klaten
16	SISTEM ANTRIAN FARMASI	Waktu tunggu dalam kefarmasian yang bertujuan untuk mengetahui waktu pasien dalam menunggu racikan obat	RSD Bagas Waras Klaten
17	Aplikasi SAPA (<i>SMS layanan Kepegawaian</i>)	1. Mengetahui Status usulan Karpeg, Karis, Karsu, Ijin belajar, Ijin Penggunaan gelar; 2. Pemberitahuan Kepada PNS yang akan memasuki BUP dan pemberitahuan usulan pensiun sudah dalam proses; 3. Pemberitahuan yang sifatnya segera yang berkaitan dengan kegiatan BKPPD	BKPPD
18	Aplikasi SIAP (<i>Sistem Informasi Anjungan Layanan Kepegawaian</i>)	1. Meningkatkan kualitas layanan kepegawaian ; 2. Memenuhi kebutuhan informasi standar tentang kepegawaian tanpa harus bertatap muka langsung dengan	BKPPD

No	Nama Inovasi	Deskripsi Singkat Inovasi	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)
		petugas (cek layanan kepegawaian spt: Karis, Karsu, ijin gelar, ijin belajar, informasi kepegawaian, Statistik kepegawaian, Cek data PNS, Cek surat.	
19	Mutasi masuk PNS dengan Tes CAT (<i>Computer Assisted Test</i>)	Untuk menghilangkan parktek pungutan dalam mutasi masuk	BKPPD
20	Penyelesaian Surat	Keputusan Pensiun PNS Pemberitahuan dini PNS yang akan Pensiun dan penyampaian SK pensiun langsung ke alamat PNS yang pensiun	BKPPD
21	Aplikasi BOS	Sistem Pengelolaan Dana Bos berbasis IT Yang Terintegrasi Dengan data Keuangan Daerah	BPKD
22	APL. SENSUS	Verifikasi data sensus yang dulu dilakukan secara manual dan makan banyak waktu, sekarang sdh bisa dilakukan dengan lebih cepat dan meminimalisir kesalahan dalam penginputan data sensus.	BPKD
23	SIDIA	Pencocokan dan penghitungan stok opname persediaan yang dulu dilakukan secara manual sekarang sudah menggunakan aplikasi sehingga laoran persediaan lebih akurat.	BPKD
24	APL.REKONSILIASI	Aplikasi untuk rekonsiliasi Aset Daerah yang dahulu masih dilakukan secara manual sekarang sudah menggunakan aplikasi, sehingga mempermudah dan mempercepat rekonsiliasi aset serta laporan lebih akurat	BPKD
25	e-PBB (<i>pbb.klatenkab.go.id</i>)	Aplikasi Untuk mengetahui berapa besaran pajak PBB yang harus di bayar oleh Wajib Pajak secara Online dengan internet (<i>Cloud System</i>) caranya cukup memasukkan NOP PBB	BPKD
26	e-BPHTB (<i>bphtb.klatenkab.go.id</i>)	Aplikasi Untuk mengetahui informasi BPHTB secara Online	BPKD
27	Pajak Online Penambahan	Loket pembayaran PBB-P2 yang semula baru bisa lewat Bank Jateng dan Bumdes, di tahun 2019 sudah bisa melalui Tokopedia, Indomaret dan Go Pay	BPKD
28	NAS BPKD NAS	<i>Network Attached Storage</i> yaitu sebuah piranti penyimpanan data dengan sistem operasi yang di khususkan untuk melayani kebutuhan backup dan share data. NAS dapat di akses langsung melalui jaringan dengan protokol seperti TCP/IP	BPKD
29	Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR)	Program untuk membantu akses permodalan bagi usaha mikro kepada lembaga jasa keuangan dengan mendapatkan subsidi bunga dari Pemerintah Kabupaten Klaten. Usaha mikro yang layak menerima bantuan subsidi bunga harus dimiliki penduduk Kab. Klaten yang berdomisili dan	Bag. Perekonomian

No	Nama Inovasi	Deskripsi Singkat Inovasi	OPD
(1)	(2)	(3)	(4)
		menjalankan usahanya di Kab. Klaten, wajib tercantum dalam data base Disdagkop UKM Kab. Klaten, memiliki Ijin Usaha Mikro (IUM) yang diterbitkan kecamatan setempat, usaha yang dijalankan merupakan usaha rintisan atau dalam upaya pengembangan usaha ekonomi produktif. Wirausaha baru dapat mengakses pinjaman sepanjang telah mengikuti pelatihan yang dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh dinas terkait. Plafon pinjaman maksimal Rp. 25 Juta untuk perorangan serta tidak untuk tujuan konsumtif. Pemberian subsidi bunga sebesar 80% dari bunga kredit per bulan dalam Tahun Anggaran 2019. Prosentase tersebut dihitung dari bunga pinjaman yang berlaku pada Bank Penyalur. Lembaga jasa keuangan penyalur yang ditunjuk untuk menyalurkan program subsidi bunga kepada usaha mikro tahun 2019 adalah PD BPR Bank Klaten (Perseroda) Kabupaten Klaten dan PD BPR BKK Tulung (Perseroda) Kabupaten Klaten. Alokasi dana untuk program ini di tahun 2019 sebesar Rp. 2 M (Dua milyar rupiah) dengan perincian Rp. 1,5 M melalui PD BPR Bank Klaten dan Rp. 500 Juta melalui PD BPR BKK Tulung.	
30	SMARD ON LINE	Pelayanan OnLine Disdukcapil ke Desadesa meliputi: Up date Data, Pembetulan Data, Akta Kelahiran OnLine, Akta Kematian On Line Disdukcapil 31 PELAUT BALA Memberikan Pelayanan kepada kaum Divabel, Disabilitas, dan Berkebutuhan Khusus	Disdukcapil
31	BUAH HATI	Memberikan Pelayanan kepada masyarakat tentang Akta Kelahiran secara Online lewat Program SIAK	Disdukcapil
32	Padi Rojolele Srinar dan Srinuk	Lolos 2 Varietas Padi Unggul (Rojolele Srinuk & Rojolele Srinar) Tahun 2019 Tingkat Nasional	Bappeda

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran inovasi yang diterapkan di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2020, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis **Inovasi yang Diterapkan** dengan Program Penelitian dan Pengembangan, dan program lainnya.

Permasalahan :

- a. Terbatasnya akses dan perluasan pasar produk inovasi serta kurang berkembangnya kerjasama inovasi Daerah; dan
- b. Lemahnya daya saing dan belum optimalnya pengembangan mutu, desain dan produk inovasi Daerah.

Solusi :

- Peningkatan akses dan perluasan pasar produk inovasi Daerah dengan membuka kerjasama dengan pihak ketiga; dan
- Penguatan daya saing dengan pengembangan mutu, desain dan produk inovasi Daerah.

28. Sasaran Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Penanaman Modal;

Sektor penanaman modal merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya sebagai penggerak utama perekonomian di daerah untuk mendorong peningkatan daya saing daerah. Upaya yang dilakukan untuk: **Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Penanaman Modal** diupayakan dengan berbagai kebijakan Daerah yang mendukung urusan penanaman modal.

Adapun capaian Sasaran: **Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Penanaman Modal** sebagaimana Tabel 2.70.

Tabel 2.70.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Penanaman Modal

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Rasio daya serap tenaga kerja (PMDN/PMA):								
	PMDN	189	131	19	460	3	0,65	483	0,62
	PMA	46	264	139	294	12	4,08	294	4,08
2	Persentase pertumbuhan realisasi investasi (PMDN/PMA):								
	PMDN	1,75	1078	733	2,5	-79	-3160,00	2,50	-3160,00
	PMA	2,25	52	272	2,55	-59	-2313,73	2,55	-2313,73

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2021.

Kondisi perkembangan perekonomian Kabupaten Klaten diukur dari berbagai variabel makro seperti PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi. Kegiatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) sangat mempengaruhi kondisi perkembangan perekonomian, dan sebagai gambaran perkembangan jumlah Investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020, disajikan pada Tabel 2.71.

Tabel 2.71.
Jumlah Investasi PMA dan PMDN
Tahun 2016-2020

Tahun	Penanaman Modal Asing				Penanaman Modal Dalam Negeri		
	Nilai Investasi (US\$)	Nilai Investasi (Rp.)	Jumlah Proyek	Kenaikan/ Penurunan (%)	Nilai Investasi (Rp.)	Jumlah Proyek	Kenaikan/ Penurunan (%)
2016	6.372.700	82.845.100.000	53	1.415	62.385.300.000	21	203
2017	10.257.000	138.469.500.000	43	61	247.327.500.000	41	68

Tahun	Penanaman Modal Asing				Penanaman Modal Dalam Negeri		
	Nilai Investasi (US\$)	Nilai Investasi (Rp.)	Jumlah Proyek	Kenaikan/ Penurunan (%)	Nilai Investasi (Rp.)	Jumlah Proyek	Kenaikan/ Penurunan (%)
2018	3.091.400	41.211.500.000	39	-70	229.788.500.000	67	27
2019	11.490.893	160.872.497.498	15	272	1.914.915.766.292	870	733
2020	4.721.429	66.100.000.000	5	-59	698.896.464.253	4743	-79

Sumber Data : DPMPTSP Kabupaten Klaten, 2021.

Berdasarkan Tabel 2.71. sebagaimana tersebut di atas, dapat dilihat bahwa jumlah nilai investasi PMDN maupun PMA selama tahun 2016-2020 bersifat fluktuatif, pada tahun 2018 nilai investasi PMA sebesar 3.091.400 US\$, tahun 2019 naik menjadi sebesar 11.490.893 US\$, dan pada tahun 2020 turun menjadi sebanyak 66.100.000.000 US\$ (atau turun 59 %). Begitu juga dengan pada tahun 2018 nilai investasi PMDN sebesar Rp.229.788.500.000,- pada tahun 2019 naik menjadi sebesar Rp.1.914.915.766.292,- (naik 733%), dan pada tahun 2020 turun menjadi sebanyak Rp.698.896.464.253,- (atau turun 64%). Hal ini disebabkan oleh iklim usaha yang kondusif, fasilitas dan infratraktur investasi yang memadai, ketersediaan tenaga kerja, dengan rincian sebagai berikut:

1. Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN)

Faktor penting lain yang juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah adalah penanaman modal/investasi. Penanaman modal/investasi tidak bisa dilepaskan dari sektor usaha industri, semakin besar dan berkembang industri di suatu daerah semakin besar investasi yang ditanamkan dalam daerah tersebut. Perkembangan PMDN di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.72.

Tabel 2.72.
Perkembangan Realisasi PMDN Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	PMDN				
			2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah Unit Usaha	Unit	21	41	67	870	4743
2	Jumlah Tenaga Kerja	Orang	2.861	2.781	1.793	16.772	12.980
3	Nilai Investasi (Rp.000)	Rp.	62.385.300	247.327.200	229.788.500	1.914.915.766.	698.896.464

Sumber Data : DPMPTSP Kabupaten Klaten, 2021.

2. Penanaman Modal Asing (PMA)

Jumlah investasi PMA di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu Tahun 2016-2020 mengalami peningkatan. Perkembangan PMA di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.73.

Tabel 2.73.
Perkembangan Realisasi PMA Tahun 2016-2020

No	Uraian	Satuan	PMA				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Unit Usaha	Unit	53	43	39	15	5
2	Jumlah Tenaga Kerja	Orang	1.468	79	561	2.087	59
3	Nilai Investasi	(US \$)	6.372.700	10.257.000	3.091.400	11.490.893	4.721.429

Sumber Data : DPMPTSP Kabupaten Klaten, 2021.

Berdasarkan Tabel 2.72. dan Tabel 2.73. sebagaimana tersebut di atas, realisasi perkembangan PMDN dan PMA di Kabupaten Klaten tahun 2020 terlihat bahwa sebagian perusahaan atau proyek belum dapat merealisasikan investasi atau penanaman modal, baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA).

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran; Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Penanaman Modal didukung dengan program:

1. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; dan
2. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

Permasalahan :

1. Kurangnya informasi terkait potensi investasi; dan
2. Tingginya harga tanah untuk pengembangan dan penanaman investasi.

Solusi :

- a. Peningkatan akses dan perluasan pasar produk ekspor dengan membuka kerjasama perdagangan internasional; dan
- b. Mengupayakan pemanfaatan lahan kritis sebagai lokasi investasi, dan Pemerintah daerah wajib menyediakan infrastruktur penunjang.

29. Sasaran Meningkatnya dan Pengembangan Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Ketenagakerjaan;

Masalah angkatan kerja adalah masalah yang perlu mendapat perhatian serius dalam melakukan perencanaan pembangunan daerah. Karakteristik angkatan kerja ini sangat besar pengaruhnya bagi kesejahteraan penduduk, terutama jika dilihat secara ekonomi makro. Proporsi atau jumlah pengangguran terbuka dari angkatan kerja berguna sebagai acuan Pemerintah bagi pembukaan lapangan kerja baru. Di samping itu, trend indikator ini akan menunjukkan keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun.

Adapun capaian sasaran: Meningkatnya dan Pengembangan Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Ketenagakerjaan disajikan pada Tabel 2.74.

Tabel 2.74.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya dan Pengembangan Produktifitas, Nilai Tambah
dan Daya Saing Sektor Ketenagakerjaan

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Rasio penduduk yang bekerja	0,97	0,87	1	1,07	0,96	89,72	1,08	88,89
2	Angka partisipasi angkatan kerja	6,779	73,58	81	69	98,79	143,17	69	143,17

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, 2021.

1. Rasio Penduduk yang Bekerja

Jumlah angkatan kerja pada tahun 2019 sebanyak 963.445 jiwa dan yang bekerja sebesar 70,72%, dan rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2019 sebanyak 1%. Sedangkan pada tahun 2020 menjadi jumlah angkatan kerja sebanyak 639.217 jiwa dan yang bekerja sebesar 616.528 orang, dan rasio penduduk yang bekerja pada tahun 2020 sebanyak 0,96 %

2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) pada tahun 2019 sebesar 81%, dan pada tahun 2020 menjadi sebesar 98,79 % (atau naik 17,79%). Sehingga masalah angkatan kerja yang perlu mendapat perhatian besar adalah soal penyerapan kerja. Karakteristik angkatan kerja ini sangat besar pengaruhnya bagi kesejahteraan penduduk, terutama jika dilihat secara ekonomi makro.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari sasaran Meningkatnya dan Pengembangan Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Ketenagakerjaan di Kabupaten Klaten dengan dukungan program:

1. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; dan
2. Peningkatan Kesempatan Kerja.

Permasalahan:

- a. Terbatasnya kesempatan kerja yang disebabkan oleh: (i) ketidakseimbangan antara kesempatan kerja yang ada dengan kebutuhan masyarakat akan pekerjaan; dan (ii) Penyerapan angkatan kerja yang ada tidak sebanding dengan pertumbuhan angkatan kerja, sehingga jumlah pengangguran bertambah;
- b. Peluang kerja belum bisa menampung kebutuhan pencari pekerjaan;
- c. Hambatan budaya (feodalisme), masyarakat cenderung kepada pekerjaan kantoran (pegawai negeri, dll) sebagai pekerjaan prestisius, sehingga mematikan kreatifitas untuk bekerja di luar sektor jasa Pemerintahan;
- d. Rendahnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang disebabkan oleh: (i) Rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja; (ii) Rendahnya ketrampilan tenaga kerja; (iii) Ketidaksesuaian antara persyaratan kualifikasi yang dibutuhkan oleh pasar kerja dengan kompetensi pendidikan yang dimiliki; (iv) Ketersediaan lembaga pelatihan untuk meningkatkan kualitas pekerja juga belum memadai;
- e. Meningkatnya jumlah pencari kerja yang diakibatkan angkatan kerja baru, tidak sebanding dengan lapangan kerja yang tersedia;
- f. Belum optimalnya pembinaan dan pemihakan anggaran terhadap kelompok-kelompok pengangguran untuk membuka kesempatan kerja mandiri melalui pemberdayaan usaha ekonomi produktif ;
- g. Belum optimalnya pelatihan kerja bagi para angkatan kerja guna meningkatkan keterampilan untuk mampu bersaing di pasar kerja;
- h. Belum optimalnya organisasi serikat pekerja sebagai wadah perjuangan hak – hak pekerja;

- i. Belum optimalnya proteksi dan advokasi terhadap tenaga kerja yang berakibat kurangnya nilai tawar tenaga kerja;
- j. Belum tersedianya database ketenagakerjaan.

Solusi :

- a. Membuka peluang kerja seluas-luasnya untuk menampung tenaga kerja bagi pencari pekerjaan;
- b. Menghilangkan hambatan budaya (feodalisme), bahwa semua lapangan kerja adalah pekerjaan prestisius, sehingga akan membuka ruang kreatifitas untuk bekerja di luar sektor jasa Pemerintahan;
- c. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja yang disebabkan oleh: (i) Rendahnya tingkat pendidikan tenaga kerja; (ii) Rendahnya ketrampilan tenaga kerja; (iii) Ketidaksesuaian antara persyaratan kualifikasi yang dibutuhkan oleh pasar kerja dengan kompetensi pendidikan yang dimiliki; (iv) Ketersediaan lembaga pelatihan untuk meningkatkan kualitas pekerja juga belum memadai;
- d. Mengoptimalkan pembinaan dan pemihakan anggaran terhadap kelompok-kelompok pengangguran untuk membuka kesempatan kerja mandiri melalui pemberdayaan usaha ekonomi produktif ;
- e. Mengoptimalkan pelatihan kerja bagi para angkatan kerja guna meningkatkan keterampilan untuk mampu bersaing di pasar kerja.
- f. Mengoptimalkan organisasi serikat pekerja sebagai wadah perjuangan hak-hak pekerja;
- g. Mengoptimalkan proteksi dan advokasi terhadap tenaga kerja yang berakibat kurangnya nilai tawar tenaga kerja; dan
- h. Merintis *database* ketenagakerjaan secara *online*.

30. Sasaran Meningkatnya Perlindungan Sektor Ketenagakerjaan;
--

Perlindungan tenaga kerja sangat besar pengaruhnya bagi kesejahteraan penduduk, terutama jika dilihat secara ekonomi makro. Tidak saja memberi rasa nyaman bagi pekerja, tetapi juga menjaga ketahanan daerah. Sehingga perlunya perlindungan tenaga kerja akan menunjukkan keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun.

Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Perlindungan Sektor Ketenagakerjaan** disajikan pada Tabel 2.75.

Tabel 2.75.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Perlindungan Sektor Ketenagakerjaan

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	86,81	82,59	71,48	88,2	43,12	48,89	25,5	169,10

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, 2021.

Berdasarkan Tabel 2.75, sebagaimana tersebut di atas pada tahun 2018 jumlah pekerja/buruh sebanyak 64.010 orang, dan yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 52.866 peserta (atau 82,59%), dan pada tahun 2019 jumlah pekerja/buruh naik menjadi sebanyak 72.639 orang, dan yang peserta program BPJS justru mengalami penurunan menjadi sebanyak 51.922 peserta (atau 71,48%), dan pada tahun 2020 jumlah pekerja/buruh naik menjadi sebanyak 123.550 orang, dan yang menjadi peserta Program BPJS Ketenagakerjaan justru turun menjadi sebanyak 56.697 peserta (atau 43,12%). Penurunan ini disebabkan gagal setor, dan pindah kerja. Sebagian peserta Program BPJS Ketenagakerjaan tersebar di PMA dan PMDN yang ada di Klaten.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari sasaran **Meningkatnya Perlindungan Ketenagakerjaan** di Kabupaten Klaten dengan dukungan program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan .

Permasalahan:

1. Belum optimalnya organisasi serikat pekerja sebagai wadah perjuangan hak – hak pekerja;
2. Belum optimalnya proteksi dan advokasi terhadap tenaga kerja yang berakibat kurangnya nilai tawar tenaga kerja;
3. Belum optimalnya pembinaan dan pemihakan anggaran terhadap kelompok-kelompok pekerja/buruh melalui pemberdayaan usaha ekonomi produktif ;
4. Belum optimalnya pelatihan kerja bagi para angkatan kerja guna meningkatkan keterampilan untuk mampu bersaing di pasar kerja;

Solusi :

- a. Menghilangkan hambatan budaya (feodalisme), bahwa semua lapangan kerja adalah pekerjaan prestisius, sehingga akan membuka ruang kreatifitas untuk bekerja di luar sektor jasa Pemerintahan dan wajib difasilitasi menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan;
- b. Mengoptimalkan pembinaan dan pemihakan anggaran terhadap kelompok – kelompok pekerja/buruh melalui pemberdayaan usaha ekonomi produktif;
- c. Mengoptimalkan organisasi serikat pekerja sebagai wadah perjuangan hak – hak pekerja; dan

- d. Mengoptimalkan proteksi dan advokasi terhadap tenaga kerja yang berakibat kurangnya nilai tawar tenaga kerja.

31. Sasaran Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Perindustrian;

Sektor perindustrian merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor lainnya sebagai penggerak utama perekonomian di daerah, untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan, serta menumbuhkan daya saing daerah. Upaya yang dilakukan untuk: **Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Perindustrian** diupayakan dengan berbagai kebijakan Daerah yang mendukung urusan perindustrian.

Adapun capaian Sasaran **Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing pada Sektor Perindustrian** sebagaimana Tabel 2.76.

Tabel 2.76.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Perindustrian

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	27,55	35,94	37,00	35,2	37,00	105,11	35,2	95,14
2	Persentase IKM yang memiliki daya saing	2,5	1,80	7,6	7,5	3,54	47,2	7,5	47,2

Sumber: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, 2021.

*) Kontribusi sektor industri terhadap PDRB tahun 2020 angka sementara.

1. Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB

Komponen pembentuk PDRB, sektor industri manufaktur dibentuk oleh sub sektor industri besar, menengah, kecil dan rumah tangga. Sektor industri sebagai sektor andalan memberikan andil yang besar bagi perekonomian di Kabupaten Klaten. Kontribusi Sektor Perindustrian terhadap PDRB pada tahun 2019 sebesar 37,00%, dan pada tahun 2020 capaiannya juga sebesar 37,00%. Sumbangan ini ditunjang dari nilai investasi pada tahun 2019 sebesar 11.490.893 US\$, dan pada tahun 2020 turun menjadi sebanyak 66.100.000.000 US\$ (atau turun 59 %). Begitu juga dengan pada tahun 2018 nilai investasi PMDN sebesar Rp.229.788.500.000,- pada tahun 2019 naik menjadi sebesar Rp.1.914.915.766.292,- (naik 733%), dan pada tahun 2020 turun menjadi sebanyak Rp.698.896.464.253,- (atau turun 64%).

2. Persentase IKM yang Memiliki Daya Saing

Pada tahun 2019 jumlah IKM sebanyak 34.828 IKM dan yang memiliki daya saing baru mencapai 7,6% (atau sebanyak 2.647 IKM), sedangkan pada tahun 2020 jumlah IKM menjadi sebanyak 8.335 IKM dan yang mempunyai daya saing mencapai 3,54 % (atau sebanyak 295 IKM).

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Meningkatkan Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan di Kabupaten Klaten. Pada tahun 2020 program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis sasaran Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Industri diantaranya dengan program:

1. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; dan
2. Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.

Permasalahan :

- a. Terbatasnya akses dan perluasan pasar produk ekspor serta kurang berkembangnya kerjasama perdagangan internasional;
- b. Lemahnya daya saing dan belum optimalnya pengembangan mutu, desain dan merk dagang beberapa produk ekspor;
- c. Terbatasnya kemampuan SDM pelaku usaha di sektor IKM; dan
- d. Masih lemahnya legalisasi hak kekayaan intelektual terhadap produk – produk perindustrian unggulan Kabupaten Klaten;

Solusi :

- a. Peningkatan akses dan perluasan pasar produk ekspor dengan membuka kerjasama perdagangan internasional;
- b. Penguatan daya saing dengan pengembangan mutu, desain dan merk dagang beberapa produk ekspor;
- c. Optimalisasi pelaksanaan perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar; dan
- d. Peningkatan kemampuan kualitas SDM pelaku usaha IKM.

32. Sasaran <i>Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Publik dan Sarana Prasarana Dasar Masyarakat;</i>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah, Pemerintah kabupaten/kota diwajibkan melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Sementara ini kewajiban yang harus diperhatikan terkait prasarana jalan adalah: Total panjang jalan di Kabupaten Klaten yang termasuk ke dalam kategori jalan negara 45,272 km, jalan provinsi sepanjang 34,238 km dan jalan kabupaten sepanjang 769,63 km. Faktor-faktor penting yang perlu diperhatikan adalah aksesibilitas, mobilitas, dan keselamatan.

Luas area layanan irigasi di Kabupaten Klaten sebesar 1.608 ha yang tercakup dalam Daerah Irigasi (DI). Secara kewenangan, ada 2 (dua) DI yang menjadi kewenangan Pemerintah pusat, 5 (lima) DI yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 478 DI yang menjadi kewenangan Kabupaten Klaten. Dengan pembagian kewenangan itu, maka pengelolaan irigasi dilakukan dari APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kabupaten Klaten maupun yang bersumber dari dana desa. Pengelolaan sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi,

manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia. Disamping itu Pemerintah kabupaten diwajibkan pula serius untuk memenuhi kebutuhan pelayanan air bersih dan sanitasi masyarakat.

Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Publik dan Sarana Prasarana Dasar Masyarakat** disajikan pada Tabel 2.77.

Tabel 2.77.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Publik dan Sarana Prasarana Dasar Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Indeks Layanan Infrastruktur	26,27	58,61	60,87	38,96	60,87	156,24	38,16	160

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Publik dan Sarana Prasarana Dasar Masyarakat di Kabupaten Klaten yang ditunjang oleh indikator persentase jalan dalam kondisi baik pada tahun 2019 sepanjang 471,86 Km (total panjang jalan 769,63 Km), drainase dalam kondisi baik baru mencapai 60,87% (471,86 Km), sedangkan pada tahun 2020 jalan dalam kondisi baik sepanjang 475,86 Km, dan drainase dalam kondisi baik 60,87%. Program pendukung pencapaian sasaran **Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Publik dan Sarana Prasarana Dasar Masyarakat**, diantaranya:

1. Pembangunan Jalan dan Jembatan;
2. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya;
3. Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
4. Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya.

Permasalahan :

- a. Infrastruktur jalan dan jembatan banyak dalam kondisi rusak, sebagai akibat karena tonase dan kelas jalan, kurangnya pemeliharaan dan peningkatan prasarana jalan dan jembatan;
- b. Belum terpenuhinya semua kebutuhan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya dalam mendukung pembangunan pertanian dan penyediaan air baku;
- c. Belum optimalnya fungsi sarana, prasarana dan utilitas umum (drainase);
- d. Belum optimalnya kinerja sarana dan prasarana air bersih, sanitasi terutama, di lingkungan masyarakat berpenghasilan rendah;

- e. Rendahnya kualitas pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung Pemerintah diakibatkan tidak dipatuhinya NSPM (Norma Standar Pedoman Manual) dan rendahnya sosialisasi serta pengawasan pelaksanaan NSPM; dan
- f. Belum optimalnya kinerja tim pembina jasa konstruksi di tingkat kabupaten dalam pembinaan sampai dengan pengawasan pelaksanaan jasa konstruksi.

Solusi :

- a. Peningkatan pemeliharaan dan peningkatan kualitas prasarana jalan dan jembatan;
- b. Pemenuhan secara bertahap kebutuhan pengelolaan jaringan irigasi dan jaringan pengairan lainnya dalam mendukung pembangunan pertanian dan penyediaan air baku;
- c. Optimalisasi fungsi sarana, prasarana dan utilitas umum (drainase);
- d. Optimalisasi kinerja sarana dan prasarana air bersih, sanitasi terutama, di lingkungan masyarakat berpenghasilan rendah;
- e. Sosialisasi serta pengawasan pelaksanaan NSPM (Norma Standar Pedoman Manual) untuk mengawasi pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung Pemerintah secara ketat; dan
- f. Peningkatan kinerja Tim Pembina Jasa Konstruksi di tingkat kabupaten dalam pembinaan sampai dengan pengawasan pelaksanaan jasa konstruksi.

33. Sasaran *Meningkatnya Kualitas Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Penyelenggaraan Angkutan;*

Peningkatan jumlah sarana angkutan publik, menuntut ketersediaan prasarana perhubungan jalan yang memadai untuk pengangkutan barang dan jasa. Adapun kondisi sarana perhubungan pada saat ini dapat dicerminkan dari keberadaan sarana transportasi darat yang terdiri mobil barang, kendaraan khusus dan angkutan publik.

Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Kualitas Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Penyelenggaraan Angkutan** disajikan pada Tabel 2.78.

Tabel 2.78.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Sasaran *Meningkatnya Kualitas Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Penyelenggaraan Angkutan*

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perhubungan	36,04	43,58	45,87	57,52	69,83	121,40	57,52	121,40

Sumber: Dinas Perhubungan, 2021.

Pencapaian indikator tingkat pelayanan infrastruktur perhubungan meningkat pada tahun 2019 sebesar 45,87% menjadi 69,83% pada tahun 2020, angka tersebut sudah diatas target yang ditetapkan pada tahun 2020 yaitu sebesar 57,52%.

Persentase tingkat realisasinya sebesar 121,40%, pencapaian indikator pelayanan infrastruktur perhubungan dengan didukung jumlah sarana angkutan (Umum dan Pribadi) disajikan pada Tabel 2.79.

Tabel 2.79.
Jumlah Sarana Angkutan (Umum dan Pribadi)
Tahun 2016-2020

Jenis Kendaraan	Tahun (unit)				
	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01 Mobil Barang	10.657	9.622	8.878	8.591	8.072
02 Mobil Bus					
* Umum	464	397	384	408	391
<i>Bus Besar</i>	44	65	97	88	91
<i>Bus Sedang</i>	131	261	248	268	215
<i>Bus Kecil</i>	289	71	39	52	85
* Bukan Umum	137	105	111	117	97
03 Kendaraan Khusus / Alat Berat	9	6	10	21	7
Jumlah	11.731	10.527	9.767	9.545	8.958

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, 2021.

Berdasarkan Tabel 2.79. sebagaimana tersebut di atas, jumlah terminal angkutan penumpang umum/sub terminal sebanyak 8 (delapan) lokasi untuk mendukung transportasi darat. Data terminal angkutan penumpang umum pada tahun 2019 disajikan pada Tabel 2.80.

Tabel 2.80
Data Terminal Angkutan Penumpang Umum
Di Kabupaten Klaten Tahun 2020

No	Terminal	Alamat	Type	Luas
1	2	3	4	5
1	Penggung	Penggung, Ceper, Klaten	C	4500 m ²
2	Cawas	Cawas, Klaten	C	3000 m ²
3	Teloyo	Teloyo, Wonosari, Klaten	C	3310 m ²
4	Pasar Klaten	Klaten Tengah	C	600 m ²
5	Bendogantungan	Bendogantungan, Klaten Selatan	C	3168 m ²
6	Tulung	Tulung, Klaten	C	400 m ²
7	Manisrenggo	Manisrenggo, Klaten	C	1785 m ²
8	Delunggu	Karang, Klaten	C	7000 m ²

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, 2021.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Meningkatnya Kualitas Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Penyelenggaraan Angkutan, dilaksanakan dengan program:

1. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;
2. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas; dan
3. Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.

Permasalahan:

- a. Perlengkapan Jalan Terpasang belum Optimal;
- b. Tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas di bidang angkutan (ijin trayek, laik jalan dan angkutan galian Golongan C);

- c. Rendahnya kesadaran pemilik KBWU untuk mengujikan kendaraannya;
- d. Masih minimnya jumlah *Traffic Light ATCS* yang telah terkoneksi dengan *CC Room*;
- e. Belum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Restribusi Daerah;
- f. Pemasangan Rambu-rambu lalu lintas daerah perbatasan yang masih belum optimal; dan
- g. Ketertiban Administrasi dan Teknis di Pengujian kendaraan bermotor yang justru dikeluhkan masyarakat dan berbanding negatif terhadap retribusi pengujian kendaraan bermotor.

Solusi:

Dari permasalahan yang dihadapi diatas, secara garis besar solusi terhadap permasalahan utama, diantaranya:

- 1. Meningkatkan tingkat pelayanan infrastruktur perhubungan; dan
- 2. Mengoptimalkan kualitas pelayanan perhubungan.

34. Sasaran Meningkatnya Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan dan Pemukiman;

Menghadapi tantangan dalam rangka peningkatan prasarana dasar permukiman khususnya kawasan permukiman padat, maka harus ditempuh dengan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukimannya. Masyarakat perlu ditingkatkan kesadarannya untuk mampu memelihara prasarana dasar permukiman yang ada di lingkungannya, dengan demikian sumber daya manusia di tingkat Pemerintahan desa dan kelurahan secara bertahap ditingkatkan kemampuannya, selain berkonsentrasi mengurus masalah administrasi Pemerintahan juga mampu memberdayakan masyarakat.

Keseluruhan lahan yang ada, tidak mungkin untuk dibangun sebagai kawasan permukiman, oleh karenanya Pemerintah Kabupaten Klaten harus melakukan pembatasan kawasan untuk pembangunan perumahan, dan melakukan optimalisasi pemanfaatan lahan. Sementara ini tercatat sebanyak 379.404 unit rumah, dengan perincian: untuk tempat tinggal sebanyak 307.713 unit, campuran sebanyak 48.532 unit, dan bukan tempat tinggal sebanyak 23.159 unit.

Adapun capaian sasaran Meningkatnya Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan dan Pemukiman sebagaimana Tabel 2.81.

Tabel 2.81.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan dan
Pemukiman

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Indeks Kualitas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	57,71	34,08	53,76	74,05	74,05	100	74	100,68

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2021.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran: **Meningkatnya Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan dan Pemukiman** di Kabupaten Klaten yang pergerakannya relatif lambat. Hal ini disebabkan karena, 1). Penanganan air minum layak, penduduk yang terlayani sistem air limbah yang layak sangat tergantung pada sumber pendanaan dari APBN. Sementara itu jumlah rumah tangga 182.324 unit, 2) penanganan kawasan kumuh perkotaan, sementara ini hanya bergerak di 2 (2 desa) titik sasaran dengan cakupan luasan 34,47 Ha. 3). Penanganan RTLH hanya bergerak pada kisaran 1087 unit pertahun, padahal jumlah RTLH masih sebanyak 24.775 unit. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah Penanganan RTLH sebanyak 3.158 unit.

Pada tahun 2020, program yang dilaksanakan untuk sasaran: **Meningkatnya Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan dan Pemukiman** terdiri dari 8 (delapan) program, diantaranya:

1. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;
2. Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan; dan
3. Perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial;
4. Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung;
5. Pengembangan Perumahan;
6. Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-Gorong;
7. Perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial; dan
8. Pembangunan infrastruktur pedesaan/perkotaan.

Permasalahan :

- a. Banyaknya rumah tidak layak huni, dan merata di setiap kecamatan;
- b. Belum optimalnya pemanfaatan lahan dengan pola pembangunan vertikal terutama pada kawasan-kawasan permukiman yang padat;
- c. Belum optimalnya upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman;
- d. Belum memadainya sarana dan prasarana pendukung permukiman (air bersih, sanitasi dan utilitas umum); dan
- e. Masih adanya kawasan kumuh perkotaan.

Solusi :

- a. Percepatan penanganan pembangunan rumah tidak layak huni
- b. Mengoptimalkan upaya pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman.
- c. Pemenuhan sarana dan prasarana pendukung permukiman (air bersih, sanitasi dan utilitas umum) layak melalui pelaksanaan Program Kotaku; dan
- d. Percepatan penanganan kawasan kumuh perkotaan dengan mengerakkan partisipasi masyarakat lewat CSR.

35. Sasaran Terkendalinya Pemanfaatan Kawasan Sesuai dengan Konsep Tata Ruang;

Peningkatan efektivitas Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai instrumen pembangunan secara konsisten digunakan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus mengintegrasikan aspek lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Kebijakan yang dimaksud adalah rangkaian konsep dan azas yang menjadi dasar rencana. Hal inilah yang menjadi pijakan pengendalian dan pemanfaatan ruang.

Adapun capaian sasaran: **Terkendalinya Pemanfaatan Kawasan sesuai dengan konsep tata ruang** sebagaimana Tabel 2.82.

Tabel 2.82.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Terkendalinya Pemanfaatan Kawasan Sesuai Dengan Konsep Tata Ruang

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Ketaatan terhadap RTRW	78,86	78,98	78,98	79,6	79,6	100,00	80,00	99,50

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021.

Kebijakan, rencana dan atau program (KRP) yang disusun harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, juga selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup, untuk mengimplementasikan hal ini pada tahun 2019 ketaatan terhadap RTRW mencapai 78,98%, dan pada tahun 2020 menjadi sebesar 79,6%. Hal ini disebabkan karena adanya upaya untuk mewujudkan konsistensi untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

Konsekwensi logis dari persoalan tersebut, KRP harus memperhatikan aspek lingkungan hidup dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Sehingga pemanfaatan dan pengendalian ruang merupakan upaya yang terstruktur,

dan sebagai terobosan dan memastikan bahwa pada setiap tahap awal penyusunan KRP sudah memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran: *Terkendalinya Pemanfaatan Kawasan Sesuai dengan Konsep Tata Ruang* dilaksanakan melalui Program:

1. Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang;
2. Penataan Ruang; dan
3. Perencanaan Ruang.

Permasalahan:

- a. Kinerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) belum optimal dalam memfasilitasi pemecahan permasalahan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. Peningkatan efektivitas RTRW sebagai instrumen pembangunan secara konsisten digunakan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- c. Pengendalian pemanfaatan ruang belum dilaksanakan secara konsisten, hal ini disebabkan karena belum lengkapnya piranti peraturan penunjang;
- d. Belum kuatnya pengendalian pemanfaatan ruang melalui penyusunan rencana detail, penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian *insentif-desinsentif* serta pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
- e. Kurangnya pengembangan sarana informasi kepada masyarakat tentang RTRW; dan
- f. Kurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannya.

Solusi:

- a. Optimalisasi Kinerja Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) belum optimal dalam memfasilitasi pemecahan permasalahan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. Peningkatan efektivitas RTRW sebagai instrumen pembangunan secara konsisten digunakan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan;
- c. Pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan secara konsisten, dan tidak terbang pilih; dan
- d. Penguatan pengendalian pemanfaatan ruang melalui penyusunan rencana detail, penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian *insentif-desinsentif* serta pemberian sanksi yang tegas terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang.

36. Sasaran <i>Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup;</i>
--

Sebagai upaya untuk menjaga kualitas lingkungan hidup, target indikator sasaran digunakan sebagai alat ukur pencapaian keberhasilan diantaranya: indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dan penegakan hukum lingkungan. Masih rendahnya

indeks kualitas air salah satu penyebabnya adalah tingginya pencemaran air oleh limbah domestik.

Adapun capaian sasaran: **Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup** disajikan pada Tabel 2.83.

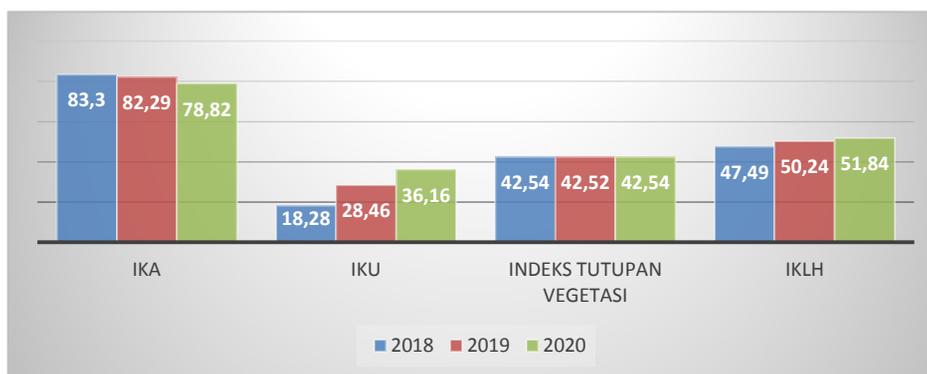
Tabel 2.83.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Indeks kualitas air	16,00	18,28	28,46	38,02	36,16	95,11	40,46	89,37
2	Indeks kualitas udara	60,00	83,3	82,29	82,02	76,82	93,68	84,46	90,95
3	Indeks tutupan vegetasi (lahan)	34,14	42,54	83,3	56,16	42,54	75,75	58,60	72,59

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021.

Indeks Kualitas Air (IKA) tahun 2020 sebesar 36,16, Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 76,82, dan Indeks tutupan vegetasi/lahan sebesar 42,54. Uji sampling udara menggunakan *metode pasive sampler* dimana keakuratan lebih baik dan lebih mewakili uji kualitas udara di Kabupaten Klaten, pengambilan uji dilakukan selama 24 jam dengan pelaksanaan 2 kali dalam setahun pada 4 titik (kawasan padat penduduk, transportasi, industri dan perkantoran).

Pengambilan uji sampling kualitas air sungai dilakukan hanya beberapa titik menyesuaikan anggaran dan karena SDM yang terbatas serta antrian pada laboratorium lingkungan yang terakreditasi sangat panjang maka tahun 2019 ini hanya dapat dilakukan sekali dengan pengambilan sampling pada 26 titik dari 7 sungai yang ada di Kabupaten Klaten dari target 10 sungai. Adapun sungai yang dapat dipantau mutu airnya dengan pengambilan sample adalah sebagai berikut : Sungai Rowo Jombor, Sungai Modin, Sungai Soran, Sungai Pusur, Sungai Merbung, Sungai Kacang Ijo, dan Sungai Kroman. Ditambah hasil uji dari BKSDA sebanyak 3 sungai yaitu Sungai Dengkeng, Sungai Jebol dan Sungai Pusur. (DAS Bengawan Solo). Berdasarkan capaian IKA, IKU, dan Indeks tutupan vegetasi/lahan selama tahun 2018-2020 capaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) disajikan pada Gambar 2.20.



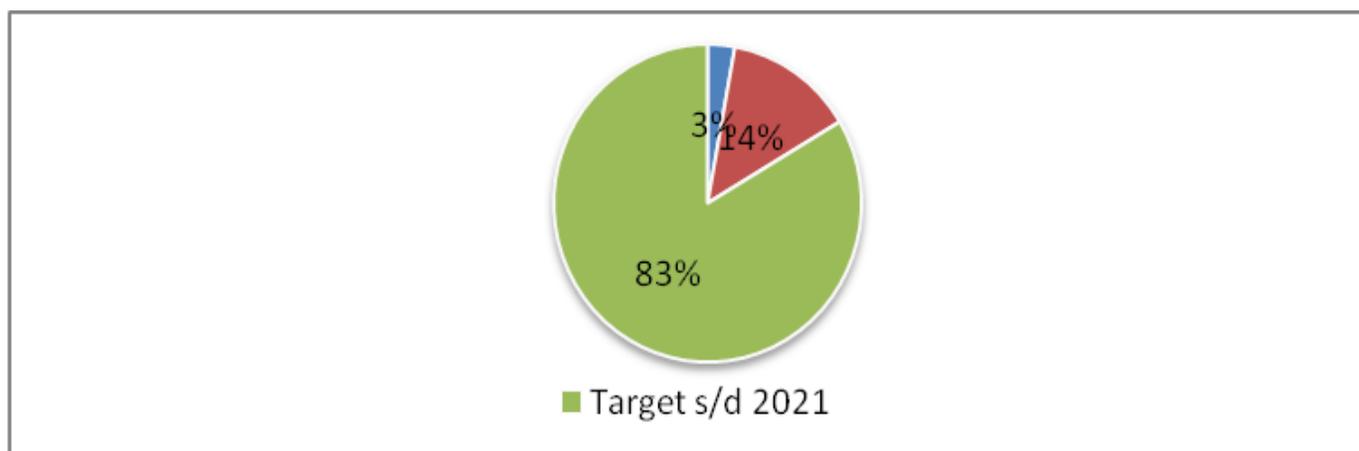
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021.

Gambar 2.20 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Tahun 2018-2020

Berdasarkan Gambar 2.20. sebagaimana di atas terlihat bahwa indeks air dibanding tahun 2020 mengalami penurunan sejumlah 3,47 poin dan indeks udara mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebanyak 7,7 poin. Kedua indeks tersebut diatas yaitu indeks kualitas air dan udara apabila digabung dengan indeks tutupan vegetasi/tutupan lahan dimana indeks tutupan lahan/vegetasi Kab. Klaten tahun 2019 sebesar 42,52 menjadi 42,54. Pada Tahun 2020 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan hasil perhitungan 51,84. Meningkat dibandingkan tahun lalu dimana IKLH Kab. Klaten 50,24, meskipun masih jauh dari target yang diharapkan akan tetapi telah terlihat jelas mengalami progres kenaikan. Dengan adanya komitmen semua pihak instansi terkait diharapkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten pada akhirnya sesuai dengan apa yang ditargetkan/diharapkan.

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL dari target 100% terealisasi 100%. Data perusahaan yang wajib AMDAL sejumlah 9 dan telah dilaksanakan monitoring/pengawasannya.

Perhitungan penegakan hukum lingkungan berdasarkan data jumlah aduan yang masuk kepada Pemda dan diteruskan ke DLHK kemudian ditindaklanjuti sehingga aduan/masalah lingkungan yang ada di masyarakat Kabupaten Klaten dapat terfasilitasi atau terselesaikan. Adapun data selama tahun 2019 sebanyak 5 aduan masyarakat di mana 5 kasus sudah terselesaikan (100%). Hasil tahun 2019 lebih baik dari pada tahun 2018 dimana persentase capaian indikator sasaran ditahun 2018 sebesar 83% menjadi 100% di tahun 2019.



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2021.

Gambar 2.21 Capaian Konservasi Penghijauan Daerah Sumber Mata Air Kabupaten Klaten Tahun 2018-2019 dan Target sampai tahun 2021.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran: **Menjaga Kualitas Lingkungan Hidup** dilaksanakan dengan program:

1. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
2. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
3. Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH;
4. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;

5. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
6. Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).

Permasalahan:

1. Belum sinerginya antar pelaku pemangku kepentingan dalam mengelola lingkungan hidup; dan
2. Tingginya tingkat pencemaran limbah domestik.

Solusi:

Kewenangan dalam pengendalian IPAL domestik bukan menjadi kewenangan Dinas LHK melainkan Perwaskim sehingga diharapkan kedepan adanya program dan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengatasi permasalahan pencemaran limbah air domestik di sungai.

37. Sasaran Pengurangan Kerentanan Risiko Bencana;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengamanatkan perlunya pengaturan yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (Pasal 1 butir 10 UU PPLH).

Sehingga potensi dampak dan/atau resiko lingkungan yang mungkin ditimbulkan oleh suatu kebijakan, rencana, dan/atau program, sebelum pengambilan keputusan dilakukan, dapat diantisipasi. Dampak dan/atau resiko lingkungan yang mungkin timbul oleh suatu kebijakan, rencana, dan/atau program, oleh Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 dikategorikan, antara lain sebagai potensi: meningkatkan resiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan, keanekaragaman hayati, banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan sekelompok masyarakat, dan/atau meningkatkan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

Berbagai hal tersebut di atas, perlu ada upaya pengurangan kerentanan resiko bencana dengan cara menggerakkan partisipasi masyarakat. Salah satu bentuk upaya tersebut perlunya penguatan masyarakat dengan menciptakan desa tangguh bencana dengan berbagai instrumen yang diperlukan.

Adapun capaian sasaran: **Terwujudnya Pengurangan Kerentanan Risiko Bencana** sebagaimana Tabel 2.84.

Tabel 2.84.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Terwujudnya Pengurangan Kerentanan Risiko Bencana

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Kelas Indeks Kapasitas Bencana	0	Sedang	Sedang (123,20)	Sedang (119)	Sedang (123,20)	103,53	Sedang	Sedang

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2021.

Pada tahun 2020 upaya untuk mewujudkan desa tangguh bencana belum optimal, sementara ini baru diupayakan dengan rintisan “**Desa Paseduluran**” dan Kabupaten Tangguh Bencana, serta untuk mendukung pencapaian sasaran: **Terwujudnya Pengurangan Kerentanan Risiko Bencana** di Kabupaten Klaten dengan upaya penguatan mitigasi bencana.

Kondisi kebencanaan yang wajib diperhatikan, diantaranya:

- 1) Bencana Banjir, sering terjadi di Kecamatan Cawas dan Karangdowo merupakan wilayah yang paling sering terkena banjir. Wilayah di Kabupaten Klaten yang termasuk dalam daerah rawan banjir adalah wilayah yang berada di sepanjang Sungai Bengawan Solo. Wilayah tersebut meliputi sebagian Kecamatan Prambanan, Gantiwarno, Wedi, Bayat, Kalikotes, Cawas, Karangdowo, Juwiring, Wonosari, Pedan, Ceper dan Trucuk. Rawan bencana lainnya yang ada di Kabupaten Klaten adalah gempa bumi dan tanah longsor.
- 2) Gempa bumi, Wilayah di Kabupaten Klaten termasuk daerah rawan gempa bumi dengan klasifikasi rendah, menengah hingga tinggi. Sebagian besar wilayah termasuk dalam klasifikasi rendah dan menengah. Di sebagian wilayah Kecamatan Polanharjo, Delanggu, Juwiring dan Wonosari termasuk daerah rawan bencana gempa bumi tinggi.
- 3) Rawan bencana tanah longsor/ gerakan tanah yang ada di Kabupaten Klaten terdiri dari gerakan tanah sangat rendah hingga tinggi. Gerakan tanah tinggi berada di Kecamatan Kemalang yang merupakan wilayah terdekat dengan Gunung Merapi. Sedangkan untuk gerakan tanah sedang berada di sebagian wilayah Kemalang, Bayat dan Gantiwarno.
- 4) Selain kejadian bencana di atas, di Kabupaten Klaten juga terdapat wilayah yang berada di lereng gunung api yaitu Gunung Merapi. Beberapa wilayah di Kabupaten Klaten yang berada di sekitar lereng gunung api termasuk dalam kawasan rawan bencana erupsi gunung api. KRB III merupakan kawasan yang letaknya berdekatan dengan sumber bahaya Gunungapi Merapi. Jika Gunungapi Merapi mengalami erupsi maka pada kawasan ini sering dilanda awan panas, aliran lava, guguran batu, dan lontaran batu (pijar) sehingga kawasan ini memiliki ancaman resiko tinggi. KRB II merupakan kawasan yang berpotensi terlanda dua hal, yaitu aliran massa berupa awan panas, aliran lava,

dan lahar dan lontaran berupa jatuhnya piroklastik lebat dan lontaran batu (pijar).

Pada tahun 2020 program yang dilaksanakan untuk sasaran Terwujudnya Pengurangan Kerentanan Risiko Bencana dengan program, diantaranya:

1. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
2. Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana; dan
3. Peningkatan Pengelolaan Logistik;

Permasalahan :

1. Masih rendahnya perencanaan berbasis mitigasi bencana; dan
2. Sulitnya persyaratan dan dukungan pembiayaan Kabupaten Tangguh Bencana.

Solusi :

Berdasarkan perkembangan Indeks Risiko Bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi melalui arah kebijakan:

- 1) Mengurangi risiko bencana; dan
- 2) Meningkatkan ketangguhan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana, dilaksanakan melalui strategi:
 - (1) Internalisasi Pengurangan Risiko Bencana dalam kerangka pembangunan berkelanjutan di Pusat dan Daerah;
 - (2) Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana; dan
 - (3) Peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam Penanggulangan Bencana.

<p>38. Sasaran Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Politik dan Demokrasi;</p>

Memperhatikan luas wilayah 65.556 ha (655,56 km²) yang mencakup 26 Kecamatan, 391 Desa serta 10 Kelurahan, sementara ini diukur dari jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk baru pada kisaran 89,83 dengan rasio Pos Siskamling per jumlah penduduk pada kisaran angka 2,49, dan cakupan penegakan Perda baru mencapai 90,91 hal ini disebabkan karena luasan wilayah, jumlah penduduk serta kompleksitas permasalahan kemasyarakatan tidak sebanding dengan jumlah Linmas. Sehingga perlunya pemberdayaan masyarakat dalam ikut menjaga ketentraman dan ketertiban untuk menekan angka kriminalitas menjadi alternatif dalam menjaga kondusivitas daerah.

Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Politik dan Demokrasi** sebagaimana Tabel 2.85.

Tabel 2.85.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Politik dan Demokrasi

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Indeks Demokrasi	69,75	72,17	72,17	80	77,22	96,53	75,70	102

Sumber: Kesbangpol Klaten 2021.

*) Angka sementara, mengingat tahun 2020 update data dalam proses.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan indeks komposit yang diukur berdasarkan 3 (tiga) aspek, diantaranya: 1) kebebasan sipil, 2) hak-hak politik, dan 3) lembaga demokrasi. Penetapan besaran IDI ditetapkan dengan skala nilai 0-100. Penetapan nilai IDI di Kabupaten Klaten mengikuti angka Provinsi Jawa Tengah, karena melakukan pengukuran dan penghitungan Provinsi. Adapun capaian IDI Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018 sebesar 72,17 dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 77,22%.

Pengukuran atas indeks komposit pembentuk IDI pada tahun 2020, diperoleh dari komponen: 1) Kebebasan Sipil (skor 78,43), 2) Hak-Hak Politik (skor 67,91), dan 3) Lembaga Demokrasi (skor 90,50).

Berdasarkan capaian IDI, selanjutnya dikelompokkan berdasarkan kategori baik (indeks > 80), kategori sedang (indeks 60-80), dan kategori buruk (indeks < 60). Oleh karena itu pencapaian IDI pada tahun 2019 angka sementara (sama dengan tahun 2018) memperoleh skor 72,17 dengan kategori sedang.

Pada tahun 2020, program yang dilaksanakan untuk sasaran Meningkatnya: **Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Politik dan Demokrasi** diantaranya:

1. Pengembangan Wawasan Kebangsaan; dan
2. Peningkatan dan Pembinaan Kehidupan Sosial Politik;

Permasalahan:

- a. Masih munculnya berbagai penyakit masyarakat;
- b. Adanya ancaman pergerakan terorisme yang berkembang di Klaten; dan
- c. Masih rendahnya kualitas politik masyarakat.

Solusi :

- a. Pengendalian dan pencegahan dini munculnya berbagai penyakit masyarakat; dan
- b. Pembinaan kualitas politik masyarakat yang bermartabat dan kepribadian Indonesia.

39. Sasaran *Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya;*

Ukuran keberhasilan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya diantaranya diukur dengan indikator Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan). Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 391 desa, dan 10 kelurahan, dengan jumlah kecamatan 10 merupakan target sasaran pembinaan dan fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya melalui lembaga desa untuk menuju ketahanan desa dan kemandirian desa.

Adapun capaian sasaran: ***Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya*** disajikan pada Tabel 2.86.

Tabel 2.86.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Pelestarian Adat dalam Pengembangan
Kehidupan Sosial Budaya

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)	16	49	58	83	61	73,49	100	61

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2021.

Berdasarkan capaian Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya pada tahun 2019 per kelompok rata-rata anggotanya sebanyak 58 orang, atau naik sebanyak 9 orang (atau 18,37%) dibanding tahun 2018, sedangkan pada tahun 2020 per kelompok rata-rata anggotanya sebanyak 61 orang.

Apabila per kelompok rata-rata anggotanya sebanyak 58 orang dan diakumulasi dengan jumlah desa/kelurahan sudah merupakan modal sosial untuk melestarikan adat dalam pengembangan kehidupan sosial yang memadai sampai tingkat kabupaten. Tinggal bagaimana pembinaan dan fasilitasi kegiatan dapat dilakukan dengan baik.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Pelestarian Adat

dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya yang didukung dengan program, diantaranya:

1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa;
2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
3. Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.

Permasalahan :

- a. Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya untuk menjaga keutuhan suatu bangsa;.
- b. Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait, dalam pelaksanaan Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya;
- c. Belum adanya sarana informasi Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

Solusi :

- a. Peningkatan sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya; dan
- b. Peningkatan sarana informasi Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

40. Sasaran Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;

Ukuran keberhasilan Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat diantaranya diukur dengan indikator Indeks ketertiban masyarakat. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 391 desa, dan 10 kelurahan, dengan jumlah kecamatan 10 merupakan target sasaran Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Adapun capaian sasaran: **Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat** disajikan pada Tabel 2.87.

Tabel 2.87.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Indeks Ketertiban Masyarakat	90	92,2	96	99	98	98,99	100	98,99

Sumber: Satpol PP, 2021.

Berdasarkan capaian Pemeliharaan ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagaimana Tabel 2.82. di atas, memperhatikan luas wilayah 65.556 ha (655,56km²) yang mencakup 26 Kecamatan, 391 Desa serta 10 Kelurahan, sementara ini diukur dari jumlah Linmas per jumlah

10.000 baru pada kisaran 89,83 dengan rasio Pos Siskamling per jumlah penduduk sudah mencapai kisaran angka 2,49, dan cakupan penegakan Perda pada tahun 2018 mencapai 90,91% dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 96% (dari sebanyak 1,254 kasus penegakan Perda dan yang diselesaikan sebanyak 1.159 kasus yang diselesaikan) kemudian pada tahun 2020 meningkat lagi menjadi 98%. Hal ini disebabkan karena luasan wilayah, jumlah penduduk serta kompleksitas permasalahan kemasyarakatan tidak sebanding dengan jumlah Linmas. Sehingga perlunya pemberdayaan masyarakat dalam ikut menjaga ketentraman dan ketertiban untuk menekan angka kriminalitas menjadi alternatif dalam menjaga kondusivitas daerah.

Jenis kegiatan untuk mendukung pencapaian urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan yang dilaksanakan diantaranya: koordinasi pengamanan wilayah, optimalisasi peran Peningkatan Kinerja Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Toma/ga dan lembaga lainnya, Penegakan Perda, Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, dan Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Hal tersebut juga diharapkan mampu untuk mencegah, menekan, dan/atau menyelesaikan terjadinya konflik sosial maupun konflik yang dilatarbelakangi masalah SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan). Berbagai permasalahan yang dihadapi bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan, diantaranya:

1. Penyakit Masyarakat

Data yang tersaji tentang berbagai penyakit masyarakat didapatkan berdasarkan Hasil operasi penertiban pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT), data tersebut adalah mengenai data pelacuran dan peredaran minuman keras/beralkohol. Salah satu jenis penyakit masyarakat yang menonjol yaitu kasus pelacuran dalam kurun waktu Tahun 2016-2020 kasusnya bersifat fluktuatif, data kondisinya disajikan pada Tabel 2.88.

Tabel 2.88
Rekapitulasi Data Hasil Operasi Penertiban
Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Tahun 2016-2020

No	Tahun	Jumlah kegiatan	Hasil Operasi Penertiban					
			PGOT		PSK / WTS	Pasangan Tidak Resmi	Anjal/punk	
			Pria	Wanita			Pria	Wanita
1	2016	12	14	7	8	46	12	4
2	2017	15	15	8	6	58	12	14
3	2018	15	8	6	10	78	18	7
4	2019	20	12	5	12	37	38	8
5	2020	16	17	15	6	54	31	17
SANKSI								
<ul style="list-style-type: none"> - Bagi WTS/PSK dan Anjal wanita langsung dikirim ke Barehsos WANODYATAMA Surakarta selama 6 bulan. - Bagi Anjal pria dikirim ke PPSA Mandiri Semarang. - Bagi PGOT yang terjaring diserahkan ke Rumah Singgah Klaten guna assesment dan tindak lanjut. - Bagi Pasangan tidak resmi diwajibkan wajib lapor pembinaan sebanyak 20 kali di SATPOL PP. 								

Sumber: Satpol PP Kab. Klaten, 2021.

Berdasarkan Tabel 2.88. sebagaimana tersebut di atas, trend pelanggaran Peraturan Daerah khususnya masalah penyakit masyarakat semakin besar jumlahnya dibandingkan jumlah pelanggaran Peraturan Daerah secara umum, hal ini disebabkan:

- a. Tingkat kesadaran warga masyarakat yang rendah;
- b. Kurangnya sosialisasi peraturan daerah dimaksud sampai kepedesaan/pelosok;
- c. Persaingan ekonomi dan gaya hidup kekinian mendorong masyarakat dan remaja melakukan perbuatan yang cenderung kriminal dan mengganggu ketertiban umum; dan
- d. Penerapan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan daerah belum mampu membuat efek jera para pelanggar.

Berikut Rekapitulasi Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Jenis Minuman Keras/Beralkohol selama tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.89.

Tabel 2.89.
Rekapitulasi Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan
Penyakit Masyarakat (PEKAT) Jenis Minuman Keras/ Beralkohol
Tahun 2016-2020

No	Tahun	Jumlah kegiatan	Hasil Operasi Penertiban			
			Ciu	Vodka	Anggur putih	Anggur merah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	2016	4	60 liter	-	2 dus	2 dus
2	2017	3	50 liter	48 botol	4 dus	6 dus
3	2018	0	0	0	0	0
4	2019	2	0	24 botol	7 botol	14 botol
5	2020	4	0	45 botol	18 botol	138 botol
SANKSI						
- Barang bukti miras diserahkan ke Polres guna pemusnahan terpadu;						
- Para pelaku pelanggaran dilakukan tipiring oleh Penyidik Polres Klaten.						

Sumber: Satpol PP Kab. Klaten, 2021.

Berdasarkan Tabel 2.89. sebagaimana tersebut di atas, minuman keras/beralkohol yang ditemukan berdasarkan hasil operasi penertiban pemberantasan penyakit masyarakat (PEKAT) jumlahnya juga bersifat fluktuatif. Hal ini tergantung pada situasi sosial budaya masyarakat yang sering kali menjadi baluran tindak kriminal yang mengiringinya.

2. Ancaman Terorisme

Adanya Ancaman Terorisme, Konflik SARA (baik Vertikal maupun Horizontal) dan gerakan yang bersifat radikalisme yang kadang bersifat laten serta kenakalan remaja masih sering terjadi. Kondisi permasalahan ketentraman umum selama tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.90.

Tabel 2.90.
Kondisi Jenis Permasalahan Ketentraman Umum
Tahun 2016-2020

No.	Jenis Permasalahan	Tahun (Jumlah Kejadian)				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Ancaman Terorisme	17	-	-	1	-
2.	Konflik Sara	17	3	1	1	7
3.	Gerakan Radikalisme	21	9	2	1	1

Sumber: Kantor Kesbangpol, 2021.

Berdasarkan Tabel 2.90. sebagaimana tersebut di atas jenis permasalahan ketentraman umum di Kabupaten Klaten secara umum mengalami penurunan. Ancaman terorisme hanya terjadi pada tahun 2016 yaitu sebanyak 17 kasus. Sedangkan konflik sara terjadi terbanyak pada tahun 2016 yaitu sebanyak 17 kasus, sedangkan Gerakan Radikalisme sebanyak 21 kasus. Rata-rata jumlah dari jenis permasalahan di tahun terakhir mengalami penurunan hal ini disebabkan karena intensifnya kegiatan forum kerukunan umat beragama untuk meminimalisir permasalahan ketentraman umum.

3. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas dirumuskan: $\text{Jumlah kriminalitas tertangani} / \text{jumlah penduduk} \times 10.000$ (Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) maka diperoleh data angka kriminalitas sebagai berikut:

a. Tahun 2016 : 4,19

Jumlah kriminalitas tertangani 546 kasus dibagi jumlah penduduk 1.300.706 dikali 10.000.

b. Tahun 2017 : 3,25

Jumlah kriminalitas tertangani 424 kasus dibagi jumlah penduduk 1.304.519 dikali 10.000.

c. Tahun 2018 : 1,89.

Jumlah kriminalitas tertangani 248 kasus dibagi jumlah penduduk 1.314.781 dikali 10.000

d. Tahun 2019 : 2,73

Jumlah kriminalitas tertangani 361 kasus dibagi jumlah penduduk 1.323.609 dikali 10.000.

e. Tahun 2020 : 1,81

Jumlah kriminalitas tertangani 240 kasus dibagi jumlah penduduk 1.327.577 dikali 10.000.

Sumber Kesbangpol, 2021.

Angka Kriminalitas belum bisa ditekan, hal ini disebabkan beberapa permasalahan, diantaranya: 1). Bentuk dan modus kejahatan (tindak pidana) pun

terus berkembang, sehingga penanganannya pun harus beda. 2). Selain itu meningkatnya tindak kriminal disebabkan persoalan seperti, ekonomi, sosial, konflik dan rendahnya kesadaran hukum, kemajuan teknologi informasi yang mendorong terjadinya bentuk-bentuk tindak yang didasari atau pun tidak. 3). Selain itu rendahnya ketaatan pelaksanaan terhadap Perda/Perbup karena kurangnya sosialisasi, dan terbatasnya sumber daya manusia aparatur penegak Perda/Perbup.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran: **Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat** yang didukung dengan program, diantaranya:

1. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan;
2. Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat);
3. Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
4. Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindakkriminal; dan
5. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.

Permasalahan :

- a. Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat untuk menjaga keutuhan suatu bangsa;
- b. Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait, dalam pelaksanaan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
- c. Belum adanya sarana informasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan masyarakat lebih senang mengkonsumsi berita hoax sebagai komoditas politik.

Solusi :

- a. Peningkatan sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
- b. Peningkatan sarana informasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas untuk melawan berita *hoax*.

41. Sasaran Meningkatkan Kapasitas Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak;

Peningkatan kapasitas perempuan, dan perlindungan anak merupakan salah satu tujuan/*goals* dari pembangunan berkelanjutan (SDGs). Penyebaran jumlah penduduk yang tidak merata, serta besarnya jumlah jiwa sudah barang tentu akan terkait dengan masalah pangan, gizi, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan khusus anak menjadi hal krusial yang harus diwujudkan untuk melindungi anak. Sehingga perlunya penguatan kelembagaan anak, perlunya hak sipil dan kebebasan, serta perlindungan khusus terhadap tumbuh kembang anak perlu menjadi perhatian serius. Data menunjukkan 14,47 persen penduduk Indonesia termasuk dalam kelompok sangat rawan pangan (asupan kalori <1.400

Kkal/orang/hari), 5,38 persen prevalensi gizi kurang hal ini menunjukkan bahwa *foodborne disease* merupakan masalah kesehatan masyarakat yang perlu diantisipasi bagi tumbuh kembang anak.

Secara khusus, peningkatan kapasitas perempuan diukur dengan indikator Indeks Pemberdayaan Gender (IPG), dan Indeks Pembangunan Gender (IDG). Sedangkan kondisi umum pencapaian dan permasalahan yang dihadapi perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Klaten, diantaranya terkait : (1). Penguatan kelembagaan, (2). Hak sipil dan kebebasan, (3). Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, (4). Kesehatan dasar dan kesejahteraan, (5). Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan kreatif, serta (6). Perlindungan khusus.

Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Kapasitas Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak** disajikan pada Tabel 2.91.

Tabel 2.91.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Kapasitas Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	59,95	60,25	60,25	60,3	72,35	119,98	60,37	119,84
2.	Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	Madya	Madya (650)	Madya (650)	Nindya (750)	Madya (650)	86,67	Nindya (750)	86,67

Sumber: Dinas Sosial, P3A dan KB, 2021.

Catatan: capaian tahun 2020 angka sementara, karena rilis data belum keluar.

Pada tabel 2.91 menunjukkan bahwa pada tahun 2020 Indeks Pemberdayaan Gender meningkat menjadi 72,35%. Indikator kinerja keberhasilan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diukur dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Gender (IPG);

Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2016-2020 menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan meskipun pada tahun 2016 sempat mengalami penurunan. Peningkatan ini disebabkan adanya komitmen pemerintah Daerah untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan, hanya saja peningkatan ini perlu ditunjang dengan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender yang optimal. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.92.

Tabel 2.92.
Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
IPG	73,97	96,54	96,62	96,62	96,62

Sumber : Dinsos P3A dan KB, 2020.

Catatan: *) angka sementara

Berdasarkan Tabel 2.92 sebagaimana tersebut di atas, selama dua tahun terakhir IPG tidak mengalami peningkatan dari tahun 2018 sebesar 96,62% dan pada tahun 2019 sementara tetap 96,62%. Perlunya peningkatan kerjasama yang baik antara pemangku kepentingan melalui penguatan lembaga P2TP2A, dan dukungan penganggaran responsif gender diharapkan akan meningkatkan IPG.

2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) selama tahun 2016-2020 menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan meskipun pada tahun 2017 sempat mengalami penurunan. Peningkatan ini disebabkan adanya komitmen pemerintah Daerah untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan. Perkembangan Indeks komposit pembentuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.93.

Tabel 2.93.
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Klaten Periode 2016-2020

No.	Indikator	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%)	6,00	6,00	6,00	18	18
2	Perempuan Sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi (%)	49,7	43,65	52,71	52,71	55,73
3	Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja (%)	37,69	37,76	37,77	37,77	37,81
4	IDG	59,95	59,60	60,25	60,25	72,35

Sumber : Dinas Sosial, P3A dan KB, 2021.

Catatan: *) angka sementara update terakhir per Februari 2020. (IDG)

Berdasarkan Tabel 2.93. sebagaimana tersebut di atas bisa dilihat perkembangan Indeks komposit pembentuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) selama tahun 2016-2020 bersifat relatif fluktuatif, hal ini dikarenakan budaya *patriarki* yang masih kuat. Hal ini termanifestasi dalam bentuk *stereotype*, marginalisasi, subordinasi, tindak kekerasan dan beban ganda perempuan, dan adanya deskriminasi pada upah pekerja perempuan di sektor non formal. Khusus Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%) pada tahun 2019 angkanya mencapai 18% (atau 9 perempuan dari total anggota DPRD sebanyak 50 orang).

3. Peran Perempuan dalam Pemerintahan

Partisipasi perempuan dalam pembangunan dapat dilihat dari posisi perempuan dalam jabatan eksekutif dan legislatif selama tahun 2016-2020 relatif

stagnan, hal ini disebabkan karena masih rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap perempuan untuk menduduki posisi jabatan eksekutif dan legislatif. Perkembangan keterwakilan peran perempuan dalam jabatan pemerintahan, dan Lembaga Perwakilan Rakyat selama tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.94.

Tabel 2.94.
Keikutsertaan Perempuan di dalam Jabatan Eksekutif
dan Legislatif di Kabupaten Klaten
Tahun 2016-2020

No.	Jenis Jabatan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Eksekutif (%)	(7.072/27.344)= 25,86	56,6	57	59,7	14,35
2	Legislatif (%)	(3/50) = 6,00	(3/50) = 6,00	(3/50) = 6,00	(9/50) = 18	(9/50) = 18

Sumber: Dinsos P3A dan KB, 2021 (diolah.)

Berdasarkan Tabel 2.94. sebagaimana tersebut di atas, keterlibatan perempuan di lembaga legislatif pada tahun 2015-2018 stagnan karena masih dalam satu periode DPRD hasil Pemilu tahun 2014, hanya dalam jabatan eksekutif mulai tahun 2017 persentasenya meningkat, hal ini seiring dengan peningkatan kualitas dan kemampuan perempuan dalam mengisi formasi jabatan publik.

4. Perlindungan Anak

Upaya perlindungan anak dan perempuan ditunjukkan dengan meningkatnya penyelesaian terhadap kasus kekerasan yang berbasis gender dan anak disebabkan karena secara intensif telah dilakukan sosialisasi tentang hukum dan peraturan lainnya berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak kepada masyarakat. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilihat pada Tabel 2.95.

Tabel 2.95.
Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
Berhadapan dengan Hukum di Kabupaten Klaten 2016-2020

Tahun	Fisik		Psikis		Seksual		Penelantaran		Traficking		Jumlah
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2016	11	16	2	8	0	29	0	6	0	1	73
2017	9	6	3	5	0	12	0	7	1	0	43
2018	7	8	2	5	0	22	1	6	0	0	51
2019	6	7	9	3	5	15	4	8	0	0	57
2020	4	11	1	8	0	13	0	3	0	0	40

Sumber: Dinsos P3A dan KB, 2021.

Berdasarkan Tabel 2.95. sebagaimana tersebut di atas, selama dua tahun terakhir (tahun 2018-2019) jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berhadapan dengan hukum (ABH) mengalami peningkatan sebesar 6 kasus dari tahun 2018 sebesar 51 kasus menjadi 57 kasus di tahun 2019, hal ini disebabkan belum optimalnya perlindungan perempuan dan anak dalam menghadapi

kekerasan. Pada tahun 2020 jumlah anak yang berhadapan dengan hukum berkurang menjadi 40 kasus.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran Peningkatan Kapasitas Perempuan, dan Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Klaten didukung dengan program:

1. Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak;
2. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
3. Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan; dan
4. Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan.

Permasalahan:

- a. Masih kurangnya kebijakan pembangunan yang berpihak pada perempuan dan anak;
- b. Lemahnya kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
- c. Masih adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
- d. Sistem kesejahteraan dan perlindungan anak belum memadai.

Solusi:

- a. Peningkatan kebijakan pembangunan yang berspektif perempuan dan anak;
- b. Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak;
- c. Peningkatan pendampingan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan; dan
- d. Peningkatan sistem kesejahteraan dan perlindungan anak.

42. Sasaran *Meningkatnya Kualitas Layanan Perhubungan;*

Ukuran keberhasilan meningkatnya kualitas layanan perhubungan diantaranya diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Layanan Perhubungan, terkait dengan aspek keselamatan, keamanan, kemudahan dan kesetaraan dalam penyelenggaraan angkutan serta kepuasan bagi pengguna layanan perhubungan. Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Indeks Kepuasan Layanan Perhubungan** disajikan pada Tabel 2.96.

Tabel 2.96.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Meningkatkan Kualitas Layanan Perhubungan

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Indeks kepuasan layanan perhubungan	75,99	78,95	79,02	81,09	79,95	98,59	81,08	98,61

Sumber: Dinas Perhubungan, 2021.

Indeks Kepuasan Layanan Perhubungan merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.

Berdasarkan capaian Meningkatnya Kualitas Layanan Perhubungan sebagaimana Tabel 2.96. di atas yaitu mencapai 79,95% di tahun 2020 yang berarti meningkat dari tahun sebelumnya, ditunjang adanya ketersediaan prasarana perhubungan jalan yang memadai untuk pengangkutan barang dan jasa. Adapun kondisi sarana perhubungan pada saat ini dapat dicerminkan dari keberadaan sarana transportasi darat yang terdiri mobil barang, kendaraan khusus dan angkutan publik. Jumlah sarana angkutan (Umum dan Pribadi) disajikan pada Tabel 2.97.

Tabel 2.97.
Jumlah Sarana Angkutan (Umum dan Pribadi)
di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Jenis Kendaraan	Tahun (unit)				
	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01 Mobil Barang	10.657	9.622	8.878	8.591	8.072
02 Mobil Bus					
* Umum	464	397	384	408	391
<i>Bus Besar</i>	44	65	97	88	91
<i>Bus Sedang</i>	131	261	248	268	215
<i>Bus Kecil</i>	289	71	39	52	85
* Bukan Umum	137	105	111	117	97
03 Kendaraan Khusus/Alat Berat	9	6	10	21	7
Jumlah	11.731	10.527	9.383	9.137	8.567

Sumber : Dinas Perhubungan, 2021.

Disamping Jumlah Sarana Angkutan (Umum dan Pribadi) yang tercatat, juga dimiliki terminal angkutan penumpang umum/sub terminal sebanyak 8 (delapan) lokasi untuk mendukung transportasi darat. Data terminal angkutan penumpang umum pada tahun 2020 disajikan pada Tabel 2.98.

Tabel 2.98.
Data Terminal Angkutan Penumpang Umum
di Kabupaten Klaten Tahun 2020

No	Terminal	Alamat	Type	Luas
1	2	3	4	5
1	Penggung	Penggung, Ceper, Klaten	C	4500 m ²
2	Cawas	Cawas, Klaten	C	3000 m ²
3	Teloyo	Teloyo, Wonosari, Klaten	C	3310 m ²
4	Pasar Klaten	Klaten Tengah	C	600 m ²
5	Bendogantungan	Bendogantungan, Klaten Selatan	C	3168 m ²
6	Tulung	Tulung, Klaten	C	400 m ²
7	Manisrenggo	Manisrenggo, Klaten	C	1785 m ²
8	Delanggu	Karang, Klaten	C	7000 m ²

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, 2021.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran **Meningkatnya Kualitas Layanan Perhubungan** yang didukung dengan program Peningkatan Pelayanan Angkutan.

Permasalahan:

- a. Tingginya mobilitas penduduk, diperlukan sarana perhubungan massal yang terjangkau dan mudah. Namun banyak kondisi angkutan umum yang sudah tidak laik jalan;.

- b. Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait, dalam pelaksanaan pemenuhan layanan perhubungan; dan
- c. Belum optimalnya sarana informasi layanan perhubungan yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

Solusi:

- a. Peningkatan sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait layanan perhubungan; dan
- b. Peningkatan sarana informasi layanan perhubungan yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

43. Sasaran *Meningkatnya Pelayanan Perijinan Satu Pintu yang Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Sasaran dan Tepat Manfaat;*

Ukuran keberhasilan meningkatnya pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat diukur dengan indikator Nilai Survei Kepuasan Masyarakat. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 391 desa, dan 10 kelurahan, dengan jumlah kecamatan 10 merupakan target sasaran Pelayanan Perijinan Satu Pintu dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) untuk menuju ketahanan desa dan kemandirian desa, serta daya saing Daerah.

Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Pelayanan Perijinan Satu Pintu yang Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Sasaran dan Tepat Manfaat** disajikan pada Tabel 2.99.

Tabel 2.99.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Pelayanan Perijinan Satu Pintu yang Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Sasaran dan Tepat Manfaat

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	84,50	80,52	78,37	80	81,60	102,00	80,00	102

Sumber: DPM dan PTSP, 2021.

Berdasarkan tanggapan penggunaan layanan ketika disurvei secara mandiri oleh Dinas Penanaman Modal, dan Perijinan Satu Pintu nilai Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 81,60 (artinya kategori baik). Perolehan indeks ini didasarkan atas penilaian atas 8 (delapan) unsur pelayanan, diantaranya: a. Persyaratan, b. Prosedur, c. Waktu pelayanan, d. Biaya/tarif, e. Produk layanan, f. Kompetensi pelaksana, g. Perilaku pelaksana, h. Maklumat pelayanan, dan i. Penanganan pengaduan.

Disamping itu pada tahun 2019 tercatat kinerja layanan satu pintu diukur dari jumlah penerbitan Surat Izin usaha berdasarkan jenis usaha, diantaranya: 1. *Perusahaan kecil sebanyak 61 izin usaha*, 2. *Perusahaan menengah sebanyak 367*

izin usaha, dan 3. Perusahaan besar sebanyak 73 izin usaha. Sedang izin ganggu (HO) menurut bentuk badan usaha, diantaranya: 1. Perusahan Terbatas (PT) sebanyak 46 PT, 2. CV sebanyak 73, dan 3. Lainnya sebanyak 193 HO. Sedangkan pada tahun 2020 jumlah izin OSS sebanyak 4.748 izin, sedangkan penerbitan Non OSS sebanyak 1.987 izin.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran pelayanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat yang didukung dengan program Peningkatan Pengembangan Pelayanan Perizinan.

Permasalahan:

- a. Belum ada jaminan kepastian dan kenyamanan berinvestasi;
- b. Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait, dalam pelaksanaan pemenuhan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat; dan
- c. Belum optimalnya sarana informasi layanan perijinan satu pintu yang tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

Solusi:

- a. Percepatan realisasi pelaksanaan Tugas Satgas Percepatan Realisasi Investasi; dan
- b. Penyusunan rencana Aksi Daerah Percepatan Investasi Daerah.

44. Sasaran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Berkualitas;

Ukuran keberhasilan peningkatan kualitas pelayanan publik tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat diantaranya diukur pada layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Jumlah penduduk pada tahun 2020 tercatat sebanyak 1.323.609 orang, yang sudah memiliki e-KTP sebanyak 957.821 orang dan yang mempunyai Akte Kelahiran sebanyak 1.313.742 orang.

Adapun capaian sasaran: **Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Berkualitas** sebagaimana Tabel 2.100.

Tabel 2.100.

Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Berkualitas

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Indeks kepuasan layanan masyarakat thd layanan administrasi	Sdh	82,74	91,77	Sdh (92,7)	Sdh (81,6)	88,03	sdh	Sdh

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2021.

Pengelolaan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil meliputi 3 (tiga) bidang, yaitu : (i) Pendaftaran Penduduk, (ii) Pencatatan Sipil, dan (iii) Pengelolaan Informasi Kependudukan. Pendaftaran Penduduk dengan produk Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Keterangan Kependudukan (SKK). Pencatatan Sipil dengan produk Akte Kelahiran, Akte Kematian, Akte Perkawinan, Akte Pengangkatan Anak dan Akte Pengakuan/Pengesahan Anak. Pengelolaan Informasi Kependudukan dengan produk data/informasi kependudukan yang berupa olahan proses dari pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Perkembangan jumlah pelayanan akte di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.101.

Tabel 2.101.
Jumlah Pelayanan Akte di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

No	Jenis Akte	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Kelahiran	22.356	23.256	27.755	26.582	19.511
2	Kematian	615	1.400	2.116	1.800	2,922
3	Perkawinan	441	450	473	472	397
4	Perceraian	58	58	71	76	166

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2021.

Berdasarkan Tabel 2.102, untuk mewujudkan penerapan *Single Identity Number* program e-KTP sampai dengan tahun 2020 baru tercatat penduduk yang ber-KTP sebanyak 957.821 orang, dan yang mempunyai Akte Kelahiran sebanyak 1.313.742 orang. Kondisi masyarakat Kabupaten Klaten yang belum memiliki kartu identitas (baik kartu identitas dalam bentuk akte lahir dan Kartu Tanda Penduduk) dalam kurun waktu tahun 2016-2020 cenderung menurun, hal ini dapat dilihat dari Tabel 2.101. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen resmi kependudukan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan secara signifikan. Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Klaten yang belum memiliki Akte Lahir dan KTP Elektronik tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.102.

Tabel 2.102.
Penduduk Kabupaten Klaten yang Belum Ber-Akte Lahir dan KTP Elektronik Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Belum Memiliki Akte Lahir	Belum Memiliki KTP Elektronik
1	2016	927.310	93.846
2	2017	894.986	91.538
3	2018	877.190	71.223
4	2019	850.325	55.921
5	2020	827.614	19.522

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2021.

Berdasarkan Tabel 2.97. sebagaimana tersebut di atas jumlah penduduk Kabupaten Klaten yang belum memiliki Akte Lahir dan KTP Elektronik tahun

2016–2020 cenderung turun, hal ini disebabkan karena validasi data kependudukan untuk mewujudkan penerapan *Single Identity Number* program e-KTP, juga kesadaran penduduk untuk memiliki dokumen kependudukan semakin tinggi. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran strategis **Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Berkualitas** dengan program Penataan Administrasi Kependudukan.

Permasalahan :

- a. Masih kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya dokumen resmi kependudukan.
- b. Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait, dan
- c. Belum adanya sarana informasi kependudukan dan catatan sipil yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

Solusi :

- a. Peningkatan sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait dalam penanganan administrasi kependudukan; dan
- b. Peningkatan sarana informasi kependudukan dan catatan sipil yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

45. Sasaran Pengembangan Ketrasmigrasian;

Ukuran keberhasilan pengembangan ketrasmigrasian diukur dengan indikator Persentase besaran peningkatan minat transmigrasi. Selama tahun 2016-2020 sasaran transmigrasi di daerah: Kalimantan, Sulawesi dan Sumatra, namun mulai tahun 2017-2019 tinggal Sumatra saja yang menjadi tujuan transmigrasi.

Adapun capaian sasaran: **Pengembangan Ketrasmigrasian** disajikan pada Tabel 2.103.

Tabel 2.103.
Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Kinerja Pengembangan Ketrasmigrasian

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Awal RPJMD	Kondisi Tahun		Kondisi Tahun 2020			Target Akhir RPJMD	Capaian s/d Tahun 2020 Thd Target Akhir RPJMD (%)
			2018	2019	Target	Realisasi	%		
1	Persentase besaran peningkatan minat transmigrasi	-64,62	-80	5,2	41,5	5,2	12,53	42	12,38

Sumber: Dinas Perindustrian, Tenaga Kerja dan Tranmigrasi, 2021.

Ukuran keberhasilan peningkatan besaran minat transmigrasi diukur dari jumlah peserta transmigrasi yang terdaftar pada tahun 2019 sebanyak 56 jiwa (20 KK). Sedangkan yang diberangkatkan pada tahun 2019 sebanyak 44 jiwa (14 KK), dan pada tahun 2020 menjadi sebanyak sebanyak 0 jiwa (0 KK).

Adapun peta penyebaran penempatan transmigrasi menurut daerah penempatan tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.104.

Tabel 2.104.
Realisasi Penempatan Transmigrasi Umum Menurut Daerah Penempatan
Tahun 2016-2020

TAHUN	Sumatra		Kalimantan		Sulawesi	
	KK	Jiwa	KK	Jiwa	KK	Jiwa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2016	5	20	10	46	4	17
2017	4	13	-	-	-	-
2018	7	28	-	-	-	-
2019	14	44	-	-	-	-
2020	0	0	-	-	-	-

Sumber : Disperinaker Kabupaten Klaten, 2021.

Berdasarkan Tabel 2.104 sebagaimana tersebut di atas, pengiriman transmigrasi dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan, hal ini dikarenakan berkurangnya kuota penempatan transmigran asal Kabupaten Klaten yang ditetapkan oleh Provinsi Jawa Tengah. Selama ini penempatan transmigrasi Kabupaten Klaten masih tergantung dengan *quota* dan anggaran dari Provinsi Jawa Tengah.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari program yang dilakukan terkait sasaran pengembangan ketransmigrasian yang didukung dengan Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi, dan Program Transmigrasi Lokal.

Permasalahan :

- a. Minimnya minat calon transmigrasi, sekalipun fasilitasi dan pembekalan dari pemerintah cukup;
- b. Penempatan calon transmigrasi itupun harus Provinsi yang menentukan quotanya.
- c. Kurangnya sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait, dalam pelaksanaan penjangkaran sampai penempatan transmigrasi; dan
- d. Belum optimalnya sarana informasi layanan ketransmigrasian yang secara langsung bisa diakses oleh masyarakat luas.

Solusi :

- a. Peningkatan sinkronisasi dan koordinasi antar instansi terkait layanan ketransmigrasian; dan
- b. Peningkatan sarana informasi layanan ketransmigrasian yang secara langsung

f. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan dengan Hasil (Kinerja) yang Telah Dicapai

Untuk mengukur sejauh mana tingkat efektifitas sumber daya pelaksanaan pembangunan Daerah, dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2020, diantaranya mencakup: 1) tingkat efisiensi penggunaan anggaran, dan 2) efektifitas penggunaan sumber daya aparatur. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Efisiensi Penggunaan Anggaran

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 ditetapkan 45 (empat puluh lima) sasaran strategis dengan 67 (enam puluh tujuh) Indikator Kinerja Sasaran yang terdiri dari: 60 (enam puluh) indikator yang sifatnya progresif, dan 7 (tujuh) indikator yang sifatnya represif.

Selanjutnya untuk mengimplementasikan RPJMD, telah ditetapkan pula Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten tahun 2020, dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan APBD Kabupaten Klaten pada tahun 2020 tercatat sebanyak 428 program dengan 2.157 kegiatan. Realisasi fisik tercapai 97% dari target rencana dengan rencana anggaran sebanyak Rp.806.643.941.344,- dan terserap sebesar Rp.667.040.959.363,- (atau 82,66%). Secara rinci tingkat pencapaian efektifitas sumber daya antara sasaran dan realisasi keuangan dapat disajikan pada Tabel 2.105

Tabel 2.105
Tingkat Efisiensi Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Rerata Realisasi Penyerapan Anggaran (%)	Keterangan*)	
		Indikator	Satuan	%				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Terwujudnya pemenuhan kebutuhan pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal	Persentase sekolah dasar yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	189,2	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD): 1. Dinas 2. TK 3. SKB	95,56 93,09 98,56	Efisiensi	
		Persentase sekolah menengah pertama yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan	%	107	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	75,49	Efisiensi	
						Pendidikan Non Formal:		Efisiensi
						1. Dinas	93,21	
						2. SKB	99,78	
						Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	99,18	Efisiensi
						Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	0	Efisiensi
Manajemen Pelayanan Pendidikan	97,19	Efisiensi						
Pengelolaan bantuan Operasional Sekolah (BOS):		Efisiensi						
1. SD	93,75							
2. SMP	90,70							
2	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan menurunnya angka kematian, angka kesakitan dan kecacatan	Kasus kematian Ibu	Kasus	113,33	Upaya Kesehatan Masyarakat: 1. Dinas 2. Puskesmas	86,45 75,51	Tdk efisien	
		Angka Kematian Bayi	per 1000 KH	92,57	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	92,92	Efisien	

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Rerata Realisasi Penyerapan Anggaran (%)	Keterangan*)
		Indikator	Satuan	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Angka kematian Balita	per 1000 KH	93,25	Obat dan Perbekalan Kesehatan	93,62	Efisiensi
		Prevalensi gizi buruk (BB/U)	%	126,76	Pengawasan Obat dan Makanan	72,89	Efisiensi
					Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	94,68	Efisiensi
					Perbaikan Gizi Masyarakat	90,37	Tdk efisien
					Pengembangan Lingkungan Sehat	78,34	Efisiensi
					Standarisasi Pelayanan Kesehatan:		Efisiensi
					1. Dinas	92,57	
					2. Puskesmas	85,27	
					Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	66,65	Efisiensi
					Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan prasarana sarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya	88,73	Efisiensi
					Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah Sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit Paru-paru/rumah sakit mata	94,06	Efisiensi
		Peningkatan pelayanan kesehatan Lansia	80,79	Efisiensi			

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Rerata Realisasi Penyerapan Anggaran (%)	Keterangan*)
		Indikator	Satuan	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3	Meningkatnya pemanfaatan pelayanan Kerumahsakititan oleh masyarakat dan menurunnya angka kematian di Rumah Sakit.	Usia Harapan Hidup	Tahun	100,21	Pelayanan Kesehatan	93,73	Efisiensi
					Manajemen, informasi dan regulasi kesehatan	0	
4	Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM	Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	%	113,10	Pemberdayaan Fakir Miskin, Komonitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	97,56	Efisiensi
		Persentase penguatan kapasitas PSKS	%	96,97	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	90,73	Efisiensi
		Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	%	95,00	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial: 1. Dinsos P3A dan KB 2. Kesra	99,80 100	Efisiensi
					Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial lainnya)/ Pembinaan para penyandang cacat dan trauma	100	Efisiensi
5	Menurunnya angka kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>)	Angka Kelahiran (<i>Total Fertility Rate</i>) / TFR	Angka	99,06	Keluarga Berencana	70,34	Efisiensi
					Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja	98,02	Efisiensi

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Rerata Realisasi Penyerapan Anggaran (%)	Keterangan*)
		Indikator	Satuan	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang Mandiri	0	Efisiensi
					Pelayanan kontrasepsi	0	Efisiensi
					Promosi Kesehatan Ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	0	Efisiensi
					Pengembangan pusat informasi dan konseling KRR	0	Efisiensi
					Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	0	Efisiensi
					Pengendalian dan Pengawasan Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (Pembinaan Keluarga Sejahtera)	71,33	Efisiensi
					Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	0	Efisiensi
6	Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga.	Persentase Kenaikan Prestasi Pemuda	%	5571	Peningkatan Peran Serta kepemudaan	97,35	Efisiensi
		Persentase Kenaikan Prestasi Olahraga	%	165,2	Pembinaan dan Pemasyaratan Olahraga	96,11	Efisiensi
					Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	0	Efisiensi
					Upaya Pencegahan Penyalahgunaan	0	Efisiensi

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Rerata Realisasi Penyerapan Anggaran (%)	Keterangan*)
		Indikator	Satuan	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Narkoba:		
					Pembinaan Pemuda dan Olahraga:		Efisiensi
					1. Disbudparpora	97,74	
					2. Kesra	89,58	
7	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan benda Cagar Budaya	Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya	%	-1250	Pengelolaan Kekayaan Budaya	97,74	Tdk efisiensi
		Persentase Peningkatan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	1000	Pengembangan Nilai Budaya	97,89	Tdk efisiensi
					Pengelolaan Keragaman Budaya	100,00	Tdk efisiensi
					Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya (Humas)	0	
8	Meningkatnya kunjungan masyarakat ke perpustakaan	Persentase kenaikan kunjungan masyarakat	%	-302,55	Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	90,34	Tdk efisiensi
9	Meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah daerah	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	89,35	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	85,23	efisiensi
					Pembinaan dan Pengembangan Aparatur:		efisiensi
					1. Setda Organisasi	98,62	
					2. BKPD	68,66	

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Rerata Realisasi Penyerapan Anggaran (%)	Keterangan*)
		Indikator	Satuan	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah	Opini	133,33	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	82,36	Efisiensi
11	Meningkatnya kualitas layanan dan akuntabilitas kinerja sekretariat DPRD	Persentase Raperda yang disahkan tepat waktu	%	92,59	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	76,52	Efisiensi
12	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Tingkat Konsistensi dan ketepatan waktu Perencanaan	%	100	Perencanaan Pembangunan Daerah	95,08	Efisiensi
					Perencanaan Pembangunan Ekonomi	91,44	Efisiensi
					Perencanaan Sosial dan Budaya	87,60	Efisiensi
					Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	94,48	Efisiensi
					Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	92,46	Efisiensi
13	Meningkatnya tata kelola arsip SKPD	Persentase kenaikan SKPD mengelola arsip secara baku	%	174,4	Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	86,61	Efisiensi
					Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	86,77	Efisiensi

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Rerata Realisasi Penyerapan Anggaran (%)	Keterangan*)
		Indikator	Satuan	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Perbaikan Sistem Adminstrasi Kearsipan	71,64	Efisiensi
14	Meningkatkan tata kelola pemerintahan desa yang profesional, transparan dan akuntabel	Persentase penyelenggaraan pemerintah desa yang profesional, transparan dan akuntabel	%	101	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa /Kelurahan	0	Efisiensi
	Tata Kelola Pemerintah Desa				87,07	Efisiensi	
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa				0	Efisiensi	
15	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah	Level Maturitas SPIP	Tingkat	100	Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	88,64	Efisiensi
		Level Kapabilitas APIP	Tingkat	100	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	97,44	Efisiensi
					Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	99,87	Efisiensi
		Nilai Akuntabilitas Kinerja pemerintah	Angka	90,18	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Tata Laksana Perangkat Daerah	83,58	Efisiensi
					Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan:		Efisiensi
					1. Inspektorat	91,47	
					2. Setda Bagian Organisasi	96,07	

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Rerata Realisasi Penyerapan Anggaran (%)	Keterangan*)
		Indikator	Satuan	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
16	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan otonomi daerah	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Angka	105,25	Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah		Efisiensi
					1. Pemerintahan	91,52	
					2. Umum	98,90	
					Peningkatan Kerjasama antar Pemerintah Daerah	97,30	Efisiensi
					Pengembangan Wilayah Perbatasan	88,80	Efisiensi
					Peningkatan koordinasi pembinaan fasilitas administrasi Tata Kelola Kecamatan	91,75	Efisiensi
					Pengembangan Komonikasi, Informasi dengan Mass Media (Humas)	99,32	Efisiensi
					Peningkatan Koordinasi Pembinaan Fasilitas Pemberdayaan Desa/Kelurahan di kecamatan	96,72	Efisiensi
					Peningkatan Koordinasi Pembinaan Fasilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan	84,01	Efisiensi
Peningkatan Koordinasi Pembinaan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	95,04	Efisiensi					
Kerjasama Informasi dengan Mass Media (Humas)	97,21	Efisiensi					

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Rerata Realisasi Penyerapan Anggaran (%)	Keterangan*)
		Indikator	Satuan	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
							Efisiensi
17	Meningkatnya koordinasi penataan peraturan perundang undangan serta bantuan hukum dan HAM	Persentase tercapainya penyusunan produk hukum dan penanganan perkara	%	100	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	86,44	Efisiensi
		Indeks Kabupaten peduli HAM	%	119,63	Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM	96,97	Efisiensi
18	Meningkatnya koordinasi pelaksanaan pembangunan	Persentase kesesuaian capaian pelaksanaan pembangunan (fisik dan keuangan) dengan target (rencana)	%	107,78	Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	86,39	Efisiensi
19	Terwujudnya pelayanan pengadaan barang dan jasa yang kredibel	Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang sesuai regulasi	%	100	Peningkatan Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa (Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan)	74,63	Efisiensi
20	Meningkatnya fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan	Persentase publikasi kebijakan dan kegiatan kepala daerah	%	101,45	Kerjasama dengan Mass Media:	97,20	Efisiensi
		Persentase dokumentasi kegiatan kepala daerah	%	100,62	Pengembangan data/informasi/statistik Daerah	99,99	Efisiensi
		Persentase pelayanan keprotokolan kegiatan kepala daerah	%	100,91	Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	99,99	Efisiensi
					Penanganan Pengaduan Masyarakat	95,89	Efisiensi
					Peningkatan Persandian Daerah	99,04	Efisiensi

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Rerata Realisasi Penyerapan Anggaran (%)	Keterangan*)
		Indikator	Satuan	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
21	Meningkatnya fasilitasi dan pengawalan kebijakan bidang perekonomian	Tingkat Inflasi YoY	%	39,43	-	-	
22	Meningkatnya koordinasi kesejahteraan rakyat	Persentase keterlibatan <i>stakeholder</i> dalam pelaksanaan pembangunan bidang kesra	%	100	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100	Efisiensi
					Peningkatan Keagamaan	83,56	Efisiensi
					Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Penyakit Menular Seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS	0	
23	Meningkatnya ketersediaan Pangan Beragam, bergizi seimbang dan meningkatnya kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi daerah	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	%	85,24	Peningkatan Ketahanan Pangan: 1. Pertanian 2. Setda Perekonomian	95,56 94,69	Tdk Efisiensi
					Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Masyarakat	92,58	Tdk Efisiensi
					Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	88,70	Tdk Efisiensi
					Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	94,98	Tdk Efisiensi
					Peningkatan Kesejahteraan Petani	89,35	Tdk Efisiensi
					Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	68,48	Efisiensi
					Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	0	Efisiensi
					Pengembangan Perikanan Tangkap	90,20	Tdk Efisiensi
					Pengembangan Budidaya Perikanan	65,00	Efisiensi

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Rerata Realisasi Penyerapan Anggaran (%)	Keterangan*)
		Indikator	Satuan	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	79,50	Efisiensi
					Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	89,37	Tdk Efisiensi
					Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	82,44	Efisiensi
24	Meningkatnya peran LEM, LED dan pengembangan potensi TTG di desa dalam penanggulangan kemiskinan	Persentase desa yang memiliki LEM, LED dan Posyantek	%	84,00	Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	88,12	Tdk Efisiensi
25	Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisata	Persentase Peningkatan PAD dari sektor Pariwisata	%	-223,53	Pengembangan Kemitraan	98,90	Tdk Efisiensi
					Pengembangan Pemasaran Pariwisata	99,38	Tdk Efisiensi
					Pengembangan Destinasi Pariwisata	86,34	Tdk Efisiensi
26	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	103,15	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	78,88	Efisiensi
		Persentase UMKM yang memiliki daya saing	%	90,77	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	89,39	Efisiensi
					Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	84,00	Efisiensi
					Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	85,41	Efisiensi

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Rerata Realisasi Penyerapan Anggaran (%)	Keterangan*)
		Indikator	Satuan	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	84,44	Efisiensi
					Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan	92,55	Efisiensi
27	Meningkatnya penerapan inovasi dalam pembangunan daerah	Persentase inovasi yang diterapkan	%	98,8	Penelitian dan Pengembangan	89,56	Efisiensi
28	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor penanaman modal	Rasio daya serap tenaga kerja (PMDN/PMA):			Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi: 1. DPM dan PTSP 2. Setda Perekonomian	98,44 99,98	Tdk Efisiensi
		PMDN	%	0,65			
		PMA	%	4,08			
		Persentase pertumbuhan realisasi investasi (PMDN/PMA):			Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	95,81	Tdk Efisiensi
		PMDN	%	- 3160,00			
		PMA	%	- 2313,73			
29	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas dan daya saing sektor Ketenagakerjaan	Rasio penduduk yang bekerja	%	89,72	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	68,23	Efisiensi
		Angka partisipasi angkatan kerja	%	99,70	Peningkatan Kesempatan Kerja	63,03	Efisiensi

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Rerata Realisasi Penyerapan Anggaran (%)	Keterangan*)
		Indikator	Satuan	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
30	Meningkatnya perlindungan sektor ketenagakerjaan	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	%	48,89	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	78,91	Tidak Efisiensi
31	Meningkatnya nilai tambah, produktifitas, dan daya saing sektor Perindustrian	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	105,11	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah: 1. Disperinaker 2. Setda Perekonomian	86,76 94,11	Efisiensi
		Persentase IKM yang memiliki daya saing	%	47,2	Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	83,40	Tidak Efisiensi
32	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur publik dan sarana prasarana dasar masyarakat	Indeks Layanan Infrastruktur	Indeks	156,24	Pembangunan Jalan dan Jembatan	55,80	Efisiensi
					Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan	74,70	Efisiensi
					Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	48,31	Efisiensi
					Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	49,72	Efisiensi
					Penataan Trotoar Jalan	0	Efisiensi
33	Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas dan penyelenggaraan angkutan	Tingkat Pelayanan Infrastruktur Perhubungan	Tingkat	121,40	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	0	Efisiensi

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Rerata Realisasi Penyerapan Anggaran (%)	Keterangan*)
		Indikator	Satuan	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	92,11	Efisiensi
					Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	96,12	Efisiensi
					Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	97,62	Efisiensi
34	Meningkatnya kualitas perumahan dan kawasan permukiman	Indeks Kualitas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Indeks	100	Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan DPU	77,42	Efisiensi
					Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah: 1. DPU 2. Perwaskim	97,55 11,51	Efisiensi
					Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	72,50	Efisiensi
					Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung	93,78	Efisiensi
					Pengembangan Perumahan	37,44	Efisiensi
					Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-Gorong	98,5	Efisiensi
					Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial	72,50	Efisiensi
					Pembangunan Infrastruktur Pedesaan/Perkotaan	53,04	Efisiensi
35	Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan konsep	Ketaatan Terhadap RTRW	%	100,00	Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang: 1. DPU	94,86	Efisiensi

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Rerata Realisasi Penyerapan Anggaran (%)	Keterangan*)
		Indikator	Satuan	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	tata ruang				2. Perwaskim	51,54	
					Perencanaan Tata Ruang	59,38	Efisiensi
					Pemanfaatan Ruang	33,55	Efisiensi
36	Terjaganya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air	Indeks	95,11	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	69,81	Efisiensi
		Indeks Kualitas Udara	Indeks	93,68	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	92,15	Tdk Efisiensi
		Indeks Tutupan Vegetasi (lahan)	Indeks	75,75	Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH	88,15	Efisiensi
					Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		Tdk Efisiensi
					1. DPU	76,66	
					2. DLHK	90,05	
					Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	91,68	Efisiensi
					Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH):		Efisiensi
					1. DPU	76,77	
					2. DLHK	95,20	
37	Terwujudnya pengurangan kerentanan risiko bencana	Kelas Indeks Kapasitas Bencana	Kelas Indeks	103,53	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	85,78	Efisiensi
					Penanganan Darurat Bencana:	86,77	Efisiensi
					Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	9,82	Efisiensi

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Rerata Realisasi Penyerapan Anggaran (%)	Keterangan*)
		Indikator	Satuan	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Peningkatan Penanganan Bencana Kebakaran	100	Efisiensi
38	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap politik dan demokrasi	Indeks Demokrasi	Indeks	96,53	Peningkatan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan:		Efisiensi
							1. Kesbangpol 2. Satpol PP
					Peningkatan dan Pembinaan Kehidupan Sosial Politik	95,52	Efisiensi
39	Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan kehidupan sosial budaya	Rata - rata kader lembaga kemasyarakatan dan kelompok pelestarian adat dalam pengembangan sosial budaya yang aktif (mendapat pembinaan dan pelatihan)	Klpk	73,49	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	95,69	Tdk Efisiensi
					Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	98,73	Tdk Efisiensi
					Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	94,46	Tdk Efisiensi
40	Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	Indeks Ketertiban Masyarakat	Indeks	98,99	Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan Keamanan	93,2	Efisiensi
					Peningkatan Pemberantasan penyakit Masyarakat (Pekat)	99,10	Tdk Efisiensi
					Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan:		Efisiensi
					1. Kesbangpol 2. Satpol PP	98,16 96,00	
					Pemeliharaan Kanrantibmas dan	98,16	Efisiensi

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Rerata Realisasi Penyerapan Anggaran (%)	Keterangan*)
		Indikator	Satuan	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					Pencegahan Tindakkriminal		
					Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	96,00	Efisiensi
41	Meningkatnya kapasitas perempuan, perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	119,98	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	97,22	Efisiensi
		Capaian Kabupaten Layak Anak (KLA)	Kelas	86,67	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak	99,60	Efisiensi
					Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	96,53	Efisiensi
					Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	0	Efisiensi
42	Meningkanya kualitas layanan perhubungan	Indeks Kepuasan Layanan Perhubungan	Indeks	98,59	Peningkatan Pelayanan Angkutan	98,03	Efisiensi
43	Meningkatnya pelayanan perijinan satu pintu yg tepat waktu, tepat mutu, tepat sasaran & tepat manfaat	Nilai Survai Kepuasan Masyarakat	Indeks	102,00	Peningkatan Pengembangan Pelayanan Perizinan	0	Efisiensi
44	Meningkatnya pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Indeks	88,03	Penataan Administrasi Kependudukan	81,94	Efisiensi

No	Sasaran Strategis	Pencapaian Indikator Kinerja			Program	Rerata Realisasi Penyerapan Anggaran (%)	Keterangan*)
		Indikator	Satuan	%			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
45	Pengembangan ketransmigrasian	Persentase besaran peningkatan minat transmigrasi	%	12,53	Pengembangan Wilayah Transmigrasi	94,86	Tdk efisiensi
					Transmigrasi Lokal	0	

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Klaten Tahun 2020 (setelah reuiu Inspektorat)

Catatan: *) **Efisiensi Sumber Daya** diukur dengan membandingkan pencapaian indikator kinerja dengan rerata serapan anggaran. Dianggap efisien apabila rerata serapan anggaran < pencapaian indikator kinerja sasaran. Apabila indikator kinerja sasaran serumpun diambil reratanya lalu dibandingkan dengan serapan anggaran, dan apabila indikator kinerja sasaran tidak serumpun perlakuannya ditentukan per item indikator sasaran.

Berdasarkan Tabel 2.105. sebagaimana tersebut di atas, jumlah sasaran strategis yang memiliki tingkat efisiensi sebanyak 51 sasaran (atau 76,12% dari sebanyak 67 indikator sasaran strategis), sedangkan jumlah indikator sasaran strategis yang tidak efisien sebanyak 16 indikator sasaran (atau 23,88% dari sebanyak 67 indikator sasaran strategis). Sedangkan jumlah program yang tidak efisiensi dalam mendukung pencapaian sasaran sebanyak 27 program (atau 16,46% dari 164 program prioritas), dan sebanyak 137 program (atau 83,54% dari sebanyak 164 program) merupakan program yang efisien dalam mendukung pencapaian sasaran).

Jumlah rencana anggaran untuk membiayai Anggaran Prioritas I (*program untuk membiayai visi dan misi Bupati*) sebanyak Rp.749.734.071.372,- dan terealisasi sebanyak Rp.618.720.315.867,- serta memperhatikan indikator sasaran strategis yang memiliki tingkat efisiensi tinggi sebanyak 56 indikator sasaran (atau 83,58% dari sebanyak 67 indikator sasaran) dengan jumlah program yang mencapai efisiensi sebanyak 137 program (atau 83,54% dari sebanyak 164 program prioritas), maka dapat disimpulkan tingkat efisien penggunaan anggaran sebanyak Rp. 131.013.755.505,- {*dengan perhitungan: Jumlah rencana anggaran dikurangi realisasi anggaran*}.

2)Efektifitas Sumber Daya Aparatur

Berdasarkan tingkat efisiensi penggunaan anggaran sebagaimana Tabel 2.105. dipakai sebagai bahan untuk mengetahui tingkat efektifitas Sumber Daya Aparatur disandingkan dengan profile Organisasi Perangkat Daerah terkait data jumlah Sumber Daya Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten sebagai bahan analisis. Data jumlah Sumber Daya Aparatur Menurut Jenis Kelamin dan Eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun 2020 disajikan pada Tabel 2.106.

Tabel 2.106.
Jumlah Sumber Daya Aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2020

Bagian / Dinas / Kantor		Jenis Kelamin		Eselon						
		Laki-laki	Perempuan	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	V.a
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
01.	Sekretariat Daerah	5	0	1	4	0	0	0	0	0
	<i>Bagian Pemerintahan Setda</i>	4	4	0	0	1	0	3	0	0
	<i>Bagian Hukum Setda</i>	6	7	0	0	1	0	3	0	0
	<i>Bagian Perekonomian Setda</i>	4	4	0	0	1	0	3	0	0
	<i>Bagian Pembangunan Setda</i>	4	4	0	0	1	0	3	0	0
	<i>Bagian Kesra Setda</i>	7	4	0	0	1	0	2	0	0
	<i>Bagian Organisasi Setda</i>	8	5	0	0	1	0	3	0	0
	<i>Bagian Humas Setda</i>	10	8	0	0	0	0	3	0	0
	<i>Bagian Umum Setda</i>	31	21	0	0	1	0	3	0	0
	<i>Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Setda</i>	10	3	0	0	1	0	3	0	0
02	Sekretariat DPRD	32	7	0	1	3	0	7	0	0
03	Inspektorat	29	21	0	1	4	0	3	0	0
04	Dinas Pendidikan	1851	3612	0	1	1	3	13	1	0
05	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	25	18	0	0	1	3	8	0	0
06	Dinas Kesehatan	308	1175	0	1	0	7	27	35	0
07	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB	21	22	0	1	1	3	9	0	0
08	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	14	17	0	0	1	2	10	0	0

Bagian / Dinas / Kantor		Jenis Kelamin		Eselon						
		Laki-laki	Perempuan	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	V.a
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
09	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	19	14	0	1	1	3	7	0	0
10	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14	6	0	1	1	2	5	0	0
11	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	115	34	0	1	1	3	13	3	0
12	Dinas Perindustrian dan Tenaga kerja	18	12	0	1	1	1	8	0	0
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	18	7	0	1	1	2	6	0	0
14	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	31	9	0	1	1	2	6	0	0
15	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	267	24	0	1	2	3	19	4	0
16	Dinas Perhubungan	39	13	0	0	2	1	6	0	0
17	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	11	10	0	1	1	3	6	0	0
18	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	136	90	0	1	1	4	21	3	0
19	Dinas Arsip dan Perpustakaan	10	14	0	1	1	2	6	0	0
20	Satuan Polisi Pamong Praja	47	5	0	1	3	8	0	0	0
21	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah	28	10	0	1	1	3	9	0	0
22	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	59	37	0	1	4	1	17	0	0
23	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	20	14	0	1	1	4	10	0	0
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	21	8	0	1	0	4	8	0	0

Bagian / Dinas / Kantor		Jenis Kelamin		Eselon						
		Laki-laki	Perempuan	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	V.a
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
25	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	11	5	0	0	1	0	4	0	0
26	Kecamatan Klaten Tengah	25	20	0	0	1	1	9	20	0
27	Kecamatan Klaten Selatan	7	11	0	0	1	1	4	5	0
28	Kecamatan Klaten Utara	15	16	0	0	1	1	4	10	0
29	Kecamatan Kebonarum	7	8	0	0	1	0	2	2	0
30	Kecamatan Wedi	13	9	0	0	1	1	3	2	0
31	Kecamatan Kalikotes	9	8	0	0	1	0	3	2	0
32	Kecamatan Ngawen	5	9	0	0	1	1	3	1	0
33	Kecamatan Jogonalan	8	7	0	0	1	1	2	1	0
34	Kecamatan Karangnongko	16	6	0	0	1	1	3	1	0
35	Kecamatan Manisrenggo	15	6	0	0	1	1	3	2	0
36	Kecamatan Gantiwarno	9	6	0	0	1	1	2	2	0
37	Kecamatan Prambanan	10	10	0	0	1	1	3	2	0
38	Kecamatan Kemalang	17	4	0	0	1	1	1	3	0
39	Kecamatan Jatinom	10	8	0	0	1	0	2	4	0
40	Kecamatan Karanganyar	9	8	0	0	2	0	3	0	0
41	Kecamatan Tulung	17	6	0	0	1	1	2	1	0
42	Kecamatan Polanharjo	14	3	0	0	1	1	2	2	0
43	Kecamatan Pedan	13	4	0	0	1	2	3	1	0
44	Kecamatan Karangdowo	13	6	0	0	1	1	2	3	0
45	Kecamatan Trucuk	10	5	0	0	1	3	2	0	0

Bagian / Dinas / Kantor		Jenis Kelamin		Eselon						
		Laki-laki	Perempuan	II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b	V.a
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
46	Kecamatan Bayat	11	5	0	0	1	2	2	0	0
47	Kecamatan Delanggu	9	7	0	0	1	1	1	0	0
48	Kecamatan Wonosari	16	6	0	0	1	0	2	1	0
49	Kecamatan Cawas	11	10	0	0	1	1	3	2	0
50	Kecamatan Ceper	12	6	0	0	1	1	3	2	0
51	Kecamatan Juwiring	11	7	0	0	1	1	3	2	0
Jumlah		3545	5445	1	23	65	81	335	122	0

Sumber : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Klaten Tahun 2020

	<i>Efektif</i>	<i>77,97%</i>
	<i>Ada yang efektif, dan ada yang tidak efektif</i>	<i>22,03%</i>
	<i>Tidak efektif</i>	<i>0%</i>

Penilaian tingkat efektifitas sumber data dihitung berdasarkan capaian indikator sasaran yang mempunyai tingkat efisiensi sebagaimana Tabel 2.105 dan 2.106.

g. Analisa Program dan Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Target Kinerja

1. Sasaran : Terwujudnya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Non Formal.
Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran diatas terdiri dari 6 (enam) program, yaitu:
 - a) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b) Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun;
 - c) Pendidikan Non Formal;
 - d) Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
 - e) Manajemen Pelayanan Pendidikan.
 - f) Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
2. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat dan menurunnya angka kematian , angka kesakitan dan kecacatan
Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran diatas terdiri dari 6 (enam) program, yaitu:
 - a) Upaya Kesehatan Masyarakat;
 - b) Obat dan Perbekalan Kesehatan;
 - c) Pengawasan Obat dan Makanan;
 - d) Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - e) Perbaikan Gizi Masyarakat;
 - f) Pengembangan Lingkungan Sehat;
 - g) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
 - h) Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
 - i) Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin;
 - j) Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Prasarana Sarana Puskesmas/Pustu dan Jaringannya;
 - k) Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Prasarana dan Sarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata;
 - l) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia; dan
 - m) Pelayanan Kesehatan.
3. Sasaran : Menurunnya Angka Kelahiran (*Total Fertility Rate*);
Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran diatas terdiri dari 9 (sembilan) program, yaitu:
 - a) Keluarga Berencana;
 - b) Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja;
 - c) Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri;
 - d) Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat;
 - e) Pelayanan Kontrasepsi;

- f) Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak;
 - g) Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR;
 - h) Pengendalian dan Pengawasan Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera; dan
 - i) Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga.
4. Sasaran : Meningkatnya Pemanfaatan Pelayanan Kerumahsakitkan oleh Masyarakat dan Menurunnya Angka Kematian di Rumah Sakit.
Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran diatas yaitu:
- a) Peningkatan Pelayanan Kesehatan; dan
 - b) Manajemen, Informasi dan Regulasi Kesehatan.
5. Sasaran : Meningkatnya Upaya Pencegahan Permasalahan Sosial dan Aksesibilitas PMKS dalam Memperoleh Pelayanan dan Rehabilitasi yang Berperspektif HAM.
Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran diatas yaitu :
- c) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;
 - d) Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
 - e) Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial; dan
 - f) Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba, Penyakit Lainnya).
6. Sasaran : Meningkatnya Hasil Pengembangan dan Pembinaan Pemuda dan Olahraga;
Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran diatas yaitu :
- a) Peningkatan Peran Serta Kepemudaan;
 - b) Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda;
 - c) Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba;
 - d) Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga; dan
 - e) Pembinaan Pemuda dan Olahraga.
7. Sasaran : Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan dan Pelestarian Seni Budaya Daerah, Kawasan Cagar Budaya, Situs dan Benda Cagar Budaya.
Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran diatas yaitu :
- a) Pengelolaan Kekayaan Budaya;
 - b) Pengembangan Nilai Budaya;
 - c) Pengelolaan Keragaman Budaya; dan
 - d) Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya.
8. Sasaran : Meningkatnya Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan;
Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran diatas yaitu :
- a) Pengembangan Budaya Baca
 - b) Pembinaan Perpustakaan.

9. Sasaran : Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah
Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran diatas yaitu :
 - a) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; dan
 - b) Pembinaan dan Pengembangan Aparatur.
10. Sasaran :Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran diatas yaitu :
Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Sasaran : Meningkatkan Kualitas Layanan dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD;
Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran diatas yaitu :
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan DPRD.
12. Sasaran :Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah;
Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran diatas yaitu :
 - a) Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b) Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
 - c) Perencanaan Sosial dan Budaya;
 - d) Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam; dan
 - e) Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah.
13. Sasaran :Meningkatnya Tata Kelola Arsip SKPD;
Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran diatas yaitu :
 - a) Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah;
 - b) Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi; dan
 - c) Perbaikan Sistem Adminstrasi Kearsipan
14. Sasaran :Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Profesional, Transparan dan Akuntabel
Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran diatas yaitu :
 - a) Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan;
 - b) Tata Kelola Pemerintah Desa; dan
 - c) Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa.
15. Sasaran : Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran diatas yaitu :
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
 - a) Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan;
 - b) Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan;
 - c) Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; dan

- d) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Tata Laksana Perangkat Daerah.
16. Sasaran : Meningkatkan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah;
Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran diatas yaitu :
- a) Peningkatan Kinerja Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b) Peningkatan Kerjasama Daerah;
 - c) Pengembangan Wilayah Perbatasan;
 - d) Peningkatan Koordinasi Pembinaan Fasilitasi Administrasi Tata Kelola Kecamatan;
 - e) Pengembangan Komunikasi Informatika Mass Media;
 - f) Peningkatan Koordinasi Pembinaan Fasilitasi Pemberdayaan Desa/Kelurahan di kecamatan;
 - g) Peningkatan Koordinasi Pembinaan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan;
 - h) Peningkatan Koordinasi Pembinaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan; dan
 - i) Kerjasama Informasi dengan Mass Media.
17. Sasaran : Meningkatkan Koordinasi Penataan Peraturan Perundang Undangan serta Bantuan Hukum dan HAM
Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran diatas yaitu :
Penataan Peraturan Perundang-Undangan dan Program Peningkatan Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM
18. Sasaran :Meningkatnya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan
Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran diatas yaitu :
:Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan.
19. Sasaran : Terwujudnya Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa yang Kredibel
Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran diatas yaitu :
Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa
20. Sasaran :Meningkatnya fasilitasi koordinasi bidang kehumasan dan keprotokolan
Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran diatas yaitu :
- a) Kerjasama dengan Mass Media;
 - b) Pengembangan data/informasi/statistik Daerah;
 - c) Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi;
 - d) Penanganan Pengaduan Masyarakat; dan
 - e) Peningkatan Persandian Daerah.
21. Sasaran : Meningkatkan Fasilitasi dan Pengawasan Kebijakan Daerah Bidang Perekonomian

Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran diatas yaitu Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.

22. Sasaran : Meningkatnya Koordinasi Kesejahteraan Rakyat

Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran diatas yaitu :

- a) Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
- b) Peningkatan Keagamaan; dan
- c) Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Penyakit Menular Seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS.

23. Sasaran : Meningkatnya Ketersediaan Pangan Beragam, Bergizi Seimbang dan Meningkatnya Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran diatas yaitu :

- a) Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan);
- b) Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Masyarakat;
- c) Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan;
- d) Pengembangan Perikanan Tangkap;
- e) Pengembangan Budidaya Perikanan;
- f) Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak;
- g) Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan;
- h) Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;
- i) Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan;
- j) Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
- k) Peningkatan Kesejahteraan Petani; dan
- l) Pemberdayaan Penyuluh Pertanian /Perkebunan Lapangan.

24. Sasaran : Meningkatnya Peran LEM, LED dan Pengembangan Potensi TTG di Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan

Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran diatas yaitu :

- a) Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan; dan
- b) Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.

25. Sasaran : Meningkatnya Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Kepariwisata

Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran diatas yaitu :

- a) Pengembangan Kemitraan;
- b) Pengembangan Pemasaran Pariwisata; dan
- c) Pengembangan Destinasi Pariwisata.

26. Sasaran : Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing pada Urusan Perdagangan, Koperasi dan UKM

Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran diatas yaitu :

- a) Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan;
- b) Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri;
- c) Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan;

- d) Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah;
 - e) Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM; dan
 - f) Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
27. Sasaran : Meningkatnya Penerapan Inovasi Dalam Pembangunan Daerah
Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran diatas yaitu Penelitian dan Pengembangan
28. Sasaran : Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Penanaman Modal
Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran diatas yaitu :
- a) Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi; dan
 - b) Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.
29. Sasaran : Meningkatnya dan Pengembangan Produktifitas, Nilai Tambah dan Daya Saing Sektor Ketenagakerjaan;
Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran diatas yaitu :
- a) Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja; dan
 - b) Peningkatan Kesempatan Kerja.
30. Sasaran : Meningkatnya Perlindungan Sektor Ketenagakerjaan
Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran diatas yaitu Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan .
31. Sasaran : Meningkatnya Nilai Tambah, Produktifitas dan Daya Saing Sektor Perindustrian
Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran diatas yaitu :
- a) Pengembangan Industri Kecil dan Menengah; dan
 - b) Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri.
32. Sasaran : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Publik dan Sarana Prasarana Dasar Masyarakat
Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran diatas yaitu :
- a) Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - b) Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya;
 - c) Rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
 - d) Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya.
33. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dan Penyelenggaraan Angkutan
Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran diatas yaitu :
- a) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;
 - b) Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas; dan
 - c) Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor.

34. Sasaran : Meningkatnya Pemenuhan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan dan Pemukiman
Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran diatas yaitu :
- a) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;
 - b) Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan; dan
 - c) Perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial;
 - d) Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung;
 - e) Pengembangan Perumahan;
 - f) Pembangunan Saluran Drainase dan Gorong-Gorong;
 - g) Perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial; dan
 - h) Pembangunan infrastruktur pedesaan/perkotaan.
35. Sasaran : Terkendalinya Pemanfaatan Kawasan Sesuai dengan Konsep Tata Ruang
Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran diatas yaitu :
- a) Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang;
 - b) Penataan Ruang; dan
 - c) Perencanaan Ruang.
36. Sasaran : Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup
Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran diatas yaitu :
- a) Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - b) Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam;
 - c) Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH;
 - d) Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
 - e) Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
 - f) Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).
37. Sasaran : Pengurangan Kerentanan Risiko Bencana
Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran diatas yaitu :
- a) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 - b) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana; dan
 - c) Peningkatan Pengelolaan Logistik;
38. Sasaran : Meningkatnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Politik dan Demokrasi
Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran diatas yaitu :
- a) Pengembangan Wawasan Kebangsaan; dan
 - b) Peningkatan dan Pembinaan Kehidupan Sosial Politik;
39. Sasaran : Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dan Kelompok Pelestarian Adat dalam Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya
Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran diatas yaitu :
- a) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa;
 - b) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga; dan

- c) Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.
40. Sasaran : Terwujudnya Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran diatas yaitu :
- a) Sasaran Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan;
 - b) Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat);
 - c) Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
 - d) Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal; dan
 - e) Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.
41. Sasaran : Meningkatnya Kapasitas Perempuan, Perlindungan Perempuan dan Anak
Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran diatas yaitu :
- a) Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - b) Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
 - c) Peningkatan Peran Serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan; dan
 - d) Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan.
42. Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Perhubungan
Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran diatas yaitu Peningkatan Pelayanan Angkutan.
43. Sasaran Meningkatnya Pelayanan Perijinan Satu Pintu yang Tepat Waktu, Tepat Mutu, Tepat Sasaran dan Tepat Manfaat
Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran diatas yaitu Peningkatan Pengembangan Pelayanan Perizinan.
44. Sasaran Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kependudukan yang Berkualitas;
Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran diatas yaitu Penataan Administrasi Kependudukan
45. Sasaran Pengembangan Ketransmigrasian;
Program yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran diatas yaitu Pengembangan Wilayah Transmigrasi, dan Program Transmigrasi Lokal.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Sesuai amanat Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 5 ayat (4) menyebutkan bahwa urusan Pemerintahan di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Penyelenggaraan tugas pembantuan merupakan penugasan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemberi tugas pembantuan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dengan alokasi dana berasal dari pemberi tugas, yang dilaksanakan oleh daerah dan ataupun desa.

1. DASAR HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang melandasi penyelenggaraan dan pelaporan pelaksanaan tugas pembantuan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten adalah :

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

2. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

A. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan

Alokasi dana tugas pembantuan kepada Kabupaten merupakan bagian anggaran Kementerian/Lembaga yang diberikan sesuai dengan beban dan jenis penugasan, dengan kewajiban Kabupaten melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada kementerian/lembaga yang memberikan penugasan. Kementerian/Lembaga yang memberikan Tugas Pembantuan kepada Pemerintah Kabupaten Klaten pada Tahun 2020 adalah:

1) Kementerian Ketenagakerjaan

Tugas Pembantuan dari Kementerian Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten

2) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten

B. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan dalam Tugas Pembantuan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut :

- 1) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten melaksanakan Tugas Pembantuan dari Kementerian Ketenagakerjaan dalam bentuk Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja dengan Kegiatan Wirausaha melalui Tenaga Kerja Mandiri, Kegiatan Padat Karya Infrastruktur dan Kegiatan Administrasi Kegiatan Tugas Pembantuan.
- 2) Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten melaksanakan Tugas Pembantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam bentuk 2 (dua) program dan meliputi 9 (sembilan) kegiatan sebagai berikut :
 - a) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian terdiri dari Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian, Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pestisida serta Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian
 - b) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan terdiri dari Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi, Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia, Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan, Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Tanaman Pangan, Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

C. Sumber dan Jumlah Anggaran yang Digunakan

- 1) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten melaksanakan Tugas Pembantuan dari Kementerian Ketenagakerjaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.645.890.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 616.532.000,- sehingga realisasi anggaran tercapai sebesar 95,45% dan realisasi fisik sebesar 100%.
- 2) Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten melaksanakan Tugas Pembantuan meliputi 2 (dua) program yaitu :
 - a) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana

Pertanian dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.708.640.000,- dan terealisasi sebesar Rp 1.648.535.000,- sehingga persentase capaian anggaran sebesar 96,48 % dan capaian serapan fisik sebesar 100%

- b) Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.136.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 4.070.682.845,- sehingga persentase capaian anggaran sebesar 98,42 % dan capaian serapan fisik sebesar 100%

3. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan diukur dengan cara membandingkan antara target atau sasaran program/kegiatan dan anggaran dengan realisasi yang dicapai selama 1 (satu) tahun anggaran.

3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang Diselenggarakan oleh Daerah

Kabupaten/Kota

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tugas pembantuan Pusat yang diterima Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten selama tahun 2020 dapat dilihat dalam Tabel 3.1.

Dari Tabel terlihat bahwa capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan sebesar 100% artinya target yang dicanangkan dalam pelaksanaan tugas pembantuan dari Kementerian Ketenagakerjaan ini seluruhnya tercapai.

Tabel 3.1
Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2020

No	K/LPNK	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output, dan Rincian Kegiatan	Lokasi	SKPD Pelaksana TP	Target Capaian Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Kementerian Ketenagakerjaan	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pembantuan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2020	Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja				95.85		100
			- Kegiatan Wirausaha melalui Tenaga Kerja Mandiri								
			- Tenaga Kerja Mandiri I	Desa Tegalrejo Kec. Bayat		Pelatihan Pembuatan kue untuk 20 orang	60,000,000	59,780,000	99.63	Pelatihan Pembuatan kue untuk 20 orang	100
			- Tenaga Kerja Mandiri II	Desa Ngerangan Kec. Bayat		Pelatihan Pembuatan kue untuk 20 orang	60,000,000	59,764,000	99.61	Pelatihan Pembuatan kue untuk 20 orang	100
			- Tenaga Kerja Mandiri III	Desa Sidowayah Kec. Polanharjo		Pelatihan Kerajinan tanah liat 20 orang	60,000,000	59,800,000	99.67	Pelatihan Kerajinan tanah liat 20 orang	100

			- Tenaga Kerja Mandiri IV	Bapas Kelas II Klaten		Pelatihan Las 20 orang	60,000,000	59,650,000	99.42	Pelatihan Las 20 orang	100
			- Tenaga Kerja Mandiri V	Desa Kiringan		Pelatihan Pembuatan kue untuk 20 orang	60,000,000	59,500,000	99.17	Pelatihan Pembuatan kue untuk 20 orang	100
			- Tenaga Kerja Mandiri VI	Desa Tulung		Pelatihan Pembuatan kue untuk 20 orang	60,000,000	59,700,000	99.50	Pelatihan Pembuatan kue untuk 20 orang	100
			- Tenaga Kerja Mandiri VII	Desa Padas		Pelatihan Pengolahan Kripik kulit ikan 20 orang	60,000,000	59,710,000	99.52	Pelatihan Pengolahan Kripik kulit ikan 20 orang	100
			- Tenaga Kerja Mandiri VIII	Desa Pondok		Pelatihan Pembuatan kue untuk 20 orang	60,000,000	59,690,000	99.48	Pelatihan Pembuatan kue untuk 20 orang	100
			- Kegiatan Padat Karya Infrastruktur								
			- Padat Karya Infrastruktur I	Desa Sudimoro		Pembuatan saluran air peserta 20 orang	50,500,000	50,388,000	99.78	Pembuatan saluran air peserta 20 orang	100
			- Padat Karya Infrastruktur II	Desa Ngerangan		Pembuatan rabat beton peserta 20 orang	50,500,000	50,260,000	99.52	Pembuatan rabat beton peserta 20 orang	100
			- Administrasi Kegiatan Tugas Pembantuan				64,890,000	38,290,000	59.01		

Sumber : Data Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten Tahun 2021

3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang Diselenggarakan oleh Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tugas pembantuan Provinsi yang diterima Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten selama tahun 2020 dapat dilihat dalam Tabel 3.2.

Dari Tabel terlihat bahwa capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan sebesar 100% artinya target yang dicanangkan dalam pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini seluruhnya tercapai.

Tabel 3.2
Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi yang Dilaksanakan
oleh Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2020

N o	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Kab.	Target Capaian Kegiatan	SKPD pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Bidang Pertanian	Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 911/050/2020 Ttg Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Tugas Pembantuan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020	<p>Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian</p> <p>Kegiatan Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian</p> <p>Keluaran (output): Jaringan irigasi tersier, Irigasi perpompaan</p> <p>Rincian kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier - Irigasi Perpompaan Besar Wilayah Barat <p>Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian</p> <p>Keluaran (output): Layanan Dukungan Manajemen Satker</p>	Klaten	Jaringan irigasi tersier 500 Ha, Irigasi perpompaan 3 unit, Layanan dukungan manajemen (12 bulan); Jumlah lokasi dalam rangka penyusunan e-RDCK mendukung penerapan Kartu Tani (26 kec), Jumlah lokasi pelaksanaan bimtek, monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup pupuk dan pestisida (26 kec), Layanan dan pembinaan	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan	1,708,640,000	1,648,535,000	96.48	Jaringan irigasi tersier 500 Ha, Irigasi perpompaan 3 unit, Layanan dukungan manajemen (12 bulan); Jumlah lokasi dalam rangka penyusunan e-RDCK mendukung penerapan Kartu Tani (26 kec), Jumlah lokasi pelaksanaan bimtek, monitoring dan evaluasi kegiatan	100

N o	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Kab.	Target Capaian Kegiatan	SKPD pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			<p>Rincian kegiatan: Layanan manajemen dan perkantoran</p> <p>Kegiatan Fasilitasi Pupuk dan Pesticida</p> <p>Keluaran (output): - e-RDCK Mendukung Penyaluran Pupuk Bersubsidi Berbasis Penerapan Kartu Tani, - Bimtek, Monitoring dan Evaluasi kegiatan lingkup Pupuk dan Pesticida</p> <p>Rincian kegiatan:</p> <p>- Penyusunan dan penginputan e-RDCK mendukung kartu tani</p> <p>- Pelaksanaan KP3 mendukung pengawasan pupuk dan pestisida</p> <p>Kegiatan Fasilitasi Pembiayaan Pertanian</p> <p>Keluaran (output): Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan lingkup Pembiayaan Pertanian</p>		kegiatan pembiayaan pertanian (12 bulan)					lingkup pupuk dan pestisida (26 kec), Layanan dan pembinaan kegiatan pembiayaan pertanian (12 bulan)	

No	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Kab.	Target Capaian Kegiatan	SKPD pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Rincian kegiatan: - Persiapan dan Pelaksanaan bimtek lingkup pembiayaan pertanian - Monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup pembiayaan pertanian								
2.	Bidang Pertanian	Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 911/050/2020 Ttg Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Tugas Pembantuan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi Rincian kegiatan: - Identifikasi CPCL dan operasional pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Sereal Rincian kegiatan: - Monitoring dan Evaluasi LTT	Klaten	Identifikasi CPCL (26 kec), monev LTT (26 kec), penyaluran bantuan benih Padi Inbrida (125000kg), penyaluran Bantuan Benih Jagung Hibrida Umum 3 (5000 ha), penyaluran perontok/pemipil (Power Thresher Multiguna Mobile 4 unit), penyaluran sarana UPH	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan	4,136,000,000	4,070,682,845	98.42	Identifikasi CPCL (26 kec), monev LTT (26 kec), penyaluran bantuan benih Padi Inbrida (125000kg), penyaluran Bantuan Benih Jagung Hibrida Umum 3 (5000 ha), penyaluran perontok/pe	100

N o	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Kab.	Target Capaian Kegiatan	SKPD pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			<p>Kegiatan Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan</p> <p>Keluaran (output): Bantuan Benih Padi Inbrida, Bantuan Benih Jagung Hibrida Umum 3</p> <p>Rincian kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Penyaluran Benih Padi Bersertifikat (Benih padi inbrida) - Identifikasi CPCL dan Operasional Pelaksanaan - Melaksanakan Penyaluran Benih Jagung Bersertifikat (Benih Jagung Hibrida Umum 3) <p>Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Tanaman Pangan</p> <p>Keluaran (output): Layanan Dukungan Manajemen Satker</p>		kedelai (UPH kedelai 1 unit, bangunan UPH kedelai 1 unit), Layanan dan pembinaan kegiatan (12 bulan)					mipil (Power Thresher Multiguna Mobile 4 unit), penyaluran sarana UPH kedelai (UPH kedelai 1 unit, bangunan UPH kedelai 1 unit), Layanan dan pembinaan kegiatan (12 bulan)	

N o	Bidang Urusan	Dasar Pelaksanaan Penugasan (TP)	Program, Kegiatan, Output dan Rincian Kegiatan	Kab.	Target Capaian Kegiatan	SKPD pelaksana TP	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	(%)	Realisasi Capaian Kegiatan	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Rincian kegiatan: Layanan manajemen dan perkantoran								
			Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan								
			Keluaran (output): Power Thresher Multiguna Mobile, sarana UPH kedelai (UPH kedelai, bangunan UPH kedelai)								
			Rincian kegiatan:								
			- Melaksanakan Penyaluran Perontok/Pemipill								
			- Penyaluran Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan								

Sumber : Data Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten Tahun 2021

3.3 Permasalahan dan Kendala

Pelaksanaan Tugas Pembantuan yang diberikan Kementerian Ketenagakerjaan kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten secara umum sudah dapat dilaksanakan dengan baik sehingga tidak terdapat permasalahan dan kendala yang cukup signifikan baik dalam aspek administrasi, keuangan maupun teknis kegiatan.

Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten dalam pelaksanaan tugas pembantuan di Tahun 2020 berjalan cukup baik walaupun muncul beberapa permasalahan dan kendala. Permasalahan yang muncul adalah kondisi Pandemi Covid 19 menyebabkan beberapa kegiatan tidak terserap maksimal, terutama perjalanan dinas luar daerah.

3.4 Saran dan Tindak Lanjut

Tindaklanjut atas kendala dalam pelaksanaan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten yaitu dilakukan revisi Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) sehingga ada kesesuaian dengan kondisi di lapangan.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

A. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

Standar teknis pelayanan minimal bidang pendidikan bertujuan untuk memberikan panduan kepada Pemerintah Daerah dalam pemenuhan kebutuhan dasar Peserta Didik sesuai dengan jenjang dan jalur Pendidikan.

SPM Pendidikan ditetapkan dan diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip : kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran dan ketepatan sasaran.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas :

a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada PAUD merupakan peserta didik yang berusia 5-6 tahun.

b. Pendidikan Dasar (Dikdas)

Penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada Dikdas merupakan peserta didik yang berusia 7-15 tahun (SD dan SMP).

c. Pendidikan Kesetaraan (Diksetara)

Penerima pelayanan dasar SPM Pendidikan pada Diksetara merupakan peserta didik yang berusia 7-18 tahun (Kejar Paket A, B dan C).

Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar SPM Pendidikan mencakup :

a. Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;

b. Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan; dan

c. Tata cara pemenuhan standar

2. Target Pencapaian SPM

Target yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten dalam mencapai SPM selama Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Target Pencapaian SPM Pendidikan

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)	100%	2020
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100%	2020

R e	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	2020
----------------	---------------------------	--	------	------

a

Sumber : Laporan SPM Urusan Pendidikan Kab. Klaten Tahun 2020

3. Realisasi Pencapaian SPM

Target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten selama Tahun Anggaran 2020 dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya.

Tabel 4.2
Realisasi Pencapaian SPM Pendidikan

No	Jenis Layanan Dasar	Indikator	Jumlah Penduduk Usia Sekolah	Jumlah Penduduk yang mendapatkan layanan pendidikan	Realisasi 2020
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTs)	170.481	156.342	91,71%
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	3.539	205	5,79%
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	54.839	36.697	66,92%

Sumber : Laporan SPM Urusan Pendidikan Kab. Klaten Tahun 2020

4. Alokasi Anggaran Tahun 2020

Alokasi Anggaran baik Belanja Langsung khususnya program dan kegiatan maupun Belanja Tidak Langsung dan juga realisasi selama Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang bersumber dari APBD, APBN dan sumber dana lain yang sah tersaji dalam tabel 4.3.

Tabel 4.3
Alokasi Anggaran & Realisasi Penerapan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2020

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)
BELANJA	338,469,353,086.00	323,393,711,223.00	(15,075,641,863.00)
BELANJA TIDAK LANGSUNG	281,431,626,110.00	271,634,859,535.00	(9,796,766,575.00)
Belanja Pegawai	281,431,626,110.00	271,634,859,535.00	(9,796,766,575.00)
BELANJA LANGSUNG	57,037,726,976.00	51,758,851,688.00	(5,278,875,288.00)
Belanja Pegawai	34,135,915,648.00	33,854,404,724.00	(281,510,924.00)
Belanja Barang dan Jasa	11,692,424,028.00	9,169,503,129.00	(2,522,920,899.00)
Hibah Barang/Jasa yang Diserahkan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	132,750,000.00	72,250,000.00	(60,500,000.00)
Barang/Jasa Selain Hibah dan Bantuan Sosial	11,559,674,028.00	9,097,253,129.00	(2,462,420,899.00)
Belanja Modal	11,209,387,300.00	8,734,943,835.00	(2,474,443,465.00)

Sumber : Laporan SPM Urusan Pendidikan Kab. Klaten Tahun 2020

5. Dukungan Personil

Pada aspek internal organisasi yang menyangkut kepegawaian, saat ini Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten didukung 96 orang, terdiri 53 orang PNS, 43 orang PTT. Keadaan pegawai dilihat dari kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan serta jabatan struktural dan fungsional sebagaimana tabel - tabel berikut :

Tabel 4.4.
Jumlah ASN Dinas Pendidikan Menurut Pangkat / Golongan Tahun 2020

No	Pangkat / Golongan	Jumlah
1.	Pembina (Gol. IV.c)	0
2.	Pembina Tk I (Gol. IV.b)	6
3.	Pembina (Gol. IV.a)	8
4.	Penata Tk. I (Gol. III.d)	7
5.	Penata (Gol. III.c)	11
6.	Penata Muda Tk. I (Gol. III.b)	8
7.	Penata Muda (Gol. III.a)	3
8.	Pengatur Tk I (Gol. II.d)	1
9.	Pengatur (Gol. II.c)	6
10.	Pengatur Muda Tk. I (Gol. II.b)	2
11.	Pengatur Muda (Gol. II.a)	1
	Jumlah Total	53

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Klaten per Tanggal 31 Desember 2020

Tabel 4.5.
Jumlah ASN & PTT Dinas Pendidikan
Menurut Latar Belakang Pendidikan Tahun 2020

No	Bidang Tugas	Eselon			Pelaksana	PTT	Fungsional/ Pengawas	Jumlah
		II	III	IV				
1	Kepala Dinas	1	0	0	0	0	0	1
2	Sekretariat	0	1	3	14	22	0	40
3	Bidang Pembinaan Sekolah Dasar	0	1	3	6	6	0	16
4	Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama	0	0	1	3	6	4	14
5	Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal	0	1	3	3	4	0	11
6	Bidang Pembinaan Ketenagaan	0	1	3	5	5	0	14
Jumlah Total		1	4	13	31	43	4	96

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Klaten per Tanggal 31 Desember 2020

Tabel 4.6.
Jumlah ASN Dinas Pendidikan Menurut
Esselonering Tahun 2020

No	Pendidikan	PNS Golongan				PTT	Jumlah
		I	II	III	IV		
1.	S2	0	0	12	14	0	26
2.	S1	0	0	12	0	20	32
3	AKADEMI / D3	0	2	0	0	9	11
4	D2	0	0	0	0	0	0
5	SLTA	0	8	5	0	14	27
6	SLTP	0	0	0	0	0	0
7	SD	0	0	0	0	0	0
Jumlah Total		0	10	29	14	43	96

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Klaten per Tanggal 31 Desember 2020

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten dalam penerapan dan pencapaian SPM, baik masalah eksternal maupun internal serta solusi dalam penyelesaian permasalahan yang ditempuh antara lain:

Permasalahan :

1. Kondisi bangunan ruang kelas Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) terdapat bangunan yang rusak, kondisi tersebut secara langsung berdampak pada kelancaran proses belajar mengajar;
2. Berdasarkan Standar kualifikasi tenaga pendidik secara formal di SD dan SMP masih terdapat guru yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan S-1;
3. Pemerataan guru, belum sepenuhnya dapat dilaksanakan khususnya pada jenjang Sekolah Dasar, untuk sekolah-sekolah yang berlokasi di daerah terpencil kebutuhan guru belum sepenuhnya terpenuhi;
4. Standar Kompetensi tenaga Pendidik dan Kependidikan masih perlu diupayakan standar Nasional;
5. Kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak usia dini pada umur 5 – 6 tahun;
6. Keterbatasan biaya dari orang tua untuk menyekolahkan anaknya pada pada jenjang pendidikan dasar (usia 7 – 15 tahun)
7. Adanya pengaruh pergaulan yang kurang baik yang masih kuat mempengaruhi anak di lingkungannya, seperti bergabung dengan kelompok Punk, gang ,maupun kelompok tertentu yang berdampak negatif;
8. kurangnya kesadaran anak akan pentingnya pendidikan, sehingga di daerah tertentu anak memilih untuk bekerja dan mendapatkan uang

Solusi :

1. Optimalisasi penggunaan dana, baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, Provinsi maupun APBN serta mendorong peran serta masyarakat agar peduli terhadap kondisi sekolah;
2. Memberikan kesempatan pendidikan penyeteraan S-1, baik yang dibiayai pemerintah maupun swadaya murni para guru;
3. Melalui pemeratan di tingkat kecamatan dan menekan adanya perpindahan dari SD yang kurang guru ke sekolah yang sudah memenuhi kecukupan guru;
4. Melakukan optimalisasi kegiatan Pusat Kegiatan Guru (PKG) dan PKB;
5. Optimalisasi dan koordinasi dilingkungan Pemerintah Daerah untuk melakukan program peningkatan kesadaran bagi masyarakat untuk mengenyam pendidikan sesuai dengan tingkatannya

B. BIDANG URUSAN KESEHATAN

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, jenis pelayanan dasar yang tertuang dalam standar pelayanan minimal bidang kesehatan kabupaten/kota sebagai berikut :

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil;
2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
4. Pelayanan kesehatan balita;
5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
8. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
9. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
10. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
11. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
12. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*). yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/ preventif.

2. Target Pencapaian SPM

Capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memberikan standar pelayanan minimal bidang kesehatan dengan target capaian kinerja pemerintahan dalam pelayanan adalah 100 persen (%).

Tabel 4.7.
Target Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Target Capaian (%)	Batas Waktu Capaian
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100	2020
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100	2020
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	2020
4	Pelayanan kesehatan balita	100	2020
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	2020
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100	2020
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100	2020
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100	2020

9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100	2020
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100	2020
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	100	2020
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	100	2020

Sumber : Laporan SPM Urusan Kesehatan Kab. Klaten Tahun 2020

3. Realisasi Pencapaian SPM

Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Klaten tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.8.
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2020

No	INDIKATOR	Target		Realisasi	
		Jumlah Sasaran	%	Jumlah Sasaran	%
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil;	16.682	100	15.584	93,42
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin;	15.726	100	15.725	99,99
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;	17.735	100	15.216	96,70
4	Pelayanan kesehatan balita;	64.738	100	60.019	92,71
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;	55.996	100	17.434	31,13
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif;	726.968	100	532.551	73,26
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	199.953	100	146.246	73,14
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;	315.318	100	102.089	32,38
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;	37.485	100	34.022	90,76
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;	2.929	100	2.587	88,32
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan	13.687	100	4.007	29,28
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus HIV	18.143	100	15.254	84,08

Sumber : Laporan SPM Urusan Kesehatan Kab. Klaten Tahun 2020

4. Alokasi Anggaran Tahun 2020

Penyerapan anggaran tahun 2020 di Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten dalam rangka pencapaian target Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Klaten berjumlah Rp 32.726.482.816,00 (*Tiga puluh dua milyar tujuh ratus dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua*

ribu delapan ratus enam belas rupiah) namun penyerapannya tidak 100% tetapi hanya 31,43% seperti pada rincian berikut.

Tabel 4.9.
Alokasi Anggaran Penerapan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2020

No	Indikator	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.683.451.625	1.348.777.867
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	365.958.600	303.450.100
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	490.365.600	394.044.350
4	Pelayanan Kesehatan Balita	2.371.900.300	1.896.317.600
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	1.372.937.200	645.362.250
6	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	1.133.840.410	618.434.625
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	775.198.725	472.432.475
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	484.291.675	330.346.965
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	637.965.545	370.001.375
10	Pelayanan Kesehatan ODGJ Berat	339.934.725	203.253.500
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	463.574.750	238.318.129
12	Pelayanan Kesehatan Pada Orang Berisiko Terinfeksi Virus yang melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	172.277.232	90.720.250

Sumber : Laporan SPM Urusan Kesehatan Kab. Klaten Tahun 2020

5. Dukungan Personil

Rincian dukungan personil berdasarkan profesinya di Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 4.10.
Jenis & Jumlah pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten Tahun 2020

No	Jenis Profesi	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Dokter Umum	24	63	87
2	Dokter Gigi	6	33	39
3	Perawat	70	134	204
4	Bidan	0	450	450
5	Kesehatan Masyarakat	8	26	34
6	Kesehatan Lingkungan	21	35	56
7	Gizi/ Nutrisisionis	10	91	101
8	Ahli Lab Medik	5	34	39
9	Terapi Fisik	9	20	29
10	Teknis Kefarmasian	3	32	35
11	Apoteker	4	30	34
Jumlah Total		160	948	1108

Sumber : Laporan SPM Urusan Kesehatan Kab. Klaten Tahun 2020

6. Permasalahan dan Solusi

Pemerintah Kabupaten Klaten menetapkan status keadaan darurat bencana wabah penyakit akibat COVID-19 dengan adanya Surat Keputusan Bupati Klaten tertanggal 1 April 2020 dengan nomor 443.4/116 Tahun 2020 tentang Status Kejadian Luar Biasa Corona Virus Disease (COVID 19) di Kabupaten Klaten. Pandemi COVID- 19 berdampak pada semua aspek, baik kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Kondisi tersebut berpengaruh juga pada cakupan pelayanan dan hasil kegiatan di Kabupaten Klaten.

Dampak pandemi COVID-19 tidak hanya pada anggaran kegiatan, tetapi berdampak juga pada sumber daya manusia di mana setiap kegiatan memberlakukan pengaturan SDM, terutama kelompok rentan (lansia, komorbid/yang mempunyai penyakit penyerta dan sedang hamil) yang berkaitan dengan tingginya potensi mereka tertular COVID-19, sehingga realisasi kegiatan dan cakupannya akan terpengaruh.

Kegiatan untuk menangani pandemi COVID-19 di Kabupaten Klaten mengacu pada kebijakan baik pemerintah pusat, provinsi maupun daerah di antaranya Inpres Nomor 6 tahun 2020 tentang penegakan hukum bagi pelanggar protokol kesehatan. Kebijakan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, antara lain:

1. Keputusan Gubernur Jawa Tengah nomor 440.1/43/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Jawa Tengah
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 25 tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular di Provinsi Jawa Tengah
3. Instruksi Gubernur Jawa Tengah nomor 1 tahun 2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Penanganan Covid-19 di Tingkat RW Melalui Pembentukan Satgas Jogotonggo.

Kebijakan penanganan pandemi COVID-19 di Kabupaten Klaten di antaranya:

1. Peraturan Bupati Klaten nomor 40 tahun 2020 tentang penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pencegahan Covid-19 di Kabupaten Klaten
2. Keputusan Bupati Klaten nomor 360/115 tahun 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit yang Disebabkan Covid-19 di Kabupaten Klaten
3. Keputusan Bupati Klaten nomor 443.4/116 tahun 2020 tentang Status Kejadian Luar Biasa Covid-19 di Kabupaten Klaten
4. Keputusan Bupati Klaten nomor 445/125 tahun 2020 tentang Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Lini Ketiga di Kabupaten Klaten
5. Keputusan Bupati Klaten nomor 443.4/215 tahun 2020 tentang Hotel

Edotel sebagai Rumah Isolasi Sehat Covid-19 Kabupaten Klaten

6. Keputusan Bupati Klaten nomor 360/298 tahun 2020 Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 di Kabupaten Klaten
7. Instruksi Bupati Klaten nomor 256 tahun 2020 tentang Kewajiban Penggunaan Masker untuk Mencegah Penularan Infeksi Covid-19
8. Surat Edaran nomor 443.5/260/08 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pengurusan Jenazah Terindikasi Terkena Covid-19 di Kabupaten Klaten

Secara umum permasalahan penerapan SPM pada tahun 2020 ini adalah penurunan pelayanan SPM. Cakupan hasil penerapan standar pelayanan minimal mengalami penurunan dengan adanya pandemi Covid-19 ini. Hal ini dikarenakan pembatasan kegiatan termasuk kegiatan yang mengumpulkan banyak orang yang berpotensi terjadinya penularan Covid-19. Sebagai contoh hari buka posyandu PTM (posbindu) berkurang atau ada pula posyandu yang tetap buka namun kehadiran/pengunjung menurun, tidak seperti pada saat sebelum terjadinya pandemi Covid-19 sehingga cakupan pelayanan juga menurun. Ada kegiatan yang membutuhkan keterlibatan lintas sektor tidak dilaksanakan karena khawatir terjadi peningkatan penularan Covid-19. Kader tuberculosis juga membatasi kegiatan. Pelayanan kesehatan prioritas pada masa pandemi ini adalah pelayanan mendesak seperti penanganan Covid-19, sedangkan pelayanan lain seperti imunisasi, penanggulangan KLB, kunjungan keluarga risiko tinggi menjadi prioritas kedua.

Hambatan lain dalam penerapan SPM ini adalah pembatasan waktu tatap muka, belum semua sasaran terfasilitasi atau ketidaktahuan cara menggunakan media online, serta kunjungan rumah yang menyita waktu karena harus mematuhi protokol kesehatan. Penjaringan/pemeriksaan UKS/UKGS tidak dapat dilaksanakan karena pembelajaran siswa juga dilaksanakan secara daring, pembatasan kegiatan posyandu, lintas sektor dan pelayanan langsung karena sasaran sendiri merasa takut/khawatir jika mengunjungi pelayanan kesehatan.

Permasalahan lain di bidang pelayanan ibu dan anak adalah belum optimalnya ANC terpadu dan kekhawatiran sasaran mengunjungi fasilitas pelayanan kesehatan karena takut tertular Covid-19, bahkan ada ibu bersalin yang melahirkan di rumah sendiri, selain karena takut juga karena ada penolakan fasyankes menerima persalinan terutama saat ibu tersebut terkonfirmasi Covid-19.

Peluang dalam penerapan SPM adalah pemanfaatan media lain selain online, misalnya media cetak (leaflet, brosur) untuk meningkatkan cakupan pelayanan, menambah anggaran untuk transport kader agar kader dapat membantu pelayanan kunjungan rumah terutama sasaran risiko tinggi dengan menerapkan protokol kesehatan, serta pengoptimalan

penggunaan media online misalnya melalui aplikasi Whatsapp group serta pemanfaatan penggunaan buku KIA untuk memantau kesehatan ibu dan balita.

1. Pelayanan kesehatan penderita DM dan hipertensi Permasalahannya:

- a) Mengurangi kegiatan yang berisiko menularkan Covid-19
- b) Refokusing dana untuk kegiatan penanggulangan pandemic Covid-19
- c) Masyarakat yang berisiko DM/hipertensi takut dan khawatir jika mendatangi pelayanan pemeriksaan karena pandemi Covid-19
- d) Belum semua penderita DM/hipertensi bersedia melakukan pengobatan rutin
- e) Masih banyak masyarakat yang berobat di klinik atau dokter praktek swasta dan datanya tidak dilaporkan ke puskesmas/ RS
- f) Pembelian bahan habis pakai untuk mendukung pelayanan IVA dalam rangka perayaan hari besar tidak dilaksanakan karena pembatasan kontak langsung dengan masyarakat
- g) Sasaran masih menggunakan data proyeksi yang sudah ditentukan dari kementerian dan bukan sasaran riil

Solusinya adalah:

Peningkatan sosialisasi tentang penyakit DM dan hipertensi kepada masyarakat maupun institusi atau pemegang kebijakan pada institusi terkait secara virtual

- a) Peningkatan kerjasama dan jejaring antar puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya
- b) Pelayanan konseling/konsultasi dapat dilakukan melalui aplikasi Matur Dokter

2. Pelayanan kesehatan pada orang dengan risiko terinfeksi HIV Permasalahan:

- a) Mengurangi kegiatan yang berisiko menularkan Covid-19
- b) Refokusing dana untuk kegiatan penanggulangan pandemic Covid-19
- c) Pasien takut dan khawatir jika mendatangi pelayanan pemeriksaan karena pandemi Covid-19

Solusinya:

- a) Peningkatan sosialisasi tentang HIV secara virtual
- b) Peningkatan kapasitas petugas sebagai konselor HIV
- c) Puskesmas membuat SOP Pemeriksaan TB-HIV
- d) Pertemuan tripel eliminasi

3. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis Permasalahan:

- a) Pelayanan kesehatan terhadap terduga tuberculosis menurun karena adanya pembatasan kegiatan
- b) Pasien takut dan khawatir jika mendatangi pelayanan pemeriksaan

karena pandemi Covid-19

Solusinya: peningkatan sosialisasi tentang tuberculosis dilaksanakan secara virtual

4. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat (ODGJ), Permasalahannya:

- a) Mengurangi kegiatan yang berisiko menularkan Covid-19
- b) Refokusing dana untuk kegiatan penanggulangan pandemic Covid-19
- c) pelayanan terhadap ODGJ yg berkeluaran belum bisa maksimal karena berasal luar daerah ,kesulitan berkomunikasi serta kesulitan dalam mengevakuasi
- d) Belum semua keluarga bersedia memeriksakan anggota keluarganya dengan gangguan jiwa berat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara rutin
- e) Masih terbatasnya tenaga kesehatan puskesmas yang mendapatkan pelatihan pelayanan dengan gangguan jiwa
- f) Belum semua ODGJ mempunyai BPJS
- g) Masih ada ODGJ yg dipasung karena keluarga kesulitan merawat
- h) Masih banyak desa yg belum mempunyai Posyandu Jiwa sehingga pemantauan secara rutin tiap bulan belum maksimal
- i) Penilaian negatif dari masyarakat terhadap orang dengan gangguan jiwa berat

Solusinya adalah:

- a) Kerjasama dengan lintas sektor terkait dalam penjangkaran ODGJ di masyarakat
- b) Edukasi kepada keluarga yg mempunyai anggota keluarga dengan gangguan jiwa berat dilakukan secara virtual atau melalui media sosial
- c) Peningkatan kompetensi tenaga kesehatan untuk pelayanan kesehatan jiwa
- d) Melakukan advokasi ke pemerintah desa untuk memasukan daftar keluarga ODGJ agar mendapat BPJS
- e) Melakukan edukasi kepada keluarga agar mengawasi ODGJ dalam meminum obat
- f) Melakukan pendekatan kekeluargaan pada keluarga agar mau melepas pasung dan mengevakuasi ODGJ ke RSJD
- g) Pemenuhan sarana dan prasarana untuk mendukung pelayanan kesehatan jiwa
- h) Pembentukan posyandu jiwa

5. Pelayanan kesehatan usia lanjut, usia produktif, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita dan ibu hamil

Permasalahan secara umum : pelayanan kesehatan terhadap kesehatan usia lanjut menurun karena adanya pembatasan kegiatan apalagi usia lanjut merupakan kelompok rawan

Solusi secara umum : pelayanan kesehatan usia lanjut dilaksanakan dengan cara konseling melalui media sosial/ media online lainnya

6. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

Permasalahan : pelayanan kesehatan terhadap usia pendidikan menurun karena adanya pembatasan kegiatan apalagi pembelajaran dilaksanakan secara daring

Solusinya: konseling atau diskusi diberikan kesempatan dengan media online atau media sosial apabila menemui permasalahan kesehatan pada anak usia dasar

C. BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

1. Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Pekerjaan Umum di Kabupaten Klaten dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten. Jenis-jenis pelayanan dasar pada bidang urusan tersebut adalah :

- a. Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari;

Penerima pelayanan dasar SPM Perumahan Rakyat Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari adalah warga masyarakat di Kabupaten Klaten yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari

- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

Penerima pelayanan dasar SPM Perumahan Rakyat Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik adalah warga masyarakat di Kabupaten Klaten yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik

2. Target Pencapaian SPM

Tabel 4.11.
Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum
Tahun 2020

No	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
	Indikator	Target (%)	
1.	pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	2020
2.	penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	100	2020

Sumber : Laporan SPM Urusan Pekerjaan Umum Kab. Klaten Tahun 2020

3. Realisasi Pencapaian SPM

Tabel 4.12.
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2020

No	Indikator	Target		Realisasi	
		Jumlah Sasaran (Kepala Keluarga)	%	Jumlah Sasaran (Kepala Keluarga)	%
1.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	380.591	100	305.063	80,16
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	422.284	100	422.284	100

Sumber : Laporan SPM Urusan Kesehatan Kab. Klaten Tahun 2020

4. Alokasi Anggaran Tahun 2020

Tabel 4.13.
Alokasi Anggaran Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Berdasarkan Program & Kegiatan Tahun 2020

No	Program dan Kegiatan	Murni	Perubahan (Rp)
Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong		110.000.0000	910.000.000
1	Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	110.000.000	110.000.000
2	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	0	800.000.000
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah		6.545.294.000	3.212.005.000
1	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (DAK Bid. Air Minum)	2.586.005.000	2.856.005.000
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (BLM)	2.859.289.000	0
3	Pendampingan Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	980.000.000	506.000.000
4	Pendampingan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Minum	120.000.000	120.000.000

Sumber : Laporan SPM Urusan Kesehatan Kab. Klaten Tahun 2020

5. Dukungan Personil

Dukungan personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum sejumlah 94 orang yang merupakan pegawai yang berdinis di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 4.14.
Jumlah Pegawai Disperwaskim
Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2020

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Keterangan
1	PNS	40 orang	Data Disperwaskim per 31 Desember 2020
2	CPNS	- orang	
3	THL	50 orang	
4	TENAGA AHLI	4 orang	
	Jumlah	94 orang	

Sumber : Laporan SPM Urusan Pekerjaan Umum Kab. Klaten Tahun 2020

Tabel 4.15.
Jumlah Pegawai Disperwaskim
Berdasarkan Pendidikan Tahun 2020

Pendidikan	Status Kepegawaian			
	PNS	CPNS	THL+ T.Ahli	Total
SD	1	-	1	2
SMP	2	-	2	4
SMA	5	-	13	18
SMK	8	-	22	30
D-3	1	-	2	3
D-4	0	-	-	0
S-1	16	-	14	30
S-2	7	-	-	7
Jumlah	40	0	54	94

Tabel 4.16.
Jumlah ASN Disperwaskim Menurut Jabatan
Tahun 2020

Bidang	Subag/Seksi	PNS	CPNS	THL	T. Bid.	T. Ahli	Jml
SEKRETARIAT	KEPALA DINAS	1					1
	SEKRETARIS	1					1
	KEPALA SUB BAGIAN	1					1
	STAF SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	2		6			8
	KEPALA SUB BAGIAN	1					1
	STAF SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	6		14			20
BIDANG PERUMAHAN	KEPALA BIDANG	1					1
	KEPAM SEKSI PENDATAAN, PERENCANAAN, & FASILITASI	1					1
	STAF SEKSI PENDATAAN, PERENCANAAN, & EVALUASI	3			2		5
	KEPALA SEKSI PENYEDIAAN & FASILITASI	1					1
	SEKSI PENYEDIAAN & FASILITASI	5		17			22

BIDANG KAWASAN PEMUKIMAN DAN TATA BANGUNAN	KEPALA BIDANG	1					1
	KEPALA SEKSI PERENCANAAN TEKNIK DAN EVALUASI	1					1
	SEKSI PERENCANAAN TEKNIK DAN EVALUASI	7		4		2	13
	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN, PENINGKATAN KUALITAS DAN PENGENDALIAN	1					1
	SEKSI PEMBANGUNAN, PENINGKATAN KUALITAS DAN PENGENDALIAN	7		7		2	16
Jumlah Total		40	0	48	4	2	94

Tabel 4.17.
Jumlah ASN Disperwaskim Menurut Golongan/Ruang
Tahun 2020

Gol.	Pangkat	PNS/CPNS/THL 2			
		Jumlah	PNS	CPNS	THL
IV/c	Pembina Utama Muda	0	0		
IV/b	Pembina Tk 1	2	2		
IV/a	Pembina	1	1		
III/d	Penata Tk 1	6	8		
III/c	Penata	7	6		
III/b	Penata Muda Tk 1	10	10		
III/a	Penata Muda	3	3		
II/d	Pengatur Tk 1	2	2		
II/c	Pengatur	2	3		
II/b	Pengatur Muda Tk 1	3	3		
II/a	Pengatur Muda	3	1		
I/d	Juru Tk 1	0	0		
I/c	Juru	1	1		
I/b	Juru Muda Tk 1	0	0		
THL		48			
T. BIDANG		2			
T. AHLI		4			54
Jumlah Total		94	40	0	54

Tabel 4.18.
Jumlah ASN Disperwaskim Menurut
Esselonering Tahun 2020

No	Pangkat	Gol	Eselon					
			Jumlah	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b
1	Pembina Utama Muda	IV/c						
1	Pembina Tk 1	IV/b	2	1	1			
2	Pembina	IV/a	1			1		
3	Penata Tk 1	III/d	5			1	4	
4	Penata	III/c	2				2	
5	Penata Muda Tk 1	III/b						

6	Penata Muda	III/a						
7	Pengatur Tk 1	II/d						
8	Pengatur	II/c						
9	Pengatur Muda Tk 1	II/b						
10	Pengatur Muda	II/a						
Jumlah Total			10	1	1	2	6	0

6. Permasalahan dan Solusi

Tabel 4.19.
Permasalahan, Solusi dan Rencana Tindak Lanjut Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2020

No	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
I	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong		
A	Kegiatan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong		
1	Data titik genangan air yang belum ada, kewenangan saluran drainase yang terpisah-pisah karena asset	Dilaksanakan pendataan titik-titik genangan dan berkoordinasi dengan para pihak untuk langkah penanganannya (permasalahan asset)	Melaksanakan pembangunan dengan mengambil data-data titik genangan sesuai dari hasil rekomendasi dari hasil pendataan tersebut (terkait dimensi & buangan akhir)
B	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong		
2	Ketidakakuratan, keterbatasan serta kekurangterpaduan database potensi permasalahan drainase di kabupaten klaten	1 Perlunya dilaksanakan studi, pendataan dan penyusunan masterplan drainase di kabupaten klaten	1 Mengajukan anggaran untuk studi dan pendataan lanjutan (di 22 kecamatan lainnya) sebagai data awal potensi dan permasalahan drainase di kabupaten klaten
		2 Perlunya koordinasi rutin antar stakeholder untuk keterpaduan, update dan penyempurnaan data base	2 Koordinasi rutin pada pemangku kebijakan masalah drainase (Bappeda selaku ketua)
		3 Perlunya ditunjuk petugas yang khusus menangani dan mengelola update terhadap database yang dimaksud	3 Ditunjuk ASN untuk menjadi pengolah data
II	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah		
A	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (DAK Bidang Air Minum)		
1	a.	Bidang Air Minum (DAK & HAMP)	

No	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
	Pelaksanaan yang melibatkan pendanaan dari desa	Pelaksanaan sesuai dengan anggaran yang ada tanpa melibatkan pedanaan dari desa berdasarkan data perencanaan yang sudah diketahui pihak desa	Melaksanakan sesuai dari perencanaan awal (sesuai dari survey perencana yang diketahui pihak desa)
B	Kegiatan Pendampingan Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)		
	a. Bidang Air Minum (PAMSIMAS)		
	Pengeboran sumur di beberapa wilayah seperti di kec. Bayat mengalami kendala tanah keras	Mencari pihak ke -3 yang mempunyai kapasitas mumpuni baik alat maupun SDM dalam pengeboran	Fasilitator lapangan dan dinas teknis mendata pihak ke-3 yang mempunyai kapasitas baik dan meminta untuk mempresentasikan terlebih dahulu mengenai kemampuan alat, SDM dan paket pekerjaan
	Beberapa desa mengalami pengunduran waktu karena belum bisa mencairkan dana yang disebabkan belum adanya rekening dalam APBDes untuk transfer dana dari APBD	Pihak desa terlebih dahulu untuk melaksanakan kegiatan dengan bekerja sama dengan pihak ke-3	Ada sosialisasi terlebih dahulu untuk desa yang mendapat program PAMSIMAS dan tata cara penganggarannya
C	Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (BLM) (DAK Bidang Sanitasi)		
	a. Bidang Sanitasi (DAK)		
	Pencairan dana DAK yang memakan waktu dan ada jeda antara pelaksanaan dana tahap sebelumnya dengan pencairan tahap berikutnya (Verifikasi dari inspektorat) dan Kesiapan tenaga desa dalam pelaksanaan yang kurang	Memperpendek waktu pencairan dari tahap sebelum dan berikutnya & mempersiapkan tenaga untuk pelaksanaan di desa	Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam hal pencairan & meningkatkan SDM BKM (pelatihan) dalam pelaksanaan fisik di desa
D	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Sanitasi (Silpa DAK Bidang Air Minum)		
	Ketidakkuratan, keterbatasan serta kekurangterpaduan database potensi permasalahan air minum di kabupaten klaten	1 Perlunya dilaksanakan studi dan pendataan sebagai data awal potensi dan permasalahan air minum di kabupaten klaten	1 Telah disusun pendataan potensi dan permasalahan air minum di kabupaten klaten

No	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
		2 Perlunya koordinasi rutin antar stakeholder untuk keterpaduan, update dan penyempurnaan data base	2 Koordinasi rutin pada pemangku kebijakan masalah drainase (Bappeda selaku ketua)
		3 Perlunya ditunjuk petugas yang khusus menangani dan mengelola update terhadap database yang dimaksud	3 Ditunjuk ASN untuk menjadi pengolah data
E	Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi (Silpa DAK Bidang Sanitasi)		
	Ketidakakuratan, keterbatasan serta kekurangterpaduan database potensi permasalahan sanitasi di kabupaten klaten	1 Perlunya dilaksanakan studi dan pendataan sebagai data awal potensi dan permasalahan sanitasi di kabupaten klaten	1 Mengajukan anggaran untuk studi dan pendataan lanjutan (di 22 kecamatan lainnya) sebagai data awal potensi dan permasalahan sanitasi di kabupaten klaten
		2 Perlunya koordinasi rutin antar stakeholder untuk keterpaduan, update dan penyempurnaan data base	2 Koordinasi rutin pada pemangku kebijakan masalah drainase (Bappeda selaku ketua)
		3 Perlunya ditunjuk petugas yang khusus menangani dan mengelola update terhadap database yang dimaksud	3 Ditunjuk ASN untuk menjadi pengolah data
			2 Mengalokasikan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kedalaman serta kompleksitas perencanaan (atau setidaknya-tidaknya mendekati ketentuan pada Permen PU Nomor 22 tahun 2018)

Sumber : Laporan SPM Urusan Pekerjaan Umum Kab. Klaten Tahun 2020

D. BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

1. Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Perumahan Rakyat di Kabupaten Klaten dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten. Jenis-jenis pelayanan dasar pada bidang urusan tersebut adalah :

- a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
- b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota

2.Target Pencapaian SPM

Tabel 4.20.
Target Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2020

No	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian (Tahun)
	Indikator	Target (%)	
1.	penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100	2020
2.	fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	100	2020

Sumber : Laporan SPM Urusan Perumahan Rakyat Kab. Klaten Tahun 2020

3.Realisasi Pencapaian SPM

Tabel 4.21.
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2020

No	Indikator	Target		Realisasi	
		Jumlah Sasaran	%	Jumlah Sasaran	%
1.	penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	1 kabupaten	100	1 kabupaten	100
2.	fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	1 kabupaten	100	1 kabupaten	100

Sumber : Laporan SPM Urusan Perumahan Rakyat Kab. Klaten Tahun 2020

4.Alokasi Anggaran Tahun 2020

Alokasi Anggaran Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) untuk penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat sebesar Rp 3.328.755.000,- dan terelisasi sebesar Rp 3.042.957.736,-

Alokasi Belanja Program dan Kegiatan dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat sesuai Tabel berikut :

Tabel 4.22.
Anggaran Program Pendukung Pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2020

No.	Program dan Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Kurang (Rp)
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15,000,000	14,997,300	2,700
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	640,000,000	358,296,746	281,703,254
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	100,000,000	77,450,500	22,549,500
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	410,000,000	359,022,490	50,977,510
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	174,000,000	154,140,520	19,859,480
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor	50,000,000	49,832,000	168,000
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35,000,000	34,971,000	29,000
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20,000,000	19,996,070	3,930
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	2,915,000	2,910,750	4,250
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	30,000,000	29,816,500	183,500
11	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	150,000,000	140,821,285	9,178,715
12	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	80,000,000	79,100,000	900,000
13	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	234,000,000	214,472,680	19,527,320
14	Penyediaan Jasa Pengemudi Kantor	33,000,000	27,898,240	5,101,760
15	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan	48,000,000	46,865,750	1,134,250
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		784,400,000	771,599,300	12,800,700
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	250,000,000	241,976,400	8,023,600
2	Pengadaan Mebeleur	0	0	-
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	210,000,000	208,800,000	1,200,000
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	95,000,000	94,997,000	3,000
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	10,000,000	9,735,000	265,000
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Gedung Non Kantor	219,400,000	216,090,900	3,309,100
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		28,200,000	26,290,850	1,909,150
1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	18,200,000	16,418,850	1,781,150
2	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan	10,000,000	9,872,000	128,000

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN		300,000,000	112,326,100	187,673,900
1	Koordinasi Pembangunan Perumahan dengan Lembaga/Badan Usaha	200,000,000	81,603,700	118,396,300
2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	100,000,000	30,722,400	69,277,600
PROGRAM PERBAIKAN PERUMAHAN AKIBAT BENCANA ALAM/SOSIAL		2,416,849,000	1,752,421,550	664,427,450
1	Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Sosial	2,256,000,000	1,686,452,850	569,547,150
2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	100,000,000	32,718,700	67,281,300
3	Biaya Operasional Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya (DAK Bidang Perumahan dan Permukiman)	60,849,000	33,250,000	27,599,000

Sumber : Laporan SPM Urusan Perumahan Rakyat Kab. Klaten Tahun 2020

5. Dukungan Personil

Dukungan personil yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat sejumlah 95 orang yang merupakan pegawai yang berdinasi di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 4.23.
Jumlah Pegawai Disperwaskim
Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2020

No	Status Kepegawaian	Jumlah	Keterangan
1	PNS	40 orang	Data Disperwaskim per 31 Desember 2020
2	CPNS	- orang	
3	THL	50 orang	
4	TENAGA AHLI	4 orang	
Jumlah		94 orang	

Sumber : Laporan SPM Urusan Perumahan Rakyat Kab. Klaten Tahun 2020

Tabel 4.24.
Jumlah Pegawai Disperwaskim
Berdasarkan Pendidikan Tahun 2020

Pendidikan	Status Kepegawaian			
	PNS	CPNS	THL+ T.Ahli	Jumlah
SD	1	-	1	2
SMP	2	-	2	4
SMA	5	-	13	18
SMK	8	-	22	30
D-3	1	-	2	3
D-4	0	-	-	0
S-1	16	-	14	30
S-2	7	-	-	7
Jumlah	40	0	54	94

Sumber : Laporan SPM Urusan Perumahan Rakyat Kab. Klaten Tahun 2020

Tabel 4.25.
Jumlah ASN Disperwaskim Menurut Jabatan Tahun 2020

BAGIAN (BIDANG)	SUBAG/SEKSI	PNS	CPNS	THL	TENAGA BIDANG	T. Ahli	Total
SEKRETARIAT	KEPALA DINAS	1					1
	SEKRETARIS	1					1
	KEPALA SUB BAGIAN	1					1
	STAF SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN	2		6			8
	KEPALA SUB BAGIAN	1					1
	STAF SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	6		14			20
BIDANG PERUMAHAN	KEPALA BIDANG	1					1
	KEPAM SEKSI PENDATAAN, PERENCANAAN, & FASILITASI	1					1
	STAF SEKSI PENDATAAN, PERENCANAAN, & EVALUASI	3			2		5
	KEPALA SEKSI PENYEDIAAN & FASILITASI	1					1
	SEKSI PENYEDIAAN & FASILITASI	5		17			22
BIDANG KAWASAN PEMUKIMAN DAN TATA BANGUNAN	KEPALA BIDANG	1					1
	KEPALA SEKSI PERENCANAAN TEKNIK DAN EVALUASI	1					1
	SEKSI PERENCANAAN TEKNIK DAN EVALUASI	7		4		2	13
	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN, PENINGKATAN KUALITAS DAN PENGENDALIAN	1					1
	SEKSI PEMBANGUNAN, PENINGKATAN KUALITAS DAN PENGENDALIAN	7		7		2	16
Jumlah Total		40	0	48	4	2	94

Sumber : Laporan SPM Urusan Perumahan Rakyat Kab. Klaten Tahun 2020

Tabel 4.26.
Jumlah ASN Disperwaskim Menurut Golongan/Ruang Tahun 2020

Gol	Pangkat	Status Kepegawaian			
		Jumlah	PNS	CPNS	THL
IV/c	Pembina Utama Muda	0	0		
IV/b	Pembina Tk 1	2	2		
IV/a	Pembina	1	1		
III/d	Penata Tk 1	6	8		
III/c	Penata	7	6		
III/b	Penata Muda Tk 1	10	10		
III/a	Penata Muda	3	3		
II/d	Pengatur Tk 1	2	2		
II/c	Pengatur	2	3		

II/b	Pengatur Muda Tk 1	3	3		
II/a	Pengatur Muda	3	1		
I/d	Juru Tk 1	0	0		
I/c	Juru	1	1		
I/b	Juru Muda Tk 1	0	0		
THL		49			
T. BIDANG		2			
T. AHLI		4			54
Jumlah Total		95	40	0	54

Sumber : Laporan SPM Urusan Perumahan Rakyat Kab. Klaten Tahun 2020

Tabel 4.27.
Jumlah ASN Disperwaskim Menurut Esselonering Tahun 2020

NO	PANGKAT	GOL	ESELON					
			Jumlah	II.b	III.a	III.b	IV.a	IV.b
1	Pembina Utama Muda	IV/c						
1	Pembina Tk 1	IV/b	2	1	1			
2	Pembina	IV/a	1			1		
3	Penata Tk 1	III/d	5			1	4	
4	Penata	III/c	2				2	
5	Penata Muda Tk 1	III/b						
6	Penata Muda	III/a						
7	Pengatur Tk 1	II/d						
8	Pengatur	II/c						
9	Pengatur Muda Tk 1	II/b						
10	Pengatur Muda	II/a						
Jumlah Total			10	1	1	2	6	0

Sumber : Laporan SPM Urusan Perumahan Rakyat Kab. Klaten Tahun 2020

3. Permasalahan dan Solusi

Tabel 4.28
Permasalahan, Solusi dan Rencana Tindak Lanjut Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2020

No	Permasalahan	Solusi	Rencana Tindak Lanjut
SEKRETARIAT			
1.	Kekurangan Sarpras Kantor	Dilaksanakan pendataan Sarpras kantor	Pengadaan Sarpras perkantoran
2.	Belum adanya kendaraan Operasional untuk IMB dan RTLH	Pengusulan Pengadaan Kendaraan Operasional	Pengadaan Kendaraan Operasional
3.	Anggaran untuk Rusunawa belum teranggarkan karena belum adanya kegiatan	Pengusulan Anggaran untuk Rusunawa belum teranggarkan karena belum adanya kegiatan	Penganggaran kegiatan untuk Rusunawa

BIDANG PERUMAHAN			
1.	Database Perumahan tentang RTLH yang belum akurat	Dilaksanakan pendataan yang detail dan akurat	Maintenance data dan update data jika sudah ada database yang akurat
2.	Belum terlaksananya kegiatan penyerahan PSU (Pra Sarana Umum) perumahan yang dibangun pengembang kepada Pemerintah Kabupaten	Dibentuk tim verifikasi dan regulasi untuk melaksanakan kegiatan tersebut	Memulai kegiatan penyerahan PSU (Pra Sarana Umum) pada Tahun Anggaran 2020
3.	Tingkat hunian RUSUNAWA yang belum optimal dan permasalahan pembayaran sewa hunian	Sosialisasi yang lebih intens untuk mempromosikan Rusunawa & menegakkan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban penghuni rusunawa	Menyebarkan pamflet RUSUNAWA, sosialisasi di kecamatan, dan menerapkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku
BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN & TATA BANGUNAN			
III	Program Pengembangan Infrastruktur Perdesaan/Perkotaan		
A	Kegiatan BOP Pendampingan PNPM		
1	A. KOTAKU		
	SK pejabat inti satker terlalu lama diterbitkan dari pusat sedangkan DIPA sudah ada lebih dahulu	Menjadwal ulang kegiatan yang akan dilaksanakan	Menjadwal ulang kegiatan yang akan dilaksanakan dan mendorong pusat agar SK pejabat inti satker segera disahkan/terbitkan
	Beberapa material terutama fabrikasi mengalami pengunduran waktu pengiriman	Menjadwal ulang kegiatan yang akan dilaksanakan di lapangan	Mendorong pihak supplier untuk segera mengirim material/barang
IV	Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung		
A	Kegiatan Pembangunan Gedung Milik Daerah		
1	Belum maksimalnya peran konsultan di lapangan	Memaksimalkan pengawasan internal melalui tenaga ahli serta penambahan SDM	Memaksimalkan peran konsultan baik konsultan supervisi maupun manajemen konstruksi untuk lebih aktif dan kritis di lapangan
2	Masih terbatasnya SDM dari dinas	Memaksimalkan tenaga ahli dan mengusulkan penambahan SDM	Memaksimalkan tenaga ahli dan mengefektifkan waktu pengawasan di lapangan

B. Kegiatan Penyusunan Dokumen Bangunan Gedung/Kantor			
1	Tidak ada database bangunan gedung pemerintah di Kabupaten Klaten	1 Perlunya dilaksanakan studi, pendataan dan penyusunan database/leger bangunan gedung pemerintah di Kabupaten Klaten	1 Mengajukan anggaran untuk studi dan pendataan leger bangunan gedung pemerintah di Kabupaten Klaten
		2 Perlunya ditunjuk petugas yang khusus menangani dan mengelola update terhadap database yang dimaksud	2 Memaksimalkan peran konsultan baik konsultan supervisi maupun manajemen kontruksi untuk lebih aktif dan kritis di lapangan
V Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang			
1	Sumber daya manusia (SDM) yang terbatas serta kapasitas dari SDM yang belum sepenuhnya mengerti akan tupoksinya masing-masing	Mengusulkan penambahan SDM serta mengikutsertakan SDM dalam diklat- diklat mengenai IMB	Mengikutsertakan SDM dalam diklat-diklat mengenai pengendalian pemanfaatan tata ruang, IMB dan turunannya
2	Pelaksanaan IMB belum sesuai SOP	Membaca kembali SOP dan mengimplementasikan di lapangan	Membuat SOP dalam media-media yang mudah difahami, dilihat dan diingat
VI Kegiatan di Anggaran Perubahan			
1	Waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi sehingga mendapatkan hasil yang kurang optimal dan akurat	Membatasi jumlah pekerjaan di anggaran perubahan tidak lebih dari 2 pekerjaan saja	Melaksanakan pekerjaan yang sangat prioritas dengan melakukan perencanaan di tahun N-1
2	Banyak kegiatan perencanaan <i>detail engineering design</i> (DED) maupun review DED yang fisik konstruksinya tidak dilaksanakan ditahun berikutnya	DED yang sudah disusun disimpan sebagai arsip	1 Mengusulkan kegiatan tersebut ditahun - tahun berikutnya 2 Perlu perencanaan makro (Bappeda) yang lebih matang supaya tidak terjadi pemborosan anggaran
3	Waktu pelaksanaan DED di anggaran perubahan sangat pendek dan anggaran penyusunan DED/review DED tidak sesuai besarannya dengan Permen PU Nomor 22 tahun 2018, sehingga hasil penyusunan DED,review DED tidak optimal	Tidak melaksanakan kegiatan penyusunan DED di APBD perubahan	1 Melaksanakan penyusunan DED APBD penetapan ditahun N-1 sehingga waktu penyusunan cukup dan dihasilkan perencanaan yang optimal 2 Mengalokasikan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dan kedalaman serta kompleksitas perencanaan (atau setidaknya tidaknya mendekati

			ketentuan pada Permen PU Nomor 22 tahun 2018)
--	--	--	---

Sumber : Laporan SPM Urusan Perumahan Rakyat Kab. Klaten Tahun 2020

E. BIDANG URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat meliputi :

- Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum
- Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
- Pelayanan informasi rawan bencana
- Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

2. Target Pencapaian SPM

Tabel 4.29

Target Pencapaian SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020

No	Jenis Layanan	Indikator Capaian	Target	Batas Waktu Capaian
1.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Presentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	2020
2.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Presentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkara	100%	2020
3.	Pelayanan informasi rawan bencana	Presentase jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100%	2020
4.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase (%) jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	2020
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase (%) jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	2020

Sumber : Laporan SPM Urusan Trantibum Linmas Kab. Klaten Tahun 2020

3. Realisasi Pencapaian SPM

Realisasi pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut:

Tabel 4.30
Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020

No	Jenis Layanan	Indikator Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	140 layanan	88 layanan	63%
2.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkara	941 layanan	866 layanan	92%
3.	Pelayanan informasi rawan bencana	Persentase jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	917.520 orang	917.520 orang	100 %
4.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase (%) jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	6.550 orang	6.550 orang	100%
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase (%) jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	392 orang	392 orang	100%

Sumber : Laporan SPM Urusan Trantibum Linmas Kab. Klaten Tahun 2020

4. Alokasi Anggaran Tahun 2020

Alokasi anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten untuk mendukung penerapan percepatan SPM berkaitan dengan tugas pokoknya yang bersifat pelayanan pada Urusan Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Bidang Kebencanaan Tahun 2020 untuk Belanja Langsung sebesar Rp 2.731.082.000,- (*Dua milyar tujuh ratus tiga puluh satu juta delapan puluh dua ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pelayanan informasi rawan bencana sebesar Rp. 145.000.000,-
- b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Rp.339.550.000,-
- c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Rp.2.246.532.000,-

Sedangkan alokasi Belanja Tidak Langsung BPBD Kabupaten Klaten khususnya Belanja Gaji dan Tunjangan bagi ASN yang berperan langsung bagi penerapan dan pencapaian SPM sebesar Rp 2.683.749.000,- yang terealisasi sebesar Rp 2.482.274.619,-

Alokasi anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten untuk mendukung penerapan percepatan SPM berkaitan dengan tugas pokoknya yang bersifat pelayanan pada urusan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat Sub-Urusan Kebakaran dan Sub-Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2020 khususnya Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) sebesar. Rp 4.929.408.000,- yang terealisasi sebesar Rp 4.268.966.423,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Klaten.

Alokasi Belanja Program dan Kegiatan dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat berdasarkan masing-masing jenis layanan sesuai Tabel berikut :

Tabel 4.31
Alokasi Anggaran Pencapaian SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2020

No	Jenis layanan	Kegiatan	Anggaran	Realisasi
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	a. Pembentukan dan pengembangan sekolah siaga bencana	100.000.000	74.199.550
		b. Penyelenggaraan sekolah sugai	45.000.000	32.455.750
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	a. Penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana	7.550.000	5.200.000
		b. Pelatihan simulasi pengurangan resiko bencana	232.000.000	214.812.700
		c. Desa tangguh bencana	100.000.000	89.002.651
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	a. Koordinasi pemantau dan operasional penanganan darurat bencana	311.914.000	239.263.800
		b. Pengembangan dan pemberdayaan TRC	354.232.000	321.103.364
		c. Droping air	242.132.000	200.860.900
		d. Pengadaan sarana dan prasarana penanganan bencana	495.000.000	402.439.237
		e. Penyediaan logistik	843.254.000	738.564.100
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	a. Peningkatan kapasitas petugas pemadam kebakaran	9.692.000	9.685.000
		b. Operasional Pemadam kebakaran	932.672.000	920.582.615
5.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban	a. Patroli Trantibum di wilayah Kabupaten Klaten	397.150.000	397.080.800

umum	b.optimalisasi pengamanan penertiban wilayah kabupaten klaten	1.208.550.000	1.122.283.730
	c.Penertibandan Penindakan terhadap pelanggaran Perda	78.200.000	7.585.140
	d.Pembinaan Penegakan Perda/Perbup	18.800.000	18.800.000
	e.Operasi PGOT,WTS dan Miras	50.500.000	49.804.450
	f.Peningkatan Kapasitas SumberDayaManusia	13.000.0000	5.562.300
	g.Kegiatan pemantapan keamanan wilayah dalamupaya perlindungan masyarakat	138.000.000	133.261.700
	h.Pengadaan Peralatan gedung Kantor	96.550.000	77.394.500
	i.Pengadaan Pakaian Dinasbeserta perlengkapannya	200.000.000	190.813.500

Sumber : Laporan SPM Urusan Trantibum Linmas Kab. Klaten Tahun 2020

5. Dukungan Personil

Pelaksana Penerapan SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat dilaksanakan oleh 2 (dua) OPD yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Klaten membidangi Sub Urusan Kebencanaan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sub Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat serta Sub Urusan Kebakaran.

Tabel 4.32.
Jumlah Personil Pelaksana Penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Kebencanaan Tahun 2020

Jumlah Pegawai			
Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
S2	7 Orang	1 Orang	8 Orang
S1	4 Orang	4 Orang	8 Orang
D3	2 Orang	1 Orang	3 Orang
SLTA	6 Orang	2 Orang	8 Orang
SLTP	1 Orang	-	2 Orang
SD	-	-	-
Jumlah	20 Orang	8 Orang	29 Orang

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Klaten Tahun 2020

Tabel 4.33.
Jumlah Personil Pelaksana Penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Sub-Urusan Kebakaran dan Sub-Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2020

Jumlah Pegawai			
Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
I	-	-	
II	13 Orang	2 orang	15 Orang
III	30 Orang	3 Orang	33 Orang
IV	4 Orang	-	4 Orang
THL Satpol PP	31 orang	4 orang	35 Orang
THL Damkar	18 orang	-	18 orang
Jumlah	96 Orang	9 Orang	105 Orang

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kab. Klaten Tahun 2020

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang dihadapi dalam penerapan dan pencapaian SPM Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Kebakaran oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan langkah-langkah penyelesaian yang di tempuh antara lain :

Tabel 4.34.
Permasalahan & Solusi Penerapan SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub-Urusan Kebakaran dan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2020

NO	Permasalahan	Solusi
1	Upaya tindak lanjut penanganan komprehensif terhadap permasalahan sosial pasca operasi penertiban, khususnya anak jalanan	a.Peningkatan kapasitas dan penguatan fisik bangunan rumah singgah sebagai penampungan sementara. b.Pendirian panti sosial khusus anjal di wilayah eks. Karesidenan surakarta
2	IMB diluar zona/kawasan pemukiman	sinkronisasi regulasi tentang tata ruang wilayah, persyaratan tehnis IMB dan pemanfaatan ruang.
3	Perizinan usaha melalui OSS	sulitnya mengontrol/mengamati kebenaran data yang disampaikan pelaku usaha melalui OSS, sehingga perlu sinergitas antara lembaga perizinan dengan Satpol PP
4	Adanya Pelanggaran Perda No. 9 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan reklame : Reklame tidak berizin, masa izin reklame sudah habis, pemasangan reklame tidak sesuai dengan ketentuan. Reklame dipasang dipohon, tiang listrik,/telepon	Berkoordinasi dengan OPD terkait, berkoordinasi dengan pihak pemasang reklame, menertibkan reklame yang melanggar Perda No. 9 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan reklame.
5	Adanya Pelanggaran Perda No. 5 Tahun 2018 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	Berkoordinasi dengan OPD terkait, melakukan penertiban PKL yang melakukan pelanggaran Perda,

	(PKL) : Pelaku PKL berjualan di fasilitas umum (trotoar, obyek vital), Pelaku PKL berjualan tidak sesuai dengan ketentuan (Buka sebelum Pukul 15.00 WIB, dan lapak tidak dibongkar pasang)	melakukan pembinaan terhadap PKL yang melakukan pelanggaran perda.
6	Cakupan wilayah kabupaten klaten yang berjumlah 26 kecamatan hanya dilayani dari 1 Pos Damkar sehingga semua layanan tidak terpenuhi SPM dalam wilayah manajemen.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten tidak tercapai dikarenakan dengan luas wilayah Kabupaten Klaten seluas 655 Km2 hanya terdapat 1 Pos Pemadam Kebakaran. Adapun WMK 7 Km /15 menit (idealnya untuk Kabupaten Klaten 7 Pos (Pos bantu Delanggu, Pedan, Jogonalan, Jatinom, wedi, Kota 2 (selatan rel dan utara rel) berdasar dokumen rencana indek sistem proteksi kebakaran Tahun 2011. (RISPK)
7	Jumlah personil dan sarana prasarana yang masih kurang layanan di Damkar masih kurang optimal personil 26 orang. sarana lainnya sangat jauh dari standar sarana prasarana di Damkar (Armada, alat pelindung diri : baju, sepatu, Helm, Jaket+Celana Tahan Panas, Sarung Tangan, Sepatu Boot dan Masker Full Face)	Pengadaan personil Damkar dan sarana prasarana
8	Hidran yang ada di wilayah kabupaten klaten sebagian besar sudah tidak berfungsi dengan maksimal	Diadakan perawatan dan perbaikan Hidran

Sumber : Laporan SPM Urusan Trantibum Linmas Kab. Klaten Tahun 2020

F. BIDANG URUSAN SOSIAL

1. Jenis Pelayanan Dasar

SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

SPM Bidang Urusan Sosial mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu :

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala kab/kota;
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kab/kota;
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala kab/kota;
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala kab/kota;
- e. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial.

2.Target Pencapaian SPM

Tabel 4.35.
Target Pencapaian SPM Urusan Sosial Tahun 2020

No	Jenis Layanan	Indikator Capaian	Target	Batas Waktu Capaian
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	100%	2020
		Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti		
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	100%	2020
		Persentase Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasar di luar panti		
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	100%	2020
		Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti		
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala kab/kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti	100%	2020
		Persentase Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti		
5.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial daerah kabupaten/kota	100%	2020

Sumber : Laporan SPM Urusan Sosial Kab. Klaten Tahun 2020

3.Realisasi

Realisasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Sosial Kabupaten Klaten Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.36.
Target Pencapaian SPM Urusan Sosial Tahun 2020

No	Jenis Layanan	Indikator Capaian	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	300	250	83%

No	Jenis Layanan	Indikator Capaian	Target (orang)	Realisasi (orang)	Capaian
	Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti			
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Persentase Anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasar di luar panti	654	84	13%
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	1.971	2.468	125%
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala kab/kota	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti Persentase Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	151	68	45%
5.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial daerah kabupaten/kota	43	43	100%

Sumber : Laporan SPM Urusan Sosial Kab. Klaten Tahun 2020

4. Alokasi Anggaran

Alokasi Anggaran Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) untuk penerapan dan pencapaian SPM Bidang Sosial sebesar Rp 4.266.448.000,- dan terelisasi sebesar Rp 3.724.464.232,-. Alokasi anggaran program dan kegiatan yang mendukung penerapan dan pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial adalah sebagai berikut :

Tabel 4.37.
Alokasi Anggaran & Realisasi Program Pencapaian SPM
Urusan Sosial Tahun 2020

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	405,000,000	395,103,900
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dan Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	2,057,863,000	1,994,156,914
3	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti			
4	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti			
5	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma	23,189,000	23,188,400
		Jumlah	2,486,052,000	2,412,449,214

Sumber : Laporan SPM Urusan Sosial Kab. Klaten Tahun 2020

Selain alokasi anggaran dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab. Klaten juga didukung oleh Bantuan Sosial dan Hibah dari APBD Kab. Klaten untuk pelayanan dasar PMKS, serta didukung anggaran pusat dari Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.

5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM yang terdiri dari :

- a. ASN = 8 orang (Fungsional Pekerja Sosial)
- b. Non-ASN = 29 orang (Sakti Peksos 3 orang, TKSK 26 orang)

6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan :

- a. Belum semua Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat tertangani;
- b. Validasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) belum optimal

- c. Terkait hal-hal teknis pelayanan terhadap PMKS dimana SDM dan sarana prasarana kurang mendukung sehingga pelayanan tidak berjalan optimal.

Solusi atas permasalahan yang muncul:

- a. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, lintas daerah dengan masalah penanganan PMKS;
- b. Meningkatkan kualitas hidup PMKS melalui peningkatan kualitas pelayanan, pemberdayaan PMKS dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- c. Perlunya pelatihan teknis terhadap ASN dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial untuk peningkatan SDM serta ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan dalam penanganan PMKS.

G. PROGRAM DAN KEGIATAN

1) Bidang Urusan Pendidikan

Program dan kegiatan yang mendukung penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan Kabupaten Klaten Tahun 2020 seperti Tabel dibawah ini :

Tabel 4.38.
Program dan Kegiatan Mendukung Pencapaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2020

No	Nama Program dan Kegiatan	Anggaran	Ket.
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.500.258.000	
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	359.970.000	
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan	821.600.000	
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor	68.500.000	
4	Penyediaan alat tulis kantor	40.000.000	
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	15.000.000	
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	10.000.000	
7	Penyediaan makanan dan minuman	28.500.000	
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	42.188.000	
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	56.000.000	
10	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	58.500.000	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	602.250.000	
11	Pembangunan gedung kantor	-	Refocusing

12	Pengadaan peralatan gedung kantor	573.750.000	
13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	-	Refocusing
14	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	21.000.000	
15	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	7.500.000	
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	30.000.000	
16	Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan	30.000.000	
IV	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	200.000.000	
17	Pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan asset daerah	200.000.000	
V	Program Pendidikan Anak Usia Dini	520.493.000	
18	Pengadaan alat praktik dan peraga siswa	-	Refocusing
19	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini	80.000.000	
20	Peningkatan Mutu pendidikan PAUD	-	Refocusing
21	Penyelenggaraan Ajang Kreativitas Anak Usia Dini	15.000.000	
22	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas peserta didik PAUD serta Lembaga PAUD	-	Refocusing
23	Fasilitasi kegiatan PAUD	5.000.000	
24	Penyediaan Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD	58.800.000	
25	Fasilitasi penyampaian BOP PAUD	70.000.000	
26	Rehabilitasi Ruang Praktik (DAK Bidang Pendidikan)	-	Penyesuaian juknis DAK
27	Rehabilitasi Toilet (Jamban) Guru (DAK Bidang Pendidikan)	42.592.000	
28	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) (DAK Bidang Pendidikan)	20.000.000	
29	Rehabilitasi Ruang Kelas (DAK Bidang Pendidikan)	229.101.000	
VI	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	19.098.581.800	
30	Penataan Lingkungan Sekolah (taman, lapangan upacara, fasilitas parkir, pagar)	900.000.000	
31	Pembangunan perpustakaan sekolah	15.000.000	
32	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary	16.899.800	

33	Pengadaan mebeluer sekolah	700.000.000	
34	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah	20.000.000	
35	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang pratikum sekolah	20.950.000	
36	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah	455.000.000	
37	Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary	17.950.000	
38	Pelatihan Penyusunan kurikulum	155.000.000	
39	Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar	-	Refocusing
40	Penggabungan SD Negeri	25.000.000	
41	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SD	-	Refocusing
42	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SMP	105.000.000	
43	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SD	75.000.000	
44	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SMP	750.000.000	
45	Pengembangan Kurikulum SD	-	Refocusing
46	Pendampingan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tingkat SD	40.000.000	
47	Pendampingan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tingkat SMP	25.000.000	
48	Pembangunan Sanitasi/MCK SD	60.000.000	
49	Penyelenggaraan Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI-PAI) Tingkat SD	-	Refocusing
50	Penyelenggaraan Lomba Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Seni Islami (MAPSI-PAI) Tingkat SMP	-	Refocusing
51	Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat Tingkat SD	-	Refocusing
52	Penyelenggaraan Lomba Sekolah Sehat Tingkat SMP	-	Refocusing
53	Penyelenggaran Ujian SD	290.000.000	
54	Penyelenggaran Ujian SMP	50.000.000	
55	Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan (DAK Bidang Pendidikan)	157.500.000	

56	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif (DAK Bidang Pendidikan)	199.500.000	
57	Operasional Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan	322.452.000	
58	Penguatan Pendidikan karakter Melalui "Program Matur Jujur"	-	Refocusing
59	Penguatan Kinerja Sekolah Perbatasan SD	1.000.000.000	
60	Penguatan Kinerja Sekolah Perbatasan SMP	2.000.000.000	
61	Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi SD	-	Refocusing
62	Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi SMP	-	Refocusing
63	Rehabilitasi Ruang Kelas (DAK Bidang Pendidikan)	1.884.550.500	
64	Rehabilitasi Ruang Perpustakaan (DAK Bidang Pendidikan)	385.875.000	
65	Rehabilitasi Ruang Guru (DAK Bidang Pendidikan)	100.485.000	
66	Rehabilitasi Jamban Siswa/Guru (DAK Bidang Pendidikan)	29.925.000	
67	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (DAK Bidang Pendidikan)	379.050.000	
68	Pembangunan (Toilet) Jamban Siswa/Guru (DAK Bidang Pendidikan)	624.750.000	
69	Pembangunan Ruang Perpustakaan (DAK Bidang Pendidikan)	945.000.000	
70	Pembangunan Ruang UKS (DAK Bidang Pendidikan)	73.500.000	
71	Pengadaan Peralatan PJOK (DAK Bidang Pendidikan)	226.800.000	
72	Pengadaan Peralatan Seni Budaya (DAK Bidang Pendidikan)	176.400.000	
73	Pengadaan Alat Kesenian Tradisional (DAK Bidang Pendidikan)	945.000.000	
74	Pengadaan Peralatan Pendidikan IPA (DAK Bidang Pendidikan)	141.750.000	
75	Pengadaan Peralatan Pendidikan IPS (DAK Bidang Pendidikan)	94.500.000	
76	Pengadaan Peralatan Pendidikan Bahasa Indonesia (DAK Bidang Pendidikan)	73.500.000	
77	Pengadaan Peralatan Pendidikan Matematika (DAK Bidang Pendidikan)	42.000.000	
78	Pengadaan Peralatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (DAK Bidang Pendidikan)	1.601.284.500	
79	Pengadaan Media Pendidikan (DAK Bidang Pendidikan)	126.000.000	

80	Rehabilitasi Ruang Kelas SMP (DAK Bidang Pendidikan)	902.000.000	
81	Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer (DAK Bidang Pendidikan)	1.150.960.000	
82	Pengadaan Alat TIK Pembelajaran SD Negeri (Bankeu Provinsi)	1.387.500.000	
83	Rehab Ruang Kelas Rusak SD Negeri (Bankeu Provinsi)	407.500.000	
VII	Program Pendidikan Non Formal	672.243.000	
84	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan	10.000.000	
85	Pengembangan pendidikan keaksaraan	-	Refocusing
86	Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal	30.000.000	
87	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal	41.000.000	
88	Penyelenggaraan UNPP Paket A,B,C	5.000.000	
89	Rehabilitasi Ruang Praktik (DAK Bidang Pendidikan)	-	Penyesuaian juknis DAK
90	Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) (DAK Bidang Pendidikan)	286.243.000	
91	Pengadaan Peralatan Pendidikan TIK (DAK Bidang Pendidikan)	300.000.000	
92	Pengadaan Peralatan Keterampilan (DAK Bidang Pendidikan)		Penyesuaian juknis DAK
VIII	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	32.793.650.000	
93	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik	94.080.000	
94	Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	-	Refocusing
95	Penilaian dan Penetapan Angka Kredit	30.000.000	
96	Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas	435.000.000	
97	Pembinaan minat bakat dan kreativitas guru	86.570.000	
98	Peningkatan Kapasitas Tenaga Kependidikan dan Pengawas	2.000.000	
99	Peningkatan Tunjangan Fungsional Guru Tidak Tetap (GTT)	-	Refocusing
100	Pengelolaan Keprofesian Berkelanjutan		Refocusing
101	Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	32.146.000.000	
102	Peningkatan Kompetensi Pengawas Sekolah	-	Refocusing

IX	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	-	
103	Pengembangan minat dan budaya baca	-	Refocusing
104	Pengembangan dan Pemahaman Penggunaan Bahasa Jawa	-	Refocusing
X	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	1.620.251.176	
105	Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan		Refocusing
106	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan		Refocusing
107	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	31.259.176	
108	Pengelolaan Jejaring Pendidikan Nasional (Jardiknas)		Refocusing
109	Penguatan kelembagaan Tim Penggerak Pendidikan Karakter dan Nasionalisme melalui Jalur Pendidikan		Refocusing
110	Pembinaan dan Pengembangan UKS Sekolah	70.000.000	
111	Penyusunan Data Pokok Pendidikan	100.000.000	
112	Penerimaan Siswa Baru SMP Online	329.992.000	
113	Operasional BOS Tingkat SD	973.000.000	
114	Operasional BOS Tingkat SMP	116.000.000	
115	Penyusunan Profile Sekolah Ramah Anak	-	Refocusing
		57.037.726.976	

Sumber : Laporan SPM Urusan Pendidikanl Kab. Klaten Tahun 2020

2) Bidang Urusan Kesehatan

Berdasarkan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten Tahun 2016 - 2021 dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan, program dan kegiatan yang mendukung penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kesehatan Kabupaten Klaten tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat;
3. Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
4. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
5. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
6. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
7. Program Pengawasan Obat dan Makanan;
8. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
9. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;

10. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan.

Rincian kegiatan yang mendukung pencapaian SPM adalah :

1. Pelayanan kesehatan ibu hamil:

- Penguatan P4K;
- Orientasi pelayanan kesehatan reproduksi sebelum hamil;
- Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam fasilitator kelas Ibu;
- Sosialisasi dan advokasi program NSPK;
- Pemanfaatan buku KIA;
- Pendampingan ibu hamil resiko tinggi oleh DSOG;
- Deteksi dini factor risiko PTM bagi ibu hamil;
- Orientasi pelayanan kesehatan reproduksi masa sebelum hamil.

2. Pelayanan kesehatan ibu bersalin:

- Pengkajian kasus maternal perinatal;
- Pelacakan kematian ibu;
- Monitoring dan evaluasi tim Jampersal;
- Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam konseling laktasi;
- Pengadaan cetak billboard ASI Eksklusif;
- Pembentukan tim Pokja Penurunan AKI dan AKB;
- Sosialisasi kegawatdaruratan Maternal Neonatal;
- Refresh tenaga kesehatan tentang Asuhan Persalinan Normal;
- Asuhan pasca keguguran.

3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir:

- Pengkajian kasus maternal perinatal;
- Pendampingan bayi dan balita oleh DSA;
- Pengadaan cetak billboard ASI Eksklusif
- Pelacakan kematian bayi;
- Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam konseling laktasi;
- Pembentukan tim Pokja Penurunan AKI dan AKB;
- Sosialisasi kegawatdaruratan Maternal Neonatal;
- Refresh tenaga kesehatan tentang Asuhan Persalinan Normal;
- Orientasi MTBS.

4. Pelayanan kesehatan balita:

- Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan stunting;
- Peningkatan kapasitas dalam Pemberian Makan Bayi dan Anak;
- Rembug stunting;
- Orientasi MTBS;
- Pelacakan masalah gizi;
- Koordinasi penanggulangan masalah gizi;
- Refresh tatalaksana gizi buruk;
- Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan dalam SDIDTK;
- Pendampingan bayi dan balita dengan komplikasi oleh DSA.

5. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar:
 - Peningkatan kapasitas Guru PAUD dalam SDIDTK
6. Pelayanan kesehatan pada usia produktif:
 - Sosialisasi strategi pencapaian SPM;
 - Pertemuan petugas Puskesmas dan Rumah Sakit;
 - Validasi data;
 - Rapat koordinasi IVA.
7. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut:
 - Pendataan sasaran;
 - Peningkatan kapasitas pemegang program lansia;
 - Kunjungan rumah (home care);
 - Penyuluhan melalui media online dan media cetak (Liflet);
 - Posyandu lansia tetapi dibatasi dengan menerapkan protocol kesehatan;
 - Pemantauan dan Pendampingan lansia risti.
8. Pelayanan kesehatan penderita DM dan hipertensi:
 - Pertemuan peningkatan kapasitas petugas;
 - Pertemuan petugas Puskesmas dan Rumah Sakit;
 - Validasi data Workshop Posbindu PTM;
 - Sosialisasi Perbup;
 - Belanja bahan, cetak, alat/bahan laboratorium dalam meningkatkan pelayanan penderita DM dan hipertensi.
9. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat:
 - Rapat koordinasi pengendalian masalah kesehatan jiwa;
 - Rapat koordinasi program jiwa dan napza;
 - Validasi data;
 - Pertemuan petugas kesehatan jiwa, Kepala Puskesmas dan Linsek.
10. Pelayanan kesehatan orang terduga *tuberculosis*:
 - Pertemuan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan TCM;
 - Pertemuan validasi data TB;
 - Pertemuan petugas laboratorium Puskesmas dan Rumah Sakit;
 - Belanja modal pengadaan alat TCM;
 - Sosialisasi TBC pada pendamping PKH.
11. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*). yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/ preventif:
 - Sosialisasi HIV pada pendamping PKH;
 - Pertemuan Koordinasi pencegahan penyakit menular;
 - Pertemuan petugas HIV Puskesmas dan Rumah Sakit;
 - Pertemuan Tim VCT Kabupaten.
 -

3) Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Program dan Kegiatan yang mendukung penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten Tahun 2020 seperti Tabel berikut :

Tabel 4.39
Program dan Kegiatan Mendukung Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2020

No	Program dan Kegiatan	Murni	Perubahan (Rp)
Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong		110.000.000,00	910.000.000,00
1	Perencanaan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	110.000.000,00	110.000.000,00
2	Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	0	800.000.000,00
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah		6.545.294.000,00	3.212.005.000,00
1	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah (DAK Bid. Air Minum)	2.586.005.000,00	2.856.005.000,00
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (BLM)	2.859.289.000,00	0
3	Pendampingan Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	980.000.000,00	506.000.000,00
4	Pendampingan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur Air Minum	120.000.000,00	120.000.000,00

Sumber : Laporan SPM Urusan Pekerjaan Umum Kab. Klaten Tahun 2020

4) Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Program dan Kegiatan yang mendukung penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Perumahan Rakyat Kabupaten Klaten Tahun 2020 seperti Tabel berikut :

Tabel 4.40
Program dan Kegiatan Mendukung Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2020

No	Program dan Kegiatan	Anggaran Murni (Rp)	Perubahan APBD (Rp)
Program pembangunan infrastruktur pedesaan/perkotaan		130.000.000.000,00	100.000.000.000,00
1	Penataan lingkungan pemukiman penduduk pedesaan/perkotaan	130.000.000.000,00	100.000.000.000,00
Program Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung		63.500.000.000,00	42.303.305.000,00
1	Pembangunan gedung milik sekolah	59.030.000.000,00	37.644.000.000,00
2	Rehabilitasi/pemeliharaan gedung milik daerah	4.450.000.000,00	3.920.000.000,00
3	Penyusunan dokumen bangunan gedung/kantor	0	739.305.000,00
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		475.000.000,00	552.962.000,00
1	Monitoring dan pengendalian	400.000.000,00	499.000.000,00

	bangunan		
2	Penunjang Operasional Tim SIUJK Kabupaten	75.000.000,00	53.965.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		2.020.000.000,00	2.021.916.000,00
1	Penyediaan jasa surat menyurat	15.000.000,00	15.000.000,00
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	584.000.000,00	640.000.000,00
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	100.000.000,00	100.000.000,00
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	420.000.000,00	410.000.000,00
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	165.000.000,00	174.000.000,00
6	Penyediaan alat tulis kantor	50.000.000,00	50.000.000,00
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	35.000.000,00	35.000.000,00
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	20.000.000,00	20.000.000,00
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	7.000.000,00	2.915.000,00
10	Penyediaan makanan dan minuman	30.000.000,00	30.000.000,00
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	233.000.000,00	150.000.000,00
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	80.000.000,00	80.000.000,00
13	Penyediaan jasa pengamanan kantor	220.000.000,00	234.000.000,00
14	Penyediaan jasa pengemudi kantor	33.000.000,00	33.000.000,00
15	Penyusunan perencanaan dan pelaporan	48.000.000,00	46.000.000,00
Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur		1.096.800.000,00	784.400.000,00
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	150.000.000,00	250.000.00000
2	Pengadaan mebeleur	56.600.000,00	0,00
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	210.000.000,00	210.000.000,00
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	45.000.000,00	95.000.000,00
5	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	10.000.000,00	10.000.000,00
6	Pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung non kantor	623.000.000,00	219.400.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumbar Daya Aparatur		28.200.000,00	28.200.000,00
1	Peningkatan sumber daya manusia	18.200.000,00	18.200.000,00
2	Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan	10.000.000,00	10.000.000,00
Program Pengembangan Perumahan		300.000.000,00	300.000.000,00
1	Koordinasi pembangunan perumahan dengan lembaga/	200.000.000,00	200.000.000,00

	badan usaha		
2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	100.000.000,00	100.000.000,00
Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial		3.750.849.000,00	2.416.849.000,00
1	Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana sosial	3.500.000.000,00	2.256.000.000,00
2	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	100.000.000,00	100.000.000,00
3	Biaya operasional peningkatan kualitas perumahan swadaya (DAK bid. Perumahan dan pemukiman)	60.849.000,00	60.849.000,00
JUMLAH TOTAL		77.956.143.000,00	52.629.639.000,00

Sumber : Laporan SPM Urusan Perumahan Rakyat Kab. Klaten Tahun 2020

5) Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Program dan kegiatan yang mendukung penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Klaten Tahun 2020 seperti Tabel berikut :

Tabel 4.41
Program dan Kegiatan Mendukung Pencapaian SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum & Perlindungan Masyarakat Tahun 2020

No	Jenis layanan	Kegiatan	Anggaran	realisasi
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	-Pembentukan dan pengembangan sekolah siaga bencana	100.000.000	74.199.550
		-Penyelenggaraan sekolah sugai	45.000.000	32.455.750
2.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	-Penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana	7.550.000	5.200.000
		-Pelatihan simulasi pengurangan resiko bencana	232.000.000	214.812.700
		-Desa tangguh bencana	100.000.000	89.002.651
3.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	-Koordinasi pemantauan dan operasional penanganan darurat bencana	311.914.000	239.263.800
		-Pengembangan dan pemberdayaan TRC	354.232.000	321.103.364
		-Dropping air	242.132.000	200.860.900
		-Pengadaan sarana dan prasarana penanganan bencana	495.000.000	402.439.237

		-Penyediaan logistic	843.254.000	738.564.100
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	-Peningkatan kapasitas petugas pemadam kebakaran	9.692.000	9.685.000
		-Operasional Pemadam kebakaran	932.672.000	920.582.615
5.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	-Patroli Trantibum di wilayah Kabupaten Klaten	97.150.000	97.080.800
		-optimalisasi pengamanan penertiban wilayah kabupaten klaten	.208.550.000	1.122.283.730
		-Penertiban dan Penindakan terhadap pelanggaran Perda	78.200.000	7.585.140
		-Pembinaan Penegakan Perda/Perbup	18.800.000	8.800.000
		-Operasi PGOT,WTS dan Miras	50.500.000	49.804.450
		-Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	13.000.0000	5.562.300
		-Kegiatan pemantapan keamanan wilayah dalam upaya perlindungan masyarakat	38.000.000	33.261.700
		-Pengadaan Peralatan gedung Kantor	96.550.000	77.394.500
		-Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	200.000.000	190.813.500

Sumber : Laporan SPM Urusan Trantibum Linmas Kab. Klaten Tahun 2020

6) Bidang Urusan Sosial

Program dan kegiatan yang mendukung penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Urusan Sosial Kabupaten Klaten Tahun 2020 seperti Tabel berikut :

Tabel 4.42
Program dan Kegiatan Mendukung Pencapaian SPM Bidang
Urusan Sosial Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	405,000,000	395,103,900
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial dan Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	2,057,863,000	1,994,156,914
3	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti			
4	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti			
5	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	Program Pembinaan para penyandang cacat dan trauma	23,189,000	23,188,400
		Jumlah	2,486,052,000	2,412,449,214

Sumber : Laporan SPM Urusan Sosial Kab. Klaten Tahun 2020

BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Klaten Tahun 2020 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Klaten. Laporan yang telah disusun diharapkan dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam melaksanakan berbagai urusan yang menjadi kewenangan dan tugas-tugas pemerintahan.

Kami menyadari disamping capaian keberhasilan yang telah diraih, ada beberapa capaian kinerja di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2020 yang hasilnya masih belum optimal. Hal tersebut menjadi catatan bagi kami untuk senantiasa mengadakan perbaikan dalam mengatasi permasalahan dan tantangan di masa yang akan datang. Pemerintah Kabupaten Klaten akan terus berusaha semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugas yang diamanatkan.

Akhir kata kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas segala bantuan, dukungan dan kerjasama yang telah terjalin selama ini. Semoga keberhasilan yang telah dicapai dapat menjadi motivasi untuk lebih meningkatkan kinerja demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klaten, selanjutnya saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat diharapkan guna mewujudkan Kabupaten Klaten yang ***Maju, Mandiri dan Berdaya Saing***.

Klaten, Maret 2021



DAFTAR LAMPIRAN

- . LAMPIRAN INDIKATOR KINERJA KUNCI OUTCOME DAN OUTPUT LPPD TAHUN 2020**
- . LAMPIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN URUSAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BESERTA OPD PELAKSANA TAHUN 2020**

LAMPIRAN
IKK OUTPUT
DAN
IKK OUTCOME

LAMPIRAN IKK OUTCOME

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		KETERANGAN
						Elemen data	Capaian Kinerja	
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD	,,,,,,,,,.%	26.873	73,97	
				Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kabupaten yang bersangkutan		36.331		
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah dasar	,,,,,,,,,.%	102.041	88,54	
				Jumlah anak usia 7-12 tahun pada kabupaten yang bersangkutan		115.251		
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di sekolah menengah pertama	,,,,,,,,,.%	39.291	71,14	
				Jumlah anak usia 13-15 tahun pada kabupaten yang bersangkutan		55.230		
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan	,,,,,,,,,.%	205	5,79	
				Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kabupaten yang bersangkutan		3.539		
2	Kesehatan	5	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan di kabupaten		1.758	0,13	
				Jumlah Penduduk kabupaten		1.327.577		
		6	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten yang terakreditasi	Jumlah RS Rujukan kabupaten yang terakreditasi (minimal Tingkat Utama)	,,,,,,,,,.%	8	66,67	
				Jumlah RS kabupaten		12		
		7	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	,,,,,,,,,.%	15.587	93,44	
				Jumlah ibu hamil di kabupaten		16.682		
		8	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan	,,,,,,,,,.%	15.242	96,92	
				Jumlah ibu bersalin di kabupaten		15.726		
		9	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	,,,,,,,,,.%	15.216	96,70	
				Jumlah bayi baru lahir di kabupaten		15.735		
		10	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	,,,,,,,,,.%	60.019	92,71	
				Jumlah balita di kabupaten		64.738		

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		KETERANGAN		
						Elemen data	Capaian Kinerja			
		11	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar	,,,,,,,,,.%	N/A		tidak ada skrining karena sekolah daring		
				Jumlah anak usia pendidikan dasar di kabupaten		115.251				
		12	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	,,,,,,,,,.%	532.551	73,26			
				Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten		726.968				
		13	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara usia 60 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	,,,,,,,,,.%	146.246	73,14			
				Jumlah orang warga negara usia 60 tahun di kabupaten		199.953				
		14	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	,,,,,,,,,.%	102.089	32,38			
				Jumlah penderita hipertensi di kabupaten		315.318				
		15	Persentase penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah penderita Diabetes Mellitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	,,,,,,,,,.%	34.022	90,76			
				Jumlah penderita DM di kabupaten		37.485				
		16	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	,,,,,,,,,.%	2.587	88,32			
				Jumlah penderita ODGJ di kabupaten		2.929				
				17	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	,,,,,,,,,.%	4.007	29,28	
						Jumlah orang dengan resiko terinfeksi TBC di kabupaten/kota		13.687		
18	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar			Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	,,,,,,,,,.%	17.277	87,00			
				Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di kabupaten		19.858				

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		KETERANGAN
						Elemen data	Capaian Kinerja	
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan Kabupaten/Kota	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai (WS) Kewenangan kabupaten (ha)	,,,,,,,,,%			kewenangan wilayah sungai di Kabupaten Klaten menjadi kewenangan BBWS Bengawan Solo
				Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan kabupaten (ha)				
		20	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kabupaten	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di Wilayah Sungai (WS) Kewenangan kabupaten (ha)	,,,,,,,,,%			Kabupaten Klaten tidak memiliki kawasan Pantai
				Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten (ha)				
		21	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi	Luas irigasi kewenangan kabupaten yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun eksisting	,,,,,,,,,%	1.705	5,74	
				Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten		29.713		
		22	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah Kabupaten.	,,,,,,,,,%	305.063	80,16	
				Jumlah proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten tersebut.		380.591		menggunakan data rumah
		23	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	,,,,,,,,,%	424.253	99,999	(menggunakan data KK yang memiliki akses sanitasi layak)
				Jumlah rumah di Kabupaten (menggunakan data KK yang memiliki akses ke air limbah domestik)		424.256		
		24	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya	,,,,,,,,,%	41.433	100	
				Jumlah IMB yang berlaku		41.433		

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		KETERANGAN
						Elemen data	Capaian Kinerja	
		25	Tingkat kemantapan jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Panjang jalan dalam kondisi mantap (baik+sedang)	,,,,,,,,,%	644,9	90,08	
				Jumlah total panjang jalan Kabupaten/Kota		715,89		
		26	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis	,,,,,,,,,%	224	45,71	
				Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di Wilayah Kabupaten/Kota		490		
		27	rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	,,,,,,,,,%	9	100	
		jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		9				
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	28	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2020	,,,,,,,,,%	1.079	98,36	tidak ada rumah yang ditangani karena bencana alam, yang ada penanganan RTLH (bencana sosial)
				Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun 2020		1.097		
		29	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni	,,,,,,,,,%			tidak ada relokasi program pemerintah Kabupaten
				Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan				
		30	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	Luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	,,,,,,,,,%	19,21	100	
				Luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha		19,21		
		31	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	Jumlah unit rumah tidak layak huni	,,,,,,,,,%	15.269	4,01	
Jumlah total unit rumah Kabupaten				380.591				

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		KETERANGAN
						Elemen data	Capaian Kinerja	
		32	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU (termasuk yang sudah terbangun)	,,,,,,,,,%	7.302	1,92	
				Jumlah unit rumah kab/kota		380.591		
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	33	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	Jumlah pengaduan yang ditangani	,,,,,,,,,%	10	100,00	
				Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk		10		
		34	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan	,,,,,,,,,%	34	100,00	
				Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi		34		
		35	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Orang	917.520	917.520	
		36	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	6.500	6.500	
		37	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Orang	392	392	
		38	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah + jumlah layanan pemadaman di kab kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah	,,,,,,,,,%	88	62,86	
Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten				140				

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		KETERANGAN
						Elemen data	Capaian Kinerja	
		39	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung darimpelaporan penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakarabn	Menit	= (2088 menit dibagi 140 kejadian)	14,91	
6	Sosial	40	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	,,,,,,,,,%	2.870	26,06	
				Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis		11.015		
		41	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran	,,,,,,,,,%	392	100	
				Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kabupaten		392		
7	Tenaga Kerja	42	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD	,,,,,,,,,%			belum ada RTKD
				Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten				
		43	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	,,,,,,,,,%	1.438	3,51	
				Jumlah tenaga kerja keseluruhan		40.991		
44	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)	Jumlah tenaga kerja	%	27.482.912.880.000	67.046.212.291		
					40.991			

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		KETERANGAN
						Elemen data	Capaian Kinerja	
		45	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	,,,,,,,,,%	66	8,79	
				Jumlah Perusahaan		751		
		46	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah pencaker (pencari kerja) yang ditempatkan	,,,,,,,,,%	1.243	21,11	
				Jumlah pencaker yang terdaftar		5.889		
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	47	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Jumlah ARG pada belanja langsung APBD	,,,,,,,,,%	5.731.032.000	0,70	
				Jumlah seluruh belanja langsung APBD		823.801.136.023,28		
		48	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten	Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani instansi tingkat Kabupaten yang didampingi	,,,,,,,,,%	18	0,00523	
				Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun)		344.374		
		49	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan	Per 100.000	22	3,30	
				Jumlah penduduk perempuan		667.121		
9	Pangan	50	Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	Jumlah cadangan pangan kabupaten	%	370.941	244,03	
				Jumlah kebutuhan pangan kabupaten		152.009		
10	Pertanahan	51	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Luas tanah sesuai peruntukan izin lokasi	,,,,,,,,,%	69.243	100	berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dalam rangka persteujuan izin lokasi 2020
				Seluruh luas tanah yang diberikan izin lokasi		69.243		
		52	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	,,,,,,,,,%	28.607	100	data BPN untuk penerbitan sertifikat tanah untuk fasilitas umum 2020
				Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum		28.607		

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		KETERANGAN
						Elemen data	Capaian Kinerja	
		53	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya di atas izin lokasi	,,,,,,,,,,%	69.243	100	
				Luas izin lokasi yang diterbitkan		69.243		
		54	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	Jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0,5 ha	,,,,,,,,,,%	tidak ada penerima tanah obyek landreform		
				Jumlah penerima tanah obyek landreform				
		55	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	Luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan Izin Membuka Tanah	,,,,,,,,,,%	tidak ada Izin Membuka Tanah (tidak ada permohonan membuka tanah)		
				Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan				
		56	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	Jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani	,,,,,,,,,,%	tidak ada sengketa tanah garapan		
				Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan				
11	Lingkungan Hidup	57	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		52,85	52,85	
				Indeks Kualitas Pencemaran Air (30%)		36.15		
				Indeks Kualitas Pencemaran Udara (30%)		76.82		
				Indeks Tutupan Hutan/Lahan (40%)		42.54		
		58	Terlaksananya pengelolaan sampah Regional/Terpadu di wilayah Kabupaten	Total Vol sampah yang dapat ditangani	,,,,,,,,,,%	92.541	23,24	tertangani DLHK =13.835 kg
				Total vol timbunan sampah Kabupaten		398.273,10		DPU = 78.706 kg
		59	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH yang diterbitkan Pemerintah kabupaten	,,,,,,,,,,%	-		tidak ada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar terhadap izin lingkungan, dan izin PPLH
Jumlah Usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan				684				

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		KETERANGAN
						Elemen data	Capaian Kinerja	
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	60	Perekaman KTP Elektronik	Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP	,,,,,,,,,%	980.235	97,87	
				Jumlah penduduk 17 tahun ke atas		1.001.556		
		61	Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	Jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA	,,,,,,,,,%	149.702	43,22	
				Jumlah anak usia 0-17 tahun		346.374		
		62	Kepemilikan akta kelahiran	Jumlah anak usia 0 – 18 Tahun tahun yang sudah memiliki akte lahir	,,,,,,,,,%	324.363	92,87	
				Jumlah anak k usia 0 – 18 tahun		349.247		
63	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	,,,,,,,,,%	16	31,37			
		Jumlah OPD		51				
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	64	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	,,,,,,,,,%	51	86,44	
				Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun n)		59		
		65	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa Membangun per tahun	,,,,,,,,,%	32	12,5	
				Jumlah desa berkembang (per-awal tahun n)		256		
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	66	TFR (Angka Kelahiran Total)	$5\sum ASFR$		(5 X 0,42)	2,10	
		67	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	Jumlah peserta KB Aktif Modern	,,,,,,,,,%	138.344	70,90	
				Jumlah Pasangan Usia Subur		195.133		
		68	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmeet need)	Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani	,,,,,,,,,%	33.068	16,95	
Jumlah Pasangan Usia Subur				195.133				

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		KETERANGAN
						Elemen data	Capaian Kinerja	
15	Perhubungan	69	Rasio konektivitas kabupaten	<p>Rasio konektivitas Kabupaten/Kota = (IK1 x bobot angkutan jalan) + (IK2 x Bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)</p> <p>• IK1 (angkutan jalan) = (Jumlah trayek yg dilayani pd kabupaten/kota x bobot trayek) dibagi jumlah kebutuhan trayek pada kabupaten/kotatersebut)</p> <p>• IK2 (Angkutan Sungai, danau dan penyeberangan)= jumlah lintas Penyeberangan yang beroperasi pd kabupaten/kota tsb x bobot lintas) dibagi (jumlah kebutuhan lintas penyeberangan pada kabupaten/kota tersebut)</p> <p>Keterangan: IK1 (Angkutan Jalan) <input type="checkbox"/> Jumlah trayek yang dilayani adalah jumlah trayek perintis ditambah trayek AKAP <input type="checkbox"/> Jumlah kebutuhan trayek adalah jumlah kebutuhan trayek perintis dalam kurun waktu tertentu dan kebutuhan trayek AKAP dalam kurun waktu tertentu</p> <p>IK2 (Angkutan Sungai, Danau, Penyeberangan) <input type="checkbox"/> Jumlah lintas penyeberangan yang beroperasi adalah jumlah lintas perintis ditambah lintas komersil</p> <p><input type="checkbox"/> Jumlah kebutuhan lintas adalah jumlah kebutuhan lintas penyeberangan baik lintas penyeberangan perintis maupun komersil untuk menghubungkan antar wilayah yang direncanakan dalam kurun waktu tertentu</p>		0,15	0,15	data terakhir(tahun 2019)
		70	Kinerja lalu lintas kabupaten	V/C ratio di jalan kabupaten		Volume/ Capacity : 1255/2435 =	0,52	
16	Komunikasi dan Informatika	71	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	,,,,,,,,,.%	51	100,00	
				Jumlah OPD		51		

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		KETERANGAN
						Elemen data	Capaian Kinerja	
		72	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	,,,,,,,,,%	50	21,46	baru diselenggarakan secara online
				Jumlah Layanan Publik		233		
		73	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten	,,,,,,,,,%	1.001.556	100,00	penyebaran informasi melalui radio, sosmed, web dan platform digital lainnya, semua penduduk menjadi sasaran penyebaran informasi
				Jumlah penduduk (diatas 17 tahun)		1.001.556		
17	Koperasi dan UKM	74	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset	,,,,,,,,,%	129	14,45	
				Jumlah seluruh koperasi		893		
		75	Meningkatnya Usaha mikro yang menjadi wirausaha	Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha	,,,,,,,,,%	6.101	15,69	
				Jumlah usaha mikro keseluruhan		38.881		
18	Penanaman Modal	76	Persentase peningkatan investasi di kabupaten	(Jumlah investasi tahun 2020 - jumlah investasi tahun 2019) di kabupaten dibagi jumlah investasi tahun 2019 dikali 100%	,,,,,,,,,%	(3.863 / 885) x 100%	436,50	
				(Jumlah investasi tahun 2020 - jumlah investasi tahun 2019		3.863		
				Jumlah investasi tahun 2020 di kabupaten		4.748		
				Jumlah investasi tahun 2019 di kabupaten		885		
19	Kepemudaan dan Olahraga	77	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yang berwirausaha di kabupaten	,,,,,,,,,%	2.500	1,02	
				Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten		244.733		

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		KETERANGAN
						Elemen data	Capaian Kinerja	
		78	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi social kemasyarakatan	Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan orgaisasi sosial kemasyarakatan di Kabupaten	,,,,,,,,,%	10.150	4,15	
				Jumlah pemuda (umur 16-30 tahun) di kabupaten		244.733		
		79	Peningkatan prestasi olahraga	Jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional	Medali			Tidak ada event karena Pandemi
20	Statistik	80	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	,,,,,,,,,%	51	100	
				Jumlah OPD		51		
		81	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	,,,,,,,,,%	51	100	
				Jumlah OPD		51		
21	Persandian	82	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi		Belum pernah dinilai terkait Indeks kemanan informasi (KAMI) dari BSSN		
				Jumlah area penilaian				
22	Kebudayaan	83	Terlestarikannya Cagar Budaya	Jumlah cagar budaya yang dilestarikan	,,,,,,,,,%	13	100	
				Jumlah cagar budaya yang terdata		13		
23	Perpustakaan	84	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat		64,04	64,04	
		85	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)		belum pernah dinilai Perpunas		

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		KETERANGAN	
						Elemen data	Capaian Kinerja		
24	Kearsipan	86	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	$T = (a + i + s + j)/4$		$T=(80+100+100+0)/4$	70,00		
				T = tingkat ketersediaan arsip					
				a = Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip		80			
				i = persentase arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip		100			
				s = persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik		100			
				j = persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN		0			
		87	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	$T = (m + b + g + a + c + i)/6$		$T=(80+70+70+90+80+70)/6$	63,33		
				T = tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban					
				m = tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK		80			
				b = tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK		70			
				g = tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah kab/kota dengan NSPK		70			
				a= tingkat kesesuaian kegiatan autentikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK		90			
				c = tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK		0			
				i = tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK		70			
	Urusan Pilihan								
25	Kelautan Perikanan	88	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten di wilayah kabupaten (sumber data: one data KKP)	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh kabupaten di wilayah kabupaten (sumber data: one data KKP)	Ton	Tangkap 184 ton; Budidaya 27604 ton	27.788		

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		KETERANGAN
						Elemen data	Capaian Kinerja	
26	Pariwisata	89	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	(Jumlah wisatawan tahun 2020 - Jumlah wisatawan tahun 2019) dibagi jumlah wisatawan tahun 2019 dikali 100%	,,,,,,,%	(- 161.334 / 183.533) x 100%	- 87,90	imbas Pandemi
				(Jumlah wisatawan tahun 2020 - Jumlah wisatawan tahun 2019)		-161.334		
				Jumlah wisatawan tahun 2020		22199		
				Jumlah wisatawan tahun 2019		183.533		
		90	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten	(Jumlah wisatawan tahun 2020 - Jumlah wisatawan tahun 2019) dibagi jumlah wisatawan tahun 2019 dikali 100%	%	(- 2.732.285 / 4.131.452) x 100%	-66,13	imbas Pandemi
				(Jumlah wisatawan tahun 2020 - Jumlah wisatawan tahun 2019)		-2.732.285		
				Jumlah wisatawan tahun 2020		1.399.167		
				Jumlah wisatawan tahun 2019		4.131.452		
		91	Tingkat hunian akomodasi	Jumlah kamar yang terjual	,,,,,,,%	71.853	16,90	
				Jumlah kamar yang tersedia		425.225		
		92	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku		2.028.224.470.000	2.028 miliar	PDRB dari pariwisata = PDRB sektor penyediaan akomodasi, makan minum + Jasa lainnya. data PDRB atas DASAR harga BERLAKU
				Jumlah total PDRB (dalam satuan rupiah)		39.950.475.580.000		
		93	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PAD		8.503.240.217	8.503.240.217	

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		KETERANGAN			
						Elemen data	Capaian Kinerja				
27	Pertanian	94	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Jumlah produksi pertanian pangan per hektar per tahun (ton)	,,,,,,,,,%	579.992,73	672,17	7 komoditas bahan pangan			
				Luas Panen (ha)		86.286,6					
		95	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	Jumlah kejadian penyakit/kasus hewan menular tahun berjalan (2020) - jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (2019) dibagi jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (2019 dikali 100%	%	$(-42 / 188) \times 100\%$	-	22,34	menurun 22,34%		
										Jumlah kejadian penyakit/kasus hewan menular tahun berjalan (2020) - jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (2019)	-42
										Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun 2020	146
										Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun 2019	188
28	Kehutanan										
29	ESDM	96	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di kab/Kabupaten	Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin	%			tidak ada sumber panas bumi di Kabupaten Klaten			
				Jumlah perusahaan pemanfaatan panas bumi							
30	Perdagangan	97	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan	,,,,,,,,,%	145	87,88	pelaku usaha			
				Jumlah pelaku usaha di wilayah Kabupaten		165					
		98	Persentase kinerja realisasi pupuk	Realisasi RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani)	,,,,,,,,,%			54.265,15	65,16		
								83.283,00			
		99	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan	,,,,,,,,,%			400	5		
								Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kabupaten		8.000	

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		KETERANGAN
						Elemen data	Capaian Kinerja	
31	Perindustrian	100	Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di kabupaten	(Jumlah Industri Kecil dan Menengah tahun 2020 - Jumlah industri Kecil dan Menengah tahun 2019) dibagi Jumlah industri Kecil dan Menengah tahun 2019 dikali 100%	,,,,,,,,,,%	(670 / 7.623) x 100%	8,8	
				(Jumlah Industri Kecil dan Menengah tahun 2020 - Jumlah industri Kecil dan Menengah tahun 2019)		670		
				Jumlah industri kecil dan menengah tahun 2020		8.293		
				Jumlah industri kecil dan menengah tahun 2019		7.623		
		101	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) yang ditetapkan dalam RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten)	Rata-Rata Capaian sasaran dalam RPIK	,,,,,,,,,,%	412	103,065	ada 4 sasaran dengan rata-rata capaian sasaran = 103,065%
						4		
				Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	,,,,,,,,,,%	monitoring yang dilakukan tahun 2020 tidak melaksanakan pemantaun terhadap ijin usaha		
				Jumlah izin yang dikeluarkan				
		103	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri Kecil dan Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	,,,,,,,,,,%	Di Kabupaten Klaten belum pernah ada yang mengajukan Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah		
				Jumlah izin yang dikeluarkan				

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		KETERANGAN
						Elemen data	Capaian Kinerja	
		104	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan	,,,,,,,,,%	Kabupaten Klaten belum memiliki kawasan Industri		
				Jumlah izin yang dikeluarkan				
		105	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini		ada	ada	
32	Transmigrasi							
33	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PERENCANAAN DAN KEUANGAN)	1	Rasioe Belanja Pegawai Di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan (realisasi)	,,,,,,,,,%	468.095.058.502	19,24	
				Jumlah APBD (realisasi)		2.432.600.729.577		
		2	Rasio PAD	Jumlah PAD	,,,,,,,,,%	329.963.261.898	13,56	
				Jumlah APBD non migas		2.432.600.729.577		
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level		3	3		
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	Level		3	3		

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		KETERANGAN
						Elemen data	Capaian Kinerja	
		5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer expenditures (realiasi)	,,,,,,,,,,%	1.560.168.337.053	64,14	belanja urusan pemerintahan adalah seluruh belanja daerah di luar belanja modal. transfer expenditures adalah hibah, bantuan sosial, subsidi, pembayaran bunga, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.
				Jumlah belanja APBD (realisasi)		2.432.600.729.577		
		6	Opini Laporan Keuangan	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)	WTP	3	3,00	
					WDP	7	7,00	
					TW		0,00	
					TMP		0,00	
34	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (PENGADAAN)	7	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	Jumlah kontrak infrastruktur dengan nilai besar yang perlu pembangunan dalam 3 kuartal yang ditandatangani pada kuartal pertama tahun n	,,,,,,,,,,%	tidak ada kontrak infrastruktur dengan nilai besar di atas 50 M pada tahun 2020		
				Jumlah kontrak keseluruhan tahun n		110		
		8	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	,,,,,,,,,,%	134	2,69	kompetitif (bersifat lelang terbuka di BLP)
			Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif	Jumlah pengadaan yang dilakukan tanpa metode kompetitif		4.983		tanpa metode kompetitif (melalui penyedia tanpa proses lelang)
		9	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Jumlah nilai belanja langsung yang melalui pengadaan	,,,,,,,,,,%	691.647.000.000	84,0	
				Total belanja langsung		823.801.136.023		Cakupan perhitungan adalah seluruh pengadaan dengan metode kompetitif maupun non kompetitif dari seluruh perangkat daerah yang ada

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		KETERANGAN
						Elemen data	Capaian Kinerja	
35	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (KEPEGAWAIAN)	10	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai menurut pendidikan Pendidikan Tinggi ke atas (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	,,,,,,,,,%	1.125	123,36	
				Seluruh jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		912		
		11	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai PNS Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	,,,,,,,,,%	229	10,8	
				Seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		2.113		
		12	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi	,,,,,,,,,%	33	14,4	
				Seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)		229		
36	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (MANAJEMEN KEUANGAN)	13	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi	,,,,,,,,,%	2.432.600.729.577,00	- 16,3	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD dengan rumus = (Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi dibagi Total belanja APBD Sebelum Perubahan) - 1 x 100%
				Total belanja APBD dikurangi satu (Sebelum Perubahan)		2.906.327.298.100,00		
				rumus = ((Nilai absolut dari Total belanja dalam realisasi dibagi Total belanja APBD Sebelum Perubahan) - 1) x 100%		= ((2.432.600.729.577 / 2.906.327.298.100) - 1) x 100%		
		14	Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Nilai absolut dari total PAD dalam realisasi	,,,,,,,,,%	329.918.589.703,00	8,33	
				Total PAD dalam APBD dikurangi satu (Sebelum Perubahan)		304.546.856.099,00		
				rumus = ((Nilai absolut dari Total PAD dalam realisasi dibagi Total PAD APBD Sebelum Perubahan) - 1) x 100%		((329.918.589.703 / 304.546.856.099) - 1) X 100%		

No	Urusan	NO IKK	IKK Outcome	RUMUS	SATUAN	Data LPPD		KETERANGAN
						Elemen data	Capaian Kinerja	
		15	Manajemen aset	Manajemen aset		semua ada	100	
				Apakah ada daftar aset tetap? (Ya/Tidak)		Ya		
				Apakah ada manual untuk menyusun daftar aset tetap? (Ya/Tidak)		Ya		
				Apakah ada proses inventarisasi aset tahunan? (Ya/Tidak)		Ya		
				Apakah nilai aset tercantum dalam laporan anggaran? (Ya/Tidak)		Ya		
		16	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Nilai Realisasi SiLPA	,,,,,,,,,,%	440.659.044.325,28	16,43	
				Total Belanja Anggaran tahun sebelumnya (realisasi)		2.682.356.733.813,68		
37	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK)	17	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda (perangkat daerah yang mempublikasikan belanja anggaran)	,,,,,,,,,,%	51 OPD	100	semua perangkat Daerah mempublikasikan anggarannya masing-masing di Website Pemda
				Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda (jumlah perangkat daerah)		51 OPD		
		18	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda	,,,,,,,,,,%	12	100,00	
				Total jumlah dokumen yang telah dirinci		12		

LAMPIRAN IKK OUTPUT

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD			
						ELEMEN DATA	CAPAIAN		
PENDIDIKAN PAUD									
1	Pendidikan	1	Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Terakreditasi (Negeri dan Swasta)		Unit	424	424		
		2	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		Orang	70	70		
		3	Jumlah peserta didik PAUD (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		Orang	27	27		
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik PAUD (Negeri dan Swasta)		Orang	3.371	3.371		
		5	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri dan Swasta)		Orang	3.788	3.788		
		6	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini		Orang	2.009	2.009		
		7	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		Orang	734	734		
		PENDIDIKAN DASAR							
		1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi		Unit	847	847		
		2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		Orang	1.330	1.330		
		3	Jumlah Peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		Orang	1.116	1.116		
		4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		Orang	72.169	72.169		
		5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah Menengah (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		Orang	39.360	39.360		
		6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		Orang	6.094	6.094		
7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	2.323	2.323				
8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar		Orang	8.121	8.121				
9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	3.780	3.780				
10	0		Orang	260	260				
11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	780	780				
12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		Orang	49	49				
13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	4	4				
		14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		Orang	7.391	7.391		

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD			
						ELEMEN DATA	CAPAIAN		
		15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		Orang	3.572	3.572		
		16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		Orang	752	752		
		17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		Orang	133	133		
		18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat		Orang	108	108		
		19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat		Orang	197	197		
			PENDIDIKAN MENENGAH PERTAMA						
		1	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi		Unit	847	847		
		2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		Orang	1.330	1.330		
		3	Jumlah Peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		Orang	1.116	1.116		
		4	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		Orang	72.169	72.169		
		5	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah Menengah (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		Orang	39.360	39.360		
		6	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		Orang	6.094	6.094		
		7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	2.323	2.323		
		8	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar		Orang	8.121	8.121		
		9	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	3.780	3.780		
		10	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		Orang	260	260		
		11	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	780	780		
		12	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)		Orang	49	49		
		13	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)		Orang	4	4		
		14	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		Orang	7.391	7.391		

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		
						ELEMEN DATA	CAPAIAN	
		15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik		Orang	3.572	3.572	
		16	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		Orang	752	752	
		17	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		Orang	133	133	
		18	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat		Orang	108	108	
		19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat		Orang	197	197	
		PENDIDIKAN KESETARAAN						
		1	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan Swasta)		Unit	3	3	
		2	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah		Orang	297	297	
		3	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan		Orang	297	297	
		4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)		Orang	112	112	
		5	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)		Orang	119	119	
		6	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)		Orang	108	108	
		7	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah		Orang	752	752	
		8	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1		Orang	22	22	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD			
						ELEMEN DATA	CAPAIAN		
2	Kesehatan	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan							
		1	Jumlah RS Rujukan Kab/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar		Unit	11	11		
		1	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya		Unit	12	12		
		Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil							
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		jenis	12	12		
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal		Orang	448	448		
		Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan							
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		jenis	7	7		
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar		Orang	448	448		
				Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir					
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		jenis	7	7		
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar		Orang	448	448		
		Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar							
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		jenis	7	7		
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar		Orang	448	448		
		Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar							
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		Jenis	11	11		
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar		Orang	3392	3392		
		Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar							
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		jenis	3	3		
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang	435	435		
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar							
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		jenis	1	1		
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang	448	448		
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar							
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		jenis	3	3		

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		
						ELEMEN DATA	CAPAIAN	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang	469	469	
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar						
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		jenis	3	3	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang	469	469	
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar						
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		jenis	3	3	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang	34	34	
		Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar						
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		jenis	3	3	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang	129	129	
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar						
		1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia		jenis	1	1	
		2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar		Orang	593	593	
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir						
		1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kab/kota (ha)		Ha	kewenangan wilayah sungai di Kabupaten Klaten menjadi		
		2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan Kab/kota (m)		M	kewenangan BBWS Bengawan Solo		
		3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan Kab/kota (ha)		Ha	tidakada kawasan pantai di Kabupaten Klaten		
		4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan Kab/kota (m)		M			
		5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan Kab/kota		Ada/Tidak	kewenangan wilayah sungai di Kabupaten Klaten menjadi kewenangan BBWS Bengawan Solo		
		6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan Kab/kota		Ada/Tidak	ada dalam bentuk Perbup Petunjuk Pelaksanaan penetapan pola tanam		
		7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah Kab/kota		Jumlah	tidakada kawasan pantai di Kabupaten Klaten		

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN
			Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota				
		1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kab/kota (ha)		Ha	kewenangan wilayah sungai di Kabupaten Klaten menjadi kewenangan BBWS Bengawan Solo	
		2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan Kab/kota (m)		M		
		3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan Kab/kota (ha)		Ha	tidak ada kawasan pantai di Kabupaten Klaten	
		4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan Kab/kota (m)		M		
		5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kab/kota		Ada/Tidak	kewenangan wilayah sungai di Kabupaten Klaten menjadi kewenangan BBWS Bengawan Solo	
		6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan Kab/kota		Ada/Tidak	ada dalam bentuk Perbup Petunjuk Pelaksanaan penetapan pola tanam serta rencana tata tanam	
		7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah Kab/kota		Jumlah	tidak ada kawasan pantai di Kabupaten Klaten	
			Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi				
		1	Persentase panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi primer dalam kondisi baik (m)	%	13.649,1 m	31,08 %
				Panjang jaringan irigasi primer (m)		45.376 m	
		2	Persentase panjang jaringan irigasi sekunder dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi Sekunder dalam kondisi baik (m)	%	136.954,9 m	26,71%
				Panjang jaringan irigasi Sekunder (m)		512.748 m	
		3	Persentase panjang jaringan irigasi Tersier dalam kondisi baik	Panjang jaringan irigasi Tersier dalam kondisi baik (m)	%	763838	35%
				Panjang jaringan irigasi Tersier (m)		2195015	
			Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh Kab/kota				
		1	Penetapan dokumen RISPAM Kab/Kota		Ada/Tidak	ada	ada
		2	Tersusun dan ditetapkannya Kebijakan Strategis Daerah (JAKSTRADA) Kab/kota		Ada/Tidak	ada	ada
		3	Jumlah BUMD dan atau UPTD Kab/kota penyelenggaraan SPAM		BUMD / UPTD	ada (BUMD)	1
		4	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM		Izin	BUMD PDAM (Perda No 3 thn 2016)	
		5	Jumlah kerja sama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain.		Kerjasama	BELUM ADA	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN
			Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik				
		1	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S		Rumah	385.016 KK	385.016
		2	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T		Rumah	3428	IPAL
		3	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T		Rumah	3428	IPAL
		4	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja		Rumah	379 KK	379
		5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan lumpur tinja		Rumah	379 KK	379
		6	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik		Rumah	379 KK	379
		7	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki septik	%	424.253 KK	99,90
				rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun < 25 jiwa/ha		424. 256 KK	JUMLAH SELURUH KK
		8	Kinerja penyediaan pelayanan IPLT akses aman	rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT	%	379 KK	0,09
				rumah di wilayah pengembangan IPLT		424. 256 KK	JUMLAH SELURUH KK
		9	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di SPALD T	%	3428	0,90
				rumah di wilayah pengembangan SPALD T		380.591	TOTAL RUMAH
		10	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat	%	385.016 KK	90,75
				jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S		424. 256 KK	JUMLAH SELURUH KK
		11	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	jumlah sarana pengangkutan yang tersedia	%	3 Armada	60%
				jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan kab/kota		5	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		
						ELEMEN DATA	CAPAIAN	
		12	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia	%	42,5 m3 / Jam	50%	
				jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan kab/kota		85 m3/jam		
		13	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah yang tersambung dengan IPALD	%	3428	100	
				jumlah rumah yang dilayani @dengan SPALD-T pada kab/kota		3428		
		14	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot	%	379 KK	0,09	
				jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPADLD-S		424. 256 KK	JUMLAH SELURUH KK	
		Rasio kepatuhan IMB kab/ kota						
		1	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	Jumlah bangunan gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana yang laik fungsi yang berlaku	%	7	100	
				Jumlah bangunan gedung kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana		7		
		2	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/kota dalam tahun eksisting		Izin	1054	1054	
		3	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung		Ada/Tidak	ada	ada	
		4	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung		Ada/Tidak	tidak	tidak	
		5	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan		Bangunan	1	1	
		6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah Kab/kota		Bangunan	belum ada penetapan bangunan kepentingan strategis kab/kota		
7	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/kota		Bangunan	data aset (3.634)	3634			
8	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah Kab/kota yang dipelihara/dirawat		Bangunan	data aset (3.634)	3634			

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN
Tingkat kemantapan jalan Kabupaten/Kota							
		1	Panjang jalan berdasarkan yang ditetapkan kepala daerah dalam SK jalan kewenangan Kab/kota		KM	715,89	
		2	Panjang jalan yang dibangun		KM	0	
		3	Panjang jembatan yg dibangun		M	0	
		4	Panjang jalan yang ditingkatkan		KM	9,06	
		5	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan		M	0	
		6	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi		KM	0	
		7	Panjang jembatan yang direhabilitasi		M	0	
		8	Panjang jalan yang dipelihara		KM	234,06	
		9	Panjang jembatan yang dipelihara		M	0	
Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi							
		1	Jumlah Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah Kab/kota		KEGIATAN	1	1
		2	Jumlah tenaga kerja operator/teknisi/analisis yang terlatih di wilayah Kab/kota		Orang	224	224
		3	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah Kab/kota		Orang	88	88
		4	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan kota yang aktif dengan data termutakhir		Ada/Tidak	belum ada	
		5	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kab/kota yang bersumber dari APBD Kab/kota		Ada/Tidak	ADA (SIRUP , SIKAP)	
		6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kab/kota yang bersumber dari APBN		Ada/Tidak		
		7	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah Kab/kota yang bersumber dari pendanaan lainnya		Ada/Tidak		
		8	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala		Ada/Tidak	ADA	
		9	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi Kab/kota		Ada/Tidak	ADA (WEBSITE PERWASKIM)	
		10	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.		Ada/Tidak	ADA (dalam bentuk pembinaan dan sosialisasi)	ADA
		11	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Kab/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analisis		Ada/Tidak	ada	ada
		12	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analisis di wilayah kab/kota		Ada/Tidak	ada	ada

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN
		13	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/kota		Ada/Tidak	ADA (dalam bentuk pembinaan dan sosialisasi)	ADA
		14	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui		Ada/Tidak	ADA	ADA
		15	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Ada/Tidak	BELUM ADA KEGATAN	
		16	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		Ada/Tidak	ADA	
		17	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Ada/Tidak	BELUM ADA KEGATAN	
		18	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota		Badan Usaha	245	245
		19	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah Kab/kota		Badan Usaha	BELUM TERDATA	
		20	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/kota		Badan Usaha	6	6
		21	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/kota		Badan Usaha	100	100
		22	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui		izin	79	79
		23	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Pengawasan	15 (SLF dan IMB)	15
		24	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya		Kecelakaan Konstruksi	tidak ada kecelakaan	
		25	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya		Pengawasan	belum ada	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD			
						ELEMEN DATA	CAPAIAN		
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kab/kota							
		1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya		Unit	380.591			
		2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam		Unit	TIDAK ADA RUMAH TERKENA DAMPAK BENCANA ALAM			
		3	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam		Orang				
		4	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi		Unit				
		5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi		Unit				
		6	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun baru/relokasi sesuai dengan rencana aksi		Unit				
		7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana		Unit				
		8	Jumlah RT, KK dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi		Orang				
		9	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan		Ha				
		Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah Kab/kota							
		1	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM		RT	Tidak adea relokasi program pemerintah Kab/kota			
		2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM		RT				
		3	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM		RT				
		4	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM		RT				
		5	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM		RT				
		6	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah		Ha				
				Persentase Luas kawasan kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten yang ditangani					
				1	Jumlah luasan (ha) kawasan pemukiman kumuh < 10 Ha		Ha	19,21 ha merupakan total beberapa lokasi. Luasan 19,21 ha tersebut sudah tertangani	19,21
		2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH		Unit	3093 (RTLH 2020)	3093		

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN
		3	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh		Ha	kawasan kumuh berdasarkan SK Bupati	186,41
Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)							
		1	Jumlah rumah di kab/kota		Rumah	380.591	
		2	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH		Rumah	3093 (RTLH 2020)	3093
		3	Jumlah rumah tidak layak huni		Rumah	15.269	
		4	Jumlah rumah yang tidak dihuni		Rumah	BELUM TERDATA	
		5	Rasio rumah dan KK	Jumlah KK	%	424.256	
				Jumlah total unit rumah		380.591	
		6	Jumlah rumah pembangunan baru			10 (Pembangunan RTLH baru)	10
Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)							
		1	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU		Perumahan	143(jumlah seluruh perumahan yg ada di Klaten)	143
		2	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum		Rumah	7.302	7.302
		3	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan		Rumah	7.302	7.302
		4	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)		Rumah	7.302	7.302
		5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH		Perumahan	108	108
		6	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU		Rumah	7.302	7.302
		7	Jumlah pengembang yang tersertifikasi		Pengembang	67	67
		8	Jumlah pengembang yang terregistrasi		Pengembang	41 (diambil dari data pengembang perseorangan)	41
		9	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan		Pengembang	67	67

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD			
						ELEMEN DATA	CAPAIAN		
5	Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan							
		1	Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam Kab/kota yang ditangani		Jumlah	10	10		
		2	Jumlah Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan		Orang	5.175	5.175		
		3	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan		Perda/perkada	34	34		
		4	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS		orang	2	2		
		5	Tersedianya SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum		ada/tidak	ada	ada		
		6	Tersedianya sarana prasarana minimal		ada/tidak	ada	ada		
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana							
		1	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	%	belum memiliki dokumen KRB			
				Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan					
		2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	%	917.520	69,11		
				Seluruh penduduk di kawasan rawan rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana		1.327.577	1.327.577 (jmlh penduduk klaten krn diasumsikan semua wilayah rawan bencana)		
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana							
		1	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	%	1	100		
				Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan		1			
		2	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun	%	1	100		
				Jumlah satu dokumen renkon yang lengkap dan sudah		1			
				Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	Jumlah aparatur dan warga negarayang ikut pelatihan	%	1440	25,25	
					Jumlah aparatur dengan warga negara di kawasan rawan		5703		
				Persentase warga negara yang ikut pelatihan	Jumlah warga negara yang ikut pelatihan	%	6550	72,78	
			Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana		9.000				

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD			
						ELEMEN DATA	CAPAIAN		
		5	Persentase warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	Jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops	%	5703	100		
				Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana		5703			
		6	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	Jumlah warga negara yang mendapat layanan peralatan	%	392	6,87		
				Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana		5703			
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana							
		1	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB	%	1	100		
				Jumlah seluruh penetapan status KLB		1			
		2	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana	%	5	100		
				Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana		5			
		3	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	%	51	56,04		
				Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat		91			
		4	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	Jumlah korban yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi	%	392	100		
				Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana		392			
		Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran							
		1	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kab/kota		Layanan	384	384		
		2	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan		Pos	tidak ada	tidak ada		
		3	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan		Orang	tidak ada	tidak ada		
		4	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa		Pos	tidak ada	tidak ada		
		5	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi		Sarpras	5	5		

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		
						ELEMEN DATA	CAPAIAN	
		6	Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran		Orang	27	27	
		7	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran		Orang	80	80	
		8	Jumlah peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran		Kegiatan	6	6	
6	Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti						
		1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki		jenis	1	1	
		2	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM		orang	11.015	11.015	
		3	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk		Tim	1	1	
		4	Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, lanjut usia yang terlantar dan gepeng dan gepeng yang dijangkau.		Orang	2870	2870	
		5	jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki.		unit	1	1	
		6	jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket pemukiman sesuai standar gizi.		orang	125	125	
		7	Jumlah rumah singgah, shelter, tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar.		unit	1	1	
		8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang.		orang	68	68	
		9	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu,		orang	21	21	
		10	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter.		Unit	0	0	
		11	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia.		Unit	0	0	
		12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan.		orang	0	0	
		13	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah.		orang	0	0	
		14	Jumlah pekerja social professional dan/atau TKS dan/atau relawan social yang disediakan.		orang	303	303	
		15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas sosial, Rumah Singgah/ Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial.		orang	2786	2786	
		16	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat		Orang	2.786	2.786	
		17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan.		orang	3	3	
		18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar.		orang	68	68	
		19	jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga.		orang	25	25	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		
						ELEMEN DATA	CAPAIAN	
		20	jumlah penyandang disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang diidentifikasi dengan keluarga.		orang	25	25	
		21	jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk.		orang	19	19	
		Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah Kab/kota						
		1	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan		Orang	392	392	
		2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang		Orang			
		3	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki		Penampungan	3	3	
		4	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan		Paket			
		5	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial		Orang			
		6	Jumlah pekerja sosial professional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia		Orang	303	303	
7	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja						
		1	Dokumen perencanaan tenaga kerja Kab/kota		Ada/Tidak	tidak ada	tidak ada	
		2	Persentase akurasi proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja		%	tidak ada RTKD	tidak ada RTKD	
		3	Jumlah perusahaan yang Menyusun rencana tenaga kerja		Perusahaan	tidak ada RTKD	tidak ada RTKD	
		Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi						
		1	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaster	Jumlah penerapan program PBK kualifikasi KKNI atau okupasi pada tahun 2020 keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun 2020	%	Program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh dinas belum berbasis kompetensi dikarenakan : 1. keterbatasan sarana dan prasarana pelatihan 2. Klaten belum memiliki BLK		
		2	Persentase instruktur bersertifikat kompetensi	umlah instruktur bersertifikat kompetensi pada tahun 2020 jumlah instruktur seluruhnya pada tahun 2020	%	Belum mempunyai instruktur dikarenakan Kabupaten Klaten belum mempunyai BLK yang aktif untuk pelatihan		
		3	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	Jumlah instruktur pada tahun 2020 jumlah peserta pelatihan pada tahun 2020	%	2 40	5,00	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN
		4	Persentase LPK yang terakreditasi	Jumlah LPK yang terakreditasi pada tahun 2020	%	10	10,87
				jumlah seluruh LPK pada tahun 2020		92	
		5	Persentase LPK yang memiliki perizinan	Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun 2020	%	92	71,32
				jumlah LPK yang terdata pada tahun 2020		129	
		6	Jumah penganggur yang dilatih		Orang	90	90
		7	Persentase lulusan bersertifikat pelatihan	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat pelatihan	%	90	100
				Jumlah lulusan bersertifikat pelatihan pada tahun 2020		90	
		8	Persentase penyerapan lulusan	Jumlah lulusan yang bekerja pada tahun 2020	%	1243	21,11
				jumlah lulusan pada tahun 2020		5889	
		9	Lulusan bersertifikat kompetensi	Jumlah lulusan pelatihan bersertifikat Kompetensi	%	49	3,41
				Jumlah lulusan bersertifikat Kompetensi pada tahun 2020		1.438	
10	Jumlah calon pekerja migran Indonesia/ calon tenaga kerja indonesia (CPMI/CTKI) yang diberikan pelatihan	Σ CPMI dilatih	%	61	75,31		
		Σ CPMI terdaftar		81			
11	Jumlah pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CPMI/CTKI)			2	2		
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja							
		1	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas	Jumlah perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun 2020	%	4	0,5
				jumlah perusahaan pada tahun 2020		751	
		2	Data tingkat produktivitas total	Pertumbuhan ekonomi dikurangi (pertumbuhan modal+pertumbuhan tenaga kerja).		belum ada perhitungan dari BPS	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN
			Persentase perusahaan yang menerapkan tata Kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)				
		1	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	Jumlah perusahaan yang telah memiliki PP pada tahun 2020	%	178	40,36
				Jumlah perusahaan yg memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih		441	
		2	Persentase perusahaan yang telah memiliki PKB	Jumlah perusahaan yang telah memiliki PKB pada tahun 2020	%	24	70,59
				Jumlah perusahaan yg memiliki Serikat Pekerja/Serikat Buruh		34	
		3	Rekapitulasi tahunan jumlah konfederasi SP/SB yang tercatat, federasi SP/SB yang tercatat, SP/SB di perusahaan yang tercatat, SP/SB di luar perusahaan yang tercatat dan anggota SP/SB di perusahaan		SP/SB	42	42
		4	Persentase perusahaan yang sudah Menyusun struktur skala upah	Jumlah perusahaan yang sudah menyusun struktur dan skala upah	%	95	47,03
				Jumlah perusahaan yang telah mengatur syarat kerja (dalam PP atau PKB)		202	
		5	Persentase perusahaan yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	Jumlah perusahaan yang sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	441	58,72
				Jumlah perusahaan berdasarkan perusahaan wajib lapor		751	
		6	Persentase jumlah perusahaan yang berselisih	Jumlah perusahaan yang berselisih	%	12	1,60
				Jumlah perusahaan pada tahun 2020		751	
		7	Jumlah mogok kerja		Mogok		tidak ada mogok kerja
		8	Jumlah penutupan perusahaan		Perusahaan		tidak ada penutupan perusahaan
		9	Jumlah perselisihan kepentingan		Perselisihan		tidak ada perselisihan
		10	Jumlah perselisihan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dalam 1 (satu) perusahaan		Perselisihan		tidak ada perselisihan
		11	Jumlah perselisihan PHK		Perselisihan	12	12

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		
						ELEMEN DATA	CAPAIAN	
		12	Jumlah pekerja/buruh yangter-PHK		pekerja	323	323	
		13	Jumlah perselisihan yang diselesaikan melalui perundingan bipartit		Perselisihan	2	2	
		14	Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang diberdayakan		LKS	1	1	
		15	Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama oleh Mediator Hubungan Industrial	Jumlah Perjanjian Bersama	%	6	50	
				Jumlah kasus perselisihan		12		
		Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten/Kota						
		1	Jumlah lowongan kerja yang tersedia di wilayah Kab/Kota		Lowongan Kerja	1.321	1.321	
		2	Jumlah pencari kerja yang terdaftar di kab/kota		Orang	5.889	5.889	
		3	Jumlah Bursa Kerja Khusus (BKK) wilayah kab/kota		BKK	35	35	
		4	Jumlah Tenaga Kerja Khusus terdaftar dalam satu Kab/kota		Orang	1656	1656	
		5	Jumlah Pejabat Fungsional Pengantar Kerja		Orang	4	4	
		6	Jumlah Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) antar kerja lokal dalam satu wilayah kab/kota		Lembaga	0	0	
		7	Jumlah perjanjian kerja yang disahkan oleh dinas bidang ketenagakerjaan Kab/kota		Perjanjian	343	343	
		8	Jumlah penempatan tenaga kerja melalui Informasi Pasar Kerja (IPK) Online (SISNAKER)		orang	949	949	
		9	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi		Orang	81	81	
		10	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang terdata		Orang	81	81	
		11	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang difasilitasi	Σ fasilitasi PMI yang dipulangkan	%	pada tahun 2020 tidak ada kegiatan terkait		
				Σ PMI yang pulang				
		12	Jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	Σ PMI/TKI yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan kerja	%			
				Σ PMI/TKI				
		13	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan dan keluarganya	Σ PMIatau TKI purna dan keluarganya yang diberdayakan	%			
				Σ PMI/TKI purna dan keluarganya				
		14	Jumlah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang dibentuk	Σ LTSA yang terbentuk	%		belum terdapat LTSA di Kabupaten Klaten	
				Jumlah daerah kantong PMI/TKI				

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		
						ELEMEN DATA	CAPAIAN	
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD						
		1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah Kab/kota yang telah dilatih PUG		Lembaga	62	62	
		2	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat Kab/kota		Prog/Keg	62	62	
		Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten						
		1	Jumlah media massa (cetak, elektronik) yang bekerja sama dengan Pemkab (dinas PPPA) untuk melakukan KIE pencegahan kekerasan terhadap anak		Media Massa	1	1	
		2	Jumlah lembaga layanan anak yang telah memiliki standar pelayanan minimal		Lembaga	4	4	
		3	Persentase korban kekerasan anak yang terlayani	Jumlah korban kekerasan anak yang dilayani	%	18	100	
				jumlah korban kekerasan anak di tingkat kab/kota		18		
		4	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan		Lembaga	50	50	
		5	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapatkan bantuan keuangan/fasilitas oleh Pemerintah Daerah Kab/kota (APBD Kab/kota)		Lembaga	3	3	
Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)								
		1	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat Kab/kota yang mendapatkan pelatihan		Organisasi	8	8	
		2	Jumlah kader perempuan tingkat Kab/kota yang sudah dilatih		Orang	35	35	
		3	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan		Lembaga	4	4	
		4	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah Kab/kota		Lembaga	1	1	
		5	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi		Kebijakan/Program	2	2	
		6	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandarisasi		Lembaga	1	1	
		7	Persentase korban kekerasan perempuan yang terlayani	Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan layanan	%	22	100	
				Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan		22		

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN
			Persentase ketersediaan pangan (tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)				
9	Pangan	1	Tersedianya infrastruktur pergudangan dan sarana pendukung lainnya untuk penyimpanan cadangan pangan	Ada/tidak gudang cadangan pangan dan sarana pendukung lainnya	Ada/Tidak	1 unit	Ada
		2	Tersedianya dan tersalurkannya pangan pokok dan pangan lainnya	Ada/tidak penyaluran pangan pokok dan pangan lainnya	Ada/Tidak	ada	ada
		3	Tersedianya regulasi harga minimum daerah untuk pangan lokal	Ada/tidak regulasi harga minimum daerah	Ada/Tidak	Tidak ada	Tidak ada
		4	Terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemenuhan konsumsi pangan yang beragam dan bergizi seimbang	Ada/tidak kegiatan pemberdayaan masyarakat	Ada/Tidak	Ada (Kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan)	Ada
		5	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada/tidak peta ketahanan dan kerentanan pangan	Ada/Tidak	Ada (Buku Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan)	Ada
		6	Tertanganinya kerawanan pangan	Ada/tidak penanganan daerah rentan rawan pangan	Ada/Tidak	Ada (di Desa Burikan, Joho, Ngerangan, Karangasem)	Ada
		7	Tersalurkannya cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada/tidak penyaluran cadangan pangan pada daerah rentan rawan pangan	Ada/Tidak	Ada (Desa Balerante, Sidorejo, Tegalmulyo)	Ada
		8	Terlaksananya pengawasan keamanan pangan segar	Ada/tidak kegiatan pengawasan keamanan pangan segar	Ada/Tidak	Ada (Kegiatan penyuluhan, pengawasan dan pembinaan mutu dan keamanan pangan)	Ada

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		
						ELEMEN DATA	CAPAIAN	
10	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan						
		Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum						
		Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.						
		Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee						
		Tersedianya tanah untuk masyarakat.						
		Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi						
		1	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	Jumlah izin lokasi yang diterbitkan + jumlah surat penolakan permohonan izin lokasi setelah melalui proses ditolak seluruhnya	%	2 (Rekomendasi dari BPN)	100	
				Jumlah permohonan izin lokasi dalam 1 tahun		2 (Permohonan ke BPN)		
		2	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimumabsentee	%	Tidak ada Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek		
				Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek				
		3	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan Maksimum/Absentee	Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum/absentee	%	tidak ada tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek		
				Jumlah luas tanah yang telah ditetapkan sebagai tanah obyek landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek				
		4	Dokumen Izin membuka tanah	Jumlah dokumen izin membuka tanah yang diproses penerbitannya	%	Tidak ada permohonan membuka tanah		
				Jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam 1 tahun				

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		
						ELEMEN DATA	CAPAIAN	
		5	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kab/kota	Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik	%	5 (pembangunan perumahan)	100	
				Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun		5 (pembangunan perumahan)		
11	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota						
		1	Hasil Perhitungan Kab/Kota terhadap :					
			a) Indeks Kualitas Air,(IKA)			36.15	36.15	
			b) Indeks Kualitas Udara (IKU)			76.82	76.82	
			c) Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)			42.54	42.54	
		Terlaksananya Pengelolaan Sampah di Wilayah Kabupaten/Kota						
		1	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah Kab/kota			ada / tidak	ada	ada
		Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
		1	Data izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/kota	Izin lingkungan,izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/kota		%	684	100
				jumlah usulan permohonan yang teregistrasi			684	
		2	Rasio pejabat pengawas LH di daerah (PPLHD) di kota terhadap usaha yang izin lingkungan, izin PPLH dan PUULH yang diterbitkan oleh pemerintah Kab/kota	Jumlah PPLHD yang ada	%	0		
				Jumlah kegiatan dan atau usaha yang izin lingkungan,izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/kota		0		
		3	Penetapan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di dua atau lebih daerah kab/kota dalam 1 Kab/kota	Jumlah MHA (masyarakat hukum adat) yg diakui dgn perda	%	0		
				Jumlah usulan MHA		0		
		4	Terfasilitasinya kegiatan peningkatan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat hukum adat terkait PPLH	Jumlah Masyarakat Hukum Adat yg mendapatkan pelatihan	%	0		
				Jumlah Masyarakat Hukum Adat yg ada		0		

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		
						ELEMEN DATA	CAPAIAN	
		5	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diberikan diklat	Jumlah lembaga kemasyarakatan yg diberikan diklat/rencana	%	38	100	
				target lembaga kemasyarakatan yg akan diberikan diklat		38		
		6	Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kab/kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kab/kota yang ditangani	Pengaduan masyarakat yang ditangani	%	Tidak ada Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kab/kota,		
				Total jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi				
12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	Perekaman KTP Elektronik						
		Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA						
		Kepemilikan akta kelahiran						
		Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama						
		1	Penerbitan akta perkawinan	Jumlah akta perkawinan yang diterbitkan		%	2.698	100
				Peristiwa perkawinan yang diterbitkan			2.698	
		2	Penerbitan akta perceraian	Jumlah akta Percerian yang diterbitkan		%	442	100
				Peristiwa Perceraian yang diterbitkan			442	
		3	Penerbitan akta kematian	Jumlah akta kematian yang diterbitkan		%	2.922	100
				Peristiwa kematian yang diterbitkan			2.922	
4	Penyajian data kependudukan	Jumlah penyajian data kependudukan skala kab/kota dalam satu tahun		%	1	50		
		2 dalam 1 tahun			2			
13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Persentase Pengentasan Desa Tertinggal						
		1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa		Desa	40	40	
		2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya		Desa	0	0	
		3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan		Lembaga	325	325	
		4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Data penambahan BUMDes tahun 2020	Desa	57	57	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN
		Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri					
		1	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa		Desa	40	40
		2	Jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun berjalan dikurangi jumlah desa yang melakukan kerja sama antar desa tahun sebelumnya		Desa	0	0
		3	Jumlah lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di desa yang terfasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan diberdayakan		Lembaga	325	325
		4	Jumlah peningkatan desa yang lembaga kemasyarakatan dan lembaga adatnya melaksanakan kegiatan ekonomi produktif dan pemberdayaan	Data penambahan BUMDes tahun 2020	Desa	57	57
14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)					
		1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan		Ada/Tidak	tidak ada	tidak ada
		2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	Median Usia Kawin Pertama Wanita Usia 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia dimana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan. Trend usia kawin pertama penting untuk menentukan pola fertilitas di Indonesia.	Nilai Tengah	27	27
		3	Angka Kelahiran Remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	$ASFR_i = \frac{i}{b} \times f$ ASFR adalah angka kelahiran di kelompok usia 15-19 tahun		0.42	0.42
		4	Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (advokasi dan KIE)	Jumlah masyarakat yang terpapar isi pesan program KKBPK advokasi dan KIE	%	4087	100
				Jumlah sasaran masyarakat program KKBPK advokasi dan KIE		4087	
		5	Jumlah stakeholders/pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program KKBPK		Stakeholder / kelompok	14	14

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		
						ELEMEN DATA	CAPAIAN	
		Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)						
		1	Persentase Fasilitas Kesehatan (Faskes) yang siap melayani KB MKJP	Jumlah faskes yang siap melayani KB MKJP	%	64	58,18	
				Jumlah faskes		110		
		2	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Peserta KB Aktif	%	138.344	70,90	
				Jumlah PUS		195.133		
		3	Pemerintah Daerah Kab/kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif					
		4	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	jumlah peserta KB pasca persalinan menurut metode kontrasepsi cara modern)	%	3.456	21,65	
				jumlah sasaran peserta KB pasca persalinan		15.962		
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)						
		1	Persentase kesertaan KB di Kab dan kota dengan kesertaan rendah	Jumlah Kec yang memiliki persentase kesertaan KB paling rendah dalam satu Kabupaten	%	12	46,15	
				Jumlah Kec dalam Kabupaten		26		
		2	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	jumlah peserta KB pada Keluarga Penerima PBI	%	3.407	70,55	
				Jumlah Keluarga PBI		4.829		
15	Perhubungan	Rasio konektivitas Kabupaten/Kota						
		Kinerja lalu lintas kabupaten						
		1	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan tipe C	Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C yang tersedia	%	4	66,67	
				Jumlah fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan sesuai dengan standar pelayanan penyelenggaraan terminal angkutan jalan		6		
		2	Terlaksananya pelayanan uji berkala	Jumlah kendaraan yang diuji per tahun	%	6.181	72,15	
				Jumlah kendaraan wajib uji		8.567		
		3	Penetapan tarif angkutan orang antar kota dalam Kabupaten, serta angkutan perotaan dan pedesaan kelas ekonomi	Jumlah penetapan tarif lintas penyeberangan	%	1	100	
				Jumlah lintas penyeberangan dalam Kab atau kota		1		

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN
		4	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota	Jumlah pemasangan perlengkapan jalan Kab/kota Target kebutuhan perlengkapan jalan Kab/kota	%	56.897 93.182	61,06
16	Komunikasi dan Informatika	: Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo					
		1	Persentase perangkat daerah yang terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang saling terkoneksi di Jaringan Intra Pemerintah atau menggunakan akses internet yang diamankan yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	51	100,00
				Jumlah Perangkat Daerah		51	
		2	Persentase perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan dinas kominfo	%	51	100,00
				Jumlah Perangkat Daerah		51	
		3	Tersedianya sistem elektronik komunikasi intra pemerintah yang disediakan Dinas Kominfo (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah		Ada/Tidak	Ada	Ada
		Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi					
		1	Persentase kegiatan (event), perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah yang dimanfaatkan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara	Jumlah kegiatan (event),perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah @yang diselenggarakan secara daring dengan memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015)	%	37	20
				Jumlah Kegiatan (event),perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah		185	
		2	Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	Jumlah perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	%	36	70,59
				Jumlah Perangkat Daerah		51	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN
		3	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Jumlah Perangkat Daerah yang mengimplementasikan layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	%	36	70,59
				Jumlah Perangkat Daerah		51	
		4	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik	%	50 (layanan yang sudah online)	21%
				Jumlah layanan		233 jumlah layanan di SPBE, proses bisnis belum dituangkan dalam dokumen	
		5	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang memanfaatkan sertifikat elektronik	Jumlah layanan SPBE layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang memanfaatkan sertifikat elektronik	%	8	
				Jumlah layanan		233	
		6	Persentase sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Jumlah sistem elektronik yang terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	%	7	100
				Jumlah sistem elektronik		7	
		7	Persentase layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	Jumlah layanan publik dan layanan administrasi yang terintegrasi dengan sistem penghubung layanan pemerintah	%	6	50
				Jumlah layanan publik dan layanan administrasi		12	
		8	Persentase perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah	%	51	100
				Jumlah perangkat daerah		51	
		9	Persentase perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat	%	51	100
				Jumlah perangkat daerah		51	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		
						ELEMEN DATA	CAPAIAN	
		10	Persentase perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis data (sesuai renstra kominfo)	Jumlah perangkat daerah yang memperbaharui datanya sesuai siklus jenis datanya Jumlah perangkat daerah	%	25 51	49,02	
		11	Persentase data yang dapat berbagi pakai	Jumlah data yang dapat berbagi pakai Jumlah data yang dimiliki pemerintah daerah	%	24 24	100% data statistik sektoral	
		12	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city	Jumlah perangkat daerah yang mengimplementasi inovasi yang mendukung smart city Jumlah perangkat daerah	%	7 51	13,73	
		13	Persentase ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan Dinas Kominfo	Jumlah ASN pengelola TIK yang tersertifikasi kompetensi di bawah pengelolaan dinas kominfo Jumlah ASN Pengelola TIK	%	19 60	31,67	
		14	Tersedianya peraturan daerah atau peraturan kepala daerah terkait implementasi e-government		Ada/tidak	ada	ada	
		Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota						
		1	Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah Kab/kota yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten / kota	Σ komunitas masyarakat atau mitra strategis Pemerintah Daerah Kab/Kota yang telah menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah Σ komunitas masyarakat atau Mitra Komunikasi Pemerintah Daerah Kab/kota	%	4 34	11,76	
		2	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kabupaten / kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	Jumlah konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kab/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM) Σ konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah Kab/kota	%	432 432	100	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		
						ELEMEN DATA	CAPAIAN	
		3	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Diseminasi dan layanan Informasi Publik yang dilaksanakan sesuai dengan Strategi Komunikasi (STRAKOM) dan SOP	%	7	100	
				Σ Diseminasi dan layanan informasi Publik		7		
17	Koperasi dan UKM	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas						
		1	Persentase fasilitasi penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam 1 (satu) daerah Kabupaten / kota	Jumlah penerbitan izin usaha simpan pinjam koperasi pada tahun yang dilaporkan	%	5	1,15	
				Jumlah usaha simpan pinjam koperasi yang belum mempunyai izin usaha simpan pinjam		435		
		2	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam oleh koperasi untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten / kota	Jumlah penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan	%	3	100	
				Jumlah permohonan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas usaha simpan pinjam pada tahun yang dilaporkan		3		
		3	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten / kota	Jumlah koperasi yang diperiksa dan diawasi	%	100	11,20	
				Jumlah koperasi yang ada		893		
		4	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten / kota	Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya	%	67	1,32	
				Jumlah usaha simpan pinjam oleh koperasi yang ada		5086		
		5	Persentase koperasi yang mengikuti pelatihan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten / kota	Jumlah koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	%	60	6,72	
				Jumlah koperasi yang ada		893		
		6	Persentase jumlah anggota koperasi yang telah mengikuti pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten / kota	Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian	%	60	0,03	
				Jumlah anggota koperasi yang ada		191.777		

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		
						ELEMEN DATA	CAPAIAN	
		7	Persentase koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten /kota	Jumlah koperasi yang telah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan	%	178	19,93	
				Jumlah koperasi yang ada		893		
		8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan			3,81	3,81	
		9	Persentase fasilitasi penerbitan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kabupaten /kota	Jumlah koperasi yang telah diterbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasinya	%	141	15,79	
				Jumlah koperasi yang ada		893		
		10	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah Kabupaten /kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pembiayaan	%	34	3,81	
				Jumlah koperasi yang ada		893		
		11	Persentase yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah Kabupaten /kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitas pemasaran	%	4	0,45	
				Jumlah koperasi yang ada		893		
		12	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan daerah Kabupaten /kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha	%	178	19,93	
				Jumlah koperasi yang ada		893		
		13	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kota dalam 1 (satu) daerah Kabupaten / kota	Jumlah koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi kemitraan	%	2	0,22	
				Jumlah koperasi yang ada		893		
			Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha					
		1	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru	%	6.101	15,691	
				Jumlah wirausaha yang ada		38.881		
		2	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	Jumlah usaha mikro yang diinput@ke dalam sistem data online (ODS)	%	5876	15,11	
				Jumlah usaha mikro yang ada		38881		
		3	Persentase jumlah usaha mikro yang bermitra	Jumlah usaha mikro yang bermitra	%	100	0,26	
				Jumlah usaha mikro yang ada		38881		

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		
						ELEMEN DATA	CAPAIAN	
		4	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi produk usaha	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi	%	500	1,30	
				Jumlah usaha mikro yang belum memiliki standar dan sertifikasi produk		38381		
		5	Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	%	500	1,30	
				Jumlah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran		38381		
		6	Rasio usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	Jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi pelatihan	%	3000	7,72	
				Jumlah usaha mikro yang ada		38881		
		7	Persentase usaha mikro yang diberikan pendampingan melalui lembaga pendampingan	Jumlah usaha mikro yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	%	1000	2,57	
				Jumlah usaha mikro yang ada		38881		
18	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi di Kabupaten / Kota						
		1	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah Kab/kota		Ada/Tidak	TIDAK	TIDAK	
		2	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal		Ada/Tidak	TIDAK	TIDAK	
		3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal		Jumlah Laporan	TIDAK ADA	TIDAK ADA	
		4	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting		Jumlah Kegiatan	1	1	
		5	Kegiatan pameran penanaman modal		Jumlah Kegiatan	tidak ada karena pandemi		
		6	Kegiatan misi penanaman modal		Jumlah Kegiatan	1 kegiatan (berupa promosi penanaman modal)	1	
		7	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal		Jumlah Konsultasi	1202	1202	
		8	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal		Jumlah Perizinan dan Non Perizinan	1987	1987	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		
						ELEMEN DATA	CAPAIAN	
		9	Laporan realisasi penanaman modal		Jumlah Realisasi (Rupiah)	764.996.464.253 (PMA + PMDN)	764.996.464.253	
		10	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat kabupaten/kota		Jumlah Aparatur	1	1	
		11	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN		Jumlah Perusahaan	32	32	
		12	Tersedianya data dan informasi perizinan dan non perizinan Kabupaten/Kota		Ada/Tidak	Ada	ada	
19	Pemuda dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri						
		1	Jumlah pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan		Orang	70	70	
		2	Jumlah pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan		Orang	70	70	
		Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan						
		1	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda		Orang	110	110	
		2	Jumlah pengelola organisasi kepemudaan yang mendapat pelatihan manajemen organisasi kepemudaan		Orang	260	260	
		Peningkatan Prestasi Olahraga						
		1	Jumlah pelatih olah raga yang memiliki kompetensi di satuan2 pendidikan		Orang	61	61	
		2	Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah		Event	1	1	
20	Statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah						
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah						
		1	Tersedianya buku profil daerah		Ada/tidak	ada	ada	
		2	Jumlah survey statistik sektoral yang dilakukan		Jumlah Survey	survey statitik belum dilakukan, yang dilakukan adalah kompilasi		
		3	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang dilakukan		Jumlah Kompilasi	24	24	
		4	Jumlah survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi BPS		Jumlah Survey	survey statitik belum dilakukan, yang dilakukan adalah kompilasi		
		5	Jumlah kompilasi statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dr BPS		Jumlah Kompilasi	24	24	
		6	Persentase kelengkapan metadata kegiatan statistik	Jumlah metadata kegiatan statistik sektoral	%	245	100	
		Jumlah kegiatan statistik sektoral		245				

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		
						ELEMEN DATA	CAPAIAN	
		7	Persentase kelengkapan metadata variabel dari kegiatan statistik	Jumlah metadata indikator statistik sektoral jumlah indikator statistik sektoral	%	245 245	100	
21	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah						
		1	Persentase kegiatan strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan	Jumlah kegiatan strategis teramankan Jumlah kegiatan strategis yang ada	%	500 berita 2100 berita	23,8	
		2	Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen yang telah menerapkan prinsip2 manajemen keamanan informasi (SMKI) dan/atau aplikasi persandian dibanding jumlah sistem elektronik yang ada pada pemerintah daerah	Jumlah SE yang menerapkan SMKI dan diamankan sertifikat elektronik atau aplikasi penyandian Jumlah SE yang ada	%	5 9	55,56	
		3	Persentase sistem elektronik/asset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah	Jumlah SE atau aset informasi yang telah diaudit dengan resiko kategori rendah Jumlah SE yang ada	%	39 buah 44 buah	89%	
		4	Persentase titik yang diamankan dibanding dengan jumlah seluruh titik pada pemerintah Daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi sandi (PHKS) yang ditetapkan	Jumlah titik teramankan Jumlah titik pada PHKS	%	10 51	19,6	
		Terlestarikannya Cagar Budaya						
		1	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi (inventarisasi, pengamanan pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi)		Obyek	13	13	
		2	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dikembangkan (penyebarluasan, pengkajian, penayaan keberagaman)		Obyek	13	13	
		3	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatkan ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)		Obyek	13	13	
		4	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)		Orang			
5	Register cagar budaya (pendaftaran, pengisian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)		Cagar Budaya	(tahap pencatatan)	(tahap pencatatan)			
6	Perlindungan cagar budaya Kab/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)		Cagar Budaya	4	4			
7	Layanan perizinan membawa cagar budaya Kab/kota ke luar Kab/kota dengan dukungan data		Cagar Budaya	tidak ada	tidak ada			
8	Pengembangan cagar budaya Kab/kota (penelitian, revitalisasi, adaptasi),		Cagar Budaya	tidak ada	tidak ada			

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		
						ELEMEN DATA	CAPAIAN	
		9	Pemanfaatan cagar budaya Kab/kota (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)		Cagar Budaya	4	4	
		10	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum		Koleksi	tidak ada museum di Kab. Klaten		
		11	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum		Orang			
		12	Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.					
		13	Pembentukan tim pendaftaran cagar budaya		Tim	belum memiliki Tim ahli cagar budaya		
		14	Pembentukan tim ahli cagar budaya Kab/kota		Tim			
		15	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya		Tim			
		16	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman		Orang	8	8	
		17	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman		Orang	1	1	
		18	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman		Unit	13 (sarana Cagar Budaya)	13	
		19	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat		Kegiatan	tidak ada museum di Kab. Klaten		
23	Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat						
		1	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk	Koleksi perpustakaan yang tersedia di berbagai perpustakaan di wilayahnya (dalam eksemplar)	rasio	825.789	0,622	
				Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)		1.327.577		
		2	Persentase ketermanfaatkan perpustakaan oleh masyarakat	Jumlah kunjungan pemustaka yang memanfaatkan perpustakaan baik secara online maupun onsite	%	70.878	5,3	
				Jumlah penduduk di wilayahnya		1.327.577		
		3	Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk	Ketersediaan tenaga perpustakaan di berbagai perpustakaan di wilayahnya	rasio	161	0,0001	
				Jumlah penduduk di wilayahnya (dalam jiwa)		1.327.577		

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		
						ELEMEN DATA	CAPAIAN	
		4	Persentase perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	%	1	1,9	
				Jumlah perpustakaan dari berbagai jenis yang terdapat di wilayahnya		53		
		5	Jumlah pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat		Jenis	1.Perpus keliling, 2. CFD 3.Umum 4.Bejanaku 5.Online	5	
		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat						
		1	Jumlah naskah kuno yang diakuisisi/dialih media (digitalisasi)/terdaftar yang ada di wilayahnya		Naskah Kuno	0		
		2	Jumlah naskah kuno yang dialih aksara dan dialih bahasa		Naskah Kuno	0		
		3	Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya (item)		Budaya Etnis	0		
24	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan						
		1	Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	1.543	100,0	
				Jumlah seluruh arsip aktif		1.543		
		2	Persentase arsip in-aktif yang telah dibuatkan daftar arsip	Jumlah arsip inaktif yang telah dibuatkan daftar arsip	%	88.368	100,0	
				Jumlah seluruh arsip inaktif		88.368		
		3	Persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	Jumlah arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik	%	63.566	100,0	
				Jumlah seluruh arsip Statis		63.566		
		4	Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	Jumlah arsip yang telah dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN	%	0	-	
				Jumlah seluruh arsip dinamis dan arsip statis pemerintahan Kab/kota		151.934		

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		
						ELEMEN DATA	CAPAIAN	
			Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat					
		1	Pemusnahan arsip yang sesuai NSPK		Jumlah Arsip	65.107	65.107	
		2	Perlindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana yang sesuai NSPK		Jumlah Arsip	2.218	2.218	
		3	Penyelamatan arsip perangkat daerah kota yang digabung dan atau dibubarkan dan pemekaran daerah kota yang sesuai NSPK di Kab/kota		Jumlah Arsip	22.035	22.035	
		4	Autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media yang dikelola oleh lembaga kearsipan Kab/kota yang sesuai NSPK		Jumlah Arsip	302	302	
		5	Pencarian arsip statis yang pengelolaannya menjadi kewenangan daerah Kab/kota yang dinyatakan hilang dalam bentuk daftar pencarian arsip yang sesuai NSPK		Jumlah Arsip	0	0	
		6	Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup yang disimpan di lembaga kearsipan daerah Kabupaten/kota yang sesuai NSPK		Jumlah Arsip	0	0	
Urusan Pilihan								
25	Kelautan Perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kab/kota di wilayah provinsi (sumber data: one data KKP)						
		1	Jumlah rumah tangga nelayan yang melakukan diversifikasi usaha (RTP)			83	83	
		2	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang operasional	Jumlah pelabuhan perikanan yang memenuhi minimal 3 (tiga) standar operasional	%		tidak memiliki TPI	
				Jumlah seluruh TPI yang ada di wilayah Kab/kota				
		3	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) Daerah Kab/ kota yang diterbitkan		Izin	100	100	
		4	Jumlah pembudidaya ikan yang memperoleh kegiatan pemberdayaan (pendidikan dan pelatihan/penyuluhan dan pendampingan/ kemitraan usaha/ kemudahan akses iptek dan informasi/dan penguatan kelembagaan)		Pembudidaya	50 orang	50 orang	
		5	Jumlah benih budidaya air tawar dan air payau yang di produksi		Benih	108 juta ekor	108 juta ekor	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD			
						ELEMEN DATA	CAPAIAN		
26	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan							
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten							
		Tingkat hunian akomodasi							
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku							
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD							
		1	Jumlah entitas pengelolaan destinasi			Pengelola	55	55	
		2	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata			Obyek	55	55	
		3	Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di Kab/kota			TDUP	225	225	
		4	Jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan			orang	22.199	22.199	
		5	Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam negeri			Kegiatan	3	3	
		6	Jumlah event luar negeri yang diikuti kabupaten/kota			Kegiatan	0	0	
		7	Jumlah industri pariwisata daerah yang berpartisipasi pada event promosi pariwisata di dalam negeri			Industri	3	3	
		8	Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata yang disertifikasi	Jumlah tenaga kerja pariwisata tersertifikasi		%	145	12,30	
				Jumlah tenaga kerja pariwisata			1179		
9	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan		%	200	100			
		Jumlah sasaran pembekalan sektor kepariwisataan			200				
10	Jumlah lokasi yang memperoleh pemberdayaan masyarakat dan pembinaan kemitraan usaha masyarakat			Lokasi	30	30			
27	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun							
		1	Jumlah Sarana dan prasana pertanian yang diberikan			Unit	alat tanam padi 2; pompa air 32, rumah pengering tembakau 5, alat transportasi hasil panen roda tiga 5, cultivator 12	56	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		
						ELEMEN DATA	CAPAIAN	
		2	Prasarana pertanian yang digunakan		Prasarana	jaringan irigasi 10, embung 3, dam parit 1, long storage 2	16	
		3	Penerbitan izin usaha pertanian		Dokumen	650	650	
		4	Persentase Prasarana pertanian yang digunakan	Jumlah prasarana yang aktif digunakan	%	16	100	
				Jumlah prasarana yang dibangun		16		
		5	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian Kab/kota	Jumlah usulan yang difasilitasi	%	650	100	
				Jumlah usulan usaha pertanian		650		
		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular						
		1.	Persentase Fasilitasi penanggulangan Bencana	Jumlah area yang dapat ditanggulangi	%	5	100	
				Jumlah area yang terkena bencana		5		
28	Kehutanan							
		1	Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura		Dokumen	Pada tahun 2020 tidak ada kegiatan terkait urusan kehutanan karena wewenang berada Pada Pemprov dan kegiatan Pemprov tidak ada yang dilaksanakan di Kabupaten Klaten pada tahun 2020		
		2	Pemberdayaan masyarakat di daerah penyangga	Jumlah kelompok masyarakat desa binaan yang terbentuk dan didampingi	kelompok			
		3	Pemulihan ekosistem pada Tahura	Luas areal yang telah dipulihkan baik dengan mekanisme alam, rehabilitasi maupun restorasi	Ha			
		4	Menurunnya gangguan kawasan TAHURA	Rekapitulasi kejadian TIPIHUT secara periodik per tahun	kejadian			
29	ESDM	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di Kab/kota						
		1	Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kab/kota		ada/tidak	tidak	tidak	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		
						ELEMEN DATA	CAPAIAN	
30	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)						
		1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : a. Pusat perbelanjaan b. Toko swalayan	Jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan < 5 hari kerja	%	0	tidak ada permohonan izin pusat perbelanjaan	
				Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar		0		
				Jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan < 5 hari kerja	%	22	100	
				Jumlah permohonan izin toko swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar		22		
		2.	Persentase Penerbitan TDG	Jumlah penerbitan TDG ≤5 hari kerja	%	14	100%	
				Jumlah permohonan penerbitan TDG		14		
		3	Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	Jumlah penerbitan TDG	%	222	61%	
Jumlah gudang yang ada di Kab kota				363				

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN
		4	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk :		%	STPW Dilaksanakan melalui sistem http://sipo.kemendag.go.id/	
		a) Penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar	%			
			Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri				
		b) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri	Jumlah STPW untuk penerima lanjutan@waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar	%			
			Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri				
		c) Penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri	Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba luar negeri yang terbit ≤2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar	%			
			Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri				
		5	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/kota	Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah Kab/kota	%		
Jumlah permohonan SIUP Bahan Berbahaya bagi Pengecer							
						Penerbitan ijin SIUP Bahan Berbahaya menjadi kewenangan kemendag dengan rekomendasi dari Disperindag Provinsi Jawa Tengah	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD		
						ELEMEN DATA	CAPAIAN	
		6	Persentase penerbitan SKA yang tepat waktu	Jumlah SKA yang terbit ≤1 hari kerja 1 x 24 jam Jumlah permohonan penerbitan SKA yang dokumennya telah diterima dengan lengkap dan benar	%	pada tahun 2020 tidak ada permohonan penerbitan SKA dari pelaku usaha		
		7	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	$K = (a + b) \times 100\%$ K = Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya a = Pembangunan sarana distribusi perdagangan telah dilakukan sesuai target waktunya (nilai 0.5) b = sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan sesuai peruntukannya (nilai 0.5)	%	a= Pembangunan pasar baru b= jumlah pasar yang ada K = (0+0,5) x 100% pada tahun 2020 tidak ada pembangunan pasar baru	50%	
		8	Persentase koefisien variasi harga antar waktu		%	belum ada perhitungan koefisien		
			Persentase kinerja realisasi pupuk					
		1	Jumlah Pupuk dan Pestisida yang tersalurkan	$X = a / (b \times c) \times 100\%$ X = Persentase jumlah pupuk yang disalurkan a = Jumlah pupuk yang disalurkan b = Target komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat Kab/kota sebesar (90% dari RDKK) c = RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok)	a = 53.413,21 b= 90% c= 83.283	X = 71,26	X = 71,26	

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN
		Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku					
		1	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	Jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku pada tahun berjalan	%	400	5%
				Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah Kab kota		8000	
		2	Persentase kesesuaian BDKT yang diawasi terhadap ketentuan yang berlaku	Jumlah sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan sesuai ketentuan yang berlaku	%	30	86%
				Total sampel BDKT yang diawasi dalam tahun berjalan		35	
31	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten/Kota					
		1	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah Kab/kota	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan	%	tidak ada izin perluasan kawasan industri	
				Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk			
		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP					
		1	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi perda		%	95	Proses sudah sampai Biro Hukum Provinsi
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait					
		1	Persentase jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan menengah yang diterbitkan	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan	%	1	100
				Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk		1	
		Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) bagi Industri kecil dan menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait					
		1	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri kecil yang diterbitkan	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan	%	tidak ada permohonan izin perluasan industri (IPUI)	
				Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk			

No	Urusan	NO IKK	IKK Output	RUMUS	SATUAN	DATA LPPD	
						ELEMEN DATA	CAPAIAN
			Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini				
		1	Persentase data perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri yang masuk dalam SII Nas terhadap total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri di Kab/kota	Jumlah data perusahaan industri kecil dan perusahaan kawasan industri di Kab/kota di SIINas	%	29	69,05
				Total populasi perusahaan industri besar dan perusahaan kawasan industri di Kab/kota		42	
31	Transmigrasi	1	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya		Kawasan	Berdasarkan surat Dirjen PKP2Trans Nomor: B656/PKT0401/IV/2020 Perihal Perpindahan dan penempatan transmigrasi Tahun 2020 sehubungan dengan Corona	
		2	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya		Permukiman		
		3	Jumlah satuan permukiman transmigrasi yang difasilitasi pembinaannya		Permukiman		

**LAMPIRAN PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN
URUSAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
BESERTA OPD PELAKSANA TAHUN 2020**

URUSAN : PENDIDIKAN

No	Uraian Prog/Kegiatan
DINAS PENDIDIKAN	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor
4	Penyediaan alat tulis kantor
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7	Penyediaan makanan dan minuman
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
10	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
11	Pengadaan peralatan gedung kantor
12	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
13	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
14	Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan
IV	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
15	Pengelolaan administrasi keuangan dan pelaporan asset daerah
V	Program Pendidikan Anak Usia Dini
16	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini
17	Penyelenggaraan Ajang Kreativitas Anak Usia Dini
18	Fasilitasi kegiatan PAUD
19	Penyediaan Biaya Operasional Penyelenggaraan PAUD
20	Fasilitasi penyampaian BOP PAUD
21	Rehabilitasi Toilet (Jamban) Guru (DAK Bidang Pendidikan)
22	Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) (DAK Bidang Pendidikan)
23	Rehabilitasi Ruang Kelas (DAK Bidang Pendidikan)
VI	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
24	Penataan Lingkungan Sekolah (taman, lapangan upacara, fasilitas parkir, pagar)
25	Pembangunan perpustakaan sekolah
26	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary
27	Pengadaan mebeluer sekolah
28	Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah
29	Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang pratikum sekolah

No	Uraian Prog/Kegiatan
30	Rehabilitasi sedang/berat perpustakaan sekolah
31	Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary
32	Pelatihan Penyusunan kurikulum
33	Penggabungan SD Negeri
34	Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) SMP
35	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SD
36	Pembinaan minat, bakat, dan kreativitas siswa SMP
37	Pendampingan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tingkat SD
38	Pendampingan Program Bantuan Siswa Miskin (BSM) Tingkat SMP
39	Pembangunan Sanitasi/MCK SD
40	Penyelenggaraan Ujian SD
41	Penyelenggaraan Ujian SMP
42	Pengadaan Buku Koleksi Perpustakaan (DAK Bidang Pendidikan)
43	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Pendidikan Inklusif (DAK Bidang Pendidikan)
44	Operasional Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan
45	Penguatan Kinerja Sekolah Perbatasan SD
46	Penguatan Kinerja Sekolah Perbatasan SMP
47	Rehabilitasi Ruang Kelas (DAK Bidang Pendidikan)
48	Rehabilitasi Ruang Perpustakaan (DAK Bidang Pendidikan)
49	Rehabilitasi Ruang Guru (DAK Bidang Pendidikan)
50	Rehabilitasi Jamban Siswa/Guru (DAK Bidang Pendidikan)
51	Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) (DAK Bidang Pendidikan)
52	Pembangunan (Toilet) Jamban Siswa/Guru (DAK Bidang Pendidikan)
53	Pembangunan Ruang Perpustakaan (DAK Bidang Pendidikan)
54	Pembangunan Ruang UKS (DAK Bidang Pendidikan)
55	Pengadaan Peralatan PJOK (DAK Bidang Pendidikan)
56	Pengadaan Peralatan Seni Budaya (DAK Bidang Pendidikan)
57	Pengadaan Alat Kesenian Tradisional (DAK Bidang Pendidikan)
58	Pengadaan Peralatan Pendidikan IPA (DAK Bidang Pendidikan)
59	Pengadaan Peralatan Pendidikan IPS (DAK Bidang Pendidikan)
60	Pengadaan Peralatan Pendidikan Bahasa Indonesia (DAK Bidang Pendidikan)
61	Pengadaan Peralatan Pendidikan Matematika (DAK Bidang Pendidikan)
62	Pengadaan Peralatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi (DAK Bidang Pendidikan)
63	Pengadaan Media Pendidikan (DAK Bidang Pendidikan)
64	Rehabilitasi Ruang Kelas SMP (DAK Bidang Pendidikan)
65	Pengadaan Peralatan Laboratorium Komputer (DAK Bidang Pendidikan)
66	Pengadaan Alat TIK Pembelajaran SD Negeri (Bankeu Provinsi)
67	Rehab Ruang Kelas Rusak SD Negeri (Bankeu Provinsi)
VII	Program Pendidikan Non Formal
68	Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan
69	Pengembangan data dan informasi pendidikan non formal
70	Pengembangan kurikulum, bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal

No	Uraian Prog/Kegiatan
71	Penyelenggaraan UNPP Paket A,B,C
72	Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) (DAK Bidang Pendidikan)
73	Pengadaan Peralatan Pendidikan TIK (DAK Bidang Pendidikan)
VIII	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
74	Pelaksanaan Sertifikasi pendidik
75	Penilaian dan Penetapan Angka Kredit
76	Seleksi Calon Kepala Sekolah dan Pengawas
77	Pembinaan minat bakat dan kreativitas guru
78	Peningkatan Kapasitas Tenaga Kependidikan dan Pengawas
79	Peningkatan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
X	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
80	Monitoring, evaluasi dan pelaporan
81	Pembinaan dan Pengembangan UKS Sekolah
82	Penyusunan Data Pokok Pendidikan
83	Penerimaan Siswa Baru SMP Online
84	Operasional BOS Tingkat SD
85	Operasional BOS Tingkat SMP
TK NEGERI	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2	Penyediaan jasa kebersihan kantor
3	Penyediaan alat tulis kantor
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2	Penyediaan jasa kebersihan kantor
3	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
4	Penyediaan alat tulis kantor
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
7	Penyediaan peralatan rumah tangga
8	Penyediaan makanan dan minuman
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
10	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
II	Program Pendidikan Anak Usia Dini
1	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik
2	Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

No	Uraian Prog/Kegiatan
III	Program Pendidikan Non Formal
1	Pengembangan pendidikan kecakapan hidup
2	Penyelenggaraan Kejar Paket B setara SMP
3	Penyelenggaraan Kejar Paket C setara SMU
4	Layanan Pembelajaran Keliling Pendidikan Kesetaraan
	SD NEGERI
I	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
I	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

URUSAN : KESEHATAN

No	Uraian Prog/Kegiatan
DINAS KESEHATAN	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1	Penyediaan jasa surat menyurat
2	Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
6	Penyediaan alat tulis kantor
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8	Penyedia komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9	Penyediaan makanan dan minuman
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
12	Penyedia jasa pengamanan kantor
13	Penyediaan jasa pengemudi kantor
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1	Pembangunan Gedung Kantor
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
3	Pengadaan Mebeleur
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
6	Penataan Lingkungan Kantor
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1	Pembinaan Administrasi Kepegawaian
4	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1	Pengadaan Obat dan Perbekelan Kesehatan (DAK Bid. Kesehatan)
2	Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan
3	Pengelola Manajemen Obat
4	Distribusi Obat dan E Logistik (DAK Non Fisik)
5	Pengelolaan Manajemen Obat (DBHCHT)
5	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1	Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Pendampingan Polindes
2	Bintek Balai Pengobatan / RB dan Lab. Swasta
3	Penunjang Operasional PPPK
4	Penunjang Operasional Pelayanan Ijin di Bidang Kesehatan
5	Akreditasi Puskesmas
6	Pemilihan Paramedis, Medis Teladan dan Puskesmas Berprestasi
7	Pembuatan Buku Profil Kesehatan
8	Penunjang Operasional Laboratorium Kesehatan

No	Uraian Prog/Kegiatan
9	Peningkatan Manajemen Puskesmas
10	Peningkatan Kinerja Klinik
11	Pembuatan Buku K I A
12	Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)
13	Peningkatan Layanan Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)
14	Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)
15	Peningkatan Manajemen Operasional Kesehatan dan Jaminan Persalinan (DAK Non Fisik)
16	Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting (DAK Non Fisik)
17	Sistim Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (DBHCHT)
18	Bantuan Operasional Kesehatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) (DAK Non Fisik)
19	Peningkatan Manajemen Khusus Penurunan AKI/AKN (DAK Non Fisik)
20	Bantuan Operasional Kesehatan Upaya Pencegahan dan Pemberantasan penyakit (P2P) (DAK Non Fisik)
6	Program Pengawasan Obat dan Makanan
1	Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan
2	Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan
3	Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah
4	Pengawasan Sarana Pelayanan Kefarmasian dan Industri Rumah Tangga Pangan (DAK Non Fisik)
7	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1	Penyuluhan Kesehatan Masyarakat
2	Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat
3	Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
8	Program Perbaikan Gizi Keluarga
1	Upaya Perbaikan Gizi Keluarga
2	Pembinaan Kewaspadaan Pangan dan Gizi
9	Program Pengembangan Lingkungan Sehat
1	Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat
2	Peningkatan Kesehatan Lingkungan
10	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1	Penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)
2	Pengendalian Penyakit Menular Langsung dan Penyakit Tidak Menular
3	Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
4	Pengendalian Penyakit Menular Langsung dan Penyakit Tidak Menular (DBHCHT)
5	Pengadaan Peralatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (DAK Bid. Kesehatan)
6	Pengadaan Bahan Medis Habis Pakai Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (DAK Bid. Kesehatan)
11	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1	Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan
2	Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan
3	Pembinaan Badan Layanan Umum Daerah

No	Uraian Prog/Kegiatan
12	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
1	Kemitraan Pelayanan Jasa Kesehatan Masyarakat Miskin (BPJS)
2	Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Rentan
13	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK Bidang Kesehatan)
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas Keliling (DAK Bidang Kesehatan)
4	Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Pembantu
5	Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan
6	Penyediaan Alat Antropometri (DAK Bidang Kesehatan)
7	Pembangunan Puskesmas (DBHCHT)
8	Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DBHCHT)
9	Pengadaan Peralatan Gawat Darurat Maternal Neonatal Puskesmas (PONED) (DAK Bidang Kesehatan)
10	Pembangunan Therapeutic Feeding Center (TFC) (DAK Bidang Kesehatan)
11	Bantuan Operasional Kesehatan Kalibrasi Alat Kesehatan (DAK Non Fisik)
12	Pengadaan sarana Prasarana Puskesmas Keliling (DBHCHT)
13	Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu (DAU)

RSD BAGAS WARAS

1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
2	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
3	Penyusunan perencanaan dan Pelaporan
2	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata
1	Pengadaan ala-alat kesehatan rumah sakit
2	Pengadaan obat-obatan rumah sakit
3	Program Pelayanan Kesehatan
1	Pelayanan Kesehatan RSUD

BAGIAN KESRA

1	Program Peningkatan Kesehatan Lansia
1	Pelayanan pemeliharaan kesehatan

PUSKESMAS

1	Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1	Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)
2	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1	Penunjang kegiatan Puskesmas

URUSAN : PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Uraian Prog/Kegiatan
DPU PR	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1	Penyediaan jasa surat menyurat
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
5	Penyediaan jasa administrasi keuangan
6	Penyediaan jasa kebersihan kantor
7	Penyediaan alat tulis kantor
8	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
11	Penyediaan makanan dan minuman
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
14	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
15	Penyediaan jasa pengemudi kantor
16	Penyediaan Operasional UPTD
17	Penyusunan perencanaan dan pelaporan
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
2	Pengadaan peralatan gedung kantor
3	Pengadaan mebeleur
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
5	Pemeliharaan Alat Berat
III	Program peningkatan disiplin aparatur
1	Pengadaan pakaian kerja lapangan
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1	Peningkatan Kapasitas SDM
2	Peningkatan kapasitas pengelolaan Keuangan
3	Pelatihan Kantor Sendiri
V	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya
1	Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
2	Pendampingan DAK Rehabilitasi Jaringan Irigasi
3	Operasi Irigasi
4	Perencanaan jaringan irigasi/bendung
5	Pengadaan Pesawat Ukur
6	Pembinaan/penyuluhan teknis irigasi kepada P3A/GP3A

No	Uraian Prog/Kegiatan
7	Pengadaan sarana prasarana pengelolaan irigasi
8	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi (DAK Bid. Prasarana Irigasi)
9	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Saluran Pembuang DI Jetisbolo (nomor 151) (Bankeu Provinsi)
VI	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
1	Pembangunan embung, dan bangunan penampung air lainnya
2	Pemeliharaan dan rehabilitasi embung, dan bangunan penampung air lainnya
3	Pemeliharaan dan penataan kawasan Waduk
4	Operasi dan pemeliharaan (OP) sungai
5	Pengadaan bahan penanganan banjir
6	Rehabilitasi kawasan sumber air
7	Penunjang Operasional Pelaksanaan Bantuan Provinsi Bidang Sumber Daya Air
BIDANG BINA MARGA	
I	Program pembangunan jalan dan jembatan
1	Pembangunan jembatan
2	Peningkatan Jalan Nangsri-Tanjungsari
3	Peningkatan Jalan Prawatan-Margorejo
4	Peningkatan Jalan Pasar Kembang-Kadilajo
5	Peningkatan Jalan Ngimbar-Kayumas
6	Peningkatan Jalan Perempatan Jetis-Polanharjo
7	Peningkatan Jalan Tegalgondo-Sidoarjo
8	Peningkatan Jalan Sidoarjo-Janti
9	Peningkatan Jalan Wonosari-Bolali
10	Peningkatan Jalan Pakis-Wonosari
11	Peningkatan Jalan Padangan-Jelobo
12	Peningkatan Jalan Samben-Sidowarno
13	Peningkatan Jalan Ngaran-Telukon
14	Peningkatan Jalan Trucuk-Sajen
15	Peningkatan Jalan Cawas-Kalisogo
16	Peningkatan Jalan Empu Sedah
17	Peningkatan Jalan Ki Ageng Penjawi
18	Peningkatan Jalan Ki Ageng Pemanahan
19	Peningkatan Jalan Jodipati
20	Penunjang Operasional Pelaksanaan Bantuan Provinsi Bidang Bina Marga
21	Penunjang Operasional Pelaksanaan Kegiatan DAK
22	Peningkatan Jalan Tegalmulyo - Surowono (no ruas 42) (Bankeu Provinsi)
II	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan
1	Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan se Kabupaten Klaten
BIDANG TATA RUANG	
I	Program Perencanaan Tata Ruang
1	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang

No	Uraian Prog/Kegiatan
2	Perencanaan dan Koordinasi Rencana Tata Ruang
3	Survey dan pemetaan
4	Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Detail Tata Ruang
II	Program Pemanfaatan Ruang
1	Penyusunan norma, standar, dan kriteria pemanfaatan ruang
2	Sosialisasi kebijakan, norma, standar, prosedur dan manual pemanfaatan ruang
III	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1	Pengawasan pemanfaatan ruang
2	Pembuatan Billboard/Papan Reklame dan sejenisnya
IV	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
1	Pemeliharaan Instalasi Pengelolaan Limbah Terpadu (IPLT)
DINAS PERWASKIM	
I	PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/ GORONG - GORONG
1	Perencanaan pembangunan saluran drainase/ gorong - gorong
2	Pembangunan saluran drainase/ gorong - gorong
II	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN MINUM LIMBAH
1	Penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (BLM)
3	Pendampingan Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)
4	Pendampingan dana alokasi khusus bidang infrastruktur air minum
III	PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN/PERKOTAAN
1	Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk Perdesaan/Perkotaan
IV	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN BANGUNAN GEDUNG
1	Pembangunan gedung milik daerah
2	Rehabilitasi/pemeliharaan gedung milik daerah
3	Penyusunan dokumen bangunan gedung/kantor
V	PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
1	Monitoring dan pengendalian bangunan
2	Penunjang Operasional Tim SIUJK Kabupaten

URUSAN : PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

No	Uraian Prog/Kegiatan
DINAS PERWASKIM	
I PROGRAM PELAYANAN DASAR ADMINISTRASI PERKANTORAN	
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan
10	Penyediaan Makanan dan Minuman
11	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
12	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
13	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
14	Penyediaan Jasa Pengemudi Kantor
15	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2	Pengadaan Mebeleur
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Gedung Non Kantor
III PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	
1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
2	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan
IV PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
1	Koordinasi Pembangunan Perumahan dengan Lembaga/Badan Usaha
2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
V PROGRAM PERBAIKAN PERUMAHAN AKIBAT BENCANA ALAM/SOSIAL	
1	Fasilitasi dan Stimulasi Rehabilitasi Rumah Akibat Bencana Sosial
2	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
3	Biaya Operasional Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya (DAK Bidang Perumahan dan Permukiman)

URUSAN : Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

No	Uraian Prog/Kegiatan
KESEBANGPOL	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor
6	Penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan
7	Penyediaan Komponen Ins. Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan.
9	Penyediaan Makanan dan Minuman
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
12	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1	Pengadaan Pelengkapan Gedung Kantor
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
3	Pemeliharaan rutin / berkala Gedung Kantor
4	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/ perasional
5	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
6	Pemeliharaan rutin / berkala peralatan kantor
7	Pemeliharaan rutin / berkala mebeleur kantor
III	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
1	Cipta Kondisi Bidang Politik Ekonomi Sosial dan Budaya
2	Koordinasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
IV	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
1	Peningkatan Koordinasi Tim kewaspadaan Dini Daerah
2	Pencegahan dan Pembrantasan Narkoba
V	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
2	Peningkatan Pembinaan Pemantapan Kesadaran Bela Negara
3	Dialog / Forum Wawasan Kebangsaan
4	Sosialisasi Wawasan Kebangsaan
VI	Program Peningkatan dan Pembinaan Kehidupan Sosial Politik
1	Fasiltasi dan Koordinasi Forum-forum, Pembauran, Kerukunan, Kewarganegaraan dan Kebangsaan
2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan Ormas/ LSM/ Lembaga Nirlaba Lainnya
3	Koordinasi dan Pembinaan Organisasi Politik
4	Penunjang Operasional Penyaluran Bantuan Ormas/LSM/Lembaga nirlaba Lainnya / Organisasi Politik
5	Desk Pemilihan Presiden / Legislatif / Gubernur /Bupati / Kepala Desa
SATPOL PP	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1	Penyediaan jasa surat menyurat
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor
5	Penyediaan alat tulis kantor
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

No	Uraian Prog/Kegiatan
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9	Penyediaan makanan dan minuman
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1	Pengadaan peralatan gedung kantor
2	Pengadaan mebel
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
6	Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran
III	Program peningkatan disiplin aparatur
1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
V	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
1	Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan
2	Penertiban pedagang kaki lima
3	Patroli trantibum di Wilayah Kabupaten Klaten
4	Penertiban reklame, sepanduk dan baliho
5	Fasilitasi dan penunjang operasional kegiatan polisi
6	Dukungan Penyelenggaraan Pemilihan Legislatif/Presiden/Gubernur/Bupati/Kepala Desa
7	Pemetaan kawasan rawan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
8	Pelatihan Dasar Kesamaptaan
V1	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
1	Peningkatan koordinasi keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat
VII	Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
1	Peningkatan dan pembinaan Korps Musik dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
VIII	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
1	Optimalisasi pengamanan penertiban wilayah Kabupaten Klaten
2	Pemantapan keamanan wilayah dalam upaya perlindungan masyarakat
IX	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
1	Penertiban dan Penindakan terhadap pelanggaran Perda
2	Pembinaan penegakan Perda/Perbub
3	Operasi-operasi PGOT, WTS dan MIRAS
X	Program Peningkatan Penanganan Bencana Kebakaran
1	Peningkatan Kapasitas Petugas Pemadam Kebakaran
XI	Program Penanganan Darurat Bencana
1	Operasional Pemadam Kebakaran
XII	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan
1	Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal

URUSAN : SOSIAL

No	Uraian Prog/Kegiatan
DINSOS P3AKB	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1	Penyediaan jasa surat menyurat
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor
5	Penyediaan alat tulis kantor
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9	Penyediaan makanan dan minuman
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
12	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
13	Penyediaan jasa pengemudi kantor
14	Penyusunan perencanaan dan pelaporan
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2	Pengadaan peralatan gedung kantor
3	Pengadaan mebeleur
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
1	Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
2	Pemutakhiran Data Keluarga Miskin
3	Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai
4	Pemutakhiran Data Keluarga Miskin (DAK Bidang Sosial)
4	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
2	Penanganan mayat terlantar
3	Penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan
4	Rehabilitasi dan pembinaan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di luar Panti
5	Fasilitasi rehabilitasi bersumber daya masyarakat
6	Penunjang operasional penyaluran bantuan
7	Peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)
5	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
1	Fasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana
2	Pemberdayaan Taruna Siaga Bencana (Tagana)
6	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
1	Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
2	Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH)
3	Pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial

BPBD

No	Uraian Prog/Kegiatan
1	Program Pelayanan Administrasi perkantoran
1	penyediaan jasa surat menyurat
2	penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
3	penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4	Penyediaan Jasa Administrasi keuangan
5	Penyediaan alat tulis kantor
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9	penyediaan bahan logistik
10	Penyediaan makanan dan minuman
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
13	Penyediaan jasa pengamanan kantor
14	Penyediaan jasa pengemudi kantor
2	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
1	Pengadaan kendaraan dinas/operasional
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3	pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
4	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas/Operasional
5	Pemeliharaan rutin/berkala mebelair
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kebencanaan
7	fasilitasi pindah kantor
3	Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
1	Pelatihan dan simulasi pengurangan resiko bencana
2	Pembentukan dan Pengembangan Sekolah Siaga Bencana
3	peningkatan koordinasi forum penanggulangan bencana
4	Penyelenggaraan Sekolah Sungai
5	pembentukan desa tangguh bencana
6	penyusunan dokumen rencana penanggulangan bencana
4	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
1	Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
2	penyelenggaraan pelatihan penanganan pasca bencana
5	Program Penanganan Darurat Bencana
1	Koordinasi, Pemantauan dan Operasional penanganan Darurat Bencana
2	Pengembangan dan pemberdayaan Tim Reaksi Cepat (TRC)
3	Droping Air Bersih
4	Penyediaan Dana Siap Pakai
5	pengadaan sarana prasarana penanganan bencana
	BAGIAN KESRA
1	Program Peningkatan Keagamaan
1	Peningkatan program pelayanan jamaah haji
2	Peningkatan kualitas pendidikan keagamaan
3	Penyelenggaraan peringatan hari besar keagamaan
4	Penunjang operasional pengelolaan masjid pemerintah daerah
2	Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
1	Penanaman nilai-nilai kepahlawanan,keperintisan dan kejuangan
3	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

No	Uraian Prog/Kegiatan
1	Penunjang operasional bantuan
4	Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Penyakit Menular Seksual (PMS) Termasuk HIV/AIDS
1	Sosialisasi HIV/AIDS dan penyakit menular seksual

URUSAN : TENAGA KERJA

No	Uraian Prog/Kegiatan
DISPERINAHER	
1	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
1	Penyusunan data base tenaga kerja daerah
2	Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja
3	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)
4	Pembinaan Tenaga Kerja AKAD
2	Peningkatan Kesempatan Kerja
1	Penyusunan informasi bursa tenaga kerja
2	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja
3	Penyelenggaraan Bursa Tenaga Kerja
4	Pembinaan Lembaga PPTKIS, LPTKS dan BKK
3	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
1	Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial
2	Pembentukan dan Pemberdayaan Organisasi/Lembaga Serikat Pekerja
3	Pemberdayaan Lembaga Kerjasama (LKS) Tripartit
4	Operasional Dewan Pengupahan
5	Sosialisasi Upah Minimum
6	Penyelesaian Kasus PHI/PHK
7	Bimtek Pembuatan Peraturan Perusahaan

URUSAN : PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

No	Uraian Prog/Kegiatan
DINSOS P3AKB	
1	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
1	Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan anak (P2TP2A)
2	Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak
3	Advokasi Penguatan Kelembagaan PUG
4	Sosialisasi, Advokasi dan Pengembangan Sistem Data Gender dan Anak
5	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
2	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak
1	Penanganan dan Pencegahan korban kekerasan berbasis gender dan anak termasuk trafficking
2	Sosialisasi Deteksi Dini Kekerasan terhadap Anak
3	Advokasi Keadilan Restoratif
3	Program peningkatan peran serta Anak dan kesetaraan gender dalam pembangunan
1	Peningkatan koordinasi dan pemberdayaan Forum Anak
2	Pengembangan dan Replikasi Desa Layak Anak (DLA)
3	Peningkatan kemampuan dan akses berusaha bagi perempuan pada sumber daya ekonomi
4	Peningkatan peran serta Organisasi Wanita

URUSAN : PANGAN

No	Uraian Prog/Kegiatan
DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
I	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
1	Pengembangan cadangan pangan daerah
2	Pembinaan dan pengembangan desa mandiri/rawan pangan
3	Pengembangan diversifikasi pangan
4	Pembinaan dan pengembangan Lumbung pangan
5	Penyuluhan, Pengawasan dan Pembinaan Mutu dan Keamanan Pangan
6	Peningkatan dan Pemberdayaan Dewan Ketahanan Pangan
7	Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan pangan
8	Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)
9	Fasilitasi distribusi dan akses pangan
10	Pengembangan Rumah Pangan Lestari

URUSAN : LINGKUNGAN HIDUP

No	Uraian Prog/Kegiatan
DLHK	
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1	Penyediaan jasa surat menyurat
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor
5	Penyediaan alat tulis kantor
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9	Penyediaan makanan dan minuman
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
12	Penyediaan jasa pengamanan kantor
13	Penyediaan jasa pengemudi
14	Penyusunan perencanaan dan pelaporan
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA
15	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
16	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
17	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
18	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
19	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
20	Fasilitasi Peningkatan Kapasitas SDM Lingkungan
IV	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
21	Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan
22	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
23	Pembinaan Bank Sampah
24	Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah
25	Pengolahan Sampah 3R
V	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
26	Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
27	Pemantauan Kualitas Lingkungan
28	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
29	Pengelolaan B3 dan Limbah B3
30	Monitoring pelaksanaan ijin lingkungan
31	Operasional Laboratorium Lingkungan
32	Operasional perijinan

No	Uraian Prog/Kegiatan
33	Pembangunan Instalasi Pembuangan Air Limbah
VI	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
34	Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber - Sumber Air
35	Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
36	Penghijauan Jalan Dalam Kota
37	Pengadaan bibit tanaman penghijauan
VII	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
38	Pengembangan data dan Informasi lingkungan
39	Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah
VIII	PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)
40	Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
41	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
IX	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP
42	Peningkatan Sekolah Adiwiyata
43	Pembinaan Saka Kalpataru

1	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1	Peningkatan operasional dan pemeliharaan sarana pengelolaan prasarana persampahan
2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Tempat Pengelolaan Sampah
3	Pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA)
4	Pengadaan sarana prasarana pengelolaan persampahan
2	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
1	Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
2	Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
3	Pengadaan sarana prasarana Ruang Terbuka Hijau (RTH)

URUSAN : Administrasi Kependudukan dan Cakil

No	Uraian Prog/Kegiatan
DISDUKCAPIL	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Alat Tulis Kantor
6	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
9	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Bahan Logistik
10	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Penyediaan Makanan dan Minuman
11	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
12	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
13	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
14	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
15	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor
16	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur / Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
17	Program Penataan Administrasi Kependudukan / Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)
18	Program Penataan Administrasi Kependudukan / Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan
19	Program Penataan Administrasi Kependudukan / Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
20	Program Penataan Administrasi Kependudukan / Penataan Arsip Kependudukan
21	Program Penataan Administrasi Kependudukan / Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan
22	Program Penataan Administrasi Kependudukan / Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan Terpadu

URUSAN : Pemberdayaan Masyarakat Desa

No	Uraian Prog/Kegiatan
DISPERMASDES	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1	Penyediaan jasa surat menyurat
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor
4	Penyediaan alat tulis kantor
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
8	Penyediaan makanan dan minuman
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
11	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
14	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
15	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
16	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
III	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
17	Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)
1	Peningkatan Implementasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan (BBGRM)
18	Peningkatan Koordinasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD)
19	Fasilitasi penyusunan profil desa/kelurahan
20	Fasilitasi sistem informasi desa/SID
IV	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
21	Pembinaan Lembaga Ekonomi Masyarakat
22	Penguatan BP-SPAMS (Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi)
23	Peningkatan pembangunan kawasan pedesaan
V	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
24	TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD)
25	Peningkatan dan Penguatan Kelembagaan Posyandu
26	Peningkatan Perencanaan Partisipatif Pembangunan Desa
VI	Program Pemberdayaan dan Kesejahteraan keluarga
27	Penguatan kelembagaan kader pemberdayaan pembinaan kesejahteraan keluarga

No	Uraian Prog/Kegiatan
28	Peningkatan koordinasi pokja pedoman penghayatan pancasila dan gotong royong
29	Peningkatan koordinasi pokja pendidikan ketrampilan dan koperasi
30	Peningkatan koordinasi pokja sandang, pangan dan tata laksana rumah tangga
31	Peningkatan koordinasi pokja kesehatan, perencanaan sehat dan pelestarian lingkungan hidup
VII	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan
VIII	Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa
32	Sosialisasi Peraturan Pemerintah tentang Desa
33	Pendampingan Penyusunan Peraturan Desa
34	Peningkatan dan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa
35	Pendataan dan Inventarisasi Aset Desa
36	Evaluasi penilaian perkembangan pembangunan desa/kelurahan

URUSAN : PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

No	Uraian Prog/Kegiatan
DINSOS P3AKB	
1	Program Keluarga Berencana
	Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluhan KB
	Pembangunan Gedung/Balai Penyuluhan Keluarga Berencana
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Klinik Pelayanan Keluarga Berencana
	Operasional Balai Penyuluhan Keluarga Berencana
	Operasional Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi ke Fasilitas Kesehatan
	Operasional Penggerakan Program KKBPK di Kampung KB
	Operasional Pembinaan Program KB bagi masyarakat oleh Kader (PPKBD/Sub PPKBD)
	Dukungan Media KIE dan Manajemen
	Pengadaan Sarana KIE Kit dan Media Lini Lapangan
	Pengadaan Sarana Pendataan
	Pelayanan Kontrasepsi
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Percontohan
	Peningkatan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit Stunting (DAK Bidang Kesehatan)
2	Program Kesehatan Reproduksi Remaja
	Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja
	Peningkatan kapasitas Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja
3	Pembinaan Keluarga Sejahtera
	Peningkatan kemitraan dengan stakeholder dan mitra kerja
	Pengembangan dan pembinaan ketahanan keluarga
	Penyediaan data dan informasi keluarga
	Pembinaan Kelangsungan Hidup Bayi dan Anak (KHIBA)

URUSAN : PERHUBUNGAN

No	Uraian Prog/Kegiatan
DINAS PERHUBUNGAN	
I PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	
1	Penyediaan jasa surat menyurat
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor
5	Penyediaan alat tulis kantor
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9	Penyediaan makanan dan minuman
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
12	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
13	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
II PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
2	Pengadaan peralatan gedung kantor
3	Pengadaan mebeleur
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
7	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
8	Pengadaan Papan Informasi
III PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ	
1	Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor
2	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan
3	Rehabilitasi dan pemeliharaan traffic light
4	Rehabilitasi/pemeliharaan Marka Jalan
5	Rehabilitasi/pemeliharaan rambu-rambu lalu lintas
IV PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN	
1	Uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang
2	Pengumpulan dan Analisis Data Base Pelayanan Angkutan
3	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan
4	Fasilitasi mudik lebaran
5	Pemilihan awak kendaraan umum teladan
6	Pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas jalan
7	Penertiban dan pengawasan terminal
V PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS	
1	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

No	Uraian Prog/Kegiatan
2	Pengamanan lalu lintas jalan
3	Operasional penertiban angkutan galian golongan C
4	Loma tertib lalu lintas / wahana tata nugraha
5	Car Free Day Kabupaten
6	Koordinasi forum LLAJ
7	Pengadaan dan pemasangan guardrail
8	Pengadaan dan pemasangan traffic light
9	Pengendalian operasional lalu lintas
10	Pengadaan dan pemasangan cermin tikungan
11	Pengadaan dan pemasangan Lampu Kedip
12	Pengelolaan tempat parkir
13	Pengadaan dan pemasangan guardrail (DAK Bidang Jalan)

URUSAN : KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

No	Uraian Prog/Kegiatan
DINAS KOMINFO	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Keuangan
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan
6	Penyediaan Makanan dan Minuman
7	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
8	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
9	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2	Pengadaan Mebeleur
3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
6	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Komunikasi dan Informasi
III	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1	Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
2	Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi
3	Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi
4	Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
5	Penataan, Pembinaan Pengawasan dan Sosialisasi Perda Internet
6	Fasilitasi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) dan Lembaga Komunikasi Masyarakat (LKM)
7	Penyusunan Dokumen Mikrocell Menara Telekomunikasi
IV	Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
1	Pelatihan SDM Dalam Bidang Komunikasi dan Informasi
V	Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media
1	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
2	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
BAGIAN HUMAS	
1	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
a	Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi
b	Penunjang Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL)
2	Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media
a	Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah
b	Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
c	Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat
d	Peningkatan Koordinasi Pemerintah Daerah Dengan Mass Media

URUSAN : KOPERASI DAN UKM

No	Uraian Prog/Kegiatan
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN UKM	
I	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
1	Pelatihan penumbuhan wirausaha baru
2	Pembinaan dan pemberdayaan UMKM
II	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
1	Penyelenggaraan pameran bagi usaha mikro kecil menengah
III	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
1	Pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan koperasi
2	Penyelenggaraan pelatihan manajemen koperasi

URUSAN : PENANAMAN MODAL

No	Uraian Prog/Kegiatan
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran/
1	Penyediaan jasa surat menyurat
2	Penyediaan SDA
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor
4	Penyediaan jasa ATK
5	Penyediaan jasa barang cetakan dan pengadaan
6	Penyediaan jasa komponen instalansi listrik
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan
8	Penyediaan makanan dan minuman
9	Rakor dan konsultasi keluar daerah
10	Rakor dan konsultasi kedalam daerah
11	Penyediaan jasa pengamanan kantor
12	Penyediaan jasa pengemudi kantor
13	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran/ penyediaan jasa tenaga administrasi kantor
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur/
1	pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3	Penataan lingkungan kantor
III	Program Peningkatan Promosi dan kerjasama Investasi/
1	Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah
2	Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA
3	Penyelenggaraan Promosi Investasi
IV	Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi investasi
1	/Peningkatan koordinasi kerjasama di bidang investasi
2	Peningkatan dan pengembangan pelayanan perizinan terpadu
3	PPengendalian perizinan dan non perizinan perizinan PM
BAGIAN PEREKONOMIAN	
I	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
1	Koordinasi antar Lembaga dalam Pengendalian Pelaksanaan Investasi PMDN/PMA
2	Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah

URUSAN : KEPEMUDAAN DAN OLAMRAGA

No	Uraian Prog/Kegiatan
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAMRAGA	
I	PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN
1	Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan
II	PROGRAM UPAYA PENCEGAHAN NARKOBA
1	Pemberian Penyuluhan tentang Bahaya Narkoba bagi Pemuda
III	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAMRAGA
1	Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga yang Berdedikasi dan Berprestasi
2	Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Olahraga
3	Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
4	Pengiriman Kontingen Olahraga
IV	PROGRAM PEMBINAAN PEMUDA DAN OLAMRAGA
1	Penyelenggaraan Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI)
2	Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga Tingkat Kabupaten
BAGIAN KESRA	
I	Program Pembinaan Pemuda Dan Olahraga
1	Penyelenggaraan kegiatan olahraga tingkat kabupaten

URUSAN : STATISTIK

No	Uraian Prog/Kegiatan
DINAS KOMINFO	
1	Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah
1	Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah

URUSAN : PERSANDIAN

No	Uraian Prog/Kegiatan
DINAS KOMINFO	
I	Program Peningkatan Persandian Daerah
1	Identifikasi Jenis Informasi dan Persandian
2	Implementasi Operasional Persandian oleh Perangkat Daerah

URUSAN : KEBUDAYAAN

No	Uraian Prog/Kegiatan
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA	
I	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA
1	Optimalisasi Pengelolaan Situs dan Benda Cagar Budaya
2	Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Nilai-nilai Tradisional
II	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA
1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya
2	Pengiriman Tim Kesenian
3	Kirab Budaya dan Pentas Seni
4	Pagelaran Wayang Kulit
5	Penyebarluasan Informasi Kekayaan Budaya Daerah
III	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA
1	Penyelenggaraan Dialog Kebudayaan

URUSAN : PERPUSTAKAAN

No	Uraian Prog/Kegiatan
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	
I	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1	Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar
2	Pengembangan minat dan budaya baca
3	Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

URUSAN : KEARSIPAN

No	Uraian Prog/Kegiatan
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1	Penyediaan jasa surat menyurat
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor
5	Penyediaan alat tulis kantor
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8	Penyediaan peralatan rumah tangga
9	Penyediaan makanan dan minuman
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
12	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
13	Penyediaan jasa pengemudi kantor
14	Penyusunan perencanaan dan pelaporan
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
15	Pengadaan mebeleur
16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
18	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
III	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan
19	Audit dan Pengawasan Kearsipan
IV	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
20	Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah
21	Penilaian Arsip Inaktif Kabupaten Klten
22	Pameran Arsip dan Perpustakaan Tingkat Provinsi dan kabupaten
V	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi
23	Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instansi pemerintah/swasta

URUSAN : KELAUTAN DAN PERIKANAN

No	Uraian Prog/Kegiatan
DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
I	Program pengembangan budidaya perikanan
1	Pengembangan Bibit Ikan Unggul
2	Pendampingan pada Kelompok Tani Pembudidaya Ikan
3	Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
4	Rehabilitasi/ Pengembangan Sarana Prasarana Fisik Kawasan Budidaya Air Tawar (DAK bidang Kelautan dan Perikanan)
II	Program pengembangan perikanan tangkap
1	Pendampingan pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap
III	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
1	Pembinaan Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

URUSAN : PARIWISATA

No	Uraian Prog/Kegiatan
DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1	Penyediaan jasa Surat menyurat
2	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya Air & Listrik
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6	Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang - undangan
7	Penyediaan Makanan dan Minuman
8	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke luar daerah
9	Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Dalam daerah
10	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
11	Penyediaan Jasa Pengemudi Kantor
12	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
3	Pemeliharaan Rutin /berkala Gedung Kantor
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor & Rumah Tangga
3	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA
1	Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pemasaran Pariwisata
2	Pengembangan Jaringan Kerjasama Promosi Pariwisata
3	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di dalam dan di luar negeri
4	Pembinaan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS)
5	Penyelenggaraan Event Pariwisata
6	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Destinasi Pariwisata (DAK Non Fisik)
4	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
1	Pengembangan Daerah Tujuan Wisata
2	Pemeliharaan Obyek Wisata
3	Operasional Pengelolaan Obyek Wisata
4	Penataan Obyek Wisata
5	Pengelolaan Obyek Wisata
6	Penataan Obyek Wisata (DAK Pariwisata)
5	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN
1	Fasilitasi Pembentukan Forum Komonikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya
2	Pembinaan dan Pengembangan ADWINDO
3	Pemilihan Mas dan Mbak Klaten

URUSAN : PERTANIAN

No	Uraian Prog/Kegiatan
DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6	Penyediaan Alat Tulis Kantor
7	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
9	Penyediaan Makanan dan Minuman
10	Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
11	Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
12	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
13	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
5	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
7	Pengadaan Papan Informasi
8	Penataan Lingkungan Kantor
III	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
1	Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis
2	Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani
3	Fasilitasi Kelompok Tani Berbasis Gender
4	Pengadaan Alsintan
5	Pembinaan Unit Pengelola Jasa Alsintan (UPJA)
6	Pelatihan Manajemen Agribisnis Tembakau (DBHCHT)
7	Penerapan pengendalian hama terpadu
IV	Program Peningkatan Ketahanan Pangan
1	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kebijakan Subsidi Pertanian
2	Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija
3	Pengembangan Perbenihan/ Perbibitan
4	Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Perkebunan, Produk Pertanian
5	Pengembangan Sumber-sumber Air Untuk Irigasi (DAK bid.Pertanian)
6	Peningkatan Sarana/Prasarana Penyuluhan Pertanian (DAK Bidang Pertanian)
7	Pengelolaan Lahan Sawah dan Air

No	Uraian Prog/Kegiatan
V	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
1	Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah
VI	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
1	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (DBHCHT)
2	Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan
3	Pengembangan Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura
4	Pembangunan Sarana Infrastruktur Pertanian (DBHCHT)
5	Penanganan Pasca Panen Tembakau (DBHCHT)
VII	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan
1	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian /Perkebunan
VIII	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
1	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
2	Penanggulangan Wabah Penyakit AI
IX	Program peningkatan produksi hasil peternakan
1	Pembibitan dan Perawatan Ternak
2	Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat
3	Penyuluhan Pengelolaan Bibit Ternak yang Didistribusikan Kepada Masyarakat
X	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
1	Penyuluhan Distribusi Pemasaran Atas Hasil Produksi Peternakan Masyarakat
2	Pengembangan Agribisnis Peternakan
3	Pengembangan Aneka Pengolahan Produk Asal Ternak
4	Peningkatan Sarana Prasarana Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R)
BAGIAN PEREKONOMIAN	
I	Peningkatan Ketahanan Pangan
1	Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Pertanian
2	Fasilitasi dan Koordinasi di Bidang Cukai Tembakau

URUSAN : Energi dan Sumberdaya Mineral

No	Uraian Prog/Kegiatan
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
I	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
1	Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)
2	Rehabilitasi/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)
3	Pendataan dan pembayaran pajak beban listrik penerangan jalan umum (PJU)
BAGIAN PEREKONOMIAN	
II	Pembinaan dan Pengawasan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
1	Peningkatan Koordinasi Bidang Pertambangan dan Energi

URUSAN : PERDAGANGAN

No	Uraian Prog/Kegiatan
DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1	Penyediaan jasa surat menyurat
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor
5	Penyediaan alat tulis kantor
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9	Penyediaan makanan dan minuman
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
12	Penyediaan jasa pengamanan kantor
13	Penyediaan jasa pengemudi kantor
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
14	Pengadaan peralatan gedung kantor
15	Pengadaan mebeleur
16	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
17	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
18	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
19	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
20	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
III	Program Perlindungan Konsumen dan Perlindungan Perdagangan
21	Operasionalisasi dan Pengembangan UPT kemetrolgian daerah
22	Pensertifikasian hak merk
23	Sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga (P-IRT)
24	Pengawasan, pemantauan dan penyampaian informasi tembakau yang dilekati pita cukai palsu
IV	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
26	Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha perdagangan
27	Penyelenggaraan pasar murah
28	Pembangunan pasar
29	Revitalisasi/pemeliharaan bangunan pasar
30	Pembangunan pasar darurat
31	Penyusunan profil pasar
32	Revitalisasi pasar
33	Pembinaan dan pengawasan pengelolaan pasar

No	Uraian Prog/Kegiatan
V	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
34	Pembinaan dan pemberdayaan pedagang kaki lima
BAGIAN PEREKONOMIAN	
I	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
1	Peningkatan Koordinasi dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Pokok

URUSAN : PERINDUSTRIAN

No	Uraian Prog/Kegiatan
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
I	Pelayanan Administrasi Perkantoran
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan
3	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
4	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran
5	Penyediaan alat tulis kantor
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7	Penyediaan peralatan rumah tangga
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9	Penyediaan makanan dan minuman
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
12	Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan
II	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1	Pengadaan peralatan gedung kantor
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
III	Pengembangan industri kecil dan menengah
1	Pembinaan Industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri
2	Pembinaan dan Pelatihan Industri Kreatif
3	Pembinaan, Pemantauan dan Pengawasan Usaha Industri
IV	Peningkatan kemampuan teknologi industri
1	Pembinaan kemampuan teknologi industri
2	Temu Kemitraan Usaha IKM Kabupaten Klaten
BAGIAN PEREKONOMIAN	
I	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
1	Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Pengembangan Perindustrian

URUSAN : TRANSMIGRASI

No	Uraian Prog/Kegiatan
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
I	Pengembangan wilayah transmigrasi
1	Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi

URUSAN : PENUNJANG PEMERINTAHAN URUSAN PENGAWASAN

No	Uraian Prog/Kegiatan
INSPEKTORAT KABUPATEN	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.1	Penyediaan jasa surat menyurat
1.2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.3	Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.4	Penyediaan alat tulis kantor
1.5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
1.6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.8	Penyediaan makanan dan minuman
1.9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
1.11	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2.2	Pengadaan peralatan gedung kantor
2.3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2.4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
2.6	Penataan Lingkungan Kantor
2.7	Fasilitasi Pindahan Kantor
3	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
3.1	Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala
3.2	Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah
3.3	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH
3.4	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan
3.5	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif
3.6	Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan
3.7	Rencana Tindak Pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
3.8	Penyelesaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)
3.9	Pengendalian Gratifikasi
3.10	Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar
3.11	Penegakan Integritas penyelenggaran pemerintah daerah
3.12	Pembinaan reformasi birokrasi
3.13	Koordinasi Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)
3.14	Peningkatan Kapabilitas APIP
3.15	Layanan Konsultasi

No	Uraian Prog/Kegiatan
4	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan
4.1	Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan
4.2	Peningkatan pembinaan administrasi tenaga pemeriksa dan aparaturngawasan
5	Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
5.1	Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

URUSAN : PENUNJANG PEMERINTAHAN URUSAN PERENCANAAN

No	Uraian Prog/Kegiatan
BAPPEDA	
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
1	Penyediaan jasa surat menyurat
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan
4	Penyediaan alat tulis kantor
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7	Penyediaan peralatan rumah tangga
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9	Penyediaan makanan dan minuman
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
12	Penyediaan jasa tenaga administrasi/ teknis perkantoran
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
1	Pengadaan peralatan gedung kantor
2	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
3	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional
4	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
5	Pemeliharaan rutin/ berkala meubeler
6	Fasilitasi pindah kantor
7	Pengadaan meubeler
III Program Perencanaan Sosial dan Budaya	
1	Koordinasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya
2	Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
3	Koordinasi dan fasilitasi bidang fisik dan prasarana
IV Program Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	
1	Pelaporan Pembangunan Daerah
2	Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Perencanaan
V Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	
1	Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi
VI Program Perencanaan Pembangunan Daerah	
1	Penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
2	Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
3	Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
4	Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA & PPAS)

No	Uraian Prog/Kegiatan
5	Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA & PPAS-P)
6	Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
7	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Bankeu Prov)
8	Updating sistem informasiPerencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD)
9	Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana
BAGIAN PEMERINTAHAN	
I	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
1	Koordinasi Penyelesaian Masalah perbatasan antar Daerah
2	Pembakuan Nama Rupa Bumi

URUSAN : PENUNJANG PEMERINTAHAN URUSAN KEUANGAN

No	Uraian Prog/Kegiatan
BPKD	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor.
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
7	Penyediaan Makanan dan Minuman.
8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah.
10	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
11	Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah
12	Asuransi Gdg Kantor & Rumah Dinas.
13	Asuransi Kendaraan Dinas
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
1	Pengadaan peralatan gedung kantor
2	Pengadaan mebeleur
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor.
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan gedung kantor
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala bangunan gedung Non kantor
8	Penataan Arsip
9	Pemeliharaan panggung Baliho dan Spanduk
III	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
1	Penyusunan standar satuan harga
2	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah
3	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD
4	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD
5	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD
6	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD
7	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
8	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
9	Penelitian DPA-SKPD
10	Penelitian DPA-SKPD Perubahan
11	Penyusunan Surat Penyediaan Dana.
12	Penyusunan Anggaran Kas Pemerintah Daerah

No	Uraian Prog/Kegiatan
13	Penerbitan SP2D
14	Pengelolaan Administrasi Kasda
15	Pengelolaan Administrasi Gaji
16	Pendataan Pajak Daerah
17	Pemutakhiran Data Pajak Daerah
18	Operasional Pencetakan Ketetapan Pajak Daerah
19	Penyuluhan Pendapatan Daerah (Pajak dan PBB)
20	Pemeriksaan Pajak Daerah
21	Penyampaian Ketetapan Pajak Daerah
22	Intensifikasi Pendapatan Asli Daerah
23	Pemberian Penghargaan Pajak Daerah
24	Pembinaan Bendahara Pengeluaran SKPD
25	Penertiban Pemasangan dan Penempatan Reklame
26	Penyusunan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
27	Sosialisasi Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
28	Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Daerah
29	Pengelolaan TPTGR Kabupaten Klaten
30	Rekonsiliasi Aset Daerah
31	Pengelolaan Aset Daerah
32	Sertifikasi Aset Pemerintah Kabupaten Klaten
33	Pembayaran SPPT PBB Aset Pemerintah Daerah
34	Pembinaan Pengelolaan Aset Daerah
35	Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis Daerah
36	Koordinasi Pengelolaan Keuangan Daerah
37	Penyusunan Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah (DK-BMD) dan Dokumen Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKP-BMD)
38	Pengelolaan Data Keuangan Daerah
39	Pengembangan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Pendapatan Daerah

URUSAN : PENUNJANG PEMERINTAHAN URUSAN KEPEGAWAIAN DAN URUSAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

No	Uraian Prog/Kegiatan
BKPPD	
I Pelayanan Administrasi Perkantoran	
1	Penyediaan Jasa surat Menyurat
2	Penyediaan Alat tulis Kantor
3	Penyediaan Brg cetakan & Penggandaan
4	Penyediaan Makanan dan Minuman
5	Rapat Rapat Koordinasi & Konsultasi ke luar Daerah
6	Rapat Rapat Koordinasi & Konsultasi dalam Daerah
7	Penyusunan Perencanaan Dan Pelaporan
II Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	
1	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
3	Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
4	Pemelhn Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Ktr
5	Pemelhn Rtn / Berkala Peralatan Gedung Ktr
III Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	
1	Seleksi Penerimaan Calon ASN
2	Penempatan PNS
3	Pengembangan Simpeg Daerah
4	Pemberian Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi
5	Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS
6	Monitoring dan inspeksi Mendadak PNS
7	Pengelolaan Arsip Kepegawaian
8	Penyelesaian Administrasi Tugas Belajar, ijin Belajar dan Ijin Gelar
9	Pengiriman Ujian Dinas Kenaikan Pangkat
10	Pengiriman Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijasah
11	Penyelesaian Kenaikan Pangkat PNS Satu Atap
12	Penyelesaian Surat Keputusan Pensiun PNS Kab Klaten
13	Pangkatan CPNS ke PNS dan penjarangan gaji
14	Penyelaian LKHPN bagi Pejabat Struktural
15	Penyelesaian Administrasi Umum Kepegawaian
16	Evaluasi Kinerja
17	Pemutakhiran Data Kepegawaian
18	Penyusunan Formasi Kepegawaian
19	Pengembangan dan Pembinaan Jabatan Fungsional
20	Pengelolaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK)
IV Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	
1	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan Bagi Calon PNS Daerah

No	Uraian Prog/Kegiatan
2	Pendidikan & Pelatihan Struktural Bagi PNS Daerah
3	Pendidikan Manajemen Kepegawaian dan Pelatihan teknis tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah
4	Pendidikan & Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah
5	Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan Kepegawaian
6	Uji Kompetensi Jabatan
7	Pembekalan PNS yang akan memasuki Purna Tugas

URUSAN : PENUNJANG PEMERINTAHAN URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

No	Uraian Prog/Kegiatan
BAPPEDA	
I	Program Penelitian dan Pengembangan
1	Koordinasi Penelitian dan Pengembangan Daerah
2	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Daerah
3	Penguatan Sistem Inovasi Daerah
4	Penelitian Perspektif Masyarakat terhadap Kualitas Pembangunan

URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

No	Uraian Prog/Kegiatan
SEKRETARIAT DPRD	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik..
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4	Penyediaan jasa Kebersihan Kantor
5	Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
7	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
8	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
10	Penyediaan Makanan Dan Minuman
11	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah
12	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi dalam Daerah
13	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
14	Penyediaan Jasa jaminan Pemeliharaan Kesehatan
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/dinas
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
3	Pemeliharaan Rutin/Rumah Jabatan
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan rumah jabatan/din.
8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebelair
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1	Penggandaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
2	Penggandaan Pakaian khusus hari-hari tertentu
IV	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
1	Pembahasan Raperda
2	Hearing/Dialog Dan Koordinasi Dengan Toga/Tomas Dan Eksekutif
3	Rapat-Rapat Paripurna
4	Reses
5	Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD
6	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
7	Penyusunan Produk Hukum

No	Uraian Prog/Kegiatan
8	Penyusunan Risalah
9	Fasilitasi Kegiatan Alat Kelengkapan DPRD
10	Fasilitasi Kegiatan Fraksi DPRD
11	Fasilitasi Rumah Jabatan Pimpinan DPRD
12	Penyebarluasan informasi lembaga perwakilan rakyat daerah
13	Penyusunan Profil
DISKOMINFO	
I	Program Intensifikasi Penanganan Pengaduan Masyarakat
1	Optimalisasi Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat

URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

No	Uraian Prog/Kegiatan
BAGIAN PEMERINTAHAN	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1	Penyediaan alat tulis kantor
2	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
3	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4	Penyediaan makanan dan minuman
5	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
6	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
III	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
1	Rapat Koordinasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
2	Penyusunan Informasi dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
3	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah
IV	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
1	Peningkatan koordinasi kerjasama antar daerah
V	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
1	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
2	Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

No	Uraian Prog/Kegiatan
BAGIAN LAYANAN PENGADAAN	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1	Penyediaan jasa surat menyurat
2	Penyediaan alat tulis kantor
3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
5	Penyediaan makanan dan minuman
6	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan dinas/operasional
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
III	Program Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan
1	Pembinaan Kompetensi Teknis
IV	Peningkatan Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa
1	Penyusunan Peraturan Bupati Klaten tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan
2	Penunjang operasional Unit Informasi Pembangunan
3	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

No	Uraian Prog/Kegiatan
BAGIAN PEMBANGUNAN	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
2	Rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
3	Rapat koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4	Pengadaan peralatan gedung kantor
5	Pengadaan Mebeleur
6	Pemeliharaan RutinBerkala Kendaraan Dinas/Operasional
7	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
8	Sosialisasi Peraturan Per UU
9	Pembinaan Kompetensi Teknis
IV	Program Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan
10	Penyusunan Peraturan Bupati Klaten tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan/proyek di kabupaten klaten
11	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan
12	Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan
13	Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pembangunan
14	Pengendalian pelaksanaan pembangunan

URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

No	Uraian Prog/Kegiatan
BAGIAN KESRA	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1	Penyediaan jasa surat menyurat
2	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kantor
3	Penyediaan jasa alat tulis kantor
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
6	Penyediaan makan dan minum
7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
9	Penyusunan perencanaan dan pelaporan
2	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
1	Pengadaan Peralatan gedung kantor
2	Pengadaan mebeleur
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

No	Uraian Prog/Kegiatan
BAGIAN PEREKONOMIAN	
I	Pelayanan Administrasi Perkantoran
1	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
2	Penyediaan Alat Tulis Kantor
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
5	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
II	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

No	Uraian Prog/Kegiatan
BAGIAN HUMAS	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
b	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
c	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
d	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
e	Penyediaan Alat Tulis Kantor
f	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
g	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan
h	Penyediaan Makanan dan Minuman
i	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
j	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
k	Penyediaan Jasa Tenaga Keprotokoleran
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
b	Pengadaan Mebeleur
c	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
d	Pemeliharaan Rutin/Berkala Bangunan Gedung Non Kantor
e	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Komunikasi dan Informasi
f	Penataan Lingkungan Kantor
3	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
a	Peningkatan Keprotokolan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

No	Uraian Prog/Kegiatan
BAGIAN ORGANISASI	
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
1	Penyediaan jasa surat menyurat
2	Penyediaan alat tulis kantor
3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
4	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
5	Penyediaan makanan dan minuman
6	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
7	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2	Pengadaan peralatan gedung kantor
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
3 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (PK, IKU, LKjIP Setda) (2016 belum ada)
2	Pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (PK, IKU, LKjIP Kabupaten)
4 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	
1	Peningkatan dan pengembangan budaya kerja
2	Peningkatan pengelolaan aparatur
3	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
4	Penyusunan Laporan Reformasi Birokrasi
5 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	
1	Penyusunan Standar Prosedur dan Metode Kerja
2	Pembinaan dan Pengembangan Pelayanan Publik
3	Penyusunan Analisis Jabatan
4	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah/Lembaga Non Struktural
5	Penyusunan evaluasi jabatan

URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

No	Uraian Prog/Kegiatan
BAGIAN HUKUM	
I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor
2	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4	Penyediaan Makan dan Minuman
5	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi luar daerah
6	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah
7	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	
8	Pengadaan peralatan gedung kantor
9	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas / Operasional
10	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
11	Penataan Kearsipan
III Penataan Peraturan Perundang-undangan	
12	Kajian Peraturan Perundang-undangan yang baru lebih tinggi dan keserasian dengan peraturan perundang-undangan
13	Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah
14	Pengembangan System JDIH
15	Evaluasi Produk Hukum Daerah
16	Penyusunan Prolegda
IV Penyuluhan dan Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM	
17	Penanganan Perkara/gugatan Perdata, Perkara TUN dan penghormatan HAM
18	Rencana Aksi HAM

URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

No	Uraian Prog/Kegiatan
BAGIAN UMUM	
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1	Penyediaan jasa surat menyurat
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4	Penyediaan jasa administrasi keuangan
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor
6	Penyediaan alat tulis kantor
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9	Penyediaan peralatan rumah tangga
10	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
11	Penyediaan bahan logistik
12	Penyediaan makanan dan minuman
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
15	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
16	Penyediaan jasa pengemudi kantor
17	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
18	Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
19	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
20	Pengadaan peralatan gedung kantor
21	Pengadaan mebeleur
22	Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan
23	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
24	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
25	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan/dinas
27	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
30	Penataan Lingkungan Kantor
III	Program peningkatan disiplin aparatur
31	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
IV	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah
32	Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan
33	Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri
34	Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah
35	Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
36	Penyediaan Biaya Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
37	Fasilitasi Persiapan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

OPD : KECAMATAN BAYAT

No	Uraian Prog/Kegiatan
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8	Penyediaan Makanan Dan Minuman
9	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
10	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah
11	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
3	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / operasional
4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubelair
III	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
1	Peningkatan Koordinasi Adm. Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan.
2	Peningkatan Pembinaan Adm. Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
3	Peningkatan Fasilitas Adm. Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
4	Penunjang Operasional Penyampaian Bantuan Keuangan
5	Fasilitas 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan
7	Penyelenggaraan Sambang Warga
IV	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban umum Kecamatan
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
V	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan.
3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan.
4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
5	Lomba Tertib Administrasi Desa
6	Koordinasi Pengisian Perangkat Desa

URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

OPD : KECAMATAN CAWAS

No	Uraian Prog/Kegiatan
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1	Penyediaan jasa surat menyurat
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor
5	penyediaan alat tulis kantor
6	penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8	Penyediaan makanan dan minuman
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
11	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
III	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, PEMBINAAN DAN FASILITASI ADMINISTRASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan
7	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
8	Penyelenggaraan Sambang Warga
IV	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, PEMBINAAN, FASILITASI ADMINISTRASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KECAMATAN
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
V	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, PEMBINAAN DAN FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintah Kecamatan
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintah Kecamatan
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan

URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

OPD : KECAMATAN CEPER

No	Uraian Prog/Kegiatan
I	Program pelayanan administrasi perkantoran
1	Penyediaan jasa surat menyurat
2	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
3	Penyediaan administrasi keuangan
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor
5	Penyediaan alat tulis kantor
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7	Penyediaan komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor
8	Penyediaan makanan dan minuman
9	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
10	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
11	Penyediaan jasa pengamanan kantor
II	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1	pengadaan peralatan gedung kantor
2	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas/Jabatan
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kendaraan dinas/operasional
5	Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Kantor dan rumah tangga.
III	Program Program Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan di Kecamatan.
1	Peningkatan Koordinasi administrasi Pemberdayaan Masy Desa / Kel di kec.
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kel di Kec.
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kel di Kec.
4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
6	Penyusunan Profil kecamatan
7	Penyelenggaraan sambang warga
IV	Program Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan fasilitasi Administrasi Ketentraman dan ketertiban umum di kecamatan
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Trantib Umum Kecamatan
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Trantib umum Kecamatan
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Trantib umum Kecamatan
V	Program Peningkatan Koordinasi Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata pemerintahan Kecamatan

No	Uraian Prog/Kegiatan
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan
4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan

URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

OPD : KECAMATAN DELANGGU

No	Uraian Prog/Kegiatan
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor
5	Penyediaan alat tulis kantor
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7	Penyediaan makanan dan minuman
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
10	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
11	Penyusunan perencanaan dan pelaporan
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
12	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
13	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
14	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
III	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
15	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
16	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
17	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
18	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
19	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
20	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
21	Penyelenggaraan Sumbang Warga
IV	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
22	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
23	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
24	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
25	Pengembangan dan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL)
V	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
26	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
27	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
28	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
29	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
30	Lomba Tertib Administrasi Desa

URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

OPD : KECAMATAN GANTIWARNO

No	Uraian Prog/Kegiatan
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1	Penyediaan jasa surat menyurat
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor
5	Penyediaan alat tulis kantor
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8	Penyediaan makanan dan minuman
9	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
11	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
12	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1	Pengadaan mebeleur
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
III	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan
7	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
8	Penyelenggaraan Sumbang Warga
IV	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
V	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
5	Lomba Tertib Administrasi Desa

URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**OPD : KECAMATAN JATINOM**

No	Uraian Prog/Kegiatan
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1	Penyediaan jasa surat menyurat
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor
5	Penyediaan alat tulis kantor
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7	Penyediaan makanan dan minuman
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
10	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1	Pengadaan mebeleur
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
4	Penataan Lingkungan Kantor
III	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
4	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
5	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan
6	Penyelenggaraan Sambang Warga
IV	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
V	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
5	Lomba Tertib Administrasi Desa

URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

OPD : KECAMATAN JOGONALAN

No	Uraian Prog/Kegiatan
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1	Penyediaan jasa surat menyurat
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor
4	Penyediaan alat tulis kantor
5	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
7	Penyediaan makanan dan minuman
8	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
9	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
10	Penyediaan jasa pengamanan kantor
11	Penyediaan Jasa tenaga Administrasi/teknis Perkantoran
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
III	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan
7	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
8	Penyelenggaraan Sumbang Warga
IV	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
V	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
2	Jumlah Kegiatan Pembinaan Tata Pemerintahan
3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan

URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

OPD : KECAMATAN JUWIRING

No	Uraian Prog/Kegiatan
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1	Terwujudnya Penyediaan Jasa Surat menyurat (bulan)
2	Terwujudnya Penyediaan Jasa Komunikasi, Air dan Listrik
3	Terwujudnya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor (bulan)
4	Terwujudnya Penyediaan Alat Tulis Kantor (bulan)
5	Terwujudnya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan (bulan)
6	Terwujudnya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan (bulan)
7	Terwujudnya Penyediaan Makanan dan Minuman (bulan)
8	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah (bulan)
9	Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi luar daerah (bulan)
10	Terwujudnya Penyediaan Jasa pengamanan Kantor (bulan)
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1	Pengadaan peralatan gedung kantor
2	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
6	Pemeliharaan rutin /berkala mebeleur
7	Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor
8	Penataan Lingkungan Kantor
III	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Administrasi PMD
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan di Kecamatan
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan Kecamatan
3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan Kecamatan
4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan
7	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
8	Penyelenggaraan Sambang Warga
IV	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Trantibum
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
V	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Tapem
1	Peningkatan Koordinasi Tata Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
2	Peningkatan Pembinaan Tata Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
3	Peningkatan Fasilitas Tata Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
5	Lomba Tertib Administrasi Desa
6	Koordinasi Pengisian Kepala Desa

No	Uraian Prog/Kegiatan
7	Koordinasi Pengisian Perangkat Desa

URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

OPD : KECAMATAN KALIKOTES

No	Uraian Prog/Kegiatan
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1	Penyediaan jasa surat menyurat
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3	Penyediaan Jasa administrasi keuangan
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor
5	Penyediaan alat tulis kantor
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7	Penyediaan makanan dan minuman
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
10	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2	Pengadaan mebeleur
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
5	Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor
III	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
5	Pembinaan 10 Program PKK Tk Kecamatan
6	Penyusunan profil desa/kelurahan/kecamatan
7	Penyelenggaraan sambang warga
8	Penyelenggaraan musrenbang tk kecamatan
IV	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
1	Peningkatan koordinasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan
2	Peningkatan pembinaan administrasi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan
3	Peningkatan fasilitasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan
V	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
5	Lomba tertib administrasi desa

URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

OPD : KECAMATAN KARANGANOM

No	Uraian Prog/Kegiatan
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7	Penyediaan Makanan dan Minuman
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar daerah
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
10	Penyediaan jasa pengamanan kantor
11	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran
II	Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
III	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
1	Peningkatan koordinasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan di kecamatan
2	Peningkatan pembinaan administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan kecamatan
3	Peningkatan fasilitasi administrasi pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan kecamatan
4	Penunjang Operasional Penyampaian Bantuan Keuangan
5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
6	Penyelenggaraan Sambang warga
IV	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
1	Peningkatan koordinasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan
2	Peningkatan pembinaan administrasi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan
3	Peningkatan fasilitasi administrasi ketentraman dan ketertiban umum kecamatan
V	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
1	Peningkatan koordinasi administrasi tata Pemerintahan kecamatan
2	Peningkatan pembinaan administrasi tata Pemerintahan kecamatan
3	Peningkatan fasilitasi administrasi tata pemerintahan kecamatan
4	Intensifikasi PBB Tingkat kecamatan
5	Lomba tertib administrasi desa
6	Koordinasi pengisian perangkat desa

URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

OPD : KECAMATAN KARANGDOWO

No	Uraian Prog/Kegiatan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1	Penyediaan jasa surat menyurat
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor
5	Penyediaan alat tulis kantor
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7	Penyediaan makanan dan minuman
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
10	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
6	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
7	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
3	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan
7	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
8	Penyelenggaraan Sumbang Warga
4	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
5	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
5	Lomba Tertib Administrasi Desa

URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
OPD : KECAMATAN KARANGNONGKO

No	Uraian Prog/Kegiatan
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
9	Penyediaan Makanan dan Minuman
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
12	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2	Pengadaan Mebeleur
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
III	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kel di Kecamatan
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kel di Kecamatan
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kel di Kecamatan
4	Penunjang Operasional Penyampaian Bantuan Keuangan
5	Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/Kecamatan
7	Penyelenggaraan Sumbang Warga
IV	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, dan Fasilitasi Administrasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
V	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, dan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
5	Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa
6	Koordinasi Pengisian Perangkat Desa

URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

OPD : KECAMATAN KEBONARUM

No	Uraian Prog/Kegiatan
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keungan
6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10	Penyedia Bahan Baca dan Peraturan Perundangan
11	Penyediaan Makanan Dan Minuman
12	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah
12	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah
14	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
III	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
1	Peningkatan Koordinasi Adm. Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan.
2	Peningkatan Pembinaan Adm. Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
3	Peningkatan Fasilitasi Adm. Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
4	Penunjang Operasional Penyampaian Bantuan Keuangan
5	Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan
7	Penyelenggaraan Musrenbang tingkat Kecamatan
8	Penyelenggaraan Sumbang Warga
IV	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban umum Kecamatan
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi .Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
V	Program Peningkatan Koordinasi ,Pembinaan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan.
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan.
4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
5	Lomba Tertib Administrasi Desa

URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

OPD : KECAMATAN KEMALANG

No	Uraian Prog/Kegiatan
1.	Program Pelayanan Administrasi perkantoran
1	Penyediaan Surat menyurat
2	Menyediaan Jasa Kominikasi, sumber daya air dan daya air dan listrik
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5	Penyediaan Alat Tulis kantor
6	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan
7	Penyediaan Komponen instalasi Listrik/penerangan bangunan listrik
8	Penyediaan Makanan dan Minuman
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi Ke luar Daerah
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi Ke Dalam Daerah
11	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1	Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas Operasional
2	Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung kantor
3	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung kantor
4	Fasilitasi Pindahan Kantor
3.	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kel. Kecamatan
1	Peningkatan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kel. Kecamatan
2	Peningkatan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kel. Kecamatan
3	Peningkatan Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kel. Kecamatan
4	Penunjang Operasional Penyampaian Bantuan Keuangan
5	Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan
7	Penyelenggaraan Musrenbang
8	Penyelenggaraan Sumbang Warga
3.	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
1	Peningkatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
2	Peningkatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
3	Peningkatan Fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
4.	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
1	Peningkatan Koordinasi Tata Pemerintahan di Kecamatan
2	Peningkatan Pembinaan Tata Pemerintahan di Kecamatan
3	Peningkatan Fasilitasi Tata Pemerintahan di Kecamatan
4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
5	Falilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa
6	Peningkatan Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)

URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

OPD : KECAMATAN KLATEN SELATAN

No	Uraian Prog/Kegiatan
1.	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7	Penyediaan Makanan dan Minuman
8	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
9	Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
10	Penyediaan Jasa pengamanan kantor
11	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
12	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
2.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2	Rehab Sedang Berat Gedung Kantor
3	Pengadaan Mebelair
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
6	Rehab Rutin Berkala Gedung Kantor
7	Rehab Sedang Berat Gedung Kantor
8	Penataan Lingkungan Kantor
9	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3.	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, PEMBINAAN DAN FASILITASI ADMINISTRASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/KELURAHAN DI KECAMATAN
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
4	Penunjang Operasional Penyampaian Bantuan Keuangan
5	Fasilitasi Penyelenggaraan Lomba Desa
6	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
7	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa
8	Penyelenggaraan Sumbang Warga
9	Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan
4.	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, PEMBINAAN, FASILITASI ADMINISTRASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
5.	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, PEMBINAAN DAN FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

No	Uraian Prog/Kegiatan
3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
4	Intensifikasi PBB Tingkat kecamatan
5	Fasilitas Pemilihan Kepala Desa
6	Lomba Tertib Administrasi Desa
7	Koordinasi Pengisian Perangkat Desa
8	Koordinasi Pengisian BPD

URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

OPD : KECAMATAN KLATEN TENGAH

No	Uraian Prog/Kegiatan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8	Penyediaan Makanan dan Minuman
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
11	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
12	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
3	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kel di Kecamatan
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kel di Kecamatan
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kel di Kecamatan
4	Penunjang Operasional Penyampaian Bantuan Keuangan
5	Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/Kecamatan
7	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
8	Penyelenggaraan Sumbang Warga
4	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, dan Fasilitasi Administrasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
5	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, dan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
5	Lomba Tertib Administrasi Desa

URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
OPD : KECAMATAN KLATEN UTARA

No	Uraian Prog/Kegiatan
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor
9	Penyediaan Makanan dan Minuman
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
11	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam daerah
12	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
III	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan.
2	Peningkatan Pembinaan administrasi Pemberdayaan Masyarakat desa/kelurahan kecamatan
3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
4	Penunjang Operasional Penyampaian Bantuan Keuangan
5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan
7	Penyelenggaraan Sumbang warga
IV	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan ketertiban umum kecamatan
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan ketertiban umum kecamatan
3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Ketentraman dan Ketertiban umum Kecamatan
4	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
5	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
6	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
7	Peningkatan Fasilitas Administrasi tata Pemerintahan Kecamatan
8	Intensifikasi PBB tingkat Kecamatan
9	Lomba Tertib Administrasi Desa
10	Koordinasi Pengisian Perangkat Desa

URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

OPD : KECAMATAN MANISRENGGO

No	Uraian Prog/Kegiatan
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1	Penyediaan jasa surat menyurat
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor
5	Penyediaan alat tulis kantor
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8	Penyediaan makanan dan minuman
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
11	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1	Pengadaan peralatan gedung kantor
2	Pengadaan mebeleur
3	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
5	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
6	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
7	Pemeliharaan Rutin Gamelan
III	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan
7	Penyelenggaraan Sumbang Warga
IV	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
V	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan

URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**OPD : KECAMATAN NGAWEN**

No	Uraian Prog/Kegiatan
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
8	Penyediaan Makanan dan Minuman
9	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
11	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
III	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
4	Penunjang Operasional Penyampaian Bantuan Keuangan
5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan
7	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
8	Penyelenggaraan Sambang Warga
IV	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Ketentraman dan ketertiban Umum di Kecamatan
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan ketertiban Umum Kecamatan
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan ketertiban Umum Kecamatan
3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Ketentraman dan ketertiban Umum Kecamatan
V	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
3	Peningkatan Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan

URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

OPD : KECAMATAN PEDAN

No	Uraian Prog/Kegiatan
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	Penyediaan Jasa Komunikas, Sumber Daya Air, dan Listrik
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8	Penyediaan Makanan dan Minuman
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Koordinasi Konsultasi ke Luar Daerah
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
11	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor
12	Penyedia Jasa Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
6	Fasilitasi Pindahan Kantor
III	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan
7	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
8	Penyelenggaraan Sambang Warga
IV	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
V	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
2	Jumlah Kegiatan Pembinaan Tata Pemerintahan
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
5	Lomba Tertib Administrasi Desa
6	Koordinasi Pengisian Perangkat Desa

URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

OPD : KECAMATAN POLANHARJO

No	Uraian Prog/Kegiatan
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	Penyediaan Jasa Komunikas, Sumber Daya Air, dan Listrik
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan perlengkapan Kantor
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8	Penyediaan Makanan dan Minuman
9	Rapat-Rapat Koordinasi dan Koordinasi Konsultasi ke Luar Daerah
10	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
11	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor Kantor
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
3	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
III	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
6	Penyelenggaraan Sumbang Warga
IV	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
V	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
2	Jumlah Kegiatan Pembinaan Tata Pemerintahan
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan

URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**OPD : KECAMATAN PRAMBANAN**

No	Uraian Prog/Kegiatan
I	PELAYANAN ADM. PERKANTORAN
1	Penyediaan jasa, listrik, air dan telepon
2	Penyediaan jasa kebersihan kantor
3	Penyediaan alat tulis kantor
4	Penyediaan barang cetak dan penggandaan
5	Penyediaan komp. Listrik pener. Kantor
6	Penyediaan makan dan minum
7	Rapat koord. dan konsultasi luardaerah
8	Rapat koord. dan konsultasi dalam daerah
9	Penyediaan jasa pengamanan kantor
10	Penyediaan jasa tenaga teknis kantor
II	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1	Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
2	Pemeliharaan rutin kendaraan dinas/ops
3	Pemeliharaan peralatan gdng ktr & RT
III	PENINGKATAN KOORD,PEMB. DAN FASILITASI PMD
1	Peningkatan koordinasi administrasi PMD
2	Peningkatan pembinaan administrasi PMD
3	Peningkatan fasilitasi administrasi PMD
4	Fasilitasi 10 program pokok PKK
5	Penyelenggaraan sambang warga
IV	PENINGKATAN KOORD,PEMB. DAN FASILITASI TRANTIBUM
1	Peningkatan koordinasi administrasi Trantibum
2	Peningkatan pembinaan administrasi Trantibum
3	Peningkatan fsilitasi administrasi Trantibum
V	PENINGKATAN KOORD,PEMB. DAN FASILITASI TAPEM
1	Peningkatan koordinasi administrasi Tapem
2	Peningkatan pembinaan administrasi Tapem
3	Peningkatan fsilitasi administrasi Tapem
4	Intesifikasi PBB tingkat kecamatan
5	Fasilitasi lomba tertib administrasi

URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

OPD : KECAMATAN TRUCUK

No	Uraian Prog/Kegiatan
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air & listrik
3	Pernyediaan Jasa Kebersihan kantor
4	Penyediaan Jasa Perbaikan Perltn Kerja
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor
6	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
7	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8	Penyediaan Peralatan rumah tangga
9	Penyediaan Bahan bacaan & Peraturan Perundangan
10	Penyediaan Makanan dan minuman
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12	Penyediaan Rapat-rapat kordinasi dan Konsultasi dalam daerah
13	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
14	Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran.
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA & PRASARANA APARATUR
1	Pengadaan peralatan gedung kantor
2	Pemeliharaan rutin/berkala rumah Dinas
3	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
4	Pemeliharaan rutin / berkala kend. Dinas / operasional
5	Pemeliharaan rutin / berkala Peralatan Gedung Kantor
6	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
7	Penataan Lingkungan kantor
III	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, PEMBINAAN, DAN FASILITASI ADMINISTRASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1	Peningkatan koordinasi Administrasi Pemberdayaan masyarakat desa/Kelurahan di Kecamatan.
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan.
3	Peningkatan Faslitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan.
4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan
7	Sambang warga
IV	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, PEMBINAAN, DAN FASILITASI ADMINISTRASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
V	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, PEMBINAAN,DAN FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN.

No	Uraian Prog/Kegiatan
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan.
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan.
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan.
4	Intensifikasi PBB tingkat Kecamatan
5	Lomba Tertib Administrasi Desa
6	Koordinasi Pengisian Perangkat Desa

URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

OPD : KECAMATAN TULUNG

No	Uraian Prog/Kegiatan
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1	Penyediaan jasa surat menyurat
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4	Penyusunan perencanaan dan pelaporan
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor
6	Penyediaan alat tulis kantor
7	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
9	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
10	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1	Pengadaan peralatan gedung kantor
2	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
3	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
4	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor
5	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
6	Rehabilitasi sedang/berat rumah Dinas
7	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga
8	Penataan Lingkungan Kantor
III	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Dsa/ Kelurahan di Kecamatan
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
6	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan
7	Penyelenggaraan Sumbang Warga
IV	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
V	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
5	Lomba Tertib Administrasi Desa

**URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
OPD : KECAMATAN WEDI**

No	Uraian Prog/Kegiatan
I	PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1.	Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2.	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3.	Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor
4.	Kegiatan penyediaan alat tulis kantor
5.	Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
6.	Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7.	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
8.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang -undangan
9.	Penyediaan makanan dan minuman
10.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
11.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
12.	Penyediaan jasa pengamanan kantor
13.	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran
II	Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur
1.	Pengadaan peralatan gedung kantor
2.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
3.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/OPS
5.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
III	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
1.	Peningkatan Koordinasi Adm.Pemberdayaan Masy.Des/Kel di Kecamatan
2.	Peningkatan Pembinaan Adm. Pemberdayaan Masy. Desa/Kel. Di Kecamatan
3.	Peningkatan Fasilitasi Adm.Pemberdayaan Masy. Desa/Kel Di Kecamatan
4.	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
5.	Fasilitasi 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
6.	Penyusunan Profil Desa/Kelurahan/Kecamatan
7.	Penyelenggaraan Sumbang warga
IV	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
1.	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman & Ketertiban Umum Kecamatan
2.	Peningkatan Pembinaan Adm.Ketentraman & Ketertiban Umum Kecamatan
3.	Peningkatan fasilitasi Adm. Ketentraman & Ketertiban Umum Kecamatan
V	Program Peningkatan Koordinasi,Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
1.	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
2.	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
3.	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
4.	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan
5.	Fasilitasi Lomba Tertib Administrasi Desa

URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

OPD : KECAMATAN WONOSARI

No	Uraian Prog/Kegiatan
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1	Penyediaan jasa surat menyurat
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor
4	Penyediaan alat tulis kantor
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
8	Penyediaan makanan dan minuman
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
11	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
12	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2	Pengadaan peralatan gedung kantor
3	Pengadaan mebeleur
4	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
6	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
7	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
8	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
9	Penataan Lingkungan Kantor
III	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kecamatan
4	Penunjang operasional penyampaian bantuan keuangan
5	Pembinaan 10 Program PKK Tingkat Kecamatan
6	Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan
7	Penyelenggaraan Sumbang Warga
IV	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan
V	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
1	Peningkatan Koordinasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
2	Peningkatan Pembinaan Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
3	Peningkatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan
4	Intensifikasi PBB Tingkat Kecamatan

No	Uraian Prog/Kegiatan
5	Lomba Tertib Administrasi Desa

URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

OPD : KELURAHAN BARENG

No	Uraian Prog/Kegiatan
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor
4	Penyediaan alat tulis kantor
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undang
7	Penyediaan makan dan minum
8	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
9	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
10	Penyediaan jasa pengamanan kantor
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
3	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Pembangunan Kelurahan
1	Koordinasi Pmbangunan Kelurahan (Musrenbangkel)
2	Pengadaan Pembangunan Pengembangan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan
3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)
4	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Masyarakat Kelurahan
1	Fasilitasi Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
5	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Pemerintah Kelurahan
1	Pembinaan kelembagaan pemerintahan kelurahan
2	Operasional PBB Tk. Kelurahan
3	Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)

URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

OPD : KELURAHAN BARENG LOR

No	Uraian Prog/Kegiatan
I.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air ,Listrik
2	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
9	Penyediaan Makan dan Minum
10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
11	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
12	Penyediaan jasa pengamanan kantor
II.	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
2	pengadaan peralatan gedung kantor
3	pengadaan mebel
4	Pemeliharaan rutin /berkala Gedung Kantor
5	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas /operasional
7	Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor
8	Penataan lingkungan kantor
III.	Program Peningkatan Koordinasi pembinaan dan Fasilitas Administrasi Pembangunan Kelurahan
1	Koordinasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)
2	Pembinaan Kelembagaan Pembamngunan Kelurahan
4	Pengadaan pembangunan pengembangan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman,transpotasi,kesehatan,pendidikan,dan kebudayaan
5	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan (DAU Tambahan)
IV.	Program Peningkatan Koordinasi Pembinaan Fasilitas Administrasi Kemasyarakatan
1	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan
2	Pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat,pendidikan dan kebudayaan,UMKM,lembaga kemasyarakatan,kententraman umum dan penguatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kejadian luar biasa di kelurahan
V.	Program Peningkatan Koordinasi Pembinaan Fasilitas Administrasi pemerintahan Kelurahan
1	Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan
2	Operasional PBB Tk.Kelurahan
3	Operasional LPMK
5	Kompensasi Gaji Perangkat Kelurahan
6	Peningkatan Kesejahteraan Aparat Pemerintahan dan Lembaga Desa/Kelurahan

URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

OPD : KELURAHAN BUNTALAN

No	Uraian Prog/Kegiatan
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINITRASI PERKATORAN
1	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2	Penyedia jasa peralatan kantor dan perlengkapan kantor
3	Penyedia jasa administrasi keuangan
4	Penyedia jasa kebersihan kantor
5	Penyedia alat tulis kantor
6	Penyedia barang cetkan dan penggandaan
7	Penyedia bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
8	Penyedia makan dan minum
9	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
10	Penyedia jasa pengamanan kantor
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
2	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional
3	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan kantor dan rumah tangga
III	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, PEMBINAAN DAN FASILITASI
	ADMINISTRASI PEMBANGUNAN KELURAHAN
1	Pengadaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan sarana dan
	prasarana lingkungan kelurahan
2	Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan (DAU tambahan)
IV	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, PEMBINAAN DAN FASILITASI
	ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN KELURAHAN
1	Pembinaan kelembagaan kemasyarakatan kelurahan
2	Fasilitasi pembinaan, monitoring dan evaluasi pemberdayaan
	masyarakat kelurahan
V	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, PEMBINAAN, FASILITASI
	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KELURAHAN
1	Pembinaan kelembagaan pemerintahan kelurahan
2	Operasional PBB tingkat kelurahan
3	Operasional LPMK
4	Kompensai gaji perangkat kelurahan
5	Peningkatan kesejahteraan aparat pemerintah dan lembaga kel.

URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

OPD : KELURAHAN GAYAMPRI

No	Uraian Prog/Kegiatan
I	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
1	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, Sumber air dan listrik daya
2	Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor
3	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor
4	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
6	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman
7	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
8	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
9	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
10	Kegiatan Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Pengelolaan Sampah
11	Kegiatan Penyediaan tenaga administrasi/teknis perkantoran
II	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
1	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
2	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor
3	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan dinas/operasional
4	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor
5	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Mebeler
6	Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
7	Penataan Lingkungan Kantor
III	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, PEMBINAAN DAN FASILITASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN KELURAHAN
1	Kegiatan Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan
2	Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan
3	Kegiatan Pengadaan Pembangunan Pengembangan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan
4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)
IV	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, PEMBINAAN DAN FASILITASI ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN KELURAHAN
1	Kegiatan Fasilitasi Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
2	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (DAU Tambahan).
V	PROGRAM PENINGKATAN KOORDINASI, PEMBINAAN DAN FASILITASI ADMINISTRASI PEMERINTAHAN KELURAHAN
1	Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan
2	Kegiatan Operasional PBB Tingkat Kelurahan
3	Kegiatan Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
4	Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Aparat Pemerintahan dan Lembaga Desa/Kelurahan

URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

OPD : KELURAHAN GERGUNUNG

No	Uraian Prog/Kegiatan
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1	Penyediaan jasa surat menyurat
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor
5	Penyediaan alat tulis kantor
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
9	Penyediaan makanan dan minuman
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
12	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional
3	Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor
4	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga
5	Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur
6	Penataan Lingkungan Kantor
III	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Pembangunan Kelurahan
1	Koordinasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)
2	Pembinaan Kelembagaan Pembangunan Kelurahan
3	Pengadaan Pembangunan Pengembangan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman, Transportasi, Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan
4	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)
IV	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan
1	Pengelolaan Kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, pendidikan, dan kebudayaan, umkm, kelembagaan kemasyarakatan, ketentraman umum, dan penguatan kesiap siagaan masyarakat dalam menghadapi bencana dan kejadian luar biasa di kelurahan
V	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Pemerintahan Kelurahan
1	Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan
2	Operasional PBB Tingkat Kelurahan
3	Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)

URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

OPD : KELURAHAN JATINOM

No	Uraian Prog/Kegiatan
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2	Penyediaan jasa administrasi keuangan
3	Penyediaan jasa kebersihan kantor
4	Penyediaan alat tulis kantor
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
7	Penyediaan makanan dan minuman
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
10	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
11	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
12	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
III	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Pembangunan Kelurahan
13	Pengadaan Pembangunan Pengembangan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan
14	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)
IV	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Kemasyarakatan
15	Pembinaan Kelembagaan Kemasyarakatan Kelurahan
16	Fasilitas Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
V	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Pemerintahan Kelurahan
17	Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan
18	Operasional PBB Tingkat Kelurahan

URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

OPD : KELURAHAN KABUPATEN

No	Uraian Prog/Kegiatan
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor
5	Penyediaan alat tulis kantor
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
8	Penyediaan makanan dan minuman
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
11	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
4	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
III	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Pembangunan Kelurahan
1	Koordinasi Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel)
2	Pengadaan Pembangunan Pengembangan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman, Transportasi, Kesehatan, Pendidikan dan Kebudayaan
3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)
IV	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Masyarakat Kelurahan
1	Fasilitas Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
V	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Pemerintahan Kelurahan
1	Pembinaan Kelembagaan Pemerintahan Kelurahan
2	Operasional PBB Tingkat Kelurahan
3	Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)

URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

OPD : KELURAHAN KLATEN

No	Uraian Prog/Kegiatan
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik
2	penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor
5	Penyediaan alat tulis kantor
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undang
9	Penyediaan makan dan minum
10	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
11	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
12	Penyediaan jasa pengamanan kantor
13	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
III	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Pembangunan Kelurahan
1	Koordinasi Pmbangunan Kelurahan (Musrenbangkel)
2	Pengadaan Pembangunan Pengembangan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan
3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)
IV	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan
1	Fasilitasi Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
V	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Pemerintah Kelurahan
1	Pembinaan kelembagaan pemerintahan kelurahan
2	Operasional PBB Tk. Kelurahan
3	Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)

URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

OPD : KELURAHAN MOJAYAN

No	Uraian Prog/Kegiatan
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1	Penyedia jasa surat menyurat
2	Penyedia jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3	Penyedia jasa peralatan dan perlengkapan kantor
4	Penyedia jasa administrasi keuangan
5	Penyedia jasa kebersihan kantor
6	Penyedia alat tulis kantor
7	Penyedia barang cetakan dan penggandaan
8	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
9	Penyediaan makanan dan minuman
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
12	Penyediaan jasa pengamanan kantor
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aporetur
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2	Pengadaan peralatan gedung kantor
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
III	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pembangunan Kelurahan
1	Pengadaan Pembangunan Pengembangan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan
2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)
IV	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan
1	Fasilitasi Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
V	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitasi Administrasi Pemerintahah Kelurahan
1	Pembinaan kelembagaan pemerintahan kelurahan
2	Operasional PBB Tingkat Kelurahan
3	Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)
4	Peningkatan kesejahteraan aparat pemerintahan dan lembaga desa/kelurahan

URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

OPD : KELURAHAN TONGGALAN

No	Uraian Prog/Kegiatan
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1	Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik
2	penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor
5	Penyediaan alat tulis kantor
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undang
8	Penyediaan makan dan minum
9	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
10	Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
11	Penyediaan jasa pengamanan kantor
12	Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
III	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan dan Fasilitas Administrasi Pembangunan Kelurahan
1	Koordinasi Pmbangunan Kelurahan (Musrenbangkel)
2	Pengadaan Pembangunan Pengembangan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan
3	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)
IV	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Kemasyarakatan Kelurahan
1	Fasilitasi Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
V	Program Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitas Administrasi Pemerintah Kelurahan
1	Pembinaan kelembagaan pemerintahan kelurahan
2	Operasional PBB Tk. Kelurahan
3	Operasional Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)

Klaten, Maret 2021

